

Bagian 3: Sejarah Konflik

Bagian 3: Sejarah Konflik	1
Bagian 3: Sejarah Konflik	5
3.1 Pendahuluan	5
3.2 Penjajahan Portugis atas Timor-Leste	6
Tinjauan	6
Kedatangan Portugis	7
Konsolidasi kekuasaan kolonial	8
Pemerintahan Portugis dan resistensi rakyat Timor	9
Timor Portugis pada Abad ke-20	10
Gerakan internasional untuk dekolonisasi dan posisi Portugal	11
Rencana pembangunan Portugis dan berkembangnya sentimen anti penjajah	12
3.3 Perubahan di Portugal dan proses dekolonisasi	13
Tinjauan	13
MFA dan Revolusi Bunga	13
Dampak Revolusi Bunga di Timor Portugis	15
Pembentukan partai-partai politik di Timor Portugis	15
3.4 Suasana internasional dan kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis	18
Tinjauan	18
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Portugis	18
Indonesia dan komunitas internasional	19
Kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis	20
3.5 Proses dekolonisasi dan partai-partai politik	24
Tinjauan	24
Permulaan kesadaran politik	24
Susunan partai-partai politik	25
Perkembangan dan ketegangan internal	26
Partai-partai politik bersiap menghadapi konfrontasi bersenjata	27
Fretilin dan ancaman komunisme	29
"Misi mustahil" Lemos Pires	31
Koalisi antara UDT dan Fretilin	32
3.6 Keterlibatan Indonesia yang semakin besar di Timor Portugis: destabilisasi dan diplomasi	34
Tinjauan	34
Operasi Komodo dan Peningkatan operasi rahasia militer	34
Diplomasi Indonesia	35
3.7 Gerakan Bersenjata 11 Agustus dan konflik bersenjata internal	40
Tinjauan	40
UDT Melancarkan Gerakan Bersenjata 11 Agustus	41
Kegagalan melakukan negosiasi: konflik bersenjata internal	43
UDT mundur ke perbatasan	44
Tanggapan Portugal terhadap konflik internal	45
Tanggapan Indonesia	45
3.8 Timor Portugis di bawah Administrasi Fretilin	47
Tinjauan	47

Fretilin mengisi kekosongan	47
Tahanan dan kekerasan politik	48
Memulihkan ketertiban	50
Pemerintahan	50
Balibo: Indonesia meningkatkan intensitas operasi militer	52
3.9 Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin, dan tanggapannya	53
Tinjauan	53
Latar belakang deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin	54
Deklarasi kemerdekaan	55
Reaksi atas deklarasi kemerdekaan	57
Invasi besar-besaran di ambang pintu	59
3.10 Invasi Besar-Besaran	59
Tinjauan	59
Keputusan Indonesia untuk menginvasi dan melakukan perang terbuka	60
Dili mempersiapkan strategi Pertahanannya	61
Berbagai persiapan militer Indonesia: Operasi Seroja	62
Invasi Dili dan Baucau	62
Tanggapan PBB terhadap invasi besar-besaran	66
3.11 Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan dan upaya Indonesia untuk meresmikan integrasi	68
Tinjauan	68
ABRI melakukan konsolidasi; Indonesia mendirikan “pemerintahan sementara”	68
Fretilin mundur, pembantaian tahanan	69
Pergerakan ABRI, awal tahun 1976	70
Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan	71
Fretilin menyusun kekuatan kembali	71
Indonesia Meresmikan Integrasi	72
Operasi Seroja berlanjut—pesawat Bronco OV-10 buatan AS mulai digunakan	73
Kebuntuan militer, akhir 1976	74
3.12 “Pengepungan dan penghancuran”: tahap akhir Operasi Seroja 1977-79	76
Tinjauan	76
Penduduk sipil di gunung-gunung	76
Kapasitas ABRI terkuras dan kepercayaan diri awal Fretilin	77
AS memimpin dalam mempersenjatai kembali militer Indonesia	77
Perpecahan internal Fretilin dan pembersihan berdarah	78
ABRI mengintensifkan operasi militer: pengepungan dan penghancuran, Agustus 1977 sampai Agustus 1978	79
Penyerahan diri: turun dari Matebian	83
3.13 Penyerahan diri, pemukiman kembali dan kelaparan	85
Tinjauan	85
Penyerahan dan eksekusi tahanan	85
Kamp-kamp penampungan sementara	86
Kamp penahanan jangka panjang dan strategi keamanan ABRI	87
Wilayah tertutup	87
Bantuan ICRC dan CRS	89
Ataúro sebagai pulau penjara	89
Berbagai kamp Penahanan ditutup	90

3.14 Operasi Keamanan	92
Tinjauan	92
Situasi di Dili dan di seluruh Timor-Leste, 1979-1980	92
Pemberontakan pertama: Dili, Juni 1980	93
"Pagar betis": Operasi Kikis	94
Konsekuensi operasi	95
3.15 Membangun kembali Resistensi	97
Tinjauan	97
Sejumlah anggota Fretilin yang bertahan setelah serangan 1978-1979	97
Menyusun kekuatan kembali	98
Konferensi Reorganisasi Nasional pada bulan Maret 1981	99
Pertumbuhan Gerakan Perlawanan	101
Gerakan perlawanan di bawah pimpinan Xanana Gusmão: menuju persatuan nasional	101
Gereja Katholik	102
3.16 Gencatan senjata tahun 1983 dan masa sesudahnya	104
Tinjauan	104
Pemilu Indonesia di Timor-Leste: 1982	104
Perubahan personel sipil dan militer Indonesia, dan berbagai aksi Resistensi	105
Pendekatan baru militer Indonesia: negosiasi	105
Gencatan Senjata	106
Pengangkatan Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI: 1983	107
Monsignor Lopes dicopot	107
Gencatan senjata dirongrong	107
Berakhirnya Gencatan Senjata	109
3.17 Konsolidasi dan awal perubahan: 1984-1991	111
Tinjauan	111
Perkembangan Resistensi	111
Represi dan pemenjaraan	113
Kebangkitan gerakan pemuda klandestin	113
Gereja Katolik	114
Situasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa	115
Kunjungan Paus Yohanes Paulus II	116
Jakarta membuka Timor-Leste	117
Perkembangan Internasional menjelang akhir dasawarsa 1980-an	118
3.18 Titik Balik	119
Tinjauan	119
Pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991	119
Dampak internasional Santa Cruz	121
Penangkapan Xanana Gusmão	122
Jaringan klandestin pelajar	123
Rencana Damai CNRM dan inisiatif-inisiatif diplomatik	125
Kasus Pengadilan Internasional: Portugal vs Australia, 1991-95	125
Hadiah Nobel Perdamaian, 1996	126
Perserikatan Bangsa-Bangsa	127
3.19 Dari Reformasi ke pengumuman tentang Konsultasi Rakyat	128
Tinjauan	128
Jatuhnya Soeharto	129

CNRT dan kampanye diplomatik	130
Dampak Reformasi di Timor-Leste	130
Munculnya Para milisi	131
Xanana Gusmão mengimbau toleransi	133
Negosiasi tentang paket otonomi	133
Teror Milisi yang makin meningkat	135
Kesepakatan 5 Mei	136
Pengaturan keamanan dalam Kesepakatan 5 Mei	137
3.20 Konsultasi Rakyat	138
Tinjauan	138
Penempatan UNAMET	139
Komisi Pemilihan	139
Pilihan	139
Koordinasi Pemerintah Indonesia untuk Konsultasi Rakyat	140
Kehadiran Masyarakat Internasional di Timor-Leste	140
Pemantau dari Timor-Leste dan Indonesia	140
Pengamanan untuk Konsultasi Rakyat	141
Kekerasan oleh TNI-Milisi: Juni-Juli	142
Dare II	142
Pendaftaran Pemilih	143
Kampanye	144
Situasi Keamanan Memburuk: Agustus	146
Persiapan terakhir Konsultasi Rakyat	147
Konsultasi Rakyat	148
Penghitungan dan hasil	148
3.21 Indonesia meninggalkan Timor-Leste: Bumi Hangus	150
Tinjauan	150
Tindak Kekerasan sesudah pengumuman hasil pemungutan suara	151
TNI Resmi Mengambil Kendali	152
Markas UNAMET	153
Meningkatnya Tekanan Internasional	154
Evakuasi penduduk secara paksa	156
Interfet datang: TNI ditarik	156
Pembentukan UNTAET: Resolusi Dewan Keamanan 1272, 25 Oktober 1999	157
Pulang ke Rumah	158

Bagian 3: Sejarah Konflik

3.1 Pendahuluan

1. Bab ini memberi konteks historis pada kejadian-kejadian yang tercakup dalam bab-bab pelanggaran dari Laporan ini. Bab ini didasarkan pada sumber-sumber primer dari Komisi ini sendiri, dari pernyataan, wawancara dan kesaksian yang diberikan pada audiensi-audiensi publik; dari bukti-bukti dokumenter yang tersedia bagi Komisi; dan dari analisis sumber-sumber sekunder yang relevan. Pada umumnya bab ini terbatas pada ulasan singkat atas kejadian-kejadian penting, momen-momen dan titik-titik balik dalam periode mandat komisi yang relevan terhadap konflik-konflik politik, upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik ini, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik-konflik ini. Dalam cakupan Laporan ini, tidak mungkin untuk bisa memberikan penjelasan yang pasti mengenai berbagai persoalan kunci yang terus menjadi dugaan sejarah mengenai masa ini dan kejadian-kejadian ini. Bukan tugas Komisi ini untuk membuat penilaian-penilaian yang pasti seperti ini. Bab ini memang berupaya untuk mengidentifikasi apa saja persoalan-persoalan ini, dan Komisi mendorong penelitian, penulisan dan analisis lebih lanjut dari aspek-aspek penting dalam sejarah East Timor.

2. Analisis dan penulisan sejarah East Timor ini merupakan langkah penting dalam pembangunan suatu bangsa, dan cara hal ini dilakukan akan mencerminkan masyarakat apa yang akan ditumbuhkan oleh bangsa baru kita ini. Laporan Komisi didasarkan pada umumnya atas pernyataan dan wawancara yang diberi oleh warga Timor biasa dari seluruh penjuru negeri, dan berupaya untuk menarik suara mereka ke dalam sebuah dialog berkelanjutan untuk membangun bangsa kita yang baru ini. Laporan ini tidak dimaksud untuk menjadi sejarah yang eksklusif, yang hanya merekam pandangan dan pencapaian para pemimpin nasional, atau dari salah satu pihak dalam pecaturan politik. Laporan ini didasarkan atas gagasan bahwa perekaman dan analisis sejarah haruslah bersifat terbuka bagi informasi dan gagasan baru, dan bagi informasi dan pandangan yang belum tentu populer secara politis. Walaupun sejarah adalah sesuatu yang penting bagi pembangunan bangsa, suatu versi sejarah yang simplistis yang ingin menyembunyikan segala kenyataan yang buruk atau menghilangkan kontribusi orang-orang dari berbagai bidang kehidupan tidak akan dapat membangun bangsa yang kuat dan tangguh. Penulisan sejarah yang mengakui kompleksitas, yang memberi ruang bagi suara-suara orang yang sering terbungkam, dan yang membuka jalan bagi renungan terbuka dapat memberi subangan dalam pembangun suatu bangsa dimana gagasan mengenai kekuatan didasarkan pada penghormatan orang lain, keberagaman dan demokrasi yang didasarkan pada kesetaraan semua warga negaranya.

3. Penulisan sejarah East Timor adalah penting sebagai dasar bagi hubungan kita dengan tetangga-tetangga internasional kita, khususnya Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh sejarawan Indonesia Dr Asvi Warman Adam kepada Komisi pada audiensi nasional tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional:

Ingatan kolektif kedua bangsa akan menentukan sifat serta kuat lemahnya hubungan antara kedua bangsa itu. Hal ini akan tercermin dalam penulisan sejarah kedua bangsa ini¹.

4. Bab ini mulai dengan sebuah ulasan singkat tentang sejarah kolonial Timor-Leste di bawah kekuasaan Portugal. Bab ini sengaja memberi penekanan pada periode menjelang konflik internal Agustus-Spetember 1975 serta invasi Indonesia setelah itu. Ulasan ini membahas kejadian-kejadian dan berbagai hubungan seputar proses dekolonisasi Timor Portugis, di dalam wilayah ini, di Indonesia dan di dalam konteks regional dan geopolitis yang lebih luas. Hal-hal ini

penting bagi sebuah pemahaman akan penyebab konflik-konflik politik di Timor-Leste, berbagai kesempatan yang hilang untuk menghindari perang dan mencari penyelesaian damai atas persoalan politik berdasarkan prinsip hukum internasional, dan melibatkan aktor Timor, Indonesia serta internasional.

5. Bagian-bagian berikutnya membahas kampanye militer besar-besaran oleh Indonesia pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an, serta upaya-upaya politiknya untuk mendapatkan pengakuan internasional bagi pencaplokannya atas Timor-Leste. Bagian-bagian tersebut juga membahas mengenai penderitaan warga Timor-Leste selama tahun-tahun perang yang gencar, di gunung-gunung dan kamp-kamp pada tahun-tahun pemboman dan kelaparan yang membinasakan penduduk. Bagian-bagian ini menelusuri pergeseran strategi oleh Fretilin/Falintil setelah mereka hampir dihancurkan dalam kampanye tahun 1978, mengenai pertumbuhan jaringan klandestin di kota-kota dan desa-desa di seluruh negeri dan ekspansi teritorial militer Indonesia serta jaringan intelijen yang intensif. Tahun-tahun konsolidasi baik oleh pemerintahan Indonesian maupun Resistensi, selama dasawarsa 1980-an, dijelaskan dengan fokus pada upaya-upaya mengembangkan rasa persatuan nasional dan bangkitnya generasi baru pemuda dalam perlawanan terhadap pendudukan.

6. Kejadian-kejadian seperti Pembantaian Santa Cruz, tertangkapnya Xanana Gusmão dan Penganugerahan Nobel Perdamaian pada dasawarsa 1990-an digambarkan sebagai titik-titik balik dalam perjuangan bangsa Timor-Leste dalam mendapatkan pengakuan atas hak untuk menentukan nasib sendiri. Bagian-bagian berikutnya membahas dampak krisis keuangan Asia di Indonesia dan di Timor-Leste, serta intensifikasi upaya-upaya internasional di bawah Sekretaris Jenderal PBB yang baru, Kofi Annan, untuk menemukan solusi bagi persoalan Timor-Leste. Dengan kejatuhan Presiden Soeharto, bab ini menelusuri upaya di dalam Timor-Leste dan di kancah internasional untuk mencari penyelesaian, serta munculnya milisi-milisi di Timor-Leste ketika menjadi jelas bahwa hal ini dapat mencakup pilihan bagi warga Timor-Leste untuk memilih merdeka. Bagian ini menggambarkan perkembangan pesat pada tahun 1999 menjelang kesepakatan 5 Mei, dan kekerasan oleh milisi-TNI terhadap penduduk sipil menjelang pengumuman hasil Konsultasi Rakyat. Masa UNAMET dan bagaimana Konsultasi Rakyat ini dijalankan juga dijelaskan. Bab ini lebih lanjut membahas secara mendalam mengenai kegagalan Indonesia untuk menjamin keamanan selama dan sesudah Konsultasi Rakyat, dan peran TNI dan kelompok-kelompok milisi dalam peningkatan kekerasan di seluruh wilayah setelah pengumuman Konsultasi Rakyat yang menolak paket otonomi khusus. Upaya-upaya orang-orang Timor dan internasional untuk menjamin adanya intervensi untuk menghentikan kekerasan dan untuk memastikan bahwa hasil Konsultasi Rakyat dihormati oleh Indonesia juga dijelaskan. Bab ini berakhir dengan kedatangan Interfet serta kembalinya para pengungsi Timor-Leste secara bertahap dari Timor Barat dan wilayah Indonesia lainnya, Portugal, Australia dan banyak negara lain di dunia di mana mereka menyebar selama tahun-tahun konflik.

7. Harapan Komisi ialah bahwa sejarah singkat ini akan membantu pembaca memahami isi dari bagian-bagian dan bab-bab yang lain dalam Laporan ini, dan bahwa hal ini akan mengilhami generasi sejarawan Timor-Leste sekarang dan masa mendatang untuk terus bekerja dalam memahami masa lalu kita sebagai bagian dari upaya yang berkesinambungan untuk membangun masa depan yang didasarkan pada penghormatan pada sesama, pada hak asasi manusia, dan pada rasa cinta damai.

3.2 Penjajahan Portugis atas Timor-Leste

Tinjauan

8. Keterlibatan Portugis di Timor dimulai pada abad-16 saat Portugis mencari kayu cendana. Pada akhir abad-16 Gereja Katolik pertama dibangun di Lifau, Oecusse, yang menjadi basis pemerintahan Portugis pertama di Timor. Portugis dan Belanda mempunyai hubungan

yang tegang sebagai dua kekuatan penjajah utama di kepulauan ini, dan pada abad-18 kekuatan militer Belanda menjadi seimbang dengan kekuatan Portugis. Portugis memindahkan basisnya ke Dili pada tahun 1771 dan semakin menitikberatkan upaya penjajahannya pada belahan timur kepulauan ini. Pada paruh kedua abad-19, Portugis secara paksa memperkenalkan tanaman perdagangan seperti kopi di Timor dan berusaha mengkonsolidasikan pemerintahannya dengan menerapkan pajak dan kerja paksa, yang mendorong terjadinya sejumlah pemberontakan rakyat Timor. Taktik penjajah untuk memecah-belah dan menguasai digunakan untuk memecah-belah dan melemahkan kepemimpinan tradisional Timor.

9. Pada tahun 1913 batas wilayah kolonial antara Timor Portugis dan Timor Belanda ditetapkan melalui sebuah keputusan oleh mahkamah internasional di Den Haag, yang dikenal dengan nama *Sentença Arbitral*, di mana Portugis mengambil setengah bagian di Timur dan wilayah kantong Oecusse. Pada abad-20, Portugal didominasi oleh rejim otoriter Perdana menteri Salazar. Timor merupakan wilayah jajahan Portugis paling terpencil, dan sebagian besar pembangunan, baik fisik maupun politik, dilupakan.

10. Perang Dunia Kedua mendatangkan kekerasan yang luar biasa di Timor, saat Tentara Sekutu mendarat di wilayah netral Timor Portugis yang diikuti oleh pasukan pendudukan Jepang. Jumlah kematian di antara penduduk Timor mencapai antara 40.000 sampai 60.000 orang. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintahan kolonial Portugis kembali. Timor tetap menjadi pulau yang miskin meskipun relatif tenang sampai Revolusi Bunga pada tanggal 25 April 1974 akhirnya membuka peluang untuk dekolonisasi di Timor-Leste.

11. Komisi mengidentifikasi tiga dampak penting kolonisasi Portugis atas Timor-Leste. Pertama, taktik penjajah mengadu domba berbagai kelompok sosial melemahkan aliansi politik pribumi. Hal ini menghambat berkembangnya persatuan sebagai prasyarat untuk membangun bangsa. Kedua, tradisi memerintah sendiri tidak berkembang. Sebagian besar masyarakat Timor-Leste dibelenggu dalam sistem yang feodal. Ketiga, rezim penjajah Portugis tidak mengembangkan atau melembagakan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia, terlepas dari telah adanya norma tradisional dan norma keagamaan dikembangkan oleh pihak gereja. Oleh karena itu aktifitas politik yang muncul pada tahun 1974-75 menghadapi risiko distorsi dan manipulasi yang luas. Semua faktor ini turut berperan dalam munculnya kekacauan dan konflik internal yang terjadi selama proses dekolonisasi pada tahun 1975. Selama perang sipil pada bulan Agustus 1975, Portugis menarik diri. Partai Fretilin keluar sebagai pemenang dalam perang sipil tersebut, dan memulai suatu administrasi pemerintahan sementara yang hanya sebagian berfungsi. Semua faktor-faktor ini turut berperan memuluskan invasi Indonesia ke Timor-Leste pada tahun 1975 tanpa banyak protes internasional.

Kedatangan Portugis

12. Orang Portugis datang pertama kali ke Timor untuk mencari kayu cendana putih pada awal abad ke-16. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511, misionaris Portugis membangun gereja pertama di pulau ini tahun 1590.² Ini mengawali periode pemukiman di Lifau (Oecusse) yang terletak di pantai utara bagian Barat Timor oleh para biarawan Fransiskan, pedagang cendana dan *Topasses*, kelompok ras campuran berayahkan pelaut, pedagang dan tentara Portugis, yang keturunannya masih ada di Timor sampai saat ini. Portugal telah membentuk koloni di berbagai pulau lain di kawasan ini, tetapi semuanya tidak aman. Belanda segera mengusir Portugis dari Malaka, Makasar di Sulawesi, dan pada tahun 1652, dari benteng yang baru dibangun Portugis di Kupang, Timor bagian Barat, hanya lima tahun sesudah selesai dibangun.

² Perang Penfui antara kekuatan kolonial Portugis dan Belanda terjadi pada pertengahan abad ke-17, dan merupakan suatu titik balik untuk Portugal. Penfui berada di sebelah utara kota Kupang, dekat dengan lokasi lapangan udaranya sekarang. Kekalahan Portugal di tangan kekuatan tentara Belanda berarti bahwa para *topasses* dengan dukungan

13. Pada tahun 1702, Pemerintah Portugis secara resmi hadir di Lifau, dan memerintah Timor dari koloninya di Goa. Pendekatan gubernur dengan memberikan pangkat militer kepada raja-raja setempat (*liurai*) menciptakan suatu preseden bagi pemerintahan Timor yang akan berlanjut hingga abad ke-20. Namun, Portugis menghadapi perlawanan dari para *liurai* yang gemar menjelajah serta dari para *Topasses*, yang pada masa itu menguasai perdagangan cendana dan, meskipun keturunan Portugis, mereka jarang mau bekerja sama. Karena tidak mampu memantapkan kekuasaannya di Lifau, Portugis pindah ke Dili pada tahun 1769. Kepindahan ini mempertemukan mereka dengan masyarakat Belu yang mendiami bagian timur pulau ini.

Konsolidasi kekuasaan kolonial

14. Dari basis barunya di Dili, Portugis memiliki pengaruh dan kontrol geografis yang terbatas atas Timor-Leste. Resistensi lokal dan kemampuan militer yang terbatas membatasi kekuasaan Portugal di pantai utara untuk waktu yang cukup lama. Pada tahun 1851, Gubernur Lopes da Lima memulai serangkaian perundingan rumit mengenai wilayah darat dengan pejabat kolonial Belanda, yang melibatkan para *liurai* dan tanah-tanah warisan di sejumlah wilayah perbatasan seperti Maucatar, lebih jauh di dalam Timor-Leste di Maubara, dan pulau Flores yang dikuasai Portugis. Berbagai perundingan tersebut melahirkan prinsip pertukaran wilayah antara Portugal dan Belanda dengan tujuan menetapkan garis batas berdasar pembagian timur-barat pulau di antara kedua kekuatan kolonial. Hal ini meringankan beban Portugal karena tidak perlu terlibat perang kolonial dengan Belanda, sehingga memungkinkannya memperkuat kekuasaannya di bagian timur pulau tersebut. Pada tahun 1895 Portugal membentuk unit-unit militer/pemerintahan di kesepuluh distrik di wilayah Timor-Leste. Oecussi ditambahkan sebagai distrik kesebelas Timor-Leste.³ Portugal membangun barak militer, kantor, sejumlah sekolah, rumah sakit dan penjara di distrik-distrik tersebut sebelum akhir abad ke-19. Gereja Katolik, yang sempat dilarang selama 20 tahun sejak tahun 1834, dipulihkan kembali dan Uskup Medeiros diterima dengan tangan terbuka.

15. Berbagai perundingan wilayah yang dimulai oleh Gubernur Lopes da Lima pada tahun 1851 berpuncak pada kesepakatan antara Portugal dan Belanda untuk membawa masalah tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag, dimana kesepakatan mengenai batas-batas wilayah jajahan diputuskan dalam *Sentença Arbitral* pada tahun 1913. Pertukaran wilayah terakhir antara Belanda dan Portugal sesuai dengan keputusan tersebut terjadi pada tahun 1917.⁴ Hasilnya Timor-Leste menjadi satu-satunya wilayah kolonial Portugal di kepulauan ini, sehingga Belanda menjadi kekuasaan kolonial yang mulai dominan.

16. Putusan akhir resmi mengenai batas-batas internasional antara Belanda dan Portugal menjadi titik acuan yang sangat penting bagi masa depan politik Timor-Leste. Pada saat Indonesia berjuang dan meraih kemerdekaan setelah Perang Dunia kedua, Indonesia mengklaim wilayah nasionalnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan bekas garis batas wilayah jajahan Belanda. Atas dasar inilah Indonesia terus memperjuangkan dan akhirnya berperang untuk merebut Irian atau Papua Barat pada dasawarsa 1960-an. Sementara pernah berkembang sejumlah wacana mengenai suatu konsep "Indonesia Raya" selama perjuangan kaum nasionalis, yang meliputi wilayah Malaya dan Borneo Inggris, hal ini tidak pernah secara sungguh-sungguh diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam submisinya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai klaim atas Irian pada akhir dasawarsa 1950-an, Indonesia secara eksplisit tidak membuat klaim apapun terhadap Timor Portugis.⁵ Belakangan, pada tahun 1974-75, dan dalam tahun-tahun sesudahnya, Pemerintah Indonesia tidak pernah secara sungguh-sungguh mencoba untuk mengajukan klaim bahwa Indonesia memiliki klaim teritorial atas wilayah Timor Portugis terdahulu.

Portugis secara efektif diusir dari pelabuhan besar pulau tersebut di Kupang, sebagai bukti nyata kejayaan tentara Belanda. Tempat peperangan tersebut juga terletak berdekatan dengan penjara di mana 69 tahanan politik dari Timor-Leste diambil di tahun 1983, di dalam operasi setelah pembantaian Kraras. [Lihat Bab 7.4 Penahanan, Penyiksaan dan Penganiayaan.]

17. Sama pentingnya dan bersumber dari hubungan kolonial ini, Pemerintah Portugal tidak pernah melepaskan posisinya sebagai penguasa administrasi yang sah atas Timor-Leste selama periode mandat Komisi. Ini memungkinkan persoalan Timor-Leste tetap hidup dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, dan suatu faktor yang secara fundamental membedakannya dengan perjuangan nasionalis atau separatist lainnya dalam wilayah negara kepulauan Indonesia dalam abad ke-20.

Pemerintahan Portugis dan resistensi rakyat Timor

18. Portugis menjalankan pemerintahan tidak langsung melalui para *liurai*, yang kerja samanya didapat Portugis dengan memberi mereka otonomi di wilayah mereka masing-masing. Portugis memanfaatkan persetujuan antara para *liurai*. Dengan melakukan hal itu mereka dapat mengakses kekuatan pasukan kecil mereka, atau kelompok-kelompok milisi* yang mereka gunakan untuk memperbesar sumber daya militer mereka sendiri yang terbatas.⁶ Portugis pertama kalinya menggunakan milisi para *liurai* yang loyal pada tahun 1642 dalam kampanye memerangi Kerajaan Wehale,⁷ dan terus melakukan hal itu sampai penumpasan pemberontakan Viqueque tahun 1959. Bagi Portugis, harga kebijakan memecah belah dan menguasai ini adalah perlawanan kecil-kecilan yang terus menerus terhadap kekuasaan Portugis. Bagi rakyat East Timor harganya adalah kelemahan dan perpecahan yang tak kunjung berakhir.

19. Kekuasaan dan kemakmuran Portugis menurun selama abad ke-17 dan 18. Dari semua wilayah jajahannya, Timor Portugis adalah yang paling terpencil dan tidak penting. Portugis membuat investasi ekonomi dan politik yang terbatas di wilayah ini. Menurunnya harga Cendana mendorong Portugal untuk memperkenalkan tanaman pertanian baru pada abad ke-19 untuk membangun sektor ekspor. Namun, ekonomi pertanian subsisten Timor Portugis hanya menyisakan sedikit sekali tenaga kerja, yang dibutuhkan untuk tanaman pertanian jenis ini. Sekitar tahun 1859 Gubernur Castro menerapkan penanaman paksa untuk tanaman perdagangan baru ini, terutama kopi, tapi juga gandum dan spesies tanaman asing lainnya. Portugal tetap menjajah Timor secara tidak langsung, yang membuat pemerintahan sulit diatur, khususnya dengan adanya resistensi terhadap berbagai kebijakan ekonominya yang memaksa. Gubernur Celestino da Silva melanjutkan sistem kerja paksa ini pada dasawarsa 1890-an dan 1900-an, dengan ciri khususnya yaitu pembangunan jalan. Kebijakan pajak yang mencekik dan kerja paksa, yang keduanya merupakan akibat dari investasi Portugal yang terlalu sedikit di wilayah jajahan ini, sangat tidak populer.

20. Resistensi para *liurai* muncul segera setelah pengangkatan seorang Gubernur di Lifau. Pemberlakuan upeti, yang disebut *finta*, sekitar tahun 1710, memicu pemberontakan dan kebencian yang terus berlanjut yang mempunyai andil dalam memaksa Portugis untuk pindah ke Dili pada tahun 1769.⁸ Portugal tidak mengalami perlawanan yang berarti sampai ketika Gubernur Castro menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan penanaman kopi. Kebijakan yang tidak populer ini memicu pemberontakan pada tahun 1861 yang diikuti oleh serangkaian pemberontakan lokal yang dipimpin oleh para *liurai* terhadap berbagai eksekusi penjajahan. Sebagai tanggapannya, pemerintahan Portugis memberlakukan kontrol langsung atas Timor-Leste pada tahun 1895 ketika Gubernur Silva membentuk pemerintahan dan militer di seluruh Timor-Leste, membagi wilayah tersebut menjadi sebelas distrik, termasuk daerah kantong Oecusse.⁹

21. Akibatnya, Portugal memisahkan Timor dari Goa, menjadikannya sebuah distrik pemerintahan terpisah pada tahun 1896. Namun demikian pemberontakan terus berlanjut. Yang terakhir dan terbesar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh *liurai* Manufahi, Dom Boaventura, yang memberontak melawan pajak kepala pada tahun 1908. Resistensi Dom Boaventura ini berawal dari pemberontakan yang dipimpin oleh ayahnya; *liurai* Dom Duarte memimpin berbagai pemberontakan pada akhir abad ke-19 sampai Gubernur da Silva

* Dalam bahasa Portugis disebut *moradores* atau *arraias*.

menyerang kerajaan Same pada tahun 1895 dan Dom Duarte dipaksa untuk menyerah pada tahun 1900. Setelah Gubernur da Silva mengganti *finta* dengan pajak kepala pada tahun 1908, Dom Boaventura, anak Dom Duarte, memberontak pada tahun 1911. Pihak Portugis mengerahkan pasukan tentara *liurai* yang amat besar yang berjumlah 12.000, serta mendatangkan pasukan dari Mozambique, dan dengan kejam menumpas pemberontakan ini pada tahun 1912. Aksi ini menciptakan suatu stabilitas, tetapi dengan harga kematian dan penderitaan yang amat besar. Diperkirakan 25.000 orang meninggal dalam kampanye menumpas pemberontakan ini.¹⁰ Dom Boaventura ditangkap dan diasingkan ke Pulau Atauro dan meninggal di sana. Setelah itu Portugis memberikan kewenangan langsung pada desa (*suco*) sebagai pemerintahan lokal, dengan demikian memotong kewenangan *liurai*, mengurangi pengaruh mereka dan menetapkan kontrol Portugis yang lebih langsung terhadap semua daerah di pedalaman Timor Portugis.

Timor Portugis pada Abad ke-20

22. Sepanjang abad ke-20, Portugal sendiri menghadapi ketidakstabilan di dalam negeri. Pada tahun 1912, Kerajaan Portugis berubah menjadi sebuah republik, yang kemudian berganti menjadi sebuah negara satu partai pada tahun 1928. Pada masa ini banyak orang Tionghoa yang masuk wilayah koloni Timor Portugis, dan memulai peran mereka sebagai perantara usaha, pengeksport dan pedagang. Melengkapi aktivitas ekonomi orang Tionghoa ini, meskipun menghadapi banyak masalah di dalam negeri, Portugal membentuk SAPT (*Sociedade Agricola Pátria e Trabalho*), sebuah konglomerat perdagangan yang membawa infrastruktur baru untuk produksi dan ekspor. Walaupun demikian, Timor Portugis tetap merupakan wilayah jajahan terpencil yang berjalan dengan personil atau investasi yang minim dari Portugis. Pada tahun 1929, hanya terdapat 200 warga negara Portugis, ditambah 300 serdadu.¹¹ Lisbon terus memerintah melalui perantara lokal. Pada tahun 1930, Undang-Undang Kolonial Perdana Menteri Salazar membentuk dewan perwakilan lokal yang pada dasarnya lemah, dan memungkinkan penduduk lokal secara terbatas untuk memperoleh status kewarganegaraan Portugis.

Perang Dunia II

23. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbour pada bulan Desember 1941, Australia mengantisipasi bahwa Jepang akan menduduki Timor dan menggunakan Timor sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan terhadap Australia. Pasukan Australia, Inggris dan Belanda mendarat di Dili pada tanggal 17 Desember 1941 dalam aksi yang disebut tindakan pencegahan. Gubernur de Carvalho memprotes pelanggaran terhadap kenetralan Portugis. Jepang menyerang Timor pada tanggal 19 Februari 1942. Masih menjadi bahan perdebatan historis apakah pelanggaran yang dilakukan Tentara Sekutu terhadap kenetralan Portugis benar-benar diperlukan untuk menangkis serangan Jepang, atau apakah kehadiran Australia di Timor Portugis justru telah memancing militer Jepang ke wilayah yang sebetulnya tidak akan diserangnya.¹²

24. Dampak perang tersebut terhadap rakyat Timor sungguh membinasakan. Antara 40.000-60.000 penduduk Timor dilaporkan meninggal.¹³ Banyak yang dibunuh dan disiksa oleh tentara Jepang karena dicurigai membantu gerilyawan Australia. Perbudakan seksual terhadap perempuan Timor yang dilakukan oleh para tentara Jepang banyak terjadi. Selain itu wilayah ini menjadi miskin akibat perang tersebut, dan benih perpecahan tersebar antara mereka yang mendukung Jepang dan mereka yang mendukung pasukan kecil gerilya Australia. Komisi mendengar kesaksian mengenai dampak berkepanjangan dari konflik ini terhadap masyarakat Timor dalam audiensi publik mengenai konflik internal tahun 1974-76.¹⁴ Tidak pernah ada penyelidikan internasional mengenai berbagai kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua negara yang menduduki, dan tidak pernah ada reparasi perang kepada orang-orang Timor.¹⁵

¹⁰ SAPT dijalankan oleh perusahaan kontraktor Brazil yang bernama Moniz da Maia Serra e Fortunato.

Gerakan internasional untuk dekolonisasi dan posisi Portugal

25. Pasal 73 dalam Piagam PBB tahun 1945 menyerukan kepada negara-negara penjajah untuk memberikan perhatian serius kepada berbagai aspirasi negara-negara jajahannya dan secara bertahap memberikan otonomi. Kesepakatan internasional ini terus berkembang sejalan dengan sebagian besar penjajah memberikan kemerdekaan kepada wilayah-wilayah jajahannya setelah Perang Dunia Kedua, dan diungkapkan melalui berbagai mekanisme seperti Sidang Umum PBB yang pada tahun 1960 mengakui penjajahan sebagai pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pada tahun 1960 Timor Portugis dicantumkan sebagai Wilayah Tidak Berpemerintahan Sendiri dalam Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengakui hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor, yang tetap relevan sampai Konsultasi Rakyat yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999.

26. Menanggapi kesepakatan internasional yang semakin berkembang mengenai pentingnya dekolonisasi ini, Portugal merubah penyebutan wilayah-wilayah jajahannya sebagai “provinsi seberang lautan” pada tahun 1951. Hal itu merupakan sebuah langkah paternalistik yang dirancang untuk ‘memberadabkan’ rakyat jajahannya dan meredam kritik, namun tidak merubah banyak. Hal ini khususnya terjadi di Timor Portugis, yang tetap sangat terisolasi. Tidak pernah ada gerakan kemerdekaan seperti yang terjadi di wilayah jajahan Portugal di Afrika. Sebaliknya, kehidupan orang-orang Timor-Leste pada tahun 1950-an masih jauh dari beradab. Pastor Martinho da Costa Lopes mengatakan bahwa selama 400 tahun penjajahan Portugis tidak satu pun pengacara, insinyur atau dokter yang lahir di Timor.¹⁶ Sangat sedikit orang pribumi Timor yang menikmati hak yang sama dengan penjajahnya, dan terus diperlakukan dengan buruk dan hak atas kepemilikan mereka terus dilanggar oleh Portugis.¹⁷ Dalam suatu kesempatan, Uskup Carlos Belo membicarakan tentang hal ini:

Saya sering melihat orang Portugis mengambil tuak dari penduduk asli yang sebenarnya untuk dijual tanpa membayar, padahal orang pribumi itu sudah berjalan jauh ke pasar untuk menjual tuaknya dan berharap mendapatkan sedikit uang untuk dibawa kembali ke desanya. Mereka ditindas, tapi tidak membela dirinya. Setiap kali saya melihat hal ini hati saya sakit dan saya menangis di dalam hati. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa.¹⁸

27. Meskipun penggunaan pecut dan pentungan dilarang oleh Portugis pada tahun 1956, kebiasaan mencambuk terus terjadi.¹⁹ Xanana Gusmão pernah mengatakan:

Saya melihat tahanan dicambuk di pos-pos [pemerintah]. Mereka mengerang kesakitan karena dipaksa berdiri di batu karang, yang panas karena terik matahari, dengan kaki yang dirantai. Kadang-kadang ketika saya jalan-jalan dengan teman-teman sekolah—anak-anak *liurai*—saya juga melihat pejabat atau orang lokal dikirim dalam kelompok-kelompok atau kembali dengan orang-orang yang bersimbah darah, karena mereka tidak datang untuk kerja paksa membangun jalan, atau bekerja sebagai *asulear* [sic] [buruh] di lahan para penjajah, orang Cina atau orang Timor yang sudah bercampur.²⁰

¹⁶ Resolusi Sidang Umum PBB 1514 (XV), 1960: “Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Rakyat Jajahan.”

28. Pada tahun 1959, sekelompok orang Indonesia yang diasingkan terlibat dalam suatu pemberontakan di Viqueque melawan pemerintahan kolonial Portugis. Portugis mengetahui rencana tersebut dan menghancurkannya dengan bengis, mengakibatkan pertumpahan darah hebat. Latar belakang dari berbagai peristiwa tersebut sampai sekarang sebagian besar tetap tidak diketahui. Sebuah laporan resmi Portugis dari masa itu menyalahkan Indonesia atas terjadinya pemberontakan tetapi masih belum pasti apakah memang demikian kejadiannya. Setelah berbagai peristiwa tersebut, pada tahun 1959, pemerintah Portugis membuka cabang polisi rahasia (*Polícia Internacional e de Defesa do Estado*, PIDE) di Dili untuk memonitor kegiatan Indonesia dan sentimen anti Portugis²¹

Rencana pembangunan Portugis dan berkembangnya sentimen anti penjajah

29. Pada tahun 1953 pemerintah pusat Portugal mulai menjalankan serangkaian rencana pembangunan dengan maksud untuk menghidupkan kembali ekonomi dalam negerinya yang stagnan. Di Timor Portugis rencana ini mencakup meningkatkan produksi dan ekspor kopi, eksplorasi pertambangan, dan pembangunan pariwisata di Timor Portugis. Perbaikan infrastruktur mencakup pembangunan jalan, perbaikan pelabuhan Dili dan pelabuhan udara Baucau, serta listrik dan sistem air bersih di Dili.²² Pada tahun 1975, terdapat 17-18 dokter yang bekerja di rumah sakit Dili dan berbagai klinik di daerah.²³

30. Namun demikian, kesempatan penduduk Timor-Leste untuk memperoleh pendidikan tetap terbatas selama masa penjajahan Portugis. Anak-anak *liurai* mulai dapat merasakan pendidikan dasar pada tahun 1860, kemudian pada tahun 1904 para Jesuit membuka sebuah sekolah misionaris di Soibada dan menjadi sebuah tempat pembelajaran yang penting untuk rakyat Timor dari seluruh wilayah negeri.[†] Meski demikian, pendidikan ala Barat masih merupakan hak eksklusif warga negara Portugis dengan sedikit pengecualian. Pada tahun 1964, hanya sepuluh orang Timor yang memiliki gelar.²⁴ Menurut data statistik Portugis, antara tahun 1950 dan 1970, pendaftaran di pendidikan dasar meningkat sepuluh kali lipat, dari 3.249 menjadi 32.937.²⁵ Sensus tahun 1970 menunjukkan sekitar 10 persen penduduk yang bisa baca tulis di wilayah koloni ini,[‡] dimana waktu itu pemerintah Portugal telah membangun sebuah sekolah menengah di Dili, *Liceu Dr Francisco Machado*, dengan 767 murid.²⁶ Renungan mengenai terbatasnya kesempatan atas pendidikan di negeri ini terlihat dari kenyataan bahwa para pelopor utama gerakan kemerdekaan Timor-Leste sebagian besar adalah didikan seminari.

31. Semakin menyadari ketimpangan yang terjadi, generasi orang-orang Timor yang terpolitisasi dan yang baru muncul juga merasa frustrasi dengan ketiadaan sarana politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat Timor. Orang-orang Timor mempunyai peran yang kecil dalam mengatur urusan wilayah jajahan ini. Gubernur provinsi ini mewakili pemerintah Portugis, bukan mewakili rakyat Timor, dan memegang kekuasaan eksekutif yang luas. Meskipun terdapat Dewan Legislatif yang beranggotakan 11 orang, hanya tiga orang wakil yang dipilih. Dewan tidak mungkin dapat mewakili aspirasi rakyat, dan hanya memiliki kewenangan yang terbatas.²⁷ Meskipun ada resolusi PBB yang mendesak Portugal untuk memberikan kebebasan politik kepada wilayah-wilayah jajahannya,²⁸ rezim Salazar dan kemudian Caetano mengingkari demokrasi bagi warga negaranya sendiri, apalagi bagi rakyat jajahannya. Keadaan ini baru berubah seiring naiknya Jenderal Spínola ke tampuk kekuasaan setelah Revolusi Bunga pada tanggal 25 April 1974.

^{*} *Plano de Fomento*.

[†] Sekolah-sekolah, Colégio Nuno Alveres Pereira (untuk laki-laki) dan Imaculada da Conceição (untuk perempuan) tersebut mengadakan perayaan 100 tahunnya pada tahun 2004.

[‡] Prosentase buta huruf di Dili adalah 14% dan di kota-kota distrik lain 45%.

3.3 Perubahan di Portugal dan proses dekolonisasi

Tinjauan

32. Gerakan pembebasan nasional dasawarsa 1960-an di berbagai koloni Portugal di Afrika berubah menjadi perjuangan bersenjata untuk mencapai kemerdekaan. Terpaksa terlibat secara serempak dalam beberapa perang terpisah di sejumlah wilayah yang berjauhan, Portugal, negara kecil yang relatif miskin mengalami tekanan politik dan ekonomi yang luar biasa pada saat negara ini semakin mengandalkan Eropa untuk masa depan ekonominya. Pada tahun 1968, setelah 40 tahun berkuasa, Perdana Menteri Salazar yang otoriter digantikan oleh Marcelo Caetano, yang gagal menemukan jalan keluar bagi berbagai konflik bersenjata yang semakin menguras dana tersebut. Putus asa dengan berbagai kegagalan ini, Gerakan Angkatan Bersenjata (*Movimento das Forças Armadas*, MFA) muncul dalam tubuh militer dan pada tanggal 25 April 1974 memimpin sebuah kudeta yang berhasil menggulingkan rezim Caetano tanpa pertumpahan darah, yang dikenal dengan nama Revolusi Bunga. Meskipun MFA telah membuka jalan untuk dekolonisasi, MFA juga menyebabkan terjadinya pergolakan politik di Portugal selama beberapa tahun. Kekacauan ini dan tersitanya perhatian Portugal pada wilayah jajahannya yang lebih besar di Afrika, merupakan faktor penting penyebab kegagalan Portugal untuk memberikan perhatian yang layak kepada dekolonisasi di wilayah jajahannya yang paling jauh, Timor.

MFA dan Revolusi Bunga

33. Pada awal dasawarsa 1960-an gerakan kemerdekaan di wilayah-wilayah jajahan Portugal di Afrika mulai melakukan perjuangan bersenjata. MPLA (*Movimento Popular de Libertação de Angola*) di Angola mengangkat senjata pada tahun 1961, diikuti oleh PAIGC (*Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde*) di Guinea Bissau pada tahun 1963 dan Frelimo (*Frente de Libertação de Moçambique*) di Mozambique pada tahun 1964. Goa, koloni Portugis, "dibebaskan" oleh pasukan India pada tahun 1961.²⁹ Memerangi tiga perang sekaligus sangat membebani Portugal secara keuangan dan militer. Pada saat yang sama, setelah bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (*European Free Trade Association*, EFTA) pada tahun 1961, Portugal menjadi semakin terikat dengan Eropa secara ekonomi dengan akibat terlantarnya wilayah-wilayah jajahannya di Afrika. Pada awal dasawarsa 1970-an berbagai kebijakan ekonomi proteksionis yang dirancang untuk membantu mengembangkan perdagangan dan investasi dengan wilayah-wilayah jajahannya tidak lagi sesuai dengan kepentingan para konglomerat Portugis yang perhatiannya semakin mengarah ke Eropa.

34. Karena telah hilang kepercayaannya pada kemampuan Salazar, kemudian Caetano untuk menemukan pemecahan atas perang di Afrika, angkatan bersenjata berpaling pada Jenderal Antonio Spínola, yang adalah rekan dekat Caetano. António Spínola pernah mengusulkan sebuah program reformasi, yang ditolak oleh Caetano. Untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya, Spínola menerbitkan sebuah buku berjudul *Portugal and its Future* (Portugal dan Masa Depan), yang mengusulkan sebuah penyelesaian atas perang kolonial melalui Konsultasi Rakyat tentang hubungan federasi dengan Portugal. Ketika MFA berdiri pada tanggal 5 Maret 1974, gerakan tersebut memilih Jenderal Spínola sebagai pemimpinnya, dan pada waktu MFA melancarkan Revolusi Bunga pada tanggal 25 April 1974, Spínola dipilih oleh Gerakan tersebut sebagai presiden.

Dekolonisasi yang cepat, kekacauan di Portugal

35. Meskipun Revolusi Bunga pada awalnya berjalan dengan mulus di Portugal, bulan-bulan dan tahun-tahun setelahnya merupakan masa ketidakstabilan politik, dimana beberapa

pemerintahan minoritas berturut-turut terbentuk, dan runtuh, sampai Partai Sosialis berkuasa pada tahun 1982. Ketidakstabilan ini membatasi kemampuan Portugal untuk secara efektif menangani berbagai peristiwa yang terjadi di Timor. Dengan destabilisasi aktif yang dilancarkan oleh Indonesia, pemerintah Portugal tidak mampu menjalankan proses dekolonisasi.

36. Pada bulan April 1974, MFA segera membentuk Dewan Penyelamat Nasional (*Junta de Salvação Nacional*, JSN) dan mengangkat Spínola sebagai pemimpinnya. Manifesto JSN mengusulkan demokratisasi di dalam negeri Portugal, termasuk pembubaran polisi rahasia, PIDE, dan pembebasan para tahanan politik. Mengenai masalah kolonial Manifesto JSN secara samar menyerukan sebuah pemecahan secara politik melalui suatu debat nasional yang mengarah pada suatu pemecahan secara damai,³⁰ namun menghindari penyebutan penentuan nasib sendiri dan otonomi.³¹ Presiden Spínola membentuk sebuah pemerintahan sementara yang baru pada tanggal 15 Mei 1974, dengan Adelino de Palma Carlos sebagai Perdana Menteri. Pada hari yang sama pemerintahan tersebut mengeluarkan Dekrit No.203/1974, yang mengemukakan sebuah kebijakan dekolonisasi. Dekrit tersebut mengikat pemerintah untuk melakukan suatu penyelesaian politik berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri.³²

37. Solusi federal Spínola tidak memperoleh dukungan yang berarti. Di Portugal opini publik semakin condong memilih mundur dari wilayah-wilayah jajahan mereka. Sadar akan keunggulan militer mereka atas militer Portugis yang terkepung, wilayah jajahan Guinea-Bissau dan Mozambique tidak berniat untuk melakukan kompromi mengenai tuntutan mereka untuk merdeka. Beberapa anggota kabinet yang berpengaruh, termasuk Menteri Luar Negeri dan ketua Partai Sosialis, Mário Soares, juga memilih kemerdekaan sebagai jalan keluar.

38. Pada pertengahan tahun 1974 bahkan dalam tubuh MFA sendiri dukungan untuk federasi semakin melemah, dan penarikan secepatnya menjadi opsi militer yang lebih disukai. Berbagai tekanan ini berbuntut pengunduran diri Palma Carlos sebagai Perdana Menteri, dan penggantinya oleh Vasco Gonçalves. Pada tanggal 27 Juli pemerintahan yang baru mengeluarkan Undang-Undang No. 7/1974 mengakui kemerdekaan sebagai suatu hasil yang bisa diterima dalam proses penentuan nasib sendiri di dalam wilayah-wilayah jajahan Portugal.³³ Pergeseran kebijakan ini berbuntut dengan pengunduran diri Spínola pada bulan September 1974. Dalam waktu satu tahun lima wilayah jajahan Portugal di Afrika telah meraih kemerdekaan.

39. Setelah mengambil alih kekuasaan pada bulan April 1974, MFA telah melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur yang mereka anggap reaksioner dalam pemerintahan sipil Portugis. MFA dengan cepat mengganti semua gubernur di wilayah-wilayah jajahannya di Afrika, tapi lebih lambat dalam melakukan tindakan yang sama di Timor Portugis. Meskipun dia telah membuat pidato yang mengkritik MFA atas radikalismenya, hanya dua hari sebelum tanggal 25 April, Gubernur Timor Portugis, Alves Aldeia, tetap menduduki jabatannya hingga tiga bulan kemudian. Perhatian Portugal pada waktu itu dan yang mengakibatkan terlantarnya Timor dirangkum oleh Gubernur Portugis terakhir untuk Timor, Mayor Jenderal Mário Lemos Pires, dalam kesaksian yang ia berikan kepada Komisi:

Bangsa Portugis yang muncul dari revolusi tersebut adalah bangsa yang lemah, tidak terpadu, dengan segala kesulitan dan tanpa kredibilitas di antara para mantan sekutu [Barat] nya. Bangsa ini sangat khawatir tentang revolusinya dan berupaya untuk mencapai stabilitas politik, mengurus warga negaranya yang datang dari Afrika dan dengan tegas memutuskan untuk mengakhiri perang di negara-negara Afrika...Apa yang orang Portugis pikirkan tentang Timor-Leste pada tahun 1974, setelah revolusi? Nihil, tidak banyak, sedikit. Nihil. Pikiran mereka adalah tentang revolusi dan keluarga mereka di wilayah-wilayah Afrika.³⁴

Dampak Revolusi Bunga di Timor Portugis

40. Di Timor berita tentang Revolusi Bunga disambut dengan perasaan yang campur aduk antara kegembiraan dan kekhawatiran. Komisi mendengarkan kesaksian dari berbagai tokoh orang Timor utama dalam audiensinya mengenai Konflik Politik Internal tahun 1974-76. Mereka mengisahkan tentang kegembiraan yang ditimbulkan oleh berbagai peristiwa di Lisbon dan berbagai wilayah jajahan lainnya di kalangan orang-orang muda yang tertarik politik. Tapi pada umumnya mereka juga setuju bahwa masyarakat Timor tidak siap karena sejarahnya untuk terlibat dalam kegiatan politik³⁵

41. Pada awal bulan Mei 1974, ketika Gubernur Alves Aldeia bertanya kepada JSN di Lisbon untuk menjelaskan kebijakan kolonialnya yang baru, ia diinstruksikan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip program MFA dan, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setempat, berupaya untuk tidak memperburuk hubungan dengan Indonesia.

42. Pada tanggal 13 Mei Alves Aldeia membentuk Komisi Timor untuk Penentuan Nasib Sendiri yang, antara lain, mendorong terbentuknya serikat-serikat sipil.³⁶ Pada akhir bulan Mei, Mayor Arnão Metello, Kepala Staf militer setempat, ditunjuk sebagai perwakilan MFA di koloni tersebut.³⁷

43. Bertolak belakang dengan sikapnya terhadap wilayah-wilayah jajahannya di Afrika, Pemerintah Portugis cenderung menganggap kemerdekaan Timor Portugis tidak realistis. Pada tanggal 3 Agustus 1974 Menteri Koordinator Antar Wilayah, António de Almeida Santos, keberatan dengan kemerdekaan penuh Timor Portugis, dan menyatakan federasi sebagai pilihan yang paling realistis.³⁸ Pendapat ini memicu reaksi keras dari serikat-serikat politik orang-orang Timor yang baru terbentuk, UDT dan Fretilin. Akan tetapi pada hari yang sama, pemerintah Portugis mengajukan sebuah memorandum kepada Sekretaris Jenderal PBB yang mengakui hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan semua wilayah di bawah kekuasaannya, posisi yang dikuatkan kembali dua bulan kemudian oleh Menteri Luar Negeri Portugal, Mario Soares, di hadapan Majelis Umum PBB.³⁹ Hak penentuan nasib sendiri untuk semua wilayah jajahan juga dicantumkan sebagai suatu kewajiban bagi negara Portugal dalam konstitusi tahun 1975. Ketentuan ini terbukti menjadi penting dalam melanjutkan komitmen resmi Portugal atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste dalam tahun-tahun selanjutnya yang berat.

Pembentukan partai-partai politik di Timor Portugis

44. Komisi mendengarkan kesaksian yang menggambarkan bagaimana Revolusi Bunga segera menggelorakan perhatian rakyat Timor mengenai masa depan politik wilayah tersebut. Domingos Oliveira, yang menjadi Sekretaris Jenderal UDT pada masa itu, menggambarkan fenomena tersebut:

Sebelum tanggal 25 April di Timor, kita biasa bicara tentang pacar-pacar kita, sepak bola dan hal-hal semacam itu di kafe dan restoran, sambil minum bir dan bertemu teman-teman. Setelah 25 April, kita hanya bicara tentang konsekuensi 25 April. Apa yang harus kita sebagai orang Timor lakukan? Apa yang semestinya dilakukan dalam situasi baru seperti ini?⁴⁰

45. Di Dili orang-orang Timor yang tertarik politik mulai memikirkan pembentukan serikat-serikat politik, dan mengadakan berbagai pertemuan untuk membahas prinsip-prinsip dan

³⁵ Domingos Oliveira, mantan Sekjen UDT, memberi kesaksian tentang perasaan marah rakyat Timor dengan pernyataan ini, di Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

asasnya. Begitu terbentuk, serikat-serikat tersebut secara efektif berfungsi sebagai partai-partai politik, meskipun secara teknis partai-partai politik masih dilarang beroperasi.⁴¹

46. Serikat yang pertama terbentuk adalah Uni Demokratik Timor (*União Democrática Timorense*, UDT), yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1974. Para pendirinya cenderung konservatif secara politik dan banyak di antaranya memiliki hubungan dengan penguasa kolonial Portugis, yang mencerminkan keistimewaan status dan fungsi sosial mereka sebagai perantara antara orang-orang Timor dan penjajah Portugis. Presiden pertama UDT adalah Francisco Lopes da Cruz. Para pendiri yang lain yaitu César Augusto da Costa Mouzinho sebagai Wakil Presiden, Carrascalão bersaudara Manuel, Mário and João Carrascalão, serta Domingos de Oliveira, Sekretaris Jenderal serikat tersebut. Manifesto awal UDT mengusulkan “otonomi progresif” di bawah Portugal, meskipun UDT juga mendukung hak untuk penentuan nasib sendiri. UDT mengumumkan perubahan posisinya pada tanggal 1 Agustus 1974 ketika menyatakan bahwa tujuan akhirnya adalah kemerdekaan setelah satu periode federasi dengan Portugal. UDT juga secara spesifik menolak integrasi dengan negara lain.⁴² Pergeseran UDT menunjukkan partai ini bisa berubah-ubah, dalam hal ini menanggapi perubahan dalam tatanan politik di Portugal dan kenyataan bahwa nasionalisme merupakan kekuatan yang semakin berkembang di dalam Timor.

47. Sembilan hari setelah berdirinya UDT, pada tanggal 20 Mei, Asosiasi Sosial Demokratik Timor (*Associação Social Democrata de Timor*, ASDT) didirikan. Para pendiri ASDT sebagian besar adalah pemuda Timor yang terpelajar, dari beragam latar belakang; beberapa dari dalam pemerintahan Portugis, yang lain dari kelompok bawah tanah anti penjajah pada awal tahun 1970-an. Karena lebih tua dan lebih dikenal ketimbang para pendiri asosiasi yang berusia muda, Francisco Xavier do Amaral diangkat sebagai Presiden. Para tokoh kunci yang lain termasuk Mári Alkatiri, José Ramos Horta, Nicolau Lobato dan Justino Mota. ASDT menerbitkan manifestonya pada tanggal 22 Mei, yang menegaskan hak untuk merdeka, dan sikap anti penjajahan dan nasionalisnya. Asosiasi itu juga menyatakan komitmennya untuk suatu kebijakan “bertetangga baik” dengan negara-negara kawasan ini tanpa merugikan kepentingan rakyat Timor.

48. Serikat ketiga yang terbentuk adalah Asosiasi Rakyat Demokratik Timor (*Associação Popular Democrática Timorense*, Apodeti), yang didirikan pada tanggal 27 Mei. Rencana awalnya adalah menamakan serikat tersebut Asosiasi untuk Integrasi Timor dengan Indonesia, namun meskipun nama ini secara lugas dapat menjabarkan tujuan utama Apodeti, nama itu tampaknya dianggap terlalu transparan. Presiden pendiri asosiasi ini adalah Arnaldo dos Reis Araújo, tapi ahli strateginya adalah José Fernando Osório Soares, yang keluar dari ASDT untuk menjadi Sekretaris Jenderal Apodeti. Tokoh penting lain adalah pemilik perkebunan kopi, Hermenegildo Martins. *Liurai* Atsabe, Guilherme Maria Gonçalves, bergabung dengan Apodeti tidak lama setelah pembentukannya, dengan membawa pendukung yang berasal dari basis kekuasaan regionalnya. Konsul Indonesia di Dili, Elias Tomodok, menjadi penghubung penting untuk saran dan dukungan keuangan bagi Apodeti selama periode tahun 1974-75.⁴³ Manifesto Apodeti menyatakan tujuan integrasi yang bersifat otonom dengan Indonesia, sesuai hukum internasional, meskipun hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. Senada dengan dua partai besar yang lain, Apodeti mengutuk sejumlah keburukan dalam pemerintahan Portugis seperti korupsi dan diskriminasi, dan juga berjanji akan menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu.

49. Tiga partai politik yang lebih kecil didirikan beberapa waktu setelah tiga partai politik yang pertama. José Martins, salah satu pendiri Apodeti, keluar dari Apodeti dan mendirikan sebuah partai para monarki (*liurai*), Asosiasi Putera Pejuang Timor (*Klibur Oan Timor Aswain*, KOTA) pada tanggal 20 November 1974.⁴⁴ Martins sempat dikenal berkarir sebagai propagandis untuk pendudukan Indonesia, dan seorang kolaborator utama bagi intelijen Indonesia (Bakin) pada tahun 1975. Partai Buruh (*Trabalhista*), didirikan pada bulan September 1974 dan mempunyai tujuan kemerdekaan melalui federasi transisi dengan Portugal.⁴⁵ Partai yang ketiga, Asosiasi Demokratik untuk Integrasi Timor-Leste dengan Australia (*Aditla*), mengajukan bergabung dengan Australia, tetapi menghilang begitu Australia menolaknya pada bulan Maret 1975.⁴⁶

50. Segera menjadi jelas bahwa UDT dan ASDT adalah dua partai yang memiliki dukungan rakyat di wilayah Timor-Leste.

3.4 Suasana internasional dan kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis

Tinjauan

51. Kesempatan dekolonisasi Timor Portugis muncul pada saat yang penting dalam Perang Dingin. Kemenangan Vietnam Utara di Vietnam pada bulan April 1975 dan runtuhnya pemerintahan pro-Amerika Serikat yang hampir bersamaan di negara-negara Indocina lainnya, yakni Kamboja dan Laos mengobarkan ketakutan di antara pembuat kebijakan Barat dan sekutu Asia mereka bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya juga rentan dan bahwa penyebaran komunisme perlu dibendung dengan segala harga. Dalam suasana seperti ini Amerika Serikat dan sekutunya memandang Indonesia sebagai komponen yang penting dari strategi pasca-Vietnamnya untuk mencegah penyebaran komunisme lebih lanjut. Pada saat yang hampir bersamaan, Revolusi *Bunga* menciptakan sebuah situasi politik yang sangat tak terkendali di Portugal, dimana hasilnya kemungkinan akan memberi kemenangan kepada pihak kiri dan kekalahan berikutnya bagi pihak Barat.

52. Selain dukungan yang dinikmati sebagai akibat dari citranya yang anti-komunisme Indonesia juga berada dalam posisi untuk mengambil keuntungan dari statusnya sebagai pendiri Gerakan Non-Blok, hubungannya dengan negara-negara Islam lainnya melalui Organisasi Konferensi Islam dan sebagai negara terbesar di Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Dukungan luas Indonesia, keengganan Portugal untuk menginternasionalkan persoalan dan ketidakpedulian yang luas tentang nasib wilayah yang dipandang sebagai sisa kekuatan kolonial minor, semuanya menjadi faktor pemberat melawan peran aktif PBB atas persoalan Timor-Leste. Semua faktor ini memberi keuntungan bagi Indonesia dalam kampanyenya untuk menggalang dukungan bagi kebijakannya mengenai Timor-Leste.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Portugis

53. Selama tahun 1975 Perang Dingin antara Timur dan Barat mencapai titik yang kritis, terutama karena perkembangan di Asia Tenggara. Pada bulan April 1975, dua tahun setelah penarikan mundur pasukan AS dari Vietnam, Saigon jatuh ke tangan Vietnam Utara yang komunis. Pergeseran perimbangan kekuatan ini mempengaruhi bangsa-bangsa besar dan kecil, serta memiliki dampak yang mendalam kepada apa yang terjadi di Timor Portugis.⁴⁷ Perang Dingin memberikan efek yang cukup mencekik di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa ini. Blok-blok kekuatan utama di dunia sering kali melumpuhkan lembaga-lembaga utamanya, seperti Dewan Keamanan. Sebagaimana karena hal ini, salah satu ciri dalam krisis yang tengah berkembang di Timor Portugis selama tahun 1974-75 adalah kegagalan untuk menginternasionalisasikan persoalan ini dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Portugal melakukan serangkaian negosiasi bilateral dengan Indonesia, dan walaupun dalam negosiasi-negosiasi Portugal pernah menggunakan ancaman "internasionalisasi" sebagai senjata dalam tawar-menawarnya, pada prakteknya Portugal hanya menggunakan opsi ini ketika sudah amat terlambat dan secara efektif tidak mampu untuk mempengaruhi situasi.⁴⁸

54. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk mengawasi dekolonisasi, Komite Khusus Dekolonisasi PBB, disibukkan dengan keadaan di berbagai koloni Portugal di Afrika, dan tidak banyak memberi perhatian kepada Timor Portugis. Pada bulan Juni 1975, Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, membahas Timor Portugis, dan menganjurkan pencapaian tujuan-tujuan Piagam PBB mengenai Deklarasi Kemerdekaan bagi Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Kolonial. Walau telah diminta untuk menilai situasi di lapangan, Komite ini tidak melakukannya.⁴⁹ Kurangnya perhatian atas Timor Portugis ini pada tahun 1974-75 berarti bahwa ketika perang sipil pecah pada bulan Agustus 1975, dan ketika kegiatan terselubung Indonesia berubah menjadi operasi militer besar-besaran pada bulan Oktober-November 1975,

Perserikatan Bangsa-Bangsa relatif tidak menyadari akan situasi di wilayah ini. Kurangnya keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan kesempatan yang hilang untuk menghindari kekerasan dan akhirnya pengambilalihan kekuasaan militer wilayah Timor Portugis oleh Indonesia (lihat Bab 7.1.: Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri).

Indonesia dan komunitas internasional

55. Dengan penduduk yang mendekati 165 juta pada pertengahan dasawarsa 1970-an Indonesia merupakan negara yang paling banyak penduduknya di Asia Tenggara. Di bawah Presiden Soeharto Indonesia mengutamakan pembangunan ekonominya yang kaya sumber daya. Setelah kekacauan pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Soekarno baik negara-negara Barat maupun negara-negara tetangganya memandang perubahan di Indonesia secara positif. Selain itu, status Indonesia sebagai negara pendiri Gerakan Non-Blok* Indonesia dapat menggalang dukungan yang besar dari kelompok negara-negara ini. Selain itu Indonesia adalah juga negara terbesar dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan dapat mengandalkan dukungan sebagian besar negara-negara Islam. Dukungan luas bagi Indonesia adalah salah satu faktor bagi tidak adanya upaya serius untuk mencegah tindakan-tindakan agresifnya di Timor Portugis, termasuk dalam fora PBB.

56. Walaupun secara resmi non-blok, rejim Soeharto yang anti-komunis berarti bahwa Indonesia lebih condong ke kubu Barat yang menawarkan kesempatan perdagangan dan investasi yang besar.⁵⁰ Rejim Orde Baru Presiden Soeharto telah membuktikan citra anti-komunismenya kepada Amerika Serikat dengan memberantas Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah kekacauan pada tahun 1965-66. Pada tahun-tahun itu, ABRI memimpin dalam penumpasan PKI, dan membunuh sampai satu juta anggota dan pendukungnya, dan memenjarakan lebih dari satu juta orang lainnya.⁵¹ Orde Baru melarang Komunisme, membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina dan mengukuhkan dirinya dengan mantap di kubu Barat. Indonesia mengupayakan investasi dan bantuan ekonomi dari teman-teman Baratnya.

57. Selain menempatkan dirinya dengan Blok Barat, Indonesia juga memperbaiki hubungannya dengan negara-negara anti-komunis di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina. Pada tahun 1967, Indonesia bergabung dengan negara-negara ini untuk membentuk Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dengan tujuan untuk memerangi penyebaran Komunisme di kawasan tersebut, khususnya dari Vietnam Utara dan Republik Rakyat Cina. Indonesia takut bahwa komunisme akan menyusup ke negaranya dan membangkitkan kembali unsur-unsur komunisme yang laten. Oleh karena itu, bahkan dengan semakin meningkatnya tekanan internasional, Soeharto belum siap untuk membebaskan ratusan ribu tahanan yang ditangkap menyusul kudeta tahun 1965.

58. Dalam dasawarsa sejak 1965 Orde Baru tidak pernah surut dalam semangat anti-komunismenya di dalam negeri. Selama tahun 1965-66 antara 250 ribu dan satu juta anggota dan pengikut PKI terbunuh, dan satu juta orang lainnya atau lebih dipenjara. Namun demikian, anti-komunisme memang merupakan unsur penting tetapi bukan satu-satunya tolok ukur loyalitas dalam rejim tersebut. Di bawah Orde Baru Soeharto batasan perdebatan politik menjadi sangat sempit, dan didefinisikan tidak hanya oleh perasaan anti-komunisme rejim tersebut, tetapi juga oleh ketidaksukaannya kepada politik pluralis pada umumnya. Berbagai aturan baru ditetapkan oleh struktur otoriter yang didominasi oleh militer.⁵² Pada masa ketika persepsi Barat mengenai Asia Tenggara dicirikan oleh ketakutan bahwa negara-negara lainnya di wilayah tersebut adalah bagaikan sederatan domino yang beresiko mengikuti contoh Indocina dan jatuh ke kubu

* Gerakan Non-Blok terdiri dari lebih dari 100 negara yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan blok kekuatan utama, yang dalam konteks perang dingin pada saat pendiriannya berarti blok kapitalis dan komunis. Indonesia menjadi tuan rumah pendiriannya pada tahun 1955.

Komunis, pihak Barat bersedia mengabaikan represi yang menjadi andalan Orde Baru, asalkan Indonesia terus menjadi benteng dalam mencegah penyebaran komunisme.

59. Banyak negara Barat dan sekutunya di Asia berpandangan sama seperti Soeharto bahwa Timor Portugis sebaiknya disatukan dengan Indonesia, baik karena mereka memiliki asumsi strategis yang sama dan pola pikir anti-komunisme yang mendasarinya, atau hanya karena mereka tidak ingin mengasingkan Jakarta. Pola pikir ini terangkum dalam saran dari Duta Besar Inggris, Sir Archibald Ford, ke London:

Bahkan tanpa intervensi Soviet atau Cina wilayah tersebut dapat menjadi “anak bermasalah” [di kawasan ini]...Bagi Inggris, lebih baik jika Indonesia mengintegrasikan wilayah tersebut...Dan jika ada krisis dan perdebatan di PBB kita semua harus diam dan tidak mengambil posisi yang menentang Indonesia.⁵³

60. Indonesia juga dapat mengandalkan dukungan negara-negara Asia yang non-komunis. Walaupun terdapat perbedaan dalam tingkat dukungan yang siap diberikan oleh mereka, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mendapatkan dukungan luas dari anggota-anggota ASEAN. Di dalam ASEAN sendiri terdapat bermacam pandangan mengenai kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis, mulai dari pandangan Singapura, yang sebagai negara pulau kecil dan memiliki budaya tersendiri, serta memandang dirinya seperti Israel di Asia Tenggara dan memiliki keraguan mengenai niat Indonesia, sampai Malaysia, yang menjadi pendukung Jakarta terbesar.

61. Persekutuan dalam Perang Dingin bukan satu-satunya alasan mengapa berbagai negara di kawasan tersebut mendukung Indonesia. Jepang memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Indonesia, dan menjadi semakin tergantung pada minyak dan gas alamnya untuk mendorong ekonominya yang tengah berkembang pesat. Kebijakan Australia mengenai Timor Portugis didasarkan pada keinginannya untuk membentuk kembali kebijakan luar negerinya secara keseluruhan dengan memberi warna regional dan khususnya memperbaiki hubungannya dengan Indonesia. Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, berpandangan sama dengan Indonesia bahwa Timor-Leste yang merdeka bukanlah opsi yang baik dan diberi tahu bahwa aneksasi Timor Portugis sudah menjadi kebijakan Indonesia yang “tetap”. Apapun niat dia sebenarnya, dalam kedua pertemuannya dengan Presiden Soeharto tahun 1974-75, Whitlam memberi Presiden Soeharto kesan yang kuat bahwa ia melihat perlunya pengambilalihan oleh Indonesia, bahkan meski mengakui pentingnya menegakkan prinsip penentuan nasib sendiri.

Kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis

62. Selama tahun-tahun awal pembentukan negara Indonesia sejumlah orang-orang nasionalis Indonesia memimpikan terciptanya Indonesia Raya seperti yang pernah dicapai pada masa keemasan ketika Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menguasai kawasan kepulauan ini. Walau tidak ada dasar historisnya, Indonesia Raya akan mencakup wilayah Malaysia dan Filipina, serta Timor Portugis. Republik Indonesia tidak pernah bermaksud untuk mewujudkan Indonesia Raya. Justru sebaliknya, ketika hendak menggalang pengakuan internasional di akhir dasawarsa 1940-an dan kemudian pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, ketika mencoba mengklaim Irian Barat (kemudian Irian Jaya, kini Papua), Indonesia menyatakan bahwa batas-batas negaranya adalah batas-batas Hindia Belanda. Alasannya pragmatis: mengklaim kedaulatan atas Indonesia Raya akan berkesan ekspansionis di dunia yang mengakui bahwa negara-negara merdeka harus mewarisi batas-batas yang telah ditetapkan oleh penguasa kolonialnya.

63. Khusus untuk Timor Portugis, sebelum tahun 1975, Indonesia tidak pernah mengklaim bahwa ia memiliki hak untuk menggabungkan Timor Portugis. Pada tahun 1961, ketika Indonesia mengupayakan klaim atas Irian Jaya Menteri Luar Negeri ketika itu, Dr. Soebandrio, secara

eksplisit menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim atas Timor Portugis karena itu merupakan wilayah Portugal sehingga bukan milik Indonesia⁵⁴. Pada tahun 1974, setelah bertemu dengan utusan luar negeri ASDT, José Ramos-Horta, Menteri Luar Negeri Indonesia ketika itu, Adam Malik, menulis kepada Ramos-Horta:

Pemerintah dan juga rakyat Indonesia tidak memiliki niat untuk menambah atau memperluas wilayah mereka, atau untuk menduduki wilayah-wilayah selain yang tercantum dalam Konstitusi mereka. Penegasan kembali ini untuk memberi anda gambaran yang jelas, sehingga tidak ada keraguan dalam pikiran rakyat Timor dalam mengungkapkan keinginan mereka sendiri...Oleh karena itu, siapapun yang akan memerintah di Timor dimasa depan setelah kemerdekaan, dapat dipastikan bahwa Pemerintah Indonesia selalu akan berusaha untuk memelihara hubungan baik, persahabatan dan kerjasama demi manfaat kedua negara.⁵⁵

64. Walaupun tidak pernah menjadi gagasan arus utama, anggapan bahwa Timor Portugis adalah milik Indonesia karena alasan historis, geografis dan etnis tetap hidup sebagai arus bawah dalam pembicaraan politik di Indonesia, yang dapat sewaktu-waktu dimunculkan bila diperlukan. Ancaman penyatuan dan integrasi Timor Portugis dengan Indonesia selalu membayangi hubungan Indonesia dengan Timor Portugis. Gubernur-gubernur Timor Portugis pasca perang selalu mencurigai niat Indonesia, dan senantiasa berusaha membatasi kontak antara kedua belahan pulau tersebut. Walaupun tingkat keterlibatan Indonesia dalam pemberontakan tahun 1959 masih dipertentangkan (lihat 3.1, di atas), represi yang terjadi setelahnya dan analisis pemerintahan Timor Portugis mengenai asal-usul pemberontakan tersebut menunjukkan bagaimana seriusnya pihak Portugis yakin bahwa Indonesia memiliki rencana bagi wilayah tersebut. Indonesia bukannya tidak mengacuhkan ketakutan-ketakutan tersebut. Pada bulan Juli 1961, contohnya, dalam sebuah pidato yang mengingatkan Portugal untuk tidak mengabaikan dukungan internasional atas kemerdekaan Anggola, Menteri Luar Negeri Indonesia ketika itu, Dr Soebandrio, mengingatkan pendengarnya dengan nada ancaman mengenai kedekatan Indonesia dengan Timor Portugis.⁵⁶ Pada tahun 1962 sebuah laporan (Komite Dekolonisasi PBB) mencatat bahwa sebuah "Biro Pembebasan Republik Timor" telah dibentuk di Jakarta. Sekitar bulan Mei-Juni 1963 Biro tersebut mengumumkan bahwa Biro ini telah membentuk pemerintahan dengan 12 menteri di Batugade.⁵⁷ Pada bulan September 1963, Menteri Penerangan Indonesia, Roeslan Abdulgani menyatakan:

walaupun kami bukanlah negara ekspansionis, kami tidak dapat membiarkan bangsa yang nenek moyangnya sama dengan kami ditindas dan dipenjara hanya karena mereka ingin bergabung dengan tanah air nenek moyang mereka.*

65. Walau demikian, integrasi Timor Portugis tidak pernah menjadi tujuan dari kebijakan resmi di bawah Presiden Soekarno. Berbagai pernyataan dan infiltrasi yang sesekali muncul tidak pernah sampai menjadi komitmen serius untuk menggabungkan Timor Portugis karena Indonesia tidak pernah memandang koloni tersebut sebagai ancaman. Indonesia menjaga hubungan yang stabil dengan pemerintahan Salazar: Ia membuka konsulatnya di Dili dan Soekarno sendiri mengunjungi Portugal pada tahun 1959.

* James Dunn, *East Timor: A rough passage to independence*, Longueville, 2003, p. 87. Juga perlu dicatat peneliti CSIS, Harry Tjan Silalahi menyebut bahwa Indonesia menyelenggarakan operasi klandestine di Timor Portugis selama "konfrontasi", dalam suatu pembicaraan dengan staff Kedutaan Australia di Jakarta, 2 Juli 1974. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976*, 2000, h. 62, document 12.

66. Sampai tahun 1974 penerus Soekarno, Soeharto, tidak pernah melenceng dari posisi pendahulunya, namun, setelah Revolusi Bunga, berbagai argumen “kembali ke pangkuan ibu pertiwi” untuk mengambil alih Timor Portugis mulai muncul. Tokoh-tokoh politik Timor-Leste mengingat di hadapan Komisi kekhawatiran mereka saat pidato John Naro, wakil ketua DPR-RI, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki klaim historis atas Timor Portugis.⁵⁸ Orang-orang yang mendekati masalah ini dari sisi strategis melihat pentingnya pandangan-pandangan ini. Dalam wawancara mereka dengan Komisi, Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi, dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), yang keduanya sangat terlibat dalam mengembangkan kebijakan tentang Timor Portugis pada tahun 1974-75 atas nama mentor mereka Jenderal Ali Moertopo, keduanya menyebutkan kuatnya pandangan-pandangan seperti ini. Kolonel Aloysius Sugianto, seorang anggota seksi operasi khusus Jenderal Ali Moertopo dalam badan intelijen, Bakin, yang memainkan peran penting dalam berbagai kegiatan rahasia awal di Timor Portugis tahun 1974-75, mengatakan kepada Komisi bahwa ia melihat dirinya bekerja untuk menyatukan kembali bangsa yang terpecah akibat kolonialisme.

*Kalau kita begitu. Apodeti itu landasannya selalu, kita ini satu saudara, satu pulau. Kita jadi pecah, jadi dua antara Timor Dili sama Timor Kupang. Itu karena penjajah. Mereka itu, kalau kita lihat, benar kan? Karena penjajah jadi pecah. Di sana menjadi daerah Portugal di sini daerah Belanda. Sebetulnya solusi kita satu. Logika itu benar, cara berpikir rakyat itu benar.*⁵⁹

67. Setelah invasi Timor-Leste, pejabat-pejabat Indonesia menghidupkan kembali argumen historis (dan etnis) bagi integrasi. Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 1975, enam hari sesudah invasi Dili dan sepuluh hari setelah ia menyangkal mengenai ambisi teritorial Indonesia di Timor Portugis, Duta Besar Indonesia untuk PBB, Anwar Sani menyatakan:

Perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan mengapa Indonesia sangat peduli akan apa yang terjadi di Timor Portugis. Timor Portugis adalah bagian dari pulau Timor, bagian lain dari pulau tersebut adalah wilayah Indonesia. Timor terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, satu dari ribuan pulau yang membentuk kepulauan. Penduduk Portugis Timor...berasal dari etnis yang sama dengan penduduk yang berada di wilayah Indonesia. Pemisahan selama 450 tahun karena dominasi kolonial tidak menghapuskan ikatan erat darah dan kultur antara penduduk wilayah ini dan kerabat mereka di Timor Indonesia. Kedekatan geografis dan kekerabatan etnis adalah alasan-alasan penting mengapa Indonesia sangat peduli dengan keamanan dan stabilitas di Timor Portugis, tidak hanya karena kepentingan Indonesia sendiri tetapi juga untuk kepentingan seluruh wilayah Asia Tenggara.⁶⁰

68. Yang lebih kuat dalam pemikiran Indonesia, selain alasan historis, adalah alasan-alasan strategis bagi penggabungan. Menurut James Dunn, mengutip sumber-sumber Indonesia, “kelompok Bakin/Opsus melihat kembali posisi mereka pada akhir tahun 1972 atau 1973 dan berkesimpulan bahwa mereka sangat menentang ide Timor-Leste merdeka”, yang dapat

⁵⁸ Yusuf Wanandi menyatakan bahwa ‘dalam lingkaran tertentu’ Timor-Leste dilihat sebagai ‘wilayah irredentist’.(Irredentism adalah gerakan yang berusaha menyatukan kembali wilayah-wilayah yang terpisahkan. [Wawancara CAVR dengan Yusuf Wanandi, Jakarta, CSIS, Jakarta, 24 Juli 2003.] Harry Tjan Silalahi mengamati: Saya pikir teori yang menyatakan bahwa Timor-Leste adalah bagian integral dari Indonesia memang ada, tanpa secara eksplisit dinyatakan, sejak masa Soekarno, setelah pembebasan Irian. [Wawancara CAVR dengan Harry Tjan Silalahi, Jakarta.]

“menambah dimensi baru bagi persoalan keamanan Indonesia”.⁶¹ Buku setengah resmi, *Integrasi*, mengklaim bahwa kepentingan Indonesia di Timor Portugis sudah ada jauh sebelum komitmen Portugal kepada dekolonisasi. Buku tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia mengambil pendekatan evolusioner, yang pada tahap awalnya akan membangkitkan keinginan rakyat Timor untuk merdeka. Yang melatari kebijakan Indonesia tersebut adalah perlunya menjamin “bahwa Timor-Leste tidak akan menjadi ‘tempat bermasalah’ dan dengan demikian tidak akan digunakan sebagai *alat tawar-menawar* melawan Indonesia.”⁶²

69. Setelah Revolusi Bunga di Portugal pada bulan April 1974, pendekatan strategis, yang dibentuk oleh rasa anti-komunisme yang mendalam dari rejim Orde Baru, dengan cepat mendominasi pemikiran mengenai persoalan Timor Portugis di antara kalangan elit Indonesia. Pendekatan ini bersumber dari ketakutan bahwa Timor-Leste yang merdeka akan menjadi basis bagi infiltrasi oleh negara-negara komunis ke Indonesia. Pandangan ini sudah muncul setidaknya sejak tanggal 22 Mei 1974, ketika anggota Bakin mengatakan kepada Kedutaan Australia di Jakarta mengenai pandangan berikut ini: “Indonesia sudah mengatasi Cina di pintu depannya dan mungkin sekarang harus menangani ancaman dari pintu belakangnya.”⁶³

70. Soeharto sendiri juga mengambil pandangan strategis ini. Pada pertemuannya dengan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, di Wonosobo dekat Yogyakarta bulan September 1974, ia menyebut Cina dan Uni Sovyet sebagai negara-negara yang mungkin akan mencampuri Timor Portugis.⁶⁴ Dalam pertemuan keduanya di Townsville, Queensland, pada bulan April 1975, Soeharto mengatakan kepada Whitlam bahwa intelijen Indonesia telah mendapat informasi bahwa orang-orang komunis dari Cina sedang berupaya masuk ke Timor Portugis melalui Australia dengan bantuan Kedutaan Cina di Canberra. Pejabat Indonesia tidak semuanya sepaham mengenai sifat ancaman komunisme ini. Kepala intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan wakil ketua Bakin, Letnan Jenderal Benny Moerdani meyakini bahwa armada Soviet adalah ancaman utamanya: ia memprediksikan bahwa Timor merdeka akan memberi Uni Sovyet pangkalan Angkatan Laut yang akan memungkinkan Soviet untuk membagi wilayah laut Indonesia menjadi dua zona.⁶⁵ Direktur eksekutif CSIS, Jusuf Wanandi, mengatakan kepada Komisi bahwa orang lainnya lebih khawatir tentang maksud Vietnam: mereka berargumen bahwa kalau Kuba dapat mengirimkan pasukannya ke Angola yang jaraknya 2.000 km jauhnya dari pangkalan mereka, kenapa Vietnam tidak bisa mengirimkan pasukannya ke Timor-Leste yang hanya berjarak 1500 km (sic. 4.000 km) jauhnya?⁶⁶ Perbedaan penilaian mengenai ancaman komunis ini seharusnya dapat memicu negara-negara luar untuk mempertanyakan kebenaran argumen tersebut.

⁶¹ Lihat Dokumen 123 di DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of East Timor*, h. 248. Whitlam mengatakan bahwa Indonesia tidak punya bukti mengenai ini.

3.5 Proses dekolonisasi dan partai-partai politik

Tinjauan

71. Revolusi Bunga seketika dengan cepat mengubah situasi percaturan politik di Timor Portugis, yang sampai saat itu belum memiliki partai politik aktif dan hanya sedikit kegiatan anti-kolonial. Dengan hukum-hukum baru untuk perserikatan politik, partai-partai cepat terbentuk. Dua partai muncul sebagai kelompok-kelompok yang dominan, UDT dan ASDT. Landasan kedua partai tersebut menyerukan kemerdekaan sebagai hasil akhir dari proses dekolonisasi. Mereka berbeda dalam laju dekolonisasi tersebut, dengan ASDT menghendaki kemerdekaan segera, sementara UDT yang lebih konservatif ingin sebuah proses yang lebih bertahap. Namun yang benar-benar memisahkan kedua partai sentris ini, adalah ideologi militan di kedua ekstrim yang saling menuduh, sebagai “fasis” atau “komunis”. Partai ketiga, Apodeti, mendapatkan dukungan di sana sini, namun jumlah pendukungnya berada jauh di bawah kedua partai utama, dan ciri utamanya adalah posisinya yang pro-integrasi dan dukungan Indonesia yang mereka raih.

72. Kampanye politik dengan cepat berubah menjadi serangan-serangan verbal dan terkadang fisik, dan kedua partai utama tidak melakukan banyak untuk mengendalikan ini. Kedua partai menggunakan siaran radio untuk menyebarkan propaganda dan serangan pribadi kepada yang lain, sehingga meningkatkan ketegangan sosial. Tidak adanya pengalaman politik ini dimanfaatkan oleh agen-agen Indonesia, termasuk anggota dinas intelijen yang melakukan operasi terselubung di dalam Timor Portugis. Mereka berupaya memecah-belah orang Timor dengan tujuan untuk mencapai integrasi dengan Indonesia. Hal ini memicu pihak-pihak militan di kedua partai, dan memuncak pada kegagalan kedua partai untuk menemukan cara untuk bekerja bersama bagi kepentingan nasional. Hasilnya adalah pecahnya koalisi yang berusia empat bulan antara UDT dan Fretilin pada akhir bulan Mei 1975. Dari situ, ketegangan antara kedua partai meningkat sampai UDT melancarkan aksi bersenjata yang terkoordinasi di seluruh wilayah, yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata berdarah. Fretilin pun menanggapi dengan kekerasan juga.

Permulaan kesadaran politik

73. Sistem kolonial Portugis merenggut suara orang Timor-Leste untuk menangani urusannya sendiri. Namun, penyebaran pendidikan yang bertahap setelah Perang Dunia Kedua mulai menumbuhkan pemikiran kritis mengenai sistem kolonial yang ciri utamanya adalah keterbelakangan ekonomi, korupsi, tingkat pengangguran yang tinggi, diskriminasi rasial dan kekejaman. Penderitaan orang Timor-Leste mulai mendapatkan penyaluran lewat kalangan terdidik.

74. Direnggut hak suaranya dan belajar dari pemberontakan Viqueque tahun 1959 tentang harga yang harus dibayar dalam konfrontasi langsung dengan sistem kolonial, pada awal dasawarsa 1970-an, kalangan yang sadar politik mengadopsi pendekatan politik yang baru yang lebih hati-hati dan rahasia. Pada tahun 1970 kalangan generasi muda terdidik memulai sebuah kelompok diskusi anti-kolonial, yang di antara anggotanya terdapat Mari Alkatiri, José Ramos-Horta, Nicolau Lobato, Justino Mota dan Francisco Borja da Costa. Sebuah kelompok anti-kolonial kecil dibentuk pada tahun 1967 yang berfungsi pada masa Revolusi Bunga, diorganisir dalam berbagai kelompok kecil yang berjalan tanpa saling mengetahui. Kelompok ini tampaknya tidak memiliki dampak politik yang besar.⁶⁷

75. Pada awal dasawarsa 1970-an orang Timor mulai diperbolehkan untuk menulis tentang topik-topik yang terbatas dan dengan kebebasan ekspresi yang dibatasi. *Seara*, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Diosis Dili, menjadi sarana pengungkapan pendapat yang penting setelah Pastor Martinho da Costa Lopes mengambil alih redaksi pada bulan September 1972. Mari Alkatiri, José Ramos-Horta, Nicolau Lobato, Abilio Araújo dan Francisco Xavier do Amaral

semuanya menulis artikel untuk *Seara* mengenai permasalahan sosial di bawah redaksi Pastor Martinho da Costa Lopes.

76. Pemerintah tidak ragu-ragu untuk menekan segala tanda pembangkangan. Pada tahun 1970 José Ramos-Horta diasingkan ke Mozambique selama dua tahun setelah DGS^{*} melaporkan Horta yang mengatakan kepada seorang turis Amerika bahwa kalau Portugal tidak sanggup membangun Timor, lebih baik Amerika mengambil alih koloni ini.⁶⁸ Sejumlah artikel oleh Amaral dan Ramos-Horta—dalam kasus Horta adalah sebuah essay berjudul “*Maubere Meu Irmão*” (“Maubere My Brother”) atau “Maubere Saudara Saya” dianggap sangat menghina—menarik perhatian pemerintah. Di bawah tekanan pemerintah, *Seara* mengumumkan, tanpa penjelasan, dalam edisi tanggal 24 Maret 1973 bahwa majalah tersebut akan tutup.[†]

77. Pada tahun 1973, di Dili, terjadi kerusuhan antara pemuda dan militer Portugis.⁶⁹ Terjadi ketegangan, dan tidak lama kemudian kegalauan generasi muda dapat menemukan bentuk yang lebih jelas.

Susunan partai-partai politik

78. Begitu Revolusi Bunga menghilangkan larangan ekspresi politik, kalangan terdidik Timor dengan cepat mengambil kesempatan untuk terjun ke kancah politik. Sementara komposisi klas, etnis dan kedaerahan sulit dijelaskan secara sederhana, terdapat pola-pola latar belakang orang-orang yang ikut masuk ke dalam partai-partai. Para pemimpin Timor dari berbagai partai umumnya saling mengenal dengan baik dan terkadang berhubungan keluarga. Domingos Oliveira, Sekretaris Jenderal partai UDT ketika itu, mengatakan kepada Komisi mengenai kedekatannya dengan Wakil Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, dan bagaimana ia sering berbincang mengenai politik dengan sepupunya José Osorio Soares, Sekretaris Jenderal Apodeti. Timor-Leste tahun 1975 merupakan dunia kecil yang terdiri dari jaringan dan aliansi politik.⁷⁰

79. Latar belakang yang terpendang adalah sesuatu yang umum di kalangan pemimpin partai. Menjadi terpendang pada penghujung masa kolonial di Timor Portugis dapat berarti beberapa hal: latar belakang *liurai*, keturunan ras campuran (*mestizo*), keluarga tuan tanah, pendidikan menengah di gereja atau sekolah negeri. Seringkali orang-orang yang memiliki ciri keberadaan seperti ini bekerja sebagai pegawai negeri. Karakteristik seperti ini mempersatukan banyak pemimpin partai. Mereka sering kali hanya bisa dibedakan dengan gradasi sosial yang lebih halus lagi. Tidak mengherankan, bila melihat landasan politik federalisnya, beberapa pemimpin UDT mempunyai kedudukan kuat dalam sistem kolonial, baik karena memegang jabatan yang cukup senior di pemerintahan sipil, melalui keanggotaan *Acção Nacional Popular* (ANP) yang Salazaris, atau melalui kedekatan mereka dengan Gereja Portugis.⁷¹ Walaupun seringkali memiliki latar belakang yang serupa, para pemimpin Fretilin tidak memiliki keterikatan emosional kepada rejim kolonial Portugal. Apodeti mendapatkan kepemimpinan mereka dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki hubungan dengan Indonesia yang bisa saja bersifat geografis (berdasarkan kedekatannya dengan perbatasan Indonesia) atau politis (berhubungan dengan keterlibatan mereka dalam pemberontakan Viqueque tahun 1959).

80. Penguasa tradisional Timor-Leste menyediakan jalur penting untuk menggalang kekuatan secara lokal bagi semua partai. Partai KOTA yang kecil bermaksud untuk menjadikan sistem tradisional ini sebagai basis programnya. Apodeti juga menggalang dukungan dari pemimpin tradisional dan regional ini, dan cukup berhasil. Guilherme Gonçalves, *liurai* Atsabe,

^{*} PIDE berubah nama menjadi DGS (*Direcção Geral de Segurança*) pada tahun 1968.

[†] Ramos-Horta menuliskan bahwa ia dipanggil lagi oleh gubernur karena kata-kata “Maubere Saudaraku”, tetapi tidak terlalu jelas bagaimana pikiran pemerintahan Portugis terhadap tulisan Xavier do Amaral pada saat itu. Tapi ini diterima banyak kalangan nasionalis bahwa *Seara* ditutup karena tulisan Xavier do Amaral. Lihat Abílio Araújo, *Timor-Leste: Os Loricos Vontaram a Cantar*, 1977, Lisbon, hal. 187.

memberi basis dukungan regional yang cukup besar bagi partai ini di daerah perbatasan dengan Indonesia. Namun demikian, para *liurai* tidak memberikan basis tunggal yang kuat bagi satu partai manapun. Fransisco Xavier do Amaral menjelaskan kepada Komisi tentang perbedaan-perbedaan antara cara Fretilin dengan UDT di dalam mencari dukungan masyarakat:

*Partai ASDT memiliki metoda ini. Kita bisa melihat bahwa partai pertama yang dibentuk ialah UDT, dan saya lihat taktik mereka. UDT berkampanye dengan fokus kepada administrator, dan mendekati administrator sub-distrik dan penguasa lokal [liurai]. Mereka tidak secara langsung mendekati rakyat. Jadi saya pikir, kita butuh rakyat, saya tidak butuh liurai, mereka mendukung Portugis. Saya butuh rakyat. Jadi mereka berangkat dari atas ke bawah, sedangkan saya memulai dari bawah. Saya memulai dari akar rumput kemudian ke atas. Terkadang, kami bertemu di tengah-tengah.*⁷²

81. Partisipasi politik dalam suatu tradisi demokrasi Barat yang individualistik tetap menjadi hak khusus segelintir kalangan elit yang membentuk partai-partai tersebut. Proses politik yang terjadi setelah Revolusi Bunga berjalan cepat, dan tanpa pendidikan kewarganegaraan atau politik, banyak orang Timor biasa yang membuat pilihan keanggotaan atau afiliasi partai berdasarkan kesetiaan lokal atau karena ikut-ikutan ketimbang karena prinsip atau kebijakan partai.⁷³ Desa-desa atau wilayah-wilayah tertentu seringkali setia terhadap satu partai saja. Mario Carrascalão dari UDT menjelaskan bagaimana kesetiaan politik suatu komunitas terbentuk:

*Orang-orang di Maubisse, karena mereka dekat dengan tentara-tentara Portugis, maka seluruh Maubisse adalah UDT. Hampir semua orang Maubisse adalah UDT. Tetapi jika anda melihat Uatulari, semua orang adalah Fretilin, dan di Uatu-carabau semua orang adalah Apodeti. Ini adalah kenyataan yang terjadi ketika kami mempersiapkan pemilihan-pemilihan [di desa] [pada tahun 1975].*⁷⁴

Perkembangan dan ketegangan internal

Kompetisi antara UDT dan Fretilin

82. Tidak diragukan lagi bahwa dua partai terbesar adalah UDT dan ASDT. Apodeti menjadi penting karena hubungan dengan dan dukungannya dari pemerintah Indonesia. Sementara UDT dan ASDT memiliki perbedaan, dalam tujuan akhir kemerdekaannya mereka sama. Dan memang selama tahun 1974-75 mengenai persoalan kemerdekaan, UDT dan Fretilin bergerak semakin dekat dengan keduanya pada akhirnya menerima jadwal waktu yang diajukan Portugal yang ditetapkan dalam Undang-Undang no. 7/75 pada tanggal 17 Juli 1975.⁷⁵ ASDT mulai membicarakan untuk membentuk sebuah front yang berbasis luas sejak bulan Juli 1974, namun menolak gagasan membentuk koalisi dengan UDT.⁷⁶ Pada bulan Agustus, pendukung UDT dan ASDT menyelenggarakan serangkaian pertemuan untuk membentuk koalisi, namun sekali lagi gagal menyetujui landasan bersama.⁷⁷ Kedua partai dengan cepat tenggelam ke dalam serangan verbal terhadap yang lainnya dan retorika agresif yang memecah belah secara sosial dan menciptakan landasan bagi kekerasan yang segera menyusul.⁷⁸

Pelatihan militer Apodeti di Timor Barat

83. Sementara itu Apodeti menjalin kontak dengan militer Indonesia dengan maksud untuk mendapatkan senjata dan pelatihan militer. Utusan Apodeti, Tomás Gonçalves, anak *liurai* Atsabe, Guilherme Gonçalves, pergi ke Timor Barat pada bulan Agustus 1974 untuk pelatihan

militer. Pada bulan September ia pergi ke Jakarta, dimana ia bertemu dengan panglima ABRI, Jenderal Maraden Panggabean yang ketika itu melihat Apodeti sebagai alat yang tepat untuk mencapai hasil integrasi. Kunjungan-kunjungan ini terjadi dengan keterlibatan dan bantuan konsulat Indonesia di Dili.⁷⁹

Partai-partai politik bersiap menghadapi konfrontasi bersenjata

84. Apodeti merupakan partai pertama, namun bukan satu-satunya partai yang mengembangkan kemampuan paramiliter. Ini merupakan kecenderungan yang kuat di antara ketiga partai. UDT dan Fretilin keduanya secara aktif mengincar dukungan di kalangan orang Timor yang menjadi anggota tentara kolonial Portugal.⁸⁰ Di samping persoalan kesetiaan kepada Portugal, Gubernur Mário Lemos Pires juga khawatir tentang prospek terjadinya perpecahan di antara pasukan Timor-Leste yang didasarkan pada kesetiaan terhadap partai politik. Mantan perwira tingkat pertengahan (*aspirante*), Rogério Lobato, belakangan mengenang:

Dapat saya katakan bahwa UDT membuat kampanye untuk memperoleh dukungan terutama dari lulusan sekolah militer, para sersan. Namun Fretilin juga membuat kampanye terbuka ... di antara pasukan-pasukan tersebut untuk memobilisasi para serdadu.⁸¹

85. Ini menjadi kekhawatiran pemerintah kolonial. Ketika Fretilin mendeklarasikan pasukan Timor sebagai bagian dari koalisi UDT-Fretilin Mayor Francisco Mota, Kepala Kantor Urusan Politik Gubernur, melarang militer terlibat dalam politik, sesuai tradisi militer Portugis untuk berada di luar politik (*apartidarismo*).⁸² Namun, pada bulan April 1974, tentara Portugis sendiri baru memberi contoh mengenai keterlibatan militer dalam politik. Banyak serdadu Timor dalam tentara dan polisi kolonial Portugis terhibur oleh apa yang mereka pandang sebagai ketiadaan disiplin dan kesetiaan pada tugas yang diperlihatkan oleh orang Portugis dalam tentara kolonial setelah Revolusi Bunga.⁸³ Walaupun sudah terjadi kegaduhan sebelum tanggal 11 Agustus, tentara Timor umumnya tetap loyal kepada prinsip *apartidarismo* sampai pecah perang sipil. Beberapa orang bahkan terus menolak untuk berpihak setelah itu.

Mahasiswa dari Portugal

86. Sumber lain bagi ketegangan di masa itu, dan dari dugaan sejarah semenjak itu, adalah peran tujuh orang mahasiswa Timor yang baru kembali dari Portugal pada bulan September 1974, beberapa hari sebelum ASDT mengganti namanya menjadi Fretilin. Mereka membawa pengalaman politik radikal mereka dari kelompok-kelompok mahasiswa di Lisbon[†] dan sikap anti-kolonial yang keras.⁸⁴ Sementara beberapa politisi Timor dari masa itu yakin bahwa para mahasiswa tersebut bertanggung jawab mendorong ASDT menjadi partai yang lebih revolusioner,⁸⁵ Komisi mendengar kesaksian dari anggota Komite Sentral Fretilin Mári Alkatiri bahwa ketika mereka kembali ke Timor, para mahasiswa, tidak seperti anggota Komite Sentral, memandang kolonialisme Portugis sebagai ancaman yang lebih besar daripada neo-kolonialisme Indonesia.⁸⁶ Para mahasiswa tersebut bergabung dengan Fretilin, yang mampu meredam beberapa gagasan mereka yang lebih radikal,⁸⁷ dan partai tersebut kemudian terpengaruh oleh semangat dan gagasan-gagasan baru mereka. Para mahasiswa ini menjadi anggota Fretilin yang menonjol. Sementara peran mereka dalam pembentukan Fretilin dan radikalisasi kebijakan partai tersebut masih dipertentangkan, para anggota UDT mengingat pengaruh mereka yang memanas-manasi melalui grafiti ("Matilah Fasis!")⁸⁸ dan hinaan tentang UDT yang dituduh konservatif.⁸⁹ Perilaku seperti ini membuat para mahasiswa ini dipersalahkan atas kebijakan-kebijakan Fretilin yang lebih radikal.

[†] Lima mahasiswa tersebut adalah Abílio Araújo, Guilhermina Araújo, António Carvarinho, Vicente Manuel Reis dan Venâncio Gomes da Silva. See Relatorio da CAEPDT, h. 54.

[†] Mereka termasuk MLTD or *Movimento Libertação Timor Dili* dan FULINTIDI or *Frente Unica de Libertação de Timor Dili*.

ASDT menjadi Fretilin

87. Pada tanggal 11 September 1974, ASDT merubah namanya menjadi *Frente Revolucionário de Timor Leste Independente*, Fretilin (Front Revolusioner bagi Timor-Leste Merdeka). Sejak saat itu partai ini mengambil sikap yang lebih radikal. Manifestonya (*Manual e Programa Políticos da Fretilin*) menyebut Fretilin sebagai “front yang mempersatukan kelompok-kelompok nasionalis dan anti-kolonialis di bawah satu visi—pembebasan bangsa Timor dari kolonialisme”.⁹⁰ Manifesto tersebut juga menegaskan bahwa Fretilin merupakan ‘satu-satunya wakil sah’ rakyat Timor. Tidak ada dasar elektoral bagi klaim ini, yang oleh Fretilin didasarkan atas kesetiaannya kepada mayoritas rakyat pribumi Timor yang agraris. Walau demikian berdasarkan nilai-nilai yang diklaimnya dimiliki oleh ‘seluruh orang Timor-Leste Fretilin menuntut kemerdekaan Timor-Leste secara *de jure* dari Portugal. Di satu sisi, Fretilin berupaya untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahnya Portugal. Di sisi lain, beberapa pimpinannya ketika itu melihat sebagai ancaman yang lebih besar kekuatan neo-kolonial Indonesia dan bermaksud untuk membangun front nasional yang luas untuk menghadapi ancaman ini.⁹¹

88. Peran yang diproklamirkan secara sepihak oleh Fretilin sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Timor-Leste membuat khawatir pemimpin-pemimpin partai lain, yang menganggap hal ini memicu rasa tidak toleransi dalam politik.

Mereka tidak menerima partai-partai lain. Mengapa?...Ini lah yang mereka inginkan, yaitu menjadi satu-satunya perwakilan rakyat Timor yang sah. Mereka tidak mengenali orang-orang di partai lain...⁹²

Istilah “Maubere”

89. Walau mereka bermaksud untuk menjadi wakil tunggal bangsa Timor-Leste, Fretilin tidak mencapai hal ini. Yang dicapai oleh Fretilin adalah pengembangan nasionalisme Timor-Leste dengan menggunakan gagasan-gagasan seperti menjadikan istilah *Maubere* sebagai simbol rakyat Timor biasa, dan slogan dalam bahasa Tetum *Ukun Rasik An*, yang berarti kebebasan dan pemerintahan sendiri. Ketika pertama kali digunakan pada tahun 1974-75, istilah *Maubere* dipandang oleh orang Timor yang tergabung dengan UDT sebagai memecah-belah ras, karena membedakan orang Timor “berdarah murni” dengan ras campuran “*mestizo*.” Komisi mendengarkan kesaksian dari mantan anggota senior partai UDT, yang menggambarkan istilah *Maubere* sebagai sumber perpecahan penting di masyarakat.⁹³ José Ramos-Horta menjelaskan lahirnya istilah tersebut sebagai slogan politik pada audiensi publik nasional Komisi mengenai Konflik Internal tahun 1974-76:

Saya menulis sebuah artikel di jurnal di Timor [Seara], bukan pada tahun 1975 atau 1974, tetapi tahun 1973...Saat kita membentuk ASDT, dalam sebuah pertemuan ASDT/Fretilin saya jelaskan bahwa semua partai politik perlu mempunyai citra. Jika kita ingin meyakinkan pemilih kita tidak bisa melakukannya dengan filsafat yang rumit...Jadi saya bilang sebaiknya kita mengidentifikasi Fretilin dengan Maubere sebagai slogan, atau simbol identitas Fretilin. Jelas bahwa 90 persen penduduk Timor tidak memakai alas kaki, tidak punya kartu penduduk, tetapi mereka menganggap diri mereka sebagai Maubere...Kita perlu [memahami] bahwa tidak ada filsafat lain dalam istilah ini, Ini adalah identitas partai.

⁹⁴

90. Di tahun-tahun belakangan, selama pendudukan Indonesia, simbol-simbol ini tumbuh menjadi penegasan yang kuat akan aspirasi Timor-Leste untuk merdeka, dan pada saat yang sama terus memecah Fretilin dan UDT.

Fretilin dan ancaman komunisme

91. Terdapat banyak perdebatan mengenai seberapa jauh Fretilin dipengaruhi oleh komunisme pada tahun 1974-75, dan apakah hal ini menjadi alasan sebenarnya bagi aksi bersenjata UDT dan intervensi Indonesia. Komisi mendengar banyak kesaksian mengenai isu ini pada audiensi publik nasional mengenai Konflik Internal tahun 1974-76. Jelas bahwa beberapa anggota Fretilin adalah komunis, akan tetapi akan tidak benar apabila menyimpulkan berdasarkan hal ini bahwa partai tersebut adalah partai komunis pada tahun 1974-75. Rangkuman yang lebih tepat adalah bahwa arus utama kepemimpinan Fretilin adalah tengah-kiri, walaupun partai ini mencakup serangkaian opini yang bervariasi dari ekstrim-kiri sampai unsur-unsur yang lebih konservatif.

92. Berikut ini adalah pandangan João Carrascalão, pemimpin UDT yang merupakan salah satu pendiri Gerakan Anti-Komunis setelah 11 Agustus:

Dalam tubuh Fretilin beberapa pemimpin adalah komunis, tetapi Fretilin bukan partai komunis. Dalam tubuh UDT beberapa pemimpin adalah sosialis, tetapi UDT bukan partai sosialis, UDT adalah partai demokrat sosial...⁹⁵

93. José Ramos-Horta, satu-satunya tokoh politik yang hadir pada pembentukan UDT dan ASDT, juga mengomentari tuduhan bahwa Fretilin adalah partai komunis:

Kalau orang bilang bahwa Fretilin itu komunis pada tahun 1974-1975 ini tidak benar. Fretilin adalah front politik. Alarico Fernandes itu orang komunis. [Sebastião] Montalvao orang komunis dan beberapa orang lain yang saya lupa namanya. Nicolau Lobato bukan seorang komunis. Anda bisa menyebut Nicolau Lobato sebagai seorang Marxis Kristen sekuler, seperti teologi pastor Amerika Latin. Para pastor di Brazil, Uskup Brazil, Nicaragua, El Salvador, semua Marxis dan beragama Katolik tanpa timbul pertentangan ... Saya katakan bahwa Nicolau Lobato adalah seorang yang percaya pada Marxisme tetapi juga 100% Katolik. Xavier Amaral, Anda mungkin menyebut dia sebagai seorang komunis atau sosial demokrat, tetapi saya tidak setuju—dia sedikit konservatif.⁹⁶

94. Selama periode sebelum konflik bersenjata internal, program dan retorika Fretilin mengandung unsur-unsur yang mencerminkan komunisme. Bahasanya, dimulai dari namanya, adalah revolusioner sosial. Ideologi Maubere-nya Fretilin ditujukan pada sebuah revolusi sosial rakyat, dengan tujuan membangun identitas nasional dari akar rumput. Kebijakan-kebijakannya tidak diragukan lagi adalah kiri, yang fokusnya adalah perombakan radikal terhadap pendidikan, kesehatan dan produksi pertanian. Manifestonya mengklaim bahwa ia adalah “satu-satunya wakil” rakyat Timor-Leste. Retorika seperti ini didengungkan oleh banyak gerakan revolusioner-sosial Marxis yang lain, khususnya dalam gerakan-gerakan pembebasan di koloni-koloni Afrika.⁹⁷

95. Anggota MFA Portugal juga tidak luput dari debat politik masa itu, dan partai UDT menganggap anggota-anggota Portugis dari MFA menyebarluaskan ide-ide komunis di Timor.

Mário Carrascalão bersaksi kepada Komisi bahwa berbagai unsur sayap kiri dan kanan di pemerintahan Portugis sudah lama bermaksud untuk menyebarkan pandangannya di Timor-Leste:

Ketika MFA [Movimento das Forças Armadas: Gerakan Angkatan Bersenjata] datang ke Timor mereka memiliki orang-orang yang beraliran kiri yang ingin menciptakan kondisi-kondisi di Timor sehingga Timor dapat menjadi; saya tidak yakin bagaimana mengatakannya, komunis atau Marxis-Leninis atau Maois...[Sementara itu] polisi rahasia Portugis [DGS] mengatakan kepada UDT bahwa Fretilin telah mengatur pelatihan militer di dua tempat. Siapakah para pelatihnya? Pelatih-pelatih ini berasal dari Vietnam [Komunis] [kata mereka].⁹⁸

96. Beberapa pemimpin UDT sangat peka terhadap saran bahwa Fretilin itu komunis. Komisi mendengar kesaksian bahwa Presiden UDT, Francisco Lopes da Cruz, dan Wakil Presidennya, César da Costa Mouzinho, menjadi semakin ekstrim dalam anti-komunismenya selama tahun 1975 setelah berkunjung ke Australia dan Jakarta.⁹⁹

97. Seringkali sulit untuk mengatakan apakah propaganda anti-komunis Indonesia merupakan ungkapan yang tulus, meskipun salah, dari semangat membara anti-komunisme rejim tersebut atau sebuah upaya untuk memanipulasikan persoalan tersebut untuk membenarkan intervensi. Setelah koalisi dibubarkan pada akhir Mei, siaran radio Indonesia dari Kupang mulai mencap baik UDT maupun Fretilin sebagai komunis, dengan mengatakan bahwa pemimpin UDT João Carrascalão adalah komunis yang pro-Soviet dan Fretilin pro-Cina. Namun selama masa ini, pejabat Indonesia juga bertemu dengan pemimpin UDT dan mengatakan kepada mereka bahwa Fretilin merupakan ancaman komunis.¹⁰⁰ Hal ini menunjukkan kepada sebagian pemimpin politik Timor bahwa isu komunisme ini digunakan oleh Indonesia sebagai alasan untuk menekan UDT dan belakangan untuk melakukan intervensi langsung ke Timor Portugis.¹⁰¹ Dalam konteks Perang Dingin, seperti yang dikatakan oleh José Ramos-Horta kepada Komisi, komunisme ialah tuduhan yang mudah dibuat tanpa harus ada dasarnya.¹⁰²

Tidak adanya toleransi politik

98. Walaupun di tingkat nasional terdapat banyak partai politik, dalam banyak kasus pola-pola politik yang muncul di tingkat lokal tidak pluralistik. Militan masing-masing partai secara agresif mempertahankan wilayah politiknya. Tomás Gonçalves dari Apodeti menceritakan tentang pengalamannya ketika mencoba berkampanye di komunitas-komunitas distrik:

'UDT sudah masuk Ermera, orang-orang mau memukul saya...jadi saya pergi ke Letefoho dan di sana juga sudah penuh dengan orang-orang UDT. Sepupu saya menjadi camat di sana, dan dia bilang kepada saya, "Kamu sebaiknya kembali, tidak perlu kampanye di sini."¹⁰³

99. Komisi mendengar banyak kesaksian dan pernyataan tentang tidak adanya toleransi politik di tingkat komunitas pada tahun 1974-75. Hal ini terwujud dalam banyak cara, dan tidak jarang berubah menjadi kekerasan. Suatu kebiasaan umum yang sering disebut adalah pemberian kartu identitas oleh partai politik kepada anggotanya, atau memaksa orang membawa kartu tersebut walaupun mereka tidak memutuskan untuk menjadi anggota partai. Para militan partai akan meminta orang-orang untuk menunjukkan kartu mereka, dan bila mereka menunjukkan kartu partai yang "salah", mereka bisa ditahan dan dipukuli.¹⁰⁴ Komisi juga mendengarkan cerita mengenai para guru yang memaksa murid-muridnya untuk menyatakan kesetiaan kepada suatu partai tertentu, dengan ancaman akan dikeluarkan dari sekolah.¹⁰⁵

100. Xanana Gusmão menceritakan kepada Komisi bagaimana intoleransi ini mendorong terjadinya kekerasan:

Tiap partai menyatakan pandangan mereka sebagai kepentingan nasional, tetapi tidak mempertimbangkan bahwa kita semua adalah orang Timor, juga tidak mempertimbangkan apa yang sedang diperjuangkan oleh seluruh bangsa. Dan karena hal ini, kami melihat kurangnya kemauan para pemimpin partai untuk mengurangi tingkat kekerasan, untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi. Kerap kali kami melihat bahwa partai-partai tersebut cukup senang ketika para pendukungnya datang dan berkata 'Kami pukul orang ini' atau 'Kami bunuh orang itu.' Hal seperti ini dianggap sebagai kemenangan kecil...Apabila suatu partai memiliki jumlah anggota terbanyak di suatu subdistrik, partai tersebut tidak memperbolehkan partai-partai lain berkampanye di daerah itu. Dan kemudian ketika partai-partai lain akan pergi ke daerah itu, penduduk akan menyerang, menutup jalan mereka, memboikot, saling melempar batu dan saling memukul.¹⁰⁶

“Misi mustahil” Lemos Pires

101. Tahap baru dalam proses dekolonisasi Timor Portugis dimulai dengan penunjukan Kolonel Mário Lemos Pires sebagai Gubernur pada bulan November 1974. Ia menjadi Gubernur terakhir Timor Portugis. Lemos Pires menulis bahwa sebelum mengambil jabatan ini, ia bertanya kepada Presiden Portugis, Jenderal Francisco da Costa Gomes, apabila pemerintah bermaksud untuk menyerahkan Timor Portugis kepada Indonesia. Ia mengatakan kepada presiden bahwa apabila rakyat Timor-Leste tidak diperbolehkan untuk menentukan nasibnya sendiri, dan bila memang itu kebijakannya, ia tidak akan menerima posisi Gubernur tersebut.¹⁰⁷ Presiden Portugal dilaporkan menjawab bahwa tidak ada kebijakan seperti itu, walaupun Indonesia merupakan bagian dari realita dimana mereka beroperasi.¹⁰⁸ Dalam sebuah wawancara dengan Komisi, Lemos Pires mengingat kekhawatirannya ketika ia meninggalkan Portugal untuk mengambil posnya sebagai Gubernur:

Saya pergi ke Timor-Leste dengan dugaan bahwa dukungan yang akan saya terima dari Pemerintah Portugal akan sangat terbatas, dan lebih buruk dari itu, bahwa fokus politik Portugis atas proses Timor-Leste akan minimal. Ternyata saya benar.¹⁰⁹

102. Tanpa suatu tugas yang jelas dari atasannya di Lisbon, pada saat kedatangannya di Timor Portugis Gubernur Lemos Pires berharap untuk menjalankan suatu program untuk mengatasi apa yang ia pandang sebagai masalah mendesak yang tengah dihadapi oleh koloni ini. Masalah-masalah tersebut ia definisikan sebagai: kondisi militer yang kehilangan moral; perlunya suatu kebijakan dekolonisasi; perlunya menghidupkan kembali pemerintahan sipil yang lumpuh; dan perlunya mempersiapkan orang Timor-Leste untuk menjalankan pemerintahan negaranya sendiri. Ia mampu menangani beberapa masalah ini, seperti reformasi pendidikan, dengan cepat. Namun mengatasi masalah yang paling mendesak, seperti hilangnya moral militer dan menemukan suatu rumusan dekolonisasi, ternyata jauh lebih sulit. Salah satu persoalannya adalah bahwa ia mendapat sedikit dukungan dari Lisbon. Permintaannya untuk mendapatkan arahan yang jelas diabaikan. Pandangannya sendiri akan dekolonisasi tidak sejalan dengan pandangan tokoh-tokoh kunci seperti Menteri Koordinator Antar-wilayah Antonio de Almeida Santos. Sebelum kedatangannya di Timor, komunikasi dengan Lisbon dipersulit dengan adanya persaingan antara perwakilan MFA di koloni ini, Mayor Arnão Metello, dan Gubernur untuk

mendapatkan perhatian pemerintah. Mário Lemos Pires berupaya mencari jalur komunikasi yang lebih jelas, akan tetapi tim yang ia susun di Kantor Gubernur hanya mencerminkan perpecahan yang juga terjadi di Lisbon. Ia tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan semangat pasukan Portugis yang sudah pupus, yang sebagian besar hanya ingin kembali ke Portugal sesegera mungkin.¹¹⁰

103. Kondisi setempat juga tidak mendukung. Upaya awal gubernur dalam menciptakan mekanisme untuk berkonsultasi dengan partai-partai dalam dekolonisasi selalu menemui hambatan. Ketika mekanisme ini terwujud, yakni dalam bentuk Komisi Dekolonisasi Timor (*Comissão de Descolonização de Timor*, CDT), pada akhir April 1975, perbedaan politik antara partai-partai sudah begitu mendalam, sehingga hal ini mungkin sudah sangat terlambat. Hal ini, dan juga inisiatif lain seperti rencana implementasi reformasi pendidikan yang dibuat untuk melayani secara lebih baik komunitas penduduk Timor terinterupsi oleh perang sipil Agustus 1975.¹¹¹ sejak awal UDT dan Fretilin menolak untuk duduk bersama dengan Apodeti; Apodeti menolak untuk menerima kemerdekaan sebagai opsi dan bersikukuh untuk periode transisi dekolonisasi yang pendek. Kegagalan koalisi Fretilin/UDT pada akhir bulan Mei benar-benar merusak segala kesamaan yang dimiliki kedua partai. Tampak jelas mengapa Lemos Pires berada di Lospalos untuk pengumuman hasil pemilihan lokal, salah satu prakarsa reformasinya, pada tanggal 10 Agustus 1975, sehari sebelum UDT melancarkan Aksi Bersenjatanya.

104. Di kalangan serdadu Timor yang merupakan bagian terbesar tentara tumbuh anggapan bahwa Portugal sedang dalam proses berpaling dari Timor.¹¹² Banyak anggota tentara Timor mulai terlibat dalam politik pada waktu yang mereka anggap sebagai momen yang penting dalam sejarah negeri mereka. Mário Lemos Pires merenung di hadapan Komisi:

*Mereka semua ingin berpihak pada suatu garis politik, namun yang lebih buruk ialah bahwa partai-partai politik, terutama UDT dan Fretilin, masing-masing berusaha meyakinkan mereka untuk membantu dan mendukung partai mereka sendiri. Dengan begitu, yang saya lihat adalah bahwa Tentara tidak bisa memenuhi misinya.*¹¹³

105. Lisbon menolak permintaan Lemos Pires untuk menambah pasukan Portugis, dan hanya memberikan dua kompi pasukan terjun payung elit. Sebagai akibatnya kekuasaan Portugis berkurang pada saat ketegangan semakin memuncak di koloni dan ketika tekanan luar dari Indonesia mulai. Lemos Pires menyadari bahwa kebijakan Timorisasinya dapat dengan mudah menimbulkan konflik yang dia takkan dapat mengendalikan. Mário Carrascalão mengenang peringatan dari Lemos Pires di hadapan Komisi:

*Kalian harus berhati-hati dengan politik kalian. Para penerjun payung yang ada di Timor sekarang bukan untuk melindungi kalian...Mereka di sini untuk mengurus orang asing di Timor, orang Portugis.*¹¹⁴

Koalisi antara UDT dan Fretilin

106. Pada tanggal 21 Januari 1975, didorong dan didukung oleh Gubernur, dan setelah berulang kali mencoba, Fretilin dan UDT membentuk suatu koalisi. Dua partai tersebut bersatu berlandaskan komitmen bersama untuk kemerdekaan sepenuhnya, penolakan Apodeti dan integrasi dengan Indonesia, dan pendirian pemerintahan transisional di mana kedua partai tersebut berperan di dalamnya. Sementara Fretilin dan UDT memiliki banyak kesamaan, hubungan mereka tidak harmonis, dan khususnya UDT semakin merasa terancam oleh massa yang mengikuti Fretilin dan klaim berkelanjutan Fretilin yang menyatakan diri sebagai wakil tunggal rakyat Timor-Leste.¹¹⁵ Kedua partai terus saling menyerang secara verbal, dan

persetujuan ini meluas ke distrik-distrik. Koalisi ini tidak memiliki mekanisme politik untuk mengatasi berbagai perbedaan dan menyatukan partai-partai tersebut.¹¹⁶

107. Sementara sejumlah elemen Fretilin terus menganggap UDT sebagai kelompok reaksioner ultra konservatif, sejumlah anggota UDT menjadi semakin khawatir dengan apa yang mereka lihat sebagai pengaruh radikal dalam Fretilin. Mulai akhir tahun 1974 Indonesia meningkatkan propaganda anti komunisnya. Siaran propaganda mereka dari Kupang meliputi uraian tentang kejadian sehari-hari, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki jaringan intelijen yang sangat efektif di wilayah Timor Portugis.¹¹⁷ Komisi mendengar dari mantan Gubernur, Lemos Pires, bahwa pemerintah Indonesia khawatir dengan persatuan rakyat Timor yang diperlihatkan oleh koalisi tersebut, dan mengambil tindakan untuk melemahkannya.¹¹⁸

108. Wakil militer Indonesia yang terlibat dalam Operasi Komodo mengunjungi Timor Portugis sepanjang bulan-bulan tersebut. Pada awal bulan April 1975 sebuah delegasi yang terdiri dari Kolonel Sugianto, Kolonel Soeharto dan beberapa yang lain bertemu dengan Gubernur Lemos Pires dan para pemimpin tiga partai politik utama tersebut. Pada bulan April 1975 Ali Moertopo mengundang perwakilan Fretilin dan UDT secara bersamaan tetapi terpisah untuk berkunjung ke Jakarta.¹¹⁹ Menurut José Ramos-Horta, yang, yang bersama dengan Alarico Fernandes, mewakili Fretilin dalam pertemuan Jakarta pada bulan April tersebut:

Kunjungan ini...dipandang berbeda oleh kami dan oleh Indonesia. Kami melihat kunjungan ini dapat menjernihkan keadaan, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk semakin memecah belah kita.¹²⁰

109. Sekembalinya para wakilnya dari kunjungan ke Jakarta, UDT mengadakan pertemuan Komite Sentral dan memilih mundur dari koalisi. Komisi mendengarkan kesaksian bahwa UDT membuat keputusan ini setelah pertemuan yang panjang dan sulit, yang memperlihatkan perpecahan besar dalam tubuh partai mengenai masalah tersebut. Domingos Oliveira mengatakan kepada Komisi:¹²¹

*Mayoritas mutlak memutuskan untuk mundur dari koalisi, mengakhiri koalisi. Mereka berkata 'koalisi ini dimaksudkan untuk menolong kita, untuk menolong menciptakan perdamaian, mempersatukan kita saat kita berjuang menuju kemerdekaan, tetapi kita justru saling menyerang. Maka lebih baik koalisi diakhiri. Namun ini adalah suatu kesalahan...Karena ketika kami mengakhiri koalisi, situasi semakin buruk.'*¹²²

110. Komisi mendengar bahwa setelah koalisi pecah, ketegangan dan ancaman kekerasan meningkat.¹²³

111. Satu akibat langsung perpecahan koalisi ini adalah bahwa jalan menjadi semakin terbuka bagi Indonesia untuk memanfaatkan ketakutan para pemimpin UDT tentang apa yang dianggap sebagai ancaman komunis. Satu akibat politik jangka-panjang adalah bahwa kedua partai politik Timor utama ini menjadi berseteru selama bertahun-tahun

3.6 Keterlibatan Indonesia yang semakin besar di Timor Portugis: destabilisasi dan diplomasi

Tinjauan

112. Sementara pemerintah Portugis di Timor-Leste mulai menerapkan program dekolonisasi, dan partai-partai politik Timor-Leste berebut menggalang dukungan, Indonesia aktif pada dua front untuk mendapatkan hasil yang akan memuaskan kepentingannya di wilayah itu.

113. Tak lama setelah Revolusi Bunga di Portugal, Indonesia semakin meningkatkan operasi pengumpulan intelijen di dalam Timor Portugis. Indonesia juga berupaya untuk mempengaruhi kalangan politisi Timor-Leste untuk mendukung opsi integrasi. Dari awal 1975 Indonesia mulai menyusun rencana solusi militer. Kebijakan yang diambil Indonesia terhadap Timor Portugis yang tampak semakin militeristik dapat ditelusuri pada keyakinannya bahwa tujuan integrasinya tidak akan mungkin tercapai tanpa kekerasan. Setelah awalnya meminta jaminan kepada Portugal bahwa Timor-Leste tidak akan menjadi ancaman bagi keamanannya, Indonesia segera berkesimpulan bahwa kepentingan keamanannya hanya akan tercapai apabila Timor-Leste tidak menjadi negara merdeka. Perubahan ini didasari oleh persepsi mengenai kepentingan keamanan Indonesia yang sangat terkondisi oleh pandangan anti-komunisme Perang Dingin pada masa itu. Indonesia mampu mendapatkan pendukung untuk pandangannya mengenai Timor-Leste di antara para sekutu Barat dan Asiana, dan sedikit banyak di Portugal juga.

Operasi Komodo dan Peningkatan operasi rahasia militer

114. Pada awal 1975 campur tangan Indonesia di Timor Portugis telah mencapai taraf yang tidak lagi dapat disebut rahasia. Agen Bakin, Luis Taolin, adalah pengunjung reguler ke Dili dari basisnya di Timor Barat. Pasukan khusus Indonesia diketahui melatih simpatisan Apodeti di Timor Barat. Kampanye disinformasi Operasi Komodo semakin ditingkatkan, melalui berbagai siaran radio yang gencar ke Timor Portugis dari Kupang, dan dengan menyebarkan berbagai cerita di media Indonesia dan luar negeri. Siaran radio mengklaim bahwa Portugal akan segera menarik diri dari koloni tersebut, menyebarkan cerita-cerita tanpa dasar mengenai infiltrasi Vietnam dan Cina ke wilayah tersebut dan berdalih bahwa integrasi adalah satu-satunya pilihan. Mereka semakin memanas-manasi rasa saling curiga antar berbagai pihak, dan menimbulkan keraguan di antara orang Timor yang tidak terikat dengan partai politik tertentu.¹²⁴

115. Setelah UDT dan Fretilin membentuk koalisi mereka pada akhir Januari 1975 pihak Indonesia semakin meningkatkan aktifitas militer. Pada bulan Februari diadakan latihan lintas angkatan secara besar-besaran di Sumatera selatan, yang secara efektif merupakan gladiresik bagi invasi skala penuh,¹²⁵ serta peningkatan kehadiran pasukan di sepanjang perbatasan dengan Timor Portugis.¹²⁶

116. Antara bulan Desember 1974 dan Februari 1975 sebuah tim Kopassandha beranggotakan delapan orang, yang dipimpin oleh Kolonel Dading Kalbuadi, tiba di Atambua. Tim ini mempersiapkan medan untuk apa yang nantinya menjadi *Operasi Flamboyan*.^{*} Sebagai operasi taktis intelijen, *Operasi Flamboyan* merupakan buah pikiran MayorJenderal Benny Moerdani atas perintah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Mereka membentuk jaringan agen lintas batas Komodo,¹²⁷ dan mengambil alih pelatihan 216 orang Timor yang direkrut, yang dikenal dengan nama Partisan, di Atambua, yang dipimpin Tomás Gonçalves dari Apodeti. Komisi mendengar kesaksian bahwa pelatihan Partisan Apodeti semakin ditingkatkan setelah kedatangan tim Kopassandha pimpinan Kolonel Kalbuadi. Menurut Tomás Gonçalves, orang

^{*} Menurut Korps Marinir TNI AL, 1970-2000, hal. 285, Operasi Flamboyan dilancarkan pada tanggal 5 Oktober sampai 5 Desember 1975.

Indonesia juga tertarik untuk mengumpulkan intelijen militer dan intelijen lain mengenai Timor Portugis.¹²⁸

*Di sana, mereka [orang-orang Indonesia] tidak berbicara dengan kami. Mereka menyebut kita anggota 'partisan', dan anggota partisan tidak berbicara dengan mereka...Ketika mereka memanggil saya mereka bertanya, 'Kira-kira berapa banyak senjata dimiliki Timor? Berapa kompi? Apakah banyak orang yang bisa menggunakan senjata api? Apakah mereka tahu bagaimana menjadi pejuang gerilya?'*¹²⁹

117. Pada bulan Januari 1975, pemerintah Portugis mengirim delegasi ke Atambua untuk mencoba meyakinkan para Partisan Apodeti untuk kembali ke Timor Portugis, namun mereka tidak berhasil.¹³⁰ Sementara itu Kapten Yunus Yosfiah mulai merekrut dan melatih lebih banyak lagi pasukan Kopassandha di Jawa Barat. Pada akhir bulan April sebuah tim Kopassandha berangkatkan 80 orang tiba di Atambua.¹³¹

Diplomasi Indonesia

118. Keputusan Indonesia untuk meningkatkan aktifitas militernya dengan pelatihan, latihan perang dan pengumpulan intelijen dilakukan bersamaan dengan kontak dengan negara-negara yang mempunyai kepentingan atas masa depan Timor Portugis, terutama Portugal dan Australia serta Amerika Serikat.

Pertemuan di Lisbon antara Portugal dan Indonesia, 14-15 Oktober 1974

119. Sebelum pengunduran diri Presiden Spínola pada bulan September 1974, Indonesia telah meminta diadakan pertemuan dengan pemerintah Portugal untuk membahas masalah Timor. Pada pertengahan bulan Oktober 1974 Presiden Soeharto mengirim sebuah delegasi Indonesia yang dipimpin oleh orang kepercayaannya, Jenderal Ali Moertopo, ke Lisbon untuk membahas Timor Portugis. Mereka bertemu Presiden Costa Gomes, Perdana Menteri Vasco Gonçalves, Menteri Luar Negeri Mário Soares, dan pejabat senior di kementerian luar negeri, sekretaris negara Jorgé Campinos.

120. Kelahiran Fretilin dan jatuhnya Presiden Spínola yang konservatif pada bulan September 1974 telah memicu kekhawatiran Indonesia dan membuat mereka yakin akan perlunya mendapatkan pernyataan pemerintah baru Portugal mengenai masa depan wilayah ini. Menurut laporan delegasi Indonesia, terdapat kesepakatan di antara para pemimpin Portugis bahwa integrasi dengan Indonesia akan menjadi hasil terbaik. Menurut versi laporan ini yang diterbitkan, Presiden Costa Gomes mengatakan kepada delegasi bahwa satu-satunya opsi yang realistis adalah hubungan dengan Portugal yang terus berlanjut atau integrasi dengan Indonesia. Ia konon pernah mengatakan secara pribadi bahwa Portugal tidak mempertahankan hubungan dengan koloninya tersebut. Sekali lagi menurut pihak Indonesia, Sekretaris Negara dan Perdana Menteri lebih tidak ragu-ragu menyatakan dukungan mereka bagi integrasi, walaupun mereka juga menyebut perlunya menyerahkan hal ini kepada kehendak rakyat Timor-Leste.¹³²

121. Delegasi Indonesia memberi tahu Presiden Soeharto bahwa para pemimpin Portugis berpandangan bahwa integrasi adalah opsi terbaik yang ada. Mário Lemos Pires menulis dalam bukunya:

Bisa saja, delegasi Indonesia menyadari bahwa posisinya lebih baik daripada yang mereka bayangkan sebelumnya - bahwa Portugal tidak menentang integrasi dengan Indonesia dan Portugal juga tidak memandang kemerdekaan sebagai suatu opsi. Tetapi Jenderal Ali Moertopo lupa bahwa, meskipun belum ada kebijakan yang ditetapkan, pemerintah Portugis tetap mendukung prinsip penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Dia (Moertopo) terlalu cepat menyimpulkan, entah karena dia sangat senang atau karena nada percakapan pada waktu itu memungkinkannya menarik kesimpulan bahwa Portugal menyukai gagasan integrasi dengan Indonesia dan akan memfasilitasi tindakan Indonesia ke arah itu.¹³³

122. Analisis mengenai pertemuan ini bisa memberi pemerintah Portugal terlalu banyak pujian. Laporan komisi penyelidikan militer Portugis mengenai dekolonisasi Timor mengemukakan pendapat yang lebih keras, yang menyimpulkan bahwa “pertemuan di Lisbon gagal melewati ujian yang diberikan Indonesia mengenai ketetapan hati Portugal untuk menentang integrasi Timor dengan Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap Portugal ini telah sedikit banyak mendorong Indonesia dalam niatnya”.¹³⁴

123. Kesimpulan ini sebagian dikonfirmasi oleh sikap pemerintah Portugal setelah pertemuan tersebut. Sekretaris negara untuk administrasi mengirimkan sebuah telegram kepada Menteri Koordinator Antar-Wilayah, Antonio de Almeida Santos, yang ketika itu sedang berkunjung ke Timor. Telegram tersebut meminta bahwa mengingat pertemuan dengan Jenderal Moertopo, selama kunjungannya, menteri ini agar tidak memberi angin pada opsi kemerdekaan dalam pernyataan-pernyataan publiknya. Menteri tersebut menuruti permintaan ini. Dalam pidatonya pada sebuah acara penerimaan di *Palácio das Repartições* (kini *Palácio do Governo*), Almeida Santos, walau menekankan bahwa rakyat Timor harus bebas menentukan nasibnya sendiri, ia berbicara dengan lebih bersemangat mengenai kemungkinan mempertahankan hubungan dengan Portugal atau integrasi dengan Indonesia ketimbang kemerdekaan, yang ia katakan tidak akan realistis mengingat Timor masih jauh dari “kemerdekaan ekonomi”.¹³⁵

Pertemuan di London antara Portugal dan Indonesia, 9 Maret 1975

124. Terusik oleh semakin meningkatnya aktifitas rahasia Indonesia, Portugal meminta pertemuan kedua dengan Indonesia.¹³⁶ Pertemuan tersebut diadakan di London pada tanggal 9 Maret 1975 dengan Jenderal Ali Moertopo kembali memimpin delegasi Indonesia. Pihak Indonesia mengambil garis tegas, dan menolak rencana Portugis bagi suatu pemerintahan transisi dan segala langkah untuk membawa permasalahan ini ke kancah internasional, dan mengklaim bahwa integrasi adalah satu-satunya solusi dan mengajukan agar Indonesia memiliki peran penasihat dalam pemerintahan koloni ini. Portugal menegaskan kembali prinsip bahwa rakyat Timor-Leste perlu didengar mengenai status masa depan koloni tersebut. Akan tetapi, sekali lagi, tampaknya lagi-lagi Portugal memberi angin kepada Indonesia, ketika, contohnya, Portugal mengatakan bahwa Indonesia berhak untuk memberi dukungan aktif kepada Apodeti. Dengan demikian, Portugal memberi Indonesia status yang melampaui status “pengamat berkepentingan”.

125. Seperti dalam pertemuan di Lisbon lima bulan sebelumnya, Indonesia menganggap bahwa mengalahkannya Portugal berarti bahwa Portugal memiliki pandangan yang sama bahwa integrasi dengan Indonesia adalah hasil terbaik. Presiden Soeharto mengungkapkan

¹³³ Delegasi Portugal terdiri dari Menteri Koordinator Antar-Wilayah, Antonio de Almeida Santos, Menteri tanpa jabatan Vitor Alves, Sekretaris Negara urusan Luar Negeri, Jorge Campinos dan Kepala Kantor Urusan Politik di pemerintahan Timor, Mayor Francisco Mota. Delegasi Indonesia terdiri dari Ali Moertopo, Duta Besar Indonesia di Inggris dan Perancis, dan Kapten Suharto dari Badan Intelijen BAKIN.

pandangannya mengenai apa yang terjadi dalam pertemuan London kepada Gough Whitlam, sebulan kemudian dalam sebuah pertemuan di Townsville. Dia memberikan penafsiran yang sangat berbeda mengenai posisi pihak Portugis dibanding catatan resmi pihak Portugis sendiri, dan rangkuman versi Soeharto mengenai pertemuan tersebut, seperti yang diungkapkan kepada Whitlam berbunyi sebagai berikut:

Dalam pertemuan di London Pemerintah Portugis berkata bahwa integrasi dengan Indonesia adalah hasil terbaik, asalkan, tentu saja, hal ini adalah yang diinginkan oleh penduduk wilayah tersebut. Portugis juga setuju bahwa tidak perlu ada "campur tangan internasional" dalam kebijakan Portugis tentang dekolonisasi di Timor. Terserah Indonesia untuk mencapai integrasi dengan wilayah ini. Untuk tujuan di atas Indonesia memperoleh persetujuan pemerintah Portugis untuk membantu dan membangun...Apodeti, dan untuk melakukan pendekatan kepada, dan untuk mempengaruhi garis kebijakan partai UDT dan Fretilin.¹³⁷

Pertemuan antara Soeharto dan Whitlam, di Wonosobo, 6 September 1974, dan di Townsville, 4 April 1975

126. Soeharto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam dua kali selama periode 1974-75. Pertama di Wonosobo, dekat Yogyakarta pada tanggal 6 September 1974 dan di Townsville, Queensland pada tanggal 4 April 1975. Timor Portugis dibahas dalam kedua pertemuan tersebut, dan dalam kedua pertemuan Whitlam diyakini telah memberi Soeharto lampu hijau untuk mengambil alih wilayah tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh catatan notulensi Australia yang kini merupakan arsip umum (lihat Bab 7.1.: Hak Menentukan Nasib Sendiri). Dalam kedua kesempatan tersebut Whitlam mengatakan kepada Soeharto bahwa pemerintahnya menganggap Timor seharusnya menjadi bagian dari Indonesia untuk alasan-alasan yang hampir identik dengan apa yang dinyatakan Soeharto: bahwa Timor tidak bisa bertahan sebagai negara merdeka dan oleh karenanya akan selalu menjadi "pusat perhatian" negara-negara yang lebih kuat.¹³⁸ Pada pertemuan di Wonosobo Soeharto secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan strategis yang sama di Timor Portugis - Timor-Leste yang merdeka akan menjadi mangsa bagi Cina atau Uni Sovyet sehingga akan menjadi "duri dalam mata Australia dan duri di punggung Indonesia".¹³⁹

127. Pada saat yang sama mereka sepakat bahwa integrasi harus terjadi melalui proses yang mengakui hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dengan tambahan dari Whitlam bahwa hal ini harus dilakukan "dengan cara yang tidak akan mengusik rakyat Australia" seperti yang dikatakannya di Townsville.¹⁴⁰ Keduanya tidak menjelaskan tujuan mana yang akan lebih dipentingkan apabila tidak mungkin mencocokkan kehendak orang Timor atas penentuan nasib sendiri dengan keinginan Indonesia untuk integrasi. Di Townsville pada bulan April 1975, walaupun masih menghindari menggunakan senjata, Soeharto tampaknya sudah hampir memutuskan persoalan ini dengan mengatakan bahwa tindakan penentuan nasib sendiri tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan kehendak sebenarnya rakyat Timor. Whitlam bersimpati, dan mengungkapkan pendapatnya bahwa orang biasa di Timor "tidak memahami politik" dan akan memerlukan waktu "untuk menyadari hubungan kekerabatan etnisnya dengan tetangga Indonesia mereka".¹⁴¹

128. Di samping segala keraguannya, terdapat bukti bahwa pandangan Whitlam yang diungkapkan di pertemuan Yogyakarta tampaknya telah sangat mempengaruhi keputusan Indonesia bahwa tidak ada alternatif selain penggabungan. Pada tanggal 14 Oktober 1974 Duta Besar Australia untuk Portugal melaporkan ke Canberra mengenai perbincangan antara Ali Moertopo selama kunjungannya ke Lisbon: 'Ali [Moertopo] mengatakan bahwa sebelum

kunjungan Whitlam ke Jakarta mereka belum membuat keputusan mengenai Timor. Namun dukungan Perdana Menteri mengenai gagasan penggabungan dengan Indonesia membantu mereka menjernihkan pemikiran mereka dan kini mereka sangat yakin tentang kebijaksanaan langkah ini".¹⁴²

129. Juga terdapat bukti bahwa dalam mengatasi dilema antara penggabungan dan penentuan nasib sendiri, Whitlam cenderung lebih memilih yang pertama. Ia mengungkapkan pandangannya mengenai hal ini secara jujur dalam sebuah pesan rahasia yang ia kirim kepada Menteri Luar Negerinya pada tanggal 24 September 1974, dua minggu setelah pertemuannya di Wonosobo: "Saya mendukung penggabungan akan tetapi penentuan nasib sendiri perlu dituruti."¹⁴³ Duta besar Whitlam di Jakarta, Richard Woolcott, juga yakin bahwa dalam pandangan Perdana Menteri, penggabungan adalah tujuan yang lebih utama. Dan tampaknya juga menjadi pandangan Woolcott bahwa hal ini harus menjadi tujuan utama Australia hanya karena ini merupakan tujuan utama Indonesia. Dalam pesan telegramnya kepada Menteri Luar Negerinya, Don Willessee, pada tanggal 17 April 1975, tak lama sesudah pertemuan Townsville, Woolcott mempertentangkan pendapat menteri mengenai hal ini dengan pendapat Perdana Menteri:

[Anda] cenderung menekankan proses tindakan penentuan nasib sendiri yang selayaknya bagi Timor Portugis...[J]elas dalam pertemuan Townsville bahwa Perdana Menteri terus menganggap bahwa logika situasinya adalah bahwa Timor harus menjadi bagian dari Indonesia dan kita akan 'menyambut' hasil seperti itu dibandingkan tindakan pilihan sendiri. Walaupun kita mendukung prinsip penentuan nasib sendiri, dan meskipun kita tidak bisa membenarkan penggunaan kekuatan, Perdana Menteri tetap tidak menginginkan munculnya Timor-Leste yang merdeka dan ia percaya bahwa penekanan secara terbuka mengenai penentuan nasib sendiri, pada tahap ini, akan semakin memperkuat tekanan bagi kemerdekaan."¹⁴⁴

130. Dalam otobiografinya Woolcott mengutip dari telegram lain untuk menjelaskan pemikiran di belakang posisi ini:

Indonesia akan bertindak untuk menyatukan Timor. Sementara Presiden Soeharto ingin agar penyatuan ini dicapai dengan cara yang sedapat mungkin terlihat baik, Indonesia tidak akan mundur dari tujuan kebijakan yang mendasar ini. Indonesia menganggap hasil ini sangat esensial bagi kepentingan nasional jangka panjangnya dan, memang, merupakan juga kepentingan kawasan tersebut seutuhnya. Indonesia secara konsisten meyakini keputusan ini sejak beberapa bulan sebelum saya menduduki pos ini Maret lalu.¹⁴⁵

Pertemuan Macau, 26-28 Juni 1975

131. Pada bulan April 1975 Gubernur Mário Lemos Pires membentuk Komisi untuk Dekolonisasi Timor (*Comissão de Descolonização de Timor*, CDT). Pertemuan bulan Mei dengan koalisi UDT-Fretilin, yang diboikot oleh Apodeti, membahas program dekolonisasi yang didasarkan atas hak untuk merdeka, sebuah pemerintah transisi dan majelis permusyawaratan lokal. Namun pada tanggal 27 Mei UDT memutuskan koalisinya dengan Fretilin, yang menyebabkan pembicaraan terhenti.¹⁴⁶ Sebagai tanggapannya, Portugal membuat rencana untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi mengenai dekolonisasi di Macau.

132. Pada tanggal 26-28 Juni Antonio de Almeida Santos, Menteri Koordinator Antar-Wilayah Portugal, bertemu dengan UDT, Apodeti dan pengamat diplomatik Indonesia di Macau. Fretilin berkeberatan atas partisipasi Apodeti dan Indonesia, dan memboikot pertemuan tersebut. Fretilin curiga bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari strategi Portugis untuk menyerahkan Timor-Leste kepada Indonesia:

Mereka menjajah kami selama 450 tahun dan mereka sudah bosan, maka mereka berikan kami kepada orang lain sambil berkata, 'Pergilah dan dirikan pemerintahan di sana sekarang.' Jadi berapa lama kami akan menjadi budak? Karena itulah saya tidak bersedia pergi ke sana. Konferensi di Macau adalah taktik Portugal dan Indonesia untuk mengintegrasikan Timor ke Indonesia.¹⁴⁷

133. Anggota senior Fretilin lebih memilih untuk menghadiri upacara kemerdekaan Mozambique.¹⁴⁸ Pertemuan puncak Macau hanya menguntungkan kepentingan Indonesia karena pertemuan ini mengakui bahwa baik Apodeti maupun Jakarta memiliki kepentingan dalam proses ini. Hasil pertemuan tersebut adalah Dekrit 7/75, yang memaparkan: struktur pemerintahan sementara dengan partisipasi semua partai; jadwal untuk pemilihan umum tahun 1976; dan berakhirnya kedaulatan Portugis pada tahun 1978. Pertemuan ini juga menyusun dasar legislatif yang menutup upaya-upaya Indonesia untuk mendapat jaminan agar integrasi menjadi hasil akhir dari proses dekolonisasi sebagai hasil kesepakatan langsung. Akan tetapi, sebagai langkah mundur dari pengakuan CDT pada bulan Mei, Dekrit 7/75 hanya mengakui hak atas penentuan nasib sendiri. Pertemuan tersebut merancang proses dekolonisasi yang akan membentuk pemerintahan transisi, yang terdiri dari orang Timor-Leste yang dipilih dan orang-orang Portugis yang diangkat, dan sebuah dewan penasihat pemerintahan. Lembaga-lembaga nasional ini akan didukung di tingkat distrik oleh dewan-dewan lokal.

134. Partai-partai politik memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap program dekolonisasi yang diputuskan di Macau. Fretilin mengambil posisi yang tidak jelas, tidak menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam pemerintahan transisi yang diusulkan, juga tidak sepenuhnya menolak, tapi hanya mengatakan bahwa mereka akan ambil bagian dalam pemilihan umum 1976 yang diusulkan.¹⁴⁹ UDT menerima hasilnya. Apodeti, seperti Indonesia, menolaknya dengan dasar bahwa kemerdekaan memang merupakan satu-satunya pilihan, dan jangka waktunya terlalu lama. Setelah pertemuan ini, ketegangan antar partai meningkat, UDT tersinggung atas boikot Fretilin, dan Fretilin marah karena Apodeti terlibat. Kedua partai besar Timor-Leste tersebut juga merasa bahwa Portugal tidak terus terang, dan mengetahui tentang pertemuan bilateral antara Portugal dan Indonesia. Mário Carrascalão mengenang dampak dari pertemuan-pertemuan bilateral ini:

Indonesia...mendampingi Apodeti ke Macau dan mengadakan pertemuan di Hong Kong dengan delegasi Pemerintah Portugis di sana. Apa yang mereka rencanakan? Sampai hari ini mereka tidak mengatakan apa yang mereka lakukan dalam rapat tersebut. Kami tidak tahu....Apa yang mereka lakukan? Ini bukan masalah Indonesia. Ini adalah masalah Timor, tetapi [Indonesia] mereka lah yang mengadakan pertemuan. Pertemuan rahasia dengan mereka [Portugis]. Kenapa? Orang-orang memanfaatkan hal ini, akibatnya rakyat menjadi terbagi-bagi."¹⁵⁰

Pertemuan antara Presiden Soeharto dan Presiden Gerald Ford, 5 Juli 1975

135. Pada tanggal 5 Juli, dalam sebuah pertemuan di Camp David dengan Presiden Gerald Ford selama kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Soeharto menggariskan kebijakan Indonesia mengenai Timor-Leste. Ia menutup kata-katanya dengan kalimat:

Jadi satu-satunya jalan adalah integrasi dengan Indonesia.

136. Soeharto berpendapat bahwa sebuah Timor Portugis merdeka tidak akan dapat berjalan, dan bahwa akan sulit bagi Portugal untuk bisa terus menjalankan negara ini karena keterpencilannya dari wilayah itu.¹⁵¹

137. Sebelumnya ia meyakinkan Presiden Ford bahwa Indonesia tidak akan menggunakan kekuatan terhadap wilayah negara lain. Seperti halnya dalam pertemuannya dengan Whitlam di Townsville, Soeharto membesar-besarkan argumen bahwa karena “tekanan kuat” oleh partai pro-kemerdekaan akan sangat sulit untuk memastikan kehendak sebenarnya rakyat Timor-Leste. Indonesia menghadapi masalah “bagaimana mengatur sebuah proses penentuan nasib sendiri agar mayoritas ingin bersatu dengan Indonesia”. Selama percakapan mereka, Presiden Ford tidak mengungkapkan pandangannya mengenai posisi Amerika Serikat dalam persoalan ini.

138. Bungkamnya Ford mungkin merupakan cerminan kebijakan Amerika Serikat terhadap Timor Portugis. Menurut Mantan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott:

Amerika Serikat, terlibat di Timur Tengah, terbebani oleh dampak Watergate dan kelelahan akibat kegagalannya di Vietnam, benar-benar tidak peduli akan masa depan Timor-Leste. Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta bahkan diminta pada tahun 1975 untuk mengurangi laporan kedutaan tersebut mengenai masalah itu.¹⁵²

3.7 Gerakan Bersenjata 11 Agustus dan konflik bersenjata internal

Tinjauan

139. Kurang dari dua minggu setelah kembali dari Jakarta, para pemimpin UDT melancarkan Gerakan Bersenjata 11 Agustus. Kadang disebut kudeta, “percobaan kudeta”, gerakan atau pemberontakan, aksi bersenjata ini dimulai di ibukota Dili dan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. UDT merebut beberapa instalasi penting, dan memberikan daftar permintaan-permintaan kepada pemerintahan Portugis. Mereka mengklaim bahwa gerakan tersebut ditujukan untuk menghilangkan elemen-elemen ekstrimis dari negeri tersebut untuk mencegah intervensi Indonesia.¹⁵³ Fretilin mundur ke basis pertahanan mereka di perbukitan Aileu. Karena dia tidak dapat menjamin keamanan, berbagai usaha Gubernur Portugal untuk mengajak kedua pihak ke meja perundingan tidak berhasil. Pada tanggal 20 Agustus Fretilin membalas, dengan dukungan sebagian besar anggota militer Portugis yang orang asli Timor. Konflik ini meluas ke sebagian besar wilayah negeri tersebut. Para pemimpin kedua partai besar tersebut mengatakan kepada Komisi bahwa mereka kehilangan kendali atas situasi tersebut. Konflik bersenjata ini relatif cepat selesai, dan pada awal September, sekitar 20.000 orang yang sebagian besar dari UDT, tetapi juga termasuk anggota dari partai-partai lain, telah terdesak menuju perbatasan dengan Timor Barat. Mereka menyeberang ke Timor Barat sebelum akhir bulan.

140. Pemerintahan Portugis berusaha membawa partai-partai tersebut ke meja perundingan. Gubernur menyimpulkan bahwa dia tidak dalam posisi untuk mengendalikan situasi tersebut dengan cara-cara militer.¹⁵⁴ Tidak berdaya untuk mempengaruhi kejadian-kejadian dan terkurung

di zona netral di Farol, Pemerintahan Portugis menarik diri ke pulau Ataúro pada malam hari tanggal 26 Agustus.

141. Pada bulan September 1975 Indonesia mengharuskan UDT dan sekutu-sekutunya yang telah lari melintasi perbatasan untuk menandatangani sebuah petisi pro-integrasi kepada Presiden Soeharto. Sebagai imbalannya Indonesia menawarkan dukungan materi dan logistik. Indonesia meningkatkan operasi-operasi militernya sendiri, dengan pertama melancarkan beberapa serangan lintas-perbatasan, dan kemudian, sejak awal Oktober, operasi-operasi militer berskala lebih besar yang berhasil menguasai sejumlah kota-kota strategis di dekat perbatasan.¹⁵⁵

UDT Melancarkan Gerakan Bersenjata 11 Agustus

142. Sejak pecahnya koalisi mereka pada bulan Mei, ketegangan antara UDT dan Fretilin terus meningkat, baik di Dili maupun di distrik-distrik. Pada awal Agustus UDT memutuskan untuk mengirim Sekjen mereka, Domingos Oliveira, dan anggota Komite Sentral yang bertanggungjawab atas hubungan luar negeri, João Carrascalão, ke Jakarta. Mereka berharap dapat bertemu dengan Presiden Soeharto. Namun mereka justru ditemui oleh Ali Moertopo. Domingos Oliveira mengatakan pada Komisi bahwa keputusan untuk mengirim delegasi ke Jakarta didorong oleh adanya kebutuhan “untuk menghancurkan semua dalih Indonesia untuk menginvasi Timor”. Misi kedua wakil UDT tersebut adalah untuk meyakinkan Moertopo bahwa Fretilin sesungguhnya adalah gerakan nasionalis dan bahwa UDT mampu “membersihkan pekarangan kami sendiri” dengan mengusir pejabat-pejabat Portugis dan para pemimpin Fretilin yang bersimpati kepada komunis. Menurut cerita João Carrascalão tentang pertemuan tersebut, Moertopo mengatakan jika mereka memang mampu membersihkan pekarangannya sendiri, Indonesia akan menghormati hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Dengan merenungkan kembali, João Carrascalão sekarang menganggap kedua wakil UDT tersebut sungguh naif karena mempercayai kata-kata Moertopo dan bahwa sesungguhnya “semuanya telah direncanakan untuk pengambilalihan Timor-Leste”, seperti yang dikatakan padanya dalam suatu percakapan pribadi di Kupang dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, El Tari, dalam perjalanannya kembali ke Dili.¹⁵⁶

143. Tentu saja ini juga merupakan pandangan dari diplomat yang mungkin paling banyak tahu di Jakarta, Dubes Australia, Richard Woolcott, bahwa jauh sebelumnya HAL INI sudah “menjadi kebijakan Indonesia yang tetap untuk menggabungkan Timor”.¹⁵⁷ Pada pertemuan tersebut Ali Moertopo mengatakan bahwa Indonesia telah menerima informasi dari intelijen bahwa Fretilin merencanakan kudeta pada tanggal 15 Agustus.¹⁵⁸

144. Para anggota UDT telah mempertimbangkan aksi anti-komunis selama beberapa minggu sebelum 11 Agustus.¹⁵⁹ Tujuan utama dari gerakan bersenjata adalah, seperti yang ditekankan para pemimpinnya sekarang, bukan untuk mengambil alih kekuasaan tetapi untuk meluruskan kembali proses dekolonisasi yang dipercaya UDT telah dibajak oleh elemen-elemen “ambisius, tidak bertanggung jawab, dan bermaksud buruk”, dan untuk mencegah kudeta Fretilin, yang konon direncanakan pada tanggal 15 Agustus.¹⁶⁰ Tetapi, ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab, khususnya tentang peran Indonesia dalam berbagai kejadian ini dan apa tujuan sebenarnya dari para pemimpin kudeta tersebut. Sejumlah kesaksian yang diterima Komisi sedikit menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini, tapi tidak cukup untuk memberi jawaban yang pasti atas sejumlah pertanyaan tersebut.

¹⁵⁵ Dalam submisinya kepada CAVR mantan Sekjen UDT, Domingos Oliveira, memberikan sebuah daftar tentang insiden yang terjadi antara bulan Juni dan awal Agustus yang menunjukkan bahwa rusaknya hubungan kedua partai. [Submisi diberikan tertulis setelah kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003. Arsip CAVR.]

145. Meskipun daftar sasaran mereka jauh lebih panjang dan termasuk semua fasilitas militer utama, gerakan bersenjata tersebut merebut markas polisi, dan ‘menangkap’ komandannya Letnan Kolonel Rui Magiolo Gouveia serta pasokan senjatanya, dan menguasai sejumlah instalasi penting, termasuk pelabuhan, bandar udara dan fasilitas radio dan telpon di Dili.¹⁶¹ Pemimpin gerakan bersenjata João Carrascalão bertemu dengan Gubernur Lemos Pires sekitar pukul 1 pagi pada tanggal 11 Agustus, dan menyatakan maksud UDT untuk menghilangkan berbagai elemen komunis dari pemerintah dan dari Fretilin. Mantan gubernur menulis beberapa tahun kemudian bahwa gerakan tersebut tidak bermaksud untuk menyingkirkan pemerintah Portugis, dan bahwa gerakan itu tidak mengharapkan intervensi militer. Keesokan harinya gerakan ini mengajukan tuntutan kepada Gubernur Lemos Pires. Tuntutan tersebut termasuk: penggantian anggota militer tertentu, proses dekolonisasi yang dipercepat; mengalihkan kekuasaan kepada UDT, dan mengakui wewenang ekstra yudisial UDT sebagai gerakan pembebasan.¹⁶²

146. Unjuk kekuatan UDT tersebut konon tidak diarahkan kepada Fretilin, tetapi lebih pada “unsur-unsur komunis” di dalam Fretilin. Namun segala harapan UDT bahwa Fretilin akan serta merta membuang para “ekstrimis”-nya dan bergabung dengan UDT untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan segera pupus. Fretilin tetap bersatu dan menuntut pemerintah kolonial Portugis untuk melucuti UDT.¹⁶³ UDT menahan ratusan anggota Fretilin, termasuk beberapa pemimpin partai di markasnya di Palapaço, Dili, dimana penganiayaan adalah sesuatu yang biasa dan ada beberapa orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak jelas.¹⁶⁴

147. Momentum awal berada pada UDT. Selama beberapa hari setelah “percobaan kudeta” tanggal 11 Agustus, para pendukung UDT menahan ratusan pemimpin Fretilin dan pendukungnya di seluruh wilayah tersebut. Gubernur Lemos Pires memutuskan untuk tidak menentang UDT dengan kekerasan. Beberapa pertimbangan membuatnya tidak melakukan tindakan tersebut. Dia tidak yakin apakah kesetiaan para *tropas* (tentara) Timor pada pemerintahan kolonial lebih kuat dibanding simpati mereka pada salah satu partai yang bersaing. Jika tidak, ada risiko para prajurit Portugis akhirnya akan berperang melawan orang Timor. Konfrontasi antara orang Portugal dan orang Timor tidak saja akan menjadi bencana politik; tetapi bisa juga berakhir dengan kekalahan militer bagi Portugis. Lemahnya kekuatan pasukan Portugis dalam beberapa bulan sebelumnya tidak bisa tergantikan dengan kedatangan 75 pasukan terjun payung untuk memperkuat tentara kolonial.¹⁶⁵

148. Sementara itu, para pemimpin Fretilin mundur ke Aíleu, sebuah basis pertahanan Fretilin dan markas pusat pelatihan tentara (*Centro de Instrução*). Pada tanggal 13 Agustus di Dili, UDT dan para simpatisannya dalam angkatan bersenjata membentuk sebuah front, Gerakan untuk Persatuan dan Kemerdekaan Rakyat Timor (*Movimento para Unidade e Independência de Timor-Dili*, MUITD), berdasarkan prinsip-prinsip “persatuan, kemerdekaan dan anti-komunisme”. Mereka meramalkan adanya peleburan semua partai pro-kemerdekaan dan kesetiaan para anggotanya pada MUITD.¹⁶⁶ Dalam dua hari berikut, UDT berhasil meyakinkan kepala polisi, Magiolo Gouveia, yang berada dalam tahanan UDT, dan banyak warga Timor di bawah komandonya, juga sebagian militer, termasuk kompi-kompi yang berbasis di Baucau dan Lospalos.¹⁶⁷ Pada tanggal 16 Agustus UDT mengeluarkan pernyataan tertulis mengimbau pengusiran semua orang komunis dari wilayah tersebut, termasuk mereka yang berada dalam “Kantor Gubernur Portugis”, pelarangan Fretilin, pembatalan Undang-Undang 7/75 dan dilanjutkannya negosiasi-negosiasi tentang kemerdekaan Timor-Leste. Pada tanggal 17 Agustus, yang tampaknya merupakan sebuah konsesi terhadap UDT, kedua orang delegasi MFA, Mayor Mota, kepala Kantor Urusan Politik dan Mayor Jónatas, yang keduanya dituduh oleh UDT (dan pihak Indonesia) sebagai wakil “sayap komunis” di pemerintahan, dikirim ke Lisbon, tampaknya untuk memberi laporan kepada pemerintah pusat tentang perkembangan di Timor-Leste.¹⁶⁸

Kegagalan melakukan negosiasi: konflik bersenjata internal

149. Pada tanggal 11 Agustus, dari basis mereka di Aileu, Fretilin memberikan suatu daftar berisi 13 syarat untuk berpartisipasi dalam negosiasi kepada pemerintahan Portugis. Di antaranya adalah pelucutan senjata UDT dan memberikan tanggung jawab keamanan pada para serdadu Timor-Leste, dengan alasan bahwa polisi telah terbukti tidak dapat diandalkan.¹⁶⁹ Pihak Portugis kemudian mengirim Rogério Lobato, serdadu Timor dengan pangkat paling tinggi dalam tentara Portugis, sebagai utusan kepada pimpinan Fretilin. Tetapi ini justru berbalik, dan dia berperan penting ketika kembali ke Dili dan meyakinkan mayoritas serdadu Timor-Leste untuk bergabung dengan pihak Fretilin. Meskipun sebelumnya bersumpah untuk bersikap netral secara politik (*apartidarismo*),¹⁷⁰ tentara Timor-Leste ikut terbawa dalam arus kebebasan politik baru seperti rekan-rekan sipilnya.¹⁷¹ Pada tanggal 15 Agustus Komite Sentral Fretilin di Aileu mengumumkan apa yang mereka sebut "dilanjutkannya perjuangan bersenjata umum melawan semua pengkhianat dan musuh-musuh rakyat".¹⁷² Pada tanggal 20 Agustus, Fretilin melancarkan serangan melawan UDT.

150. Pada tanggal 18 Agustus, pegawai pemerintah Portugis yang tersisa telah mundur ke lingkungan Farol dimana sebagian besar dari mereka tinggal dan yang membentuk pusat zona di Dili yang dinyatakan netral. Pasukan terjun payung Portugis dikerahkan ke zona netral untuk melindungi mereka.

151. Pada pukul 1.00 dini hari tanggal 20 Agustus, Rogério Lobato dan Hermenegildo Alves melancarkan pemberontakan bersenjata Fretilin dengan mengambil alih *Quartel Geral* (markas tentara) di Taibessi dan menahan tentara Portugis yang berada di situ, termasuk wakil kepala staff.¹⁷³ Pada tanggal 22 Agustus pemimpin Fretilin kembali ke Dili. Garis depan konflik di Dili pada awalnya berada di Colmera, tetapi pertempuran menyebar ke seluruh kota selama dua minggu berlangsungnya pertempuran tersebut. Komisi menerima kesaksian bahwa senjata tersedia dalam jumlah besar di Dili, dan bahwa kedua belah pihak membagikannya dengan sembarangan.¹⁷⁴ Dalam konflik bersenjata singkat tersebut para partai politik bersekutu dengan partai lain melalui segala kemungkinan. Mario Carrascalão menggambarkan fenomena ini dalam Audiensi Publik tentang Konflik Internal:

Kami melihat pendekatan yang berbeda di sana [di distrik-distrik]...Di Atsabe kami melihat Fretilin bersama dengan UDT melawan Apodeti. Apodeti di Same berbeda, mereka bersama UDT melawan Fretilin. Di Dili, Fretilin dan Apodeti melawan UDT.¹⁷⁵

152. Angka kematian tertinggi terjadi di daerah pedesaan, dimana ketegangan yang bersumber dari pertikaian antar suku yang sudah lama dan dendam-dendam pribadi, lebih dipicu lagi oleh berbagai perbedaan militan kepartaian, dan meledak menjadi kekerasan.¹⁷⁶ Kekerasan paling hebat terjadi di Liquiça, Ermera, Ainaro, Manufahi dan Manatuto, meskipun tidak terbatas di berbagai distrik ini saja.

153. Komisi menerima kesaksian dan pernyataan dari seluruh negeri tentang dampak konflik terhadap rakyat biasa. Kebrutalan rakyat Timor-Leste melawan sesamanya dalam konflik singkat ini telah meninggalkan luka yang dalam pada masyarakat Timor-Leste yang terus dirasakan hingga hari ini. Para anggota UDT bertanggung jawab atas pembunuhan berbagai tahanan Fretilin di sejumlah tempat pada bulan Agustus, setelah semakin jelas bahwa Fretilin semakin memperkuat kekuasaan mereka. Sebanyak 348 pembunuhan selama periode konflik internal telah dilaporkan kepada Komisi. Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah total sebanyak 1500 pembunuhan yang diperkirakan oleh perhitungan terkini seperti dari ICRC bisa dikatakan cukup akurat.¹⁷⁷ Data Komisi menunjukkan bahwa sebagian besar pembunuhan dilaksanakan oleh Fretilin, meskipun pembunuhan masal juga dilakukan oleh UDT (lihat Bab 7.2: Pembunuhan

Tidak Sah dan Penghilangan Paksa).¹⁷⁸ Suatu pembantaian terjadi pada tanggal 27 Agustus 1975 di pantai selatan di Wedauberek, Manufahi, dimana para anggota UDT mengeksekusi 11 anggota organisasi pemuda Fretilin, Unetim.¹⁷⁸ Pada tanggal 28 Agustus, dengan semakin mendekatnya pasukan Fretilin ke basis pertahanan UDT di Ermera, 20 orang yang ditahan oleh UDT sesudah gerakan bersenjata dibunuh.¹⁷⁹

154. Dalam kesaksiannya kepada Komisi Xanana Gusmão menjelaskan tanggapan Fretilin sebagai balas dendam atas aksi-aksi yang dilakukan UDT.¹⁸⁰ Rogério Lobato, yang memimpin pasukan bersenjata Fretilin saat itu, mengatakan kepada Komisi bahwa ada beberapa motivasi berbeda untuk kekerasan tersebut :

Kadangkala ini bukan karena mereka memiliki masalah dengan mereka tentang situasi [politik] ini, tetapi dari masalah lama. Saya tahu kadang itu karena mereka menculik pacarnya sehingga sekarang mereka menggunakan kesempatan itu untuk menghajarnya. Saya tahu ini. Orang memanfaatkan perang ini untuk menghajar orang lain dan main hakim sendiri. Tapi sebagian dari mereka memang menghajar mereka karena mereka marah pada mereka selama perang...Saya ingin mengatakan bahwa dalam proses perang ini banyak sekali yang meninggal...memang benar Fretilin membunuh banyak tahanan UDT...UDT juga membunuh para tahanan Fretilin.
¹⁸¹

155. Dalam Audiensi Publik Komisi tentang Konflik Internal, para pemimpin politik UDT dan Fretilin memberi kesaksian bahwa partai mereka tidak memiliki kebijakan untuk membunuh tahanan, atau kekerasan terhadap rakyat sipil, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan kader mereka di seluruh negeri.¹⁸² Namun demikian, Komisi menerima sejumlah kesaksian yang menyatakan adanya keterlibatan para anggota senior kedua partai tersebut dalam pembunuhan, meskipun tidak disertai dengan bukti bahwa partai-partai tersebut mengambil keputusan institusional dalam melakukan kejahatan-kejahatan ini (lihat Bagian 8: Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban).¹⁸³

156. Orang Timor yang menjadi anggota militer dan polisi Timor Portugis, dan sebagian orang Portugis, tidak berdiri di luar konflik ini. Sementara UDT mendapat dukungan anggota polisi orang Timor (dan beberapa orang Portugis) dan beberapa unit militer, mayoritas pasukan Timor mendukung Fretilin.¹⁸⁴ Dukungan militer ini memungkinkan Fretilin untuk unggul dengan cepat setelah melancarkan "pemberontakan bersenjata umum". Pelanggaran prinsip *apartidarismo* ini juga mengakibatkan tersebarnya senjata-senjata api ke tangan partai-partai politik dan pendukung mereka, yang sangat meningkatkan dampak kekerasan tersebut. Di Dili, UDT mundur ke bandar udara, dan pada awal September telah mundur ke arah barat melalui Liquica ke arah Indonesia.

UDT mundur ke perbatasan

157. Sebagai akibat dari serangan balasan Fretilin, pada bulan September para anggota dan simpatisan partai UDT, Apodeti, Klibur Oan Timor Aswain (KOTA) dan Trabalhista lari pertama ke daerah perbatasan Batugade, dan kemudian melintasi perbatasan ke Timor Barat.¹⁸⁵ Kekalahan UDT dan para sekutunya mendorong para pemimpinnya, bagaimanapun enggan, untuk menerima permintaan Indonesia untuk menandatangani petisi yang mengimbau integrasi Timor

¹⁷⁸ CAVR telah melaksanakan Survey Retrospektif Kematian yang didasarkan oleh pengalaman dari 1396 rumah tangga yang dipilih secara acak di Timor-Leste. Dari survey ini, CAVR mengekstrapolasi perkiraan pelanggaran total untuk 1974-1999.

Portugis ke dalam Indonesia sebagai harga bagi keselamatan perjalanan mereka ke Timor Barat. Jumlah warga Timor-Leste yang dipindahkan ke Timor Barat telah dipertentangkan. Pejabat-pejabat Indonesia saat itu menyebut angka sekitar 40.000 – 50.000 orang.¹⁸⁶ Warga Timor-Leste yang ikut dalam pelarian tersebut menyebut angka yang jauh lebih rendah, sekitar 10.000 sampai 30.000, dan menyatakan bahwa perbedaan antara perkiraan mereka dan perkiraan Indonesia ini karena Indonesia ingin membesarkan angka jumlah pengungsi, baik untuk membesar-besarkan skala dan parahnya konflik internal ataupun untuk menarik jumlah bantuan internasional yang lebih besar.¹⁸⁷

Tanggapan Portugal terhadap konflik internal

158. Portugal menanggapi konflik internal dengan mengirim utusan ke koloni dari Lisbon. Indonesia menghalangi usaha utusan pertama Kolonel José Gomes untuk sampai ke Dili pada tanggal 14 Agustus. Pada tanggal 22 Agustus sebuah pesan dari Kantor Kepresidenan di Lisbon sampai ke Gubernur Lemos Pires, yang memberikan informasi bahwa Menteri Koordinator Antar-Wilayah, Antonio de Almeida Santos, akan tiba di Darwin pada tanggal 27 Agustus. Mário Lemos Pires berusaha mengatur gencatan senjata untuk memungkinkan negosiasi. UDT setuju untuk melakukan gencatan senjata terbatas, tapi Fretilin menolak usulan tersebut mentah-mentah.¹⁸⁸ Pada malam hari tanggal 26 Agustus, orang-orang yang tersisa dari pemerintahan Portugis meninggalkan Dili menuju Pulau Ataúro, dan tidak pernah kembali.¹⁸⁹

159. Setelah berusaha mencari dukungan ke PBB dan Australia, Almeida Santos tiba di Ataúro pada tanggal 28 Agustus. Karena tidak berhasil menghubungi UDT, yang para pemimpinnya saat itu berada di Indonesia, Almeida Santos menghubungi Fretilin dan meminta agar para tahanan Portugis dibebaskan. Fretilin mengabaikan permintaan ini. Tetapi, pada tanggal 9 September Portugal memberi petunjuk kepada Almeida Santos untuk menghindar mengakui Fretilin sebagai satu-satunya wakil rakyat Timor-Leste, salah satu syarat yang ditetapkan Fretilin untuk ikut negosiasi.¹⁹⁰ Pada tanggal 22 September Almeida Santos meninggalkan Ataúro menuju Lisbon. Di sana, dia merekomendasikan negosiasi dengan tiga partai politik utama. Ini menjadi problematis. Karena sudah menguasai sebagian besar Timor-Leste, Fretilin mau bernegosiasi dengan Portugal - namun tidak dengan UDT dan Apodeti -. Meskipun terjadi banyak deklarasi dari pertemuan bilateral terakhir antara para Menteri Luar Negeri Indonesia dan Portugal, yang diadakan di Roma pada tanggal 1-2 November, bahwa kedua pihak pemerintah akan bekerja untuk meyakinkan sejumlah partai tersebut tentang perlunya melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Portugal, Indonesia tidak menunjukkan itikad untuk membiarkan UDT dan Apodeti terlibat dalam pembicaraan seperti itu. Usaha yang terlambat dari Portugal untuk menyertakan negara-negara lain dalam menyelesaikan masalah Timor Portugis juga tidak berbuah. Hari-hari akhir sebelum invasi ditandai dengan satu lagi krisis politik di Lisbon, yang mengakibatkan Portugal tidak lagi memiliki pemerintah yang fungsional. Pada akhirnya, usaha-usaha Portugal yang setengah-setengah ini dilumatkan oleh keputusan Indonesia untuk melancarkan invasi militer skala penuh.¹⁹¹

Tanggapan Indonesia

Partai-partai politik Timor-Leste berada di bawah pengaruh Indonesia

160. Dengan larinya para anggota UDT dan sekutunya—partai Apodeti, Tralabista dan KOTA—ke daerah perbatasan, atau melintas ke Timor Barat, mereka semakin berada dalam pengaruh kekuasaan militer Indonesia.

161. Selama dan sesaat setelah konflik internal, pada awal bulan September, berbagai kelompok Timor-Leste di Maliana dan Suai melakukan dua proklamasi integrasi dengan Indonesia.¹⁹² Pada tanggal 7 September 1975, di Batugade, para pemimpin UDT, KOTA, dan Tralabista mengeluarkan petisi bersama yang ditujukan pada Presiden Soeharto, kembali

meminta Timor Portugis untuk diintegrasikan dengan Indonesia.¹⁹³ Mario Carrascalão memberi kesaksian pada Komisi tentang latar belakang penandatanganan petisi Batugade:

Kami tetap di sana dan setiap hari orang dari Indonesia datang. Louis Taolin [dari Bakin], [Kolonel Aloysius] Sugianto [dari Opsus] selalu datang dan menanyakan kami memerlukan bantuan apa...Apa yang ingin mereka lakukan adalah memanipulasi kami, untuk menandatangani...sebuah petisi yang meminta Indonesia untuk masuk ke Timor... Sebagian orang menandatangani sementara yang lain menodongkan senjata di depan mereka. Sebagian pergi ke Atambua, dan mereka menandatangani di sana. Kondisinya bagus di sana. Petisi ini kemudian dikirim ke Presiden Soeharto, dan tak lama kemudian Gubernur El Tari memberikan tanggapan pada Senhor [bapak] Francisco Lopes da Cruz. Dia mengatakan bahwa dia setuju untuk memberi kami materi, bahwa tidak perlu khawatir. Ini bukan integrasi, saya melihat ini hanya sebagai fasilitas.¹⁹⁴

Operasi Flamboyan: Operasi Indonesia memasuki tahapan baru

162. Pada tanggal 31 Agustus operasi Indonesia dialihkan dari badan intelijen, Bakin, ke sebuah komando militer yang khusus dibuat bernama Komando Tugas Gabungan (Kogasgab). Pengalihan ini menandai perubahan penting dalam operasi-operasi Indonesia di wilayah tersebut, perubahan dari destabilisasi skala kecil ke operasi militer berskala lebih besar.¹⁹⁵

163. Pada akhir bulan Agustus dan September, berbagai unit Pasukan Khusus yang direkrut untuk operasi baru tersebut, yang disebut *Operasi Flamboyan*, sering melakukan sejumlah penyusupan ke dalam Timor Portugis. Jumlah korban yang tinggi memaksa aktivitas mereka berhenti sejenak.¹⁹⁶ Yang pertama, *Tim Susi*, dipimpin oleh Kapten Yunus Yosfiah, memasuki Atsabe.¹⁹⁷ Para partisan Timor-Leste bergabung dengan sejumlah tim Pasukan Khusus. Ini merupakan pasukan yang dilatih oleh Indonesia termasuk, contohnya, unit Halilintar João Tavares (lihat Bagian 4: Rejim Pendudukan). Mereka diperintahkan untuk menciptakan “teror, [dan] intimidasi.”¹⁹⁸ Pada tanggal 14 September, pasukan Fretilin bertempur dengan militer Indonesia dekat perbatasan Atsabe.¹⁹⁹ Pada hari yang sama, militer Indonesia melancarkan serangan-serangan serempak dengan sasaran Bobonaro, Atsabe dan Suai.²⁰⁰ Kota perbatasan Batugade jatuh pada tanggal 8 Oktober, dan pasukan-pasukan Fretilin mundur ke Balibo.²⁰¹

3.8 Timor Portugis di bawah Administrasi Fretilin

Tinjauan

164. Dengan berakhirnya pertikaian antara Fretilin dan UDT, pada awal Spetember 1975, Fretilin kini berada dalam posisi sebagai penguasa *de facto* Timor Portugis yang tengah menghadapi keadaan darurat. Fretilin tetap menghormati kedaulatan Portugis atas wilayah ini sementara pemerintahan kolonial Portugis tetap tinggal di Pulau Ataúro. Kekurangan dana dan pengalaman pemerintahan, dan dihadapkan dengan kemungkinan krisis kemanusiaan, Fretilin melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mendistribusikan makanan dan memelihara ketertiban masyarakat. Akan tetapi, Fretilin terus menahan tahanan politik dari masa konflik bersenjata yang singkat dan menghadapi kesulitan mencegah berbagai pelanggaran oleh para kadernya sendiri. Sebagai tambahan, tanggapan Indonesia atas kemenangan Fretilin dalam konflik bersenjata internal adalah dengan meningkatkan kegiatan militernya. Mulai bulan September 1975, Indonesia mulai melancarkan penyusupan bersenjata ke wilayah Timor Portugis. Pada bulan Oktober, berbagai penyerangan ini menjadi semakin besar dan sebagai hasilnya Indonesia mampu merebut beberapa kota dekat perbatasan. Selain perlawanan langsung terhadap kekuatan Indonesia, Fretilin juga berusaha menarik dukungan internasional.

Fretilin mengisi kekosongan

165. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Portugis, Fretilin membentuk administrasi pemerintahan sementara. Selama masa ini Fretilin terus mengakui kedaulatan Portugis atas Timor-Leste, dan berulang kali menyerukan kepada Portugal untuk kembali dan meneruskan proses dekolonisasi yang terputus. Fretilin membiarkan bendera Portugis berkibar di depan kantor Gubernur dan membiarkan kantor tersebut kosong.²⁰² Fretilin juga melakukan hal-hal lain untuk memperlihatkan sikap bahwa mereka masih menganggap Portugal sebagai penguasa yang berdaulat, seperti menempatkan penjaga bersenjata di luar *Banco Nacional Ultramarino* (BNU), bank milik Portugis, yang berfungsi sebagai bank sentral *de facto* selama masa pemerintahan Portugis, dan melarang penggunaan kediaman gubernur untuk bermacam keperluan resmi.²⁰³

166. Selama bulan September Fretilin terus berupaya mendorong Portugal untuk kembali. Pada tanggal 13 September Komite Sentral Fretilin mengeluarkan sebuah komunike, yang menegaskan kembali pengakuannya atas kekuasaan Portugal, dan menyerukan dilakukannya negosiasi untuk kembali melanjutkan proses dekolonisasi.²⁰⁴ Fretilin menyatakan bahwa negosiasi harus dilakukan “di dalam wilayah nasional tanpa tekanan dari luar”, dan harus dilakukan hanya dengan Fretilin sebagai pemenang satu-satunya dalam konflik internal. Portugal tidak menerima Fretilin sebagai satu-satunya wakil yang sah dari rakyat Timor Portugis.²⁰⁵ Pada tanggal 16 September, menanggapi serangan Indonesia di Atsabe, Fretilin mengeluarkan pernyataan lainnya, yang sekali lagi mengakui kedaulatan Portugis dan menyerukan dilanjutkannya perundingan mengenai dekolonisasi.²⁰⁶

167. Pernyataan-pernyataan ini juga mengusulkan diangkatnya permasalahan Timor-Leste ke kancah internasional dengan melibatkan negara-negara lain di kawasan itu. Fretilin merekomendasikan bahwa sebuah misi pencari fakta, yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN, Australia, Selandia Baru bersama pengamat dari negara-negara lain, mengunjungi negeri tersebut. Pernyataan tanggal 16 September itu juga menyerukan diadakannya sebuah konferensi yang dihadiri oleh perwakilan dari Portugal, Australia, Indonesia, dan Timo-Leste, untuk “menjernihkan kabar burung dan kesalahpahaman”. Fretilin juga merekomendasikan pasukan perdamaian gabungan Indonesia-Timor-Leste untuk melakukan patroli perbatasan gabungan.

168. Pada bulan Oktober, Organisasi Non Pemerintah dari Australia ACFOA (*Australian Council for Overseas Aid*) mengirim delegasi, yang dipimpin oleh James Dunn, untuk berusaha menyatukan Fretilin, UDT, dan Administrasi Portugis untuk berdialog. Tetapi hal ini tidak terjadi, sebagian karena keenganan Portugal untuk bertemu dengan Fretilin maupun UDT.²⁰⁷ Upaya terakhir Fretilin untuk mengajak Portugis dilakukan tanggal 25 Oktober, sembilan hari setelah Balibo jatuh ke tangan pasukan Indonesia. Fretilin mengirim undangan kepada pemerintah Portugis di Ataúro untuk mengirim delegasinya ke Dili untuk mengamati situasi di lapangan.²⁰⁸ Seperti sebelumnya, Portugis hanya diam.²⁰⁹

Tahanan dan kekerasan politik

Ekses Fretilin di akhir Agustus memasuki September

169. Selama masa awal penguasaan Fretilin setelah konflik internal, terjadi berbagai ekses seperti kerja paksa, penyiksaan dan eksekusi.²¹⁰ Sebagian besar pembunuhan yang terjadi di luar pertempuran dilakukan di wilayah pedesaan, setelah Fretilin melancarkan aksi balasannya. Kemarahan publik sering kali berubah menjadi kekerasan yang mematikan. Selama masa ini pembunuhan oleh orang-orang yang terkait dengan Fretilin kadang terjadi akibat perseteruan lokal yang mendalam ketimbang politik.²¹¹ Presiden Fretilin kala itu, Francisco Xavier do Amaral, menjelaskan kepada Komisi bahwa ketika itu:

*Ada banyak kebingungan. Semuanya naik pitam, darah mereka mendidih, dan karenanya orang-orang saling menyerang. Kekerasan terjadi. Kemenangan satu pihak akan menimbulkan pembalasan dari pihak lain. Inilah yang terjadi pada tahun 1975...Contohnya, beberapa orang dipecat dari pekerjaannya. Mereka melakukan pembalasan kepada atasan mereka, ketika muncul kesempatan... Pihak yang satu memukul dan membunuh pihak yang lain. Dan karena itu siklus kebencian berlanjut.*²¹²

170. Banyak pembunuhan balas dendam terjadi di Distrik Ermera, sebuah basis UDT. Sebuah kesaksian dari Ermera mengatakan bahwa:

*Pada tanggal 15 September 1975 [tiga] komandan milisi Fretilin...menangkap tujuh orang UDT...di desa Katrai Kraik, Letefoho, Ermera. Ketujuh orang tersebut dibawa ke Germano, Desa Katrai Leten dan dibunuh. Kepala desa Lauana menyaksikan pembunuhan tersebut.*²¹³

171. Seperti yang dikatakan para pemimpin Fretilin dalam kesaksiannya kepada Komisi, kenyataan bahwa senjata yang dirampas selama konflik tersedia dengan mudah semakin memperburuk situasi kekerasan.²¹⁴

Penjara Fretilin dan Komisi Penyidikan

172. Selama masa konflik internal, Fretilin menangkap dan menahan sebanyak 2.000 tahanan.²¹⁵ Sebagian besar adalah anggota UDT, namun ada juga anggota Fretilin, yang ditahan karena apa yang mereka sebut sebagai ekses selama konflik.²¹⁶ Posisi resmi Fretilin adalah bahwa mereka menahan orang-orang sampai pemerintahan Portugis kembali untuk mengadili mereka. Namun ketika harapan kembalinya Portugal semakin pupus, Fretilin memutuskan untuk menangani situasi tersebut sendiri. Pada tanggal 30 September Fretilin mengumumkan didirikannya sebuah Komisi Penyidikan (*Comissão de Inquérito*) untuk memisahkan para pemimpin dari para anggota partai yang tidak terlibat.²¹⁷ Komisi Penyidikan mengundang rakyat

untuk memberi kesaksian dalam menentukan kesalahan tertuduh di sejumlah “pengadilan” umum. Metode peradilan seperti ini cenderung menghasilkan hukuman yang sewenang-wenang. Seorang mantan tahanan yang ditahan Fretilin, Monis da Maia, menggambarkan pengalamannya:

Semua penduduk kampung diperintahkan untuk pergi ke pos militer dan para tahanan dibawa keluar satu demi satu dan “diadili”. Tahanan-tahanan yang dituduh melakukan kejahatan berat dibawa ke Aileu. Ketika tiba giliran saya semua orang berdiam diri sampai H1 mulai memancing-ancing mereka. Ia menyuruh mereka mengatakan bahwa saya telah memukul mereka. Orang-orang itu menolak kecuali satu orang yang berkata, “Ia memaki kakek saya.” Karena ini saya dibawa ke Aileu, dituduh memaki kakek seseorang.²¹⁸

173. Fretilin memindahkan para pemimpin regional UDT ke Dili atau Aileu untuk diperiksa oleh komisi.²¹⁹ Di Aileu para pemimpin UDT ditahan di gedung *Companhia* di Aisirimou, dan para anggota partai biasa ditahan di sebuah gudang besar.²²⁰ Penduduk diperkenankan untuk melampiaskan kemarahan mereka kepada para tahanan yang baru datang:

Mayor Lorenço yang paling parah dipukuli saat ia tiba di Aileu karena ia adalah komandan. Mereka melelekkannya di atap mobil [yang ditumpangi saat dia datang] dan membawanya keliling Aileu dan mereka berteriak “Viva Fretilin”. Seseorang menusuknya dan ia berdarah. Wajahnya bengkak dan ia tidak dapat berbicara.²²¹

174. Para pemimpin UDT yang tertangkap, termasuk Wakil Presiden Partai, César Mouzinho, mendapat perlakuan yang paling buruk.²²² Tetapi para mantan tahanan bersaksi bahwa pemukulan dan penganiayaan adalah hal yang biasa, contohnya ketika seorang penjaga Fretilin memaksa para tahanan untuk baku pukul di depan umum, seperti mengadu ayam.²²³

175. Selama masa pemerintahannya, Fretilin mengizinkan anggota Komite Palang Merah Internasional untuk mengakses berbagai penjaranya. Para pengamat Australia yang mengunjungi berbagai penjara Fretilin pada tahun 1975 mengkonfirmasi bahwa beberapa tahanan dipukuli, termasuk mantan kepala polisi, Letnan Kolonel Magiolo Gouveia, walaupun mereka menyimpulkan bahwa secara umum, para tahanan dalam keadaan sehat dan diperlakukan dengan baik.²²⁴

176. Para anggota senior Fretilin yang bersaksi di hadapan Komisi mengakui bahwa selama masa itu anggota-anggota Fretilin melakukan penganiayaan terhadap para tahanan. Rogério Lobato, yang ketika itu menjabat kepala Angkatan Bersenjata Fretilin, mengatakan kepada Komisi:

Sering kali mereka [Fretilin] memasuki penjara, mengejek para tahanan dan memukuli para tahanan tersebut...Orang-orang mengambil keuntungan dari konflik ini untuk memukuli orang lain dan untuk main hakim sendiri. Namun beberapa memang memukuli mereka karena marah pada mereka sehubungan dengan konflik ini.²²⁵

177. Pada bulan Oktober 1975, ketika serangan penyusupan Indonesia dimulai kembali, Fretilin menahan beberapa anggota Apodeti. Mári Alkatiri mengatakan kepada Komisi bahwa ia memerintahkan penahanan mereka setelah ia menerima informasi intelijen bahwa Apodeti

tengah merencanakan kudeta melawan Fretilin, yang akan dimulai dengan melempar granat di tengah-tengah pertemuan Komite Sentral Fretilin.²²⁶ Ini mungkin juga dipicu oleh penyusupan militer Indonesia di perbatasan.²²⁷ Banyak tahanan Apodeti dibunuh setelah invasi Indonesia.

178. Tidak ada bukti bahwa perlakuan buruk atas tahanan selama September sampai awal Desember merupakan kebijakan resmi Fretilin. Walaupun dalam beberapa kasus anggota senior Fretilin turun tangan untuk menghentikan penganiayaan,²²⁸ jelas bahwa Komite Sentral Fretilin mengetahui situasi ini dan tidak mengambil langkah yang cukup untuk mencegah malpraktek ini atau berupaya untuk mengendalikannya.²²⁹

Memulihkan ketertiban

179. Pada awal September, setelah menguasai sebagian besar wilayah, Fretilin mulai bergerak untuk memulihkan ketertiban.²³⁰ Mereka mengambil berbagai langkah yang keras untuk mencapai maksud ini. Beberapa orang asing yang mengunjungi sejumlah penjara Fretilin menyaksikan para serdadu Fretilin yang dipenjara karena melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil.²³¹ Sampai awal September, Fretilin menguasai seluruh wilayah Timor-Leste kecuali wilayah Batugade, wilayah perbatasan dengan Indonesia. Dua anggota Parlemen Australia membuat penilaian berikut ini setelah mengunjungi beberapa kota:

Kunjungan kami keliling negeri membenarkan klaim Fretilin bahwa situasi telah terkendali. Di wilayah-wilayah yang kami kunjungi sendiri, kami menerima informasi dari pekerja kemanusiaan dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) bahwa mereka juga berpendapat sama.²³²

Pemerintahan

180. Selama masa konflik internal 80% dari 3.000 tenaga ahli Timor dan staf asing pemerintahan Portugis telah meninggalkan negeri ini. Tidak ada kemungkinan untuk meyakinkan mereka kembali dan bekerja di bawah pemerintahan Fretilin. Fretilin memperluas keanggotaan Komite Sentral dengan mengangkat sejumlah besar perwakilan regional dan anggota militer aktif, yang mencerminkan pengaruh militer pasca konflik internal dan perlunya perwakilan geografis yang lebih luas.²³³ Untuk mengatasi kekosongan pemerintahan di luar Dili ini, Fretilin mengangkat Komite-Komite Regional untuk memerintah di setiap distrik. Pada pertengahan September, Fretilin membentuk Komite Eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sementara.²³⁴ Komite ini terdiri dari 13 departemen, antara lain Departemen Urusan Ekonomi, Kesehatan dan Militer.²³⁵ Pada bulan Oktober Fretilin membentuk serangkaian komisi untuk memfasilitasi pemerintahan di wilayah ini. Satu komisi yang utama adalah Komisi Pengelolaan dan Pengawasan Ekonomi, yang diketuai oleh Dr José Gonçalves, mungkin satu-satunya ahli ekonomi yang masih berada di wilayah ini. Diresmikan pada tanggal 11 Oktober 1975, komisi ini bertindak sebagai wakil Fretilin dalam manajemen pusat pemulihan ekonomi negeri ini. Komisi ini juga bekerja dengan Komite-Komite Regional Fretilin dan LSM-LSM asing dalam pendistribusian bantuan makanan darurat, menggunakan aset-aset perusahaan niaga dan logistik semi-pemerintah SAPT (*Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho*).²³⁶

181. Gangguan terhadap sistem produksi dan distribusi akibat konflik internal dan ketidakmampuan Timor-Leste untuk memenuhi kebutuhannya sendiri²³⁷ mengakibatkan krisis ekonomi perkotaan dimana Fretilin, dengan sejumlah dukungan lembaga-lembaga internasional, kesulitan untuk mengatasinya. Walaupun kekerasan mempengaruhi beberapa kota yang lebih besar di wilayah tengah dan barat, dan pertikaian-pertikaian kecil menyebar luas, sebagian besar wilayah pedesaan luput dari konflik bersenjata yang menelan Dili. Warga pedesaan Timor umumnya bergantung pada pertanian subsisten untuk penghidupannya, sehingga tidak menjadi

bagian dalam ekonomi tunai yang menjadi sandaran warga Timor-Leste perkotaan.²³⁸ ICRC melaporkan akibat dari politik internal:

Kerusakan dari perang hanya mempengaruhi beberapa wilayah: Maubisse, Aijnaro, Ermera, Same...[kekurangan makanan] pada dasarnya akan mempengaruhi populasi perkotaan tapi tidak akan mempengaruhi populasi pedesaan di mana orang-orang...hidup di dalam sistem ekonomi subsisten.²³⁹

182. Satu cara yang digunakan Fretilin untuk mengatasi kelangkaan makanan ini adalah dengan memaksa para tahanan UDT untuk melakukan kerja paksa.²⁴⁰ Satu tempat dimana ini terjadi adalah di perkebunan di Aisirimou, Aileu.²⁴¹

183. Sesudah menguasai keadaan, Fretilin sadar bahwa Fretilin tidak memiliki sumber daya untuk mengimpor makanan. Pada tanggal 13 September Fretilin mengeluarkan permintaan untuk memohon bantuan makanan darurat. ICRC dan Dewan Bantuan Luar Negeri Australia (*Australian Council for Overseas Aid*, ACFOA) menanggapi hal ini dengan sedikit pasokan makanan, tapi tidak ada pemerintah manapun yang memberi bantuan selama masa ini. Fretilin kemudian menyerukan kepada orang-orang yang lari dari daerah pedesaan ke kota selama konflik internal untuk kembali ke desa mereka masing-masing. Selain meningkatkan produksi pertanian, hal ini juga mengurangi jumlah orang yang akan terkatung pada pasokan pangan yang terbatas. Mengantisipasi ancaman kekurangan makanan, Fretilin berencana untuk menerapkan penjatahan makanan pada bulan Desember, dan mulai melakukan sensus untuk dapat menjalankan suatu sistem penjatahan (lihat Bab 7.3.: Pindahan Paksa dan Kelaparan).

184. Penutupan BNU dan kemustahilan untuk segera mendirikan sistem perbankan alternatif, yang Fretilin memang tidak memiliki keahlian untuk menjalankan,²⁴² tetap menjadi masalah selama pemerintahan Fretilin. Ketiadaan valuta asing berakibat benar-benar melumpuhkan kemampuan wilayah ini untuk menghidupkan kembali ekonomi tunai atau untuk menjalankan perdagangan internasional.^{*} Apapun yang tersisa dari komunitas pedagang Cina mampu untuk sedikit memompa ekonomi. Namun banyak yang telah meninggalkan pedesaan untuk datang ke Dili dan kota-kota lainnya atau telah pergi ke luar negeri, dengan membawa serta modalnya. Kemerosotan nilai mata uang memaksa Fretilin untuk membayar pegawai negeri yang ada dengan barang ketimbang uang tunai. Walau ada semua faktor-faktor negatif ini, kegiatan ekonomi mulai sedikit kembali ke pasar-pasar di Dili dan toko-toko Cina selama bulan Oktober dan November.²⁴³

185. Pendidikan merupakan bidang penting dalam kebijakan Fretilin. Fretilin telah melakukan banyak sebelum terjadi konflik internal dengan mengembangkan program melek huruf yang diilhami oleh pendidik Brazil, Paulo Freire.[†] Setelah konflik internal sistem pendidikan yang ada benar-benar lumpuh. Seperti halnya di bidang-bidang pemerintahan lainnya, sebagian besar personil yang cakap telah pergi. Baik sekolah-sekolah negeri maupun yang dijalankan Gereja tutup, yang terakhir ini tutup karena banyak suster dan pastor yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut juga pergi, sehingga membuat Francisco Xavier do Amaral berkomentar:

Sungguh disesalkan bahwa para "gembala" pergi ketika "domba-domba" memerlukan bimbingan mereka.²⁴⁴

186. Para guru yang tinggal dialihtugaskan sebagai serdadu Falintil atau sebagai pegawai pemerintah, dimana kemampuan membaca mereka amat dibutuhkan.²⁴⁵ Walaupun ada rencana

^{*} Kapal bantuan ACFOA berangkat dengan membawa kopi ke Australia. Namun demikian, uang yang didapat harus disimpan di Bank di Darwin.

[†] Sistem pendidikan masyarakat terutama ditujukan untuk memecahkan persoalan tingkat melek huruf yang rendah, yang dikembangkan oleh Paulo Freire, seorang pendidik Brazil.

untuk membuka kembali sejumlah Sekolah Dasar pada bulan November, dengan menggunakan siswa Sekolah Menengah Atas sebagai guru, hal ini tidak terjadi dan sekolah-sekolah tetap tutup.

187. Konflik internal telah mengakibatkan ratusan orang terluka, baik anggota militer maupun warga sipil. Dokter-dokter Portugis telah ditarik mundur pada tanggal 26 Agustus, walaupun sebagian besar pekerja kesehatan Timor terus bekerja tanpa gangguan.²⁴⁶ Masih cukup banyak pasokan obat-obatan di Dili, dan fasilitas medis walaupun sederhana tetapi mencukupi. Dengan perlengkapan dasar ini, dan dibantu oleh kedatangan sejumlah dokter dari ICRC dan sebuah NGO Australia, ASIAT (*Australian Society for Inter-Country Aid*), pada tanggal 1 September, Rumah Sakit Dili terus buka. Walaupun ASIAT berencana untuk membuka berbagai sekolah pelatihan medis—dan selama masa ini Fretilin juga membuka sekolah perawat kesehatan di Aileu pada bulan Agustus 1974—di luar Dili pelayanan kesehatan terbatas.²⁴⁷

188. Jelas bahwa antara bulan September dan Desember 1975, Fretilin melakukan upaya sungguh-sungguh untuk membangun pemerintahan interim yang terpercaya di seluruh wilayah Timor-Leste tanpa kehadiran Portugal, sementara tetap menanti kembalinya Portugal untuk menuntaskan proses dekolonisasi. Terbentur oleh kurangnya kemampuan keuangan dan administrasi, dan dalam konteks ketidakstabilan politik akibat konflik politik bulan Agustus serta peningkatan operasi militer lintas batas oleh pasukan bersenjata Indonesia, pemerintahan yang baru lahir ini menghadapi tekanan yang luar biasa.

Balibo: Indonesia meningkatkan intensitas operasi militer

189. Pada tanggal 15 Oktober Tim Susi dan batalyon-batalyon dari Brigade Infantri Kedua ABRI melancarkan serangan ke Balibó, dimana lima wartawan internasional terbunuh. Para wartawan tersebut tengah meliput berita mengenai berbagai operasi militer Indonesia di dalam Timor Portugis. Tiga wartawan Australia dan dua wartawan Inggris yang bekerja untuk Televisi Australia ditembak atau ditikam dalam keadaan yang ditutup-tutupi oleh pejabat militer Indonesia ketika itu.* Satu kemungkinan alasan atas eksekusi para wartawan itu adalah bahwa mereka menyaksikan besarnya skala operasi Indonesia di sekitar Balibo, yang jauh lebih besar dari penyusupan-penyusupan sebelumnya (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa).²⁴⁸

190. Pada tanggal 16 Oktober, ketika militer Indonesia menguasai Balibo dan Maliana, garis depan Fretilin pindah ke Atabae dan Bobonaro.²⁴⁹ Komisi memiliki rekaman film dari operasi-operasi militer Indonesia ini, yang memperlihatkan penggunaan kapal perang untuk membombardir posisi Fretilin dan pendaratan pesawat di Maliana, sesuatu yang jelas merupakan penyerangan besar-besaran.²⁵⁰ Tidak seperti serangan di bulan Agustus atas Atsabé yang menggunakan pasukan Partisan untuk mendukung unit-unit Pasukan Khusus, serangan atas Balibó tidak banyak menggunakan orang Timor.²⁵¹ Walaupun demikian, Indonesia berusaha menyalahkan sekutu UDT/Apodeti mereka atas kematian para wartawan tersebut. Secara umum, pihak berwenang Indonesia berulang kali menyangkal bahwa pasukan-pasukan mereka terlibat secara militer di Timor Portugis pada bulan September-November. Sebaliknya mereka menyatakan bahwa bentrokan apapun terjadi akibat para “Partisan” Timor-Leste yang berupaya menangkis serangan-serangan ke dalam wilayah Indonesia.

191. Selama bulan Oktober pasukan-pasukan lain yang dipimpin Kopassandha melancarkan serangan, dan berharap untuk menjangkau lebih jauh ke dalam. Mereka menemui perlawanan yang sengit dan berhasil diusir kembali. Laporan harian CIA, *the National Intelligence Daily*, melaporkan bahwa pada tanggal 20 Oktober serangan Indonesia “terhenti karena Jakarta gagal

* Meskipun hal ini diketahui pemerintah Australia dengan segera, tidak ada protes internasional atau seruan untuk diadakan penyelidikan. Memang, Pemerintah Australia tampaknya tidak memprotes baik secara diam-diam kepada pemerintah Indonesia tentang pembunuhan tersebut. Ini tetap menjadi masalah antara Indonesia dan Australia selama masa-masa pendudukan.

menguasai kota perbatasan Lebos”.²⁵² Tanpa perlindungan artileri laut di wilayah yang dekat dengan pantai, pasukan penginvansi Indonesia menemui kesulitan di wilayah pedalaman di mana kedua pihak lebih berimbang kekuatannya. Menurut Albino do Carmo, komandan Falintil/Fretilin, penyerangan tersebut terjadi:

*...Di [desa] Lela, berbatasan dengan Lamaknen, di daerah yang disebut Bulubulu. Saat itu kira-kira bulan Oktober, sekitar pertengahan bulan. Ada banyak orang di sana, mereka menembakkan mortir ke sini. Mereka memiliki senapan mesin, dua di antaranya. Ada banyak orang. Kami lihat dari kejauhan. Ada informasi bahwa [mereka] dari Menpur. Lebih dari 100 [orang]. Kami tidak bisa melihat di belakang [mereka]. Mereka tidak bisa maju karena...tidak bisa ke depan karena kami menembaki mereka. Kami pun punya senapan mesin dan mortir. Saya punya 20 anak buah saat itu.*²⁵³

192. Pasukan Fretilin secara tak terduga memberi perlawanan sengit terhadap pasukan Indonesia, yang juga bermasalah dengan persenjataannya, dan dihambat oleh permulaan musim hujan. Setelah jeda sejenak, operasi tersebut dimulai kembali pada tanggal 20 November dengan sebuah operasi yang diarahkan ke Atabae. Untuk pertama kalinya Pasukan Indonesia mendapatkan dukungan laut dan udara. Pada tanggal 27 November Atabae, yang dipertahankan oleh kompi kavaleri Portugis orang Timor-Leste yang loyal terhadap Fretilin, jatuh ke tangan penyerbu.²⁵⁴ Militer Indonesia kini sudah bersiap untuk melancarkan invasi besar-besaran ke Dili.

3.9 Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin, dan tanggapannya

Tinjauan

193. Dengan semakin gencarnya operasi militer Indonesia dan invasi besar-besaran tampak semakin pasti, Fretilin semakin perlu mencari cara untuk melibatkan komunitas internasional.

194. Pada awal November 1975 Portugal mengadakan pembicaraan bilateral dengan Indonesia di Roma. Dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan kembali komitmen mereka kepada dekolonisasi Timor Portugis yang teratur dan setuju untuk bekerja dan menyelenggarakan perundingan antara Portugal dan semua partai politik Timor. Dengan pasukan Indonesia yang sudah menduduki bagian yang cukup besar dari wilayah tersebut dan pemerintahnya selalu menghalang-halangi terjadinya pembicaraan antar semua pihak, pertemuan Roma tersebut gagal untuk mempertimbangkan realitas situasi di lapangan.

195. Fretilin memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak tak lama setelah pasukan Indonesia menduduki kota Atabae di bagian barat. Fretilin melakukan ini pada tanggal 28 November 1975. Fretilin membentuk sebuah pemerintahan, dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mencegah invasi besar-besaran yang akan terjadi.

196. Anggota empat partai politik Timor-Leste lainnya berkumpul di Bali. Pada tanggal 29 November, di bawah tekanan intelijen Indonesia, untuk membalas deklarasi sepihak Fretilin, mereka menandatangani apa yang disebut “Deklarasi Balibo”, yang mendeklarasikan “kemerdekaan dan integrasi” Timor Portugis ke dalam Indonesia. Portugal tidak mengakui kedua deklarasi tersebut. Indonesia bersiap untuk invasi besar-besaran.

Latar belakang deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin

197. Mantan Presiden Fretilin Francisco Xavier Amaral mengatakan kepada Komisi tentang dilema yang dihadapi Fretilin saat Pemerintah Kolonial Portugis tetap tinggal di Ataúro.

Dari sudut pandangan Fretilin kebijakannya untuk terus mengakui kedaulatan Portugal tanpa ada tanda-tanda apapun dari Portugal bahwa mereka berniat menjalankan kewenangan itu adalah suatu kebijakan yang berbahaya untuk dijalani. Walaupun sebagai penguasa de facto, Fretilin tidak memiliki legitimasi internasional sebagai penguasa. Fretilin bukan pemerintah yang dipilih dan ketakutannya adalah bahwa kekosongan politik ini akan memberikan dalih bagi Indonesia untuk melancarkan invasi besar-besaran ke Timor-Leste.²⁵⁵

198. Undangan Fretilin tanggal 25 Oktober kepada pemerintahan Portugis di Ataúro untuk mengirim delegasi ke Dili untuk melakukan penilaian situasi politik tidak mendapat tanggapan. Posisi Fretilin semakin mengeras ketika mengetahui terjadinya pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Portugal dan rekannya Menteri Luar Negeri Indonesia di Roma pada tanggal 1-2 November. Pernyataan pers bersama para Menteri Luar Negeri tersebut menyerukan dipulihkannya ketentraman dan ketertiban sebagai syarat bagi proses dekolonisasi, akan tetapi sama sekali tidak menyebutkan masuknya pasukan Indonesia jauh ke dalam wilayah Timor Portugis. Ketika diadakan pembicaraan di Roma, dan setelah kejatuhan Balibó dan Maliana ke pihak pasukan Indonesia pada tanggal 16 Oktober, garis depan Fretilin telah mundur ke Atabae dan Bobonaro.²⁵⁶

199. Bagi sebagian orang di Fretilin, kegagalan pembicaraan Roma merupakan pukulan terakhir. Ketika diwawancarai pada tahun 2004, Francisco Xavier do Amaral menyatakan bahwa pemerintah Portugal telah mengkhianati rakyat Timor-Leste:

Portugal dan Indonesia sudah setuju bahwa Indonesia tidak akan campur tangan dalam urusan Timor-Leste. Tapi pada akhirnya siapa yang turut campur? Indonesia. Dan apa yang dikatakan Portugal? Tidak ada. Mereka hanya berdiam diri. Bahkan tidak ada peringatan untuk Indonesia. Fretilin sudah cukup lama menunggu kesempatan untuk memulai negosiasi dengan Portugal, tapi mereka tetap diam, tidak menjawab. Apa sebenarnya alasan bagi penundaan-penundaan ini? Untuk membela kita atau mengkhianati?²⁵⁷

200. Fretilin kini harus menghadapi tiga kenyataan pahit: ancaman luar yang amat besar dari tetangganya yang besar di perbatasan maupun di wilayahnya, ekonomi yang tidak memiliki infrastruktur administrasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari, dan ketidakpedulian Portugal. José Gonçalves, ketua Komite Ekonomi dan Pengawas Fretilin, ditugaskan menghidupkan kembali ekonomi yang lumpuh. Ia menyatakan pada bulan Oktober 1975:

“Sekarang karena pemerintah Portugis sudah tidak ada dan negosiasi terus berjalan, kita harus mulai merencanakan untuk merdeka.”²⁵⁸

201. Dr Gonçalves menyadari bahwa pemulihan ekonomi domestik dan perdagangan internasional tidak akan mungkin terjadi apabila BNU, satu-satunya bank di Timor Portugis, tidak

buka kembali. Sebaliknya, apabila Fretilin terus mengakui pemerintahan Portugis sebagai penguasa yang sah di Timor-Leste bank tersebut tidak bisa buka kembali. Dr Gonçalves menyatakan:

*Kita tidak bisa seterusnya menunggu bank ini berfungsi kembali. Bank ini sudah dinasionalisasi dan kita bermaksud untuk menyelesaikan proses ini.*²⁵⁹

202. Pada bulan November, Fretilin mengirim delegasi ke Afrika untuk menggalang dukungan bagi deklarasi kemerdekaan sepihak.^{*} Delegasi tersebut terdiri dari dua anggota penting Komite Sentral Fretilin, Mári Alkatiri dan César Mau Laka. Mereka kembali ke Dili pada minggu ketiga bulan November dan menyatakan bahwa 25 negara berjanji untuk memberi pengakuan apabila Timor-Leste mendeklarasikan kemerdekaan, di antaranya Cina, Uni Sovyet, Zambia, Mozambique, Tanzania, Guinea-Bissau, Angola, Cabo Verde, São Tome dan Principe, Korea Utara, Vietnam Utara dan Selatan, Kamboja, Rumania, Belanda, Jerman Timur, Swedia, Aljazair, Kuba, Norwegia dan Brazil (lihat Bab 7.1.: Hak Menentukan Nasib Sendiri).²⁶⁰

203. Terlebih lagi, ancaman militer Indonesia semakin jelas, dan Fretilin mulai menumpuk senjata dan makanan di pedalaman untuk mengantisipasi invasi besar-besaran.²⁶¹ Fretilin juga mengambil langkah untuk memperbesar angkatan bersenjata. Walaupun pasukan Falintil tengah berperang di perbatasan dan sampai saat itu berhasil menahan tentara Indonesia, kemungkinan Falintil dilumpuhkan dalam suatu invasi besar-besaran cukup besar. Untuk mengantisipasi hal ini, Falintil mulai melatih dan mempersenjatai kelompok-kelompok milisi (*Milicia Popular de Libertacao Nacional*, Miplin).²⁶²

204. Bungkamnya komunitas internasional dan kegagalan Portugal untuk berkomunikasi dengan Fretilin setelah serangan 16 Oktober atas Balibó mulai membuat Fretilin yakin akan keterasingannya. Walaupun opini terpecah, pada minggu ketiga bulan November 1975, tak lama setelah Mári Alkatiri dan César Mau Laka kembali dari Afrika, Komite Sentral Fretilin memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan.²⁶³ Keputusan ini menjadwalkan deklarasi pada tanggal 1 Desember, hari Portugal merayakan kemerdekaannya dari penjajahan Spanyol.²⁶⁴

Deklarasi kemerdekaan

205. Pada tanggal 26 November, setelah dua minggu pemboman gencar dari laut dan udara, Atabae jatuh ke tangan pasukan bersenjata Indonesia. Komite Sentral menyimpulkan bahwa invasi besar-besaran sudah di ambang pintu. Dalam wawancaranya dengan Komisi pada tahun 2004 Mári Alkatiri mengingat kata-kata wakil presiden Fretilin, Nicolau Lobato, kepada Komite Sentral:

*Pasukan Indonesia sudah masuk di Atabae...Mereka sudah menduduki Atabae! Kalau kita tunggu sampai 1 Desember kita tidak akan punya waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan di Dili. Jadi sebaiknya kita proklamasikan kemerdekaan hari ini.*²⁶⁵

206. Walaupun ada penentangan terhadap keputusan mendeklarasi kemerdekaan, pada Jumat sore tanggal 28 November 1975, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan di hadapan 2.000 orang yang berkumpul di depan gedung pemerintahan Portugis.²⁶⁶ Pasukan Falintil berparade mengenakan seragam loreng dan ikat kepala berwarna sesuai satuan-satuan mereka.²⁶⁷ Francisco Xavier do Amaral datang dengan mobil Mercedes-Benz hitam, mobil resmi Gubernur

^{*} Sebelumnya, pada akhir bulan September konferensi negara-negara Asia Afrika yang diselenggarakan di Maputo, ibukota Mozambique memutuskan untuk "mendukung secara penuh perjuangan kemerdekaan yang dipimpin oleh Fretilin." Resolusi ini diusulkan oleh Presiden Mozambique Samora Machel dan mendapat dukungan dari negara peserta.

Portugis. Pada pukul 17:55 bendera Portugis, yang telah berkibar di Timor-Leste selama berabad-abad, diturunkan. Fretilin mengibarkan bendera baru Republik Demokratik Timor-Leste—merah, hitam dan kuning dengan bintang putih—dan hening cipta selama satu menit dilakukan untuk mengenang “semua orang yang telah gugur dalam beberapa bulan terakhir ini dan selama perang-perang anti-kolonial di Timor-Leste”.²⁶⁸ Sebuah meriam ditembakkan 20 kali sebagai tanda penghormatan bagi yang meninggal. Pemimpin Fretilin, Xavier do Amaral, kemudian membacakan proklamasi kemerdekaan:

Dengan menyatakan kehendak mulia rakyat Timor-leste dan untuk melindungi kedaulatan nasional yang sangat sah secara hukum, Komite Sentral Fretilim secara sepihak memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Timor-Leste. Mulai tengah malam nanti, [kami] menyatakan [kelahiran] suatu bangsa yang anti-kolonial dan anti-imperialis, negara Republik Demokratik Timor-Leste,

Hidup Republik Demokratik Timor-Leste!

Hidup Timor-Leste yang bebas dan merdeka!

Hidup Fretilin!

207. Setelah proklamasi, para hadirin menyanyikan “*Pátria! Pátria!*” (Tanah Air! Tanah Air!), dan mendeklarasikan lagu ini sebagai lagu kebangsaan. Timor-Leste kemudian menyiarkan berita deklarasi kemerdekaannya kepada dunia dari Pusat Komunikasi Marconi.²⁶⁹

208. Walaupun Fretilin telah merencanakan untuk melakukan deklarasi kemerdekaan tanggal 1 Desember, deklarasi kemerdekaan sepihak 28 November terjadi secara tak terduga dan tiba-tiba. Beberapa hal mengkonfirmasi ini, termasuk penulisan proklamasinya²⁷⁰ dan penjahitan benderanya²⁷¹ pada sore hari tanggal 28 November. Selain itu tidak semua pemimpin Fretilin hadir pada upacara proklamasinya.²⁷² Sekretaris Jenderal Fretilin, Alarico Fernandes, dan sekretaris urusan luar negeri, José Ramos-Horta, berada di Australia sejak 20 November untuk menggalang dukungan politik, sementara Juvenal Inácio (Sera Key) dan Vicente Reis (Sa’he) tengah memerangi pasukan Indonesia di perbatasan.

209. Keesokan harinya, 29 November, Komite Sentral Fretilin menunjuk Francisco Xavier do Amaral sebagai Presiden republik baru ini. Dalam pidato pengangkatannya, Xavier do Amaral menekankan bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh rakyat Timor-Leste. Ia mengatakan bahwa kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari kelalaian dan pengingkaran hak tersebut selama proses dekolonisasi pemerintah Portugis. Xavier do Amaral menegaskan:

Setelah 400 tahun penderitaan, kelaparan, pemiskinan, pengabaian dan pembantaian, apa lagi yang kita tunggu? Kawan-kawan, baik atau buruk, kita harus menjadi orang yang pertama dan yang terakhir untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi mulai hari ini, kita semua, ya kita semua, akan membangun bangsa kita, Timor-Leste.²⁷³

210. Menteri Pertahanan, Rogério Lobato, membacakan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Konstitusi, yang terdiri atas 55 pasal, ditulis hanya beberapa hari sebelum 28 November 1975.²⁷⁴ Pada tanggal 1 Desember Dewan Menteri diangkat di kediaman Gubernur Portugis di Lahane. Komite Sentral Fretilin menunjuk Wakil Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, sebagai Perdana Menteri.

211. Konstitusi tersebut memasukkan pasal-pasal yang menetapkan Timor-Leste untuk melakukan hal-hal berikut:

- Penghapusan struktur-struktur kolonial dan menciptakan masyarakat baru yang terbebas dari segala jenis dominasi dan pemerasan. (Pasal 2)
- Kebijakan-kebijakan pembangunan yang terfokus pada pembangunan pertanian dan industri. (Pasal 6)
- Melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi terencana. (Pasal 10)
- Memerangi buta huruf dan ketidaktahuan, melindungi dan mengembangkan budayanya. (Pasal 12)
- Mengembangkan dan menjalankan sebuah sistem kesehatan. (Pasal 13)
- Menjamin kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan. (Pasal 14)
- Menjamin kebebasan beragama. (Pasal 15)
- Mengembangkan “hubungan kerja sama dan bersahabat” dengan “kekuatan-kekuatan dunia yang demokratis dan progresif, yang dianggap sebagai sekutu alamiah.” (Pasal 16)
- Menjamin hak untuk ikut serta di dalam proses-proses konsolidasi demokratis. (Pasal 23)
- Menjamin kebebasan untuk berpikir, berasosiasi, berserikat, dan berbicara. (Pasal 24)
- Menjamin hak untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan umum. (Pasal 25)
- Menjamin hak untuk bekerja, mendapat pendidikan, dan kesehatan. (Pasal 27).

212. Konstitusi menetapkan sistem pemerintahan semi-presidensial. Perdana Menteri adalah kepala Dewan Menteri (Pasal 40) yang bertugas menjalankan pemerintahan. Presiden adalah Kepala Negara (Pasal 42) dan Panglima Angkatan Bersenjata (pasal 4). Presiden diberi wewenang untuk menunjuk dan memecat Perdana Menteri, Ketua Mahkamah Agung dan Gubernur Bank Timor-Leste (Pasal 42). Nicolau Lobato, yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri, menyusun sebuah daftar menteri dan wakil menteri, dan mengajukannya kepada Presiden dan Komite Sentral Fretilin untuk disahkan.²⁷⁵

Reaksi atas deklarasi kemerdekaan

Deklarasi Balibo

213. Sehari setelah deklarasi kemerdekaan Timor-Leste sepihak oleh Fretilin, keempat partai politik Timor-Leste lainnya—UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalhista—mengeluarkan “Proklamasi Integrasi” mereka untuk mengimbangi langkah Fretilin. Proklamasi tersebut menuduh Fretilin menghambat solusi damai atas konflik dan hak rakyat Timor Portugis atas penentuan nasib sendiri. Kemudian proklamasi itu menyatakan bahwa “seluruh bekas koloni Timor Portugis” akan diintegrasikan ke dalam Indonesia, dan menggambarkan hal ini sebagai “pengungkapan paling tegas dari perasaan rakyat Timor Portugis”. Pemerintah dan rakyat Indonesia diminta untuk “mengambil segala langkah untuk melindungi hidup rakyat yang kini menganggap dirinya orang Indonesia namun hidup di bawah teror dan praktek Fasis Fretilin dengan persetujuan Pemerintah Portugis”.²⁷⁶

214. Di bagian paling bawah deklarasi tersebut tercantum kata-kata “Dilakukan di Balibo” dan tanda tangan dari perwakilan keempat partai. Keadaan seputar pembuatan apa yang disebut Deklarasi Balibo telah menjadi sumber kontroversi selama bertahun-tahun.²⁷⁷ Komisi mendengarkan kesaksian dari para pemimpin politik Timor-Leste yang hadir pada saat penandatanganan yang mengatakan bahwa deklarasi tersebut disusun di Jakarta dan ditandatangani di sebuah hotel di Bali oleh para pemimpin partai, yang seperti dikatakan seorang penandatanganan, berada “di bawah pengawasan ketat”, namun tetap berusaha berargumen selama berjam-jam untuk tidak menandatangani dokumen tersebut.²⁷⁸ Mereka bersaksi mengenai tekanan yang dikenakan kepada politisi Timor oleh anggota badan intelijen Bakin

dalam penyusunan dan keputusan untuk memungut suara mengenai deklarasi tersebut.^{*} Deklarasi tersebut dibacakan dari pemancar radio berkekuatan tinggi di Balibo.²⁷⁹

Portugal

215. Portugal menolak baik deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin dan “Deklarasi Balibo”. Komunike Dewan Nasional Dekolonisasi Portugal pada tanggal 29 November menyatakan bahwa Portugal masih menganggap dirinya “penguasa yang memerintah” Timor.²⁸⁰ Komunike tersebut juga mengutuk intervensi militer atas wilayah tersebut dengan jelas mengacu kepada serangan militer Indonesia. Pemerintah Portugis bersikukuh bahwa Timor-Leste harus mencapai penyelesaian hasil perundingan ketiga partai politik, yang dapat memuaskan rakyat Timor-Leste dan dengan ketentuan bahwa “kepentingan sah wilayah geopolitis Indonesia” akan dipertimbangkan.²⁸¹

Indonesia

216. Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin menjadi pemicu bagi Presiden Soeharto untuk mensahkan invasi besar-besaran Indonesia atas Timor-Leste.²⁸² Setelah bertemu dengan Presiden Soeharto pada tanggal 29 November, Menteri Penerangan Indonesia Mashuri, mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan “tindakan sepihak” Fretilin dan posisi pemerintah Portugal yang “jelas-jelas merestui tindakan Fretilin.”²⁸³ Indonesia mengutuk tindakan sepihak Fretilin tetapi “sungguh-sungguh memahami pernyataan UDT, Apodeti, KOTA dan Tralabista bahwa, atas nama rakyat Timor Portugis, mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia.”²⁸⁴

217. Ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menerima Proklamasi Integrasi pada tanggal 1 Desember, ia mengatakan bahwa “perjuangan berat” masih ada di depan dan Indonesia akan memberikan “dukungan yang terselubung atau terbuka secara menyeluruh.” Adam Malik menyimpulkan dengan mengatakan “Diplomasi sudah berakhir. Kini persoalan Timor-Leste akan diselesaikan di medan tempur.”²⁸⁵

Tanggapan internasional yang lebih luas

218. Para pelaku penting dalam komunitas internasional telah lama menyadari bahwa invasi militer Indonesia atas Timor Portugis sangat mungkin terjadi. Australia sudah lama menerima bahwa penggabungan sudah menjadi kebijakan Indonesia yang “tetap” (lihat Bagian 3: Meningkatnya keterlibatan Indonesia di Timor Portugis: destablisasi dan diplomasi, di atas) dan mengetahui tentang skala keterlibatan militer Indonesia di wilayah tersebut.²⁸⁶ Banyak dokumen juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat juga mengetahui tentang rencana Indonesia untuk menguasai Timor-Leste dengan cara militer.²⁸⁷ Australia menolak untuk memberi pengakuan kepada bangsa baru ini dan memandang tindakan Fretilin sebagai “provokatif dan tidak bertanggung jawab”.²⁸⁸ Amerika Serikat menegaskan posisinya untuk tidak terlibat.²⁸⁹ Negara-negara Afrika yang baru merdeka, yakni Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique dan San Tomé dan Príncipe semuanya mengakui kemerdekaan Timor-Leste namun semua bangsa ini terlalu kecil untuk memiliki pengaruh dalam politik internasional. Cina dan Vietnam, pendukung Fretilin utama di Asia, memberi ucapan selamat yang hangat. Cina adalah satu-satunya anggota permanen Dewan Keamanan PBB yang mengakui deklarasi kemerdekaan tersebut.

219. Pada tanggal 6 Desember, sehari sebelum invasi, Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negerinya, Henry Kissinger, berada di Jakarta. Para analis CIA memprediksikan bahwa

^{*} Tiga dokumen lainnya, yang ditandatangani oleh orang Timor-Leste yang menyatakan atau membuat petisi untuk integrasi, Deklarasi Suai dan Bobonaro Declarations dan Petisi Batugade, sudah ada sebelum ‘Deklarasi Balibo’. Komisi menerima kesaksian bahwa dalam setidaknya dua dari dokumen-dokumen ini, Deklarasi Suai dan Petisi Batugade, agen-agen Indonesia juga terlibat dalam perumusan dan pemberian tekanan terhadap penandatanganan [lihat Submisi Domingos Oliveira, h.31 dan Wawancara CAVR dengan Claudio Vieira, Kupang, 25 Agustus 2004].

invasi akan terjadi setelah keberangkatan Ford.²⁹⁰ Pada tanggal 6 Desember Kissinger menyatakan bahwa penggunaan senjata buatan AS dalam operasi militer semacam itu dapat menjadi masalah, tapi kemudian menambahkan bahwa:

[I]tu tergantung bagaimana kita menafsirkan hal ini: apakah untuk membela diri atau sebagai operasi luar negeri.²⁹¹

220. Walaupun mengetahui hal ini, tidak pernah ada upaya oleh negara manapun untuk mencegah Indonesia, dan tidak ada satu negara pun yang mendekati Fretilin, yang lalu menyadari keterkucilannya.

Invasi besar-besaran di ambang pintu

221. Setelah deklarasi kemerdekaan situasi di Timor-Leste menjadi semakin tegang. Pimpinan Fretilin menunggu Indonesia menginvasi dan setiap malam anggota Komite Sentral melakukan patroli.²⁹² Pada tanggal 2 Desember delegasi Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Dili menerima telegram dari pemerintah Australia yang memperingatkan semua warga Australia di Timor-Leste untuk meninggalkan negeri tersebut demi keselamatan masing-masing.²⁹³ Kenetralan ICRC sudah diakui oleh Fretilin, namun tidak oleh UDT, Apodeti dan Indonesia. ICRC terpaksa mengungsi ke Pulau Ataúro pada tanggal 2 Desember, dan berencana untuk menjalankan klinik di situ untuk melayani Dili. Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan RDTL, Rogério Lobato, mengeluarkan pernyataan:

Berdasarkan informasi dari sumber-sumber intelijen Fretilin, kami menduga akan ada serangan besar-besaran atas Timor-Leste, khususnya ibukota Dili akan terjadi...Kami menyerukan dunia untuk menghentikan agresi kriminal ini, karena akan menyebabkan pertumpahan darah yang tiada henti. Bangsa Timor-Leste akan melawan.²⁹⁴

222. Pada tanggal 4 Desember sebuah delegasi yang terdiri dari Menteri Urusan Ekonomi dan Politik, Mári Alkatiri, Menteri Urusan Hubungan Luar Negeri dan Informasi, José Ramos-Horta, dan Menteri Pertahanan Nasional, Rogério Lobato, meninggalkan Timor-Leste.²⁹⁵ Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mempercayakan delegasi ini dengan tugas untuk menjalankan kampanye diplomatik di luar negeri dan untuk mencari persenjataan untuk membela republik baru ini.²⁹⁶ Pada tanggal 6 Desember kelompok pekerja ICRC terakhir meninggalkan Dili ke Ataúro. Sore itu orang-orang mulai mengungsi ke pegunungan. Malam itu Roger East, satu-satunya reporter luar negeri yang tinggal di Timor-Leste, menulis:

Dengan semakin memburuknya situasi keamanan, orang-orang perlahan mulai mengungsi ke perbukitan. Malam ini Dili sepi dan hampir kosong, ditinggalkan oleh penghuninya. Jam malam mulai diberlakukan pada hari keempat dan serdadu bersenjata menjaga pantai dan jalan-jalan.²⁹⁷

3.10 Invasi Besar-Besaran

Tinjauan

223. Keinginan Indonesia untuk melaksanakan invasi besar-besaran terhadap Timor-Leste menjadi jelas pada bulan Desember. Intelijen Australia sedang memantau situasi, dan pada

tanggal 2 Desember Pemerintah Australia memberitahukan warga negaranya untuk meninggalkan Timor-Leste. Sebagian besar dari orang asing yang masih berada di wilayah itu pergi beberapa hari kemudian. Fretilin mengirim sebuah delegasi untuk melakukan sebuah kampanye diplomatik. Pasukan invasi mencakup sebagian kecil anggota UDT dan Apodeti. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan kesan bahwa mereka hanya dibantu oleh sejumlah "sukarelawan" Indonesia. Militer bahkan sampai menghapuskan tanda pengenal dari kapal pendarat dan menggunakan berbagai senjata yang dibeli khusus untuk penyerangan itu, yang tidak dapat ditelusuri hingga ke sponsor utama militernya, yakni Amerika Serikat. Walau demikian, invasi tersebut adalah serangan skala penuh dari udara dan laut, yang melibatkan sejumlah besar pasukan. Fretilin memberi perlawanan terhadap pasukan invasi ketika para pemimpin politiknya mundur ke berbagai bukit Aileu. Pada hari invasi terjadi sejumlah kekejaman yang dilakukan pasukan Indonesia terhadap penduduk sipil Timor, termasuk banyak pembunuhan dan pembantaian.

224. Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan segera membahas invasi tersebut dan Dewan Keamanan dengan suara bulat mengeluarkan sebuah resolusi pada tanggal 22 Desember untuk mengutuk invasi itu, menuntut penarikan segera Pasukan Indonesia dan menegaskan kembali hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Seorang utusan PBB dikirimkan untuk menilai situasi di Timor-Leste, tetapi upayanya dihambat dan debat PBB pun dipindahkan ke Majelis Umum pada awal tahun 1976.

Keputusan Indonesia untuk menginvasi dan melakukan perang terbuka

225. Pada tanggal 28 November 1975, Pasukan Indonesia sudah menguasai cukup banyak daerah di Timor-Leste. Pemerintah Indonesia menyelesaikan persiapan akhir politiknya pada awal bulan Desember, dan membulatkan tekadnya untuk mengambil alih wilayah itu. Ini bukanlah suatu berita baru bagi para penguasa Barat. Intelijen AS dan Australia telah memantau penguatan pasukan Indonesia, dan pemerintah mereka telah terlibat dalam dialog yang terus menerus dengan Indonesia selama periode operasi militer di bawah Operasi Flamboyan, terutama melalui Harry Tjan Silalahi dan Yusuf Wanandi dari CSIS, think-tank yang dibentuk oleh Kepala Intelijen Jenderal Ali Moertopo. Setelah mendapat peringatan dari Pemerintah Australia pada tanggal 2 Desember sebagian besar warga asing yang masih tersisa segera pergi dari Dili. Warga Australia Roger East adalah satu-satunya wartawan asing yang tersisa di wilayah itu.

226. Perdana Menteri Australia Whitlam telah menyatakan dalam pertemuannya di Townsville dan Wonosobo dengan Presiden Soeharto persetujuannya kepada Indonesia untuk menggabungkan Timor-Leste.²⁹⁸ Menyadari akan adanya kunjungan Presiden AS Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger ke Jakarta, pada tanggal 5 Desember Fretilin dengan putus asa mengirimkan sebuah surat kepada Presiden Ford:

Kami telah dituduh di Majelis Umum PBB sebagai negara agresor...Kini kami mendengar bahwa "Timor-Leste telah melakukan tindakan agresi" melawan Indonesia dan bahwa rakyatnya menuntut intervensi penuh. Pemerintah kami yakin bahwa tuduhan-tuduhan tidak berdasar ini adalah awal dari sebuah peperangan terbuka.²⁹⁹

227. Invasi terhadap Timor-Leste yang akan segera terjadi dibahas secara singkat antara Presiden Ford, Presiden Soeharto serta Menteri Luar Negeri Kissinger. Pihak Amerika Serikat mengungkapkan persetujuannya terhadap penggabungan Indonesia atas Timor-Leste yang bakal terjadi:

[Soeharto] Kami meminta pengertian anda jika kami merasa perlu mengambil tindakan yang cepat dan drastis.

[Ford] Kami akan memahami dan tidak akan memperlakukan hal ini. Kami memahami masalah yang Anda hadapi dan maksud anda.³⁰⁰

228. Setelah berhasil mendapatkan dukungan utama internasional, Indonesia juga ingin mengesahkan keputusannya secara domestik melalui Parlemen. Pada tanggal 6 Desember Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia menyatakan bahwa:

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah penyelesaian terhadap masalah Timor-Timur.

Sangat menyesali tindakan Fretilin untuk mendeklarasikan kemerdekaan Timor Portugis pada tanggal 28 November 1975, yang jelas bertentangan...[proses dekolonisasi]...sesuai dengan persetujuan Roma.³⁰¹

229. Pernyataan MPR diakhiri dengan menyatakan kembali prinsip anti-kolonial Indonesia.* Pada hari yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan ketetapan yang menyatakan bahwa:

Terdapat suatu kehendak dari rakyat Timor Portugis untuk bergabung dengan Republik Indonesia yang harus diakui oleh DPR.³⁰²

Dili mempersiapkan strategi Pertahanannya

230. Fretilin dapat mengandalkan 10,000 pasukan untuk mempertahankan Timor-Leste, yang terdiri dari 2,500 serdadu profesional Timor dalam tentara Portugis, dan sekitar 7,000 warga sipil terlatih.³⁰³ Pasukan itu dipersenjatai dengan senapan Mauser dan amunisi yang berlimpah dari persediaan NATO Portugis. Fretilin juga memiliki kepemimpinan militer yang kompeten, dipimpin oleh Fernando do Carmo, anggota militer Timor dalam angkatan bersenjata Portugis. Selama periode operasi rahasia Indonesia di perbatasan dari bulan September 1975 sampai invasi Dili bulan Desember, pasukan Fretilin unggul di beberapa daerah, di mana pasukan Indonesia tidak memiliki dukungan artileri angkatan laut dan mendapatkan pengalaman perang yang berharga.

231. Pada bulan Oktober, Fretilin mengirim sebuah telegram kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, yang menunjukkan keinginannya untuk melawan intervensi bersenjata oleh Indonesia:

Kami akan melawan sampai orang yang terakhir dan tidak akan pernah meletakkan senjata selagi hak demokratik rakyat kami tidak dihormati. Indonesia sangat terlibat dalam pelatihan pasukan gerilya di Timor Indonesia yang merupakan pelanggaran prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Kami menyerukan Anda untuk menghentikan agresi militer Indonesia terhadap bangsa kami.³⁰⁴

* Tidak ada persetujuan formal antara Portugal dan Indonesia dari pertemuan Roma pada bulan November. Pada saat berlangsungnya pertemuan itu para pasukan Indonesia sudah menduduki beberapa bagian Timor Portugis, administrasi kolonial Portugis berada di Ataúro dan berbagai upaya Fretilin untuk berkomunikasi dengan mereka pun tidak terjawab. Komisi mendengar sebuah submisi dari anggota CSIS Jusuf Wanandi bahwa deklarasi unilateral kemerdekaan oleh Fretilin menyebabkan terjadinya perselisihan di Indonesia "untuk mendukung operasi militer untuk melibatkan diri di Timor-Leste. Oleh karena itu, apa yang sebelumnya telah digolongkan dengan operasi intelijen dan merupakan rahasia, menjadi operasi militer gabungan dan didukung oleh semua pasukan..." Lihat submisi yang dibuat di audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974-76, 16 Desember 2003.

Berbagai persiapan militer Indonesia: Operasi Seroja

232. Perlawanan yang dihadapi Pasukan Khusus selama serangan penyusupan mereka pada bulan Agustus dan September mendorong dibentuknya Komando Pasukan Tugas Gabungan Operasi Seroja pada bulan Oktober 1975, dan jumlah pasukan ditambah hingga 3,200 orang.³⁰⁵ Bala bantuan ini termasuk Detasemen Tempur ke-2 Kopassandha,[†] Batalyon Infanteri ke-5[‡] Marinir dari Surabaya, kapal selam Ratulangi, dua pesawat pengangkut angkatan udara, dan tiga batalyon dari Brigade Infanteri ke-2 (Jawa Timur).³⁰⁶ Sementara berbagai serangan susupan di perbatasan berlanjut, yang berakibat majunya ABRI di kawasan perbatasan kota pesisir Balibo dan Atsabe, Komando Seroja merencanakan invasi besar-besaran terhadap Timor-Leste. Ini menjadi serangan dari dua sisi oleh pasukan gabungan terhadap Dili pada tanggal 7 Desember. Rencana itu menggunakan beberapa Batalyon Marinir dan Infantri Angkatan Darat yang dibawa dengan kapal dari kota perbatasan Atabae di Distrik Bobonaro, yang telah diduduki oleh Brigade Infanteri ke-2 dan Tim Susi. Tujuannya adalah untuk melakukan sebuah pendaratan amfibi di Dili saat fajar, tidak lama kemudian diikuti oleh turunnya pasukan terjun patung dari Komando Pasukan Sandhi Yudha dan Kostrad ke pusat kota.³⁰⁷

Invasi Dili dan Baucau

Penyerangan

233. Pada tanggal 7 Desember 1975 Indonesia melancarkan sebuah serangan besar-besaran atas Dili. Ini adalah ofensif militer besar yang melibatkan pasukan dengan dukungan penuh dari laut dan udara.³⁰⁸ Penyerangan ini dilakukan tanpa adanya formalitas pernyataan perang.[§] Kota Dili sudah berada dalam kondisi siaga selama sehari-hari, menantikan serangan. Pada tahun 1975, jumlah penduduk Dili kurang lebih 28,000 penduduk. Sementara beberapa unit bersenjata Fretilin bertahan untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan invasi, para penduduk sipil dan pemimpin Fretilin menyingkir menuju Aileu. Banyak yang tidak dapat melarikan diri. Pasukan invasi melakukan kekejaman terhadap masyarakat sipil dan membuat beberapa kesalahan militer besar yang mengakibatkan kematian yang signifikan di pihak mereka sendiri.

234. Pada tanggal 6 Desember sore hari, beberapa ratus Partisan Timor dan pasukan Indonesia dari Unit Marinir 1 menaiki Kapal Perang Angkatan Laut Teluk Bone di Atabae dan berlayar menuju Dili. Mereka akan melakukan persiapan pendaratan pada malam hari untuk invasi besar-besaran pada hari berikutnya.³⁰⁹ Pada pukul dua pagi tanggal 7 Desember, lima kapal perang Indonesia tiba lagi di Dili.³¹⁰ Melihat kehadiran mereka, Fretilin mematikan listrik kota pada pukul tiga pagi, menyelimuti kota dengan kegelapan. Kapal-kapal komando angkatan laut Indonesia pun mulai menembaki Dili, namun ini tidak terjadi sesuai rencana. Wartawan Indonesia Subroto menyertai pasukan invasi dan melaporkan:

^{*} *Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja*. Brig. Gen. Chamid Soeweno, kemudian bertugas sebagai Komandan Pusat Intelijen Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), adalah komandan terpilih. Kol. Dading Kalbuadi tetap menjadi Asisten Intelijen.

[†] Komando Pasukan Sandhi Yudha.

[‡] Diganti menjadi Pasmar 1.

[§] Jumlah pasukan yang menyerbut tidak diketahui dengan pasti. Namun tambahan beberapa ribu yang mendarat tanggal 7 dan 10 Desember, 10-20.000 diperkirakan sudah mendarat selama beberapa minggu berikutnya, termasuk sejumlah besar lagi pada Hari Natal. Lihat Carmel Budiardjo and Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, h 15, 23; Dunn 2003, h. 244.

Karena merasa faktor pendudukan telah hilang, maka Pangkogasgab Brigjen. TNI Soewono memerintahkan KRI Ratulangi, KRI Barakuda, KRI Martadinata, dan KRI Jayawijaya membuka tembakan ke arah pantai. Gempuran ini terlampau hebat sehingga unsur pendudukannya semakin tidak ada dan malah membuat satuan Pasmar 1 yang telah mendarat tidak dapat bekerja secara maksimal akibat tembakan meriam itu.³¹¹

235. Kira-kira pukul setengah lima pagi, 400 marinir^{*} bersama dengan tank-tank amfibi ringan dan kendaraan pengangkut personil bersenjata mendarat di Kampung Alor yang terletak di bagian Barat Dili.³¹² Perlawanan Fretilin/Falintil tidak banyak, dan pada pukul tujuh Marinir Indonesia telah berhasil menguasai daerah itu. Setelah itu Angkatan Laut Indonesia membombardir bagian timur dan barat kota Dili, yang mereka sangka adalah tempat artileri Fretilin, untuk persiapan kedatangan pasukan terjun payung.³¹³

236. Sebelumnya, sebelum pukul enam pagi, sembilan pesawat Hercules C-130B terbang di atas Dili dan menurunkan kontingen pertama pasukan terjun payung Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kelompok 1) dan Kostrad (Yonif 501).³¹⁴ Intelijen yang kurang baik menyebabkan pasukan ini diturunkan langsung di kota, suatu tempat pendaratan yang sangat berbahaya.³¹⁵ Sebagian besar pasukan ini mendarat di bagian timur laut kota Dili. Beberapa pasukan terjun payung ditembaki oleh pasukan Fretilin/Falintil ketika masih di udara; yang lainnya terluka atau mati saat mereka mendarat di antara sejumlah gedung dan kabel listrik. Satu pesawat menurunkan sejumlah pasukan terjun payung di laut, sehingga mereka tenggelam, dan yang lainnya di belakang garis Fretilin.³¹⁶ Penerjunan kedua dilakukan menjelang pukul delapan pagi dan mengakibatkan beberapa unit ABRI saling bertempur dalam kebingungan. Karena penerjunan pagi hari tidak berlangsung dengan baik, maka penurunan pada sore harinya dibatalkan oleh Komando Pasukan Tugass Gabungan.³¹⁷

237. Pasukan Fretilin/Falintil yang mempertahankan kota menikmati sukses awal. Ketika dua pesawat Dakota C 47 yang membawa 38 tentara Pasukan Khusus mencoba untuk mendarat dan menguasai pelabuhan udara Comoro di bagian barat kota Dili, Fretilin berhasil menghalau salah satu pesawat itu.³¹⁸ Meskipun demikian, tidak lama kemudian dengan kekuatan senjata yang lebih besar ABRI mulai unggul. Seperti yang dikatakan serdadu Fretilin/Falintil Carlos Maria Soares:

...Kami berada di Pos Fretilin di Bidau Santana. Kami mulai melakukan perlawanan terhadap TNI [ABRI] di bawah komandan Amandio. Pada saat itu kami berjumlah 21 orang...Perlawanan kami tidak bertahan lama karena kami tidak memiliki kekuatan yang seimbang dan kekurangan amunisi.³¹⁹

238. Pada tengah hari pasukan Indonesia berhasil menduduki *Palácio do Governo* yang berada di jantung kota Dili dan menempatkan tim-timnya di sepanjang jalan utama ke luar dari pusat kota. Pasukan Fretilin/Falintil tetap menguasai Taibessi dan Lahane di kaki bukit di selatan Dili, begitu juga beberapa bukit di selatan Fatuhada dan di dekat pelabuhan udara Comoro.

Kontrol informasi: upaya menyembunyikan keterlibatan ABRI

239. Untuk mempertahankan dongeng bahwa tidak satu pun personil militernya terlibat, ABRI menghapus tanda pengenal pada pesawatnya.³²⁰ Pasukan ABRI menggunakan AK-47 dan senjata ringan lainnya yang didapatkan oleh Jenderal Benny Moerdani khusus untuk menginvasi

^{*} Dari 5 Batalion Tim Pendarat (Yonif 5 Brigif 1 Pasrat Marinir, disebut sebagai Pasmar 1).

Timor-Leste. Tujuannya adalah untuk menyangkal keterlibatan ABRI dan menghindari pelibatan penyalur senjata utama ABRI, khususnya Amerika Serikat.³²¹ Sebagian besar dari persenjataan berat – pesawat, kapal dan landasan pesawat, juga pelatihan kebanyakan tentara elit seperti brigade lintas udara – telah dipasok oleh Amerika Serikat.³²²

240. Satu-satunya wartawan asing yang tetap berada di Timor-Leste, warga Australia Roger East, dibawa dari Hotel Turismo pada pagi hari terjadinya pendaratan dan dibunuh di pantai oleh pasukan Indonesia.³²³ Jumlah wartawan asing yang mati karena dibunuh oleh militer Indonesia menjadi enam orang dalam waktu kurang dari dua bulan, dan ini memastikan bahwa cerita mengenai invasi Indonesia dan berbagai operasi setelahnya tidak diliput secara dekat oleh media internasional.

241. Militer Indonesia berupaya untuk mempertahankan cerita bohong bahwa invasi terhadap Dili telah dilakukan oleh Partisan Timor dari empat partai politik yang telah menandatangani Deklarasi Balibo. Sehari setelah invasi Dili sebuah surat kabar resmi Indonesia menyebutkan “jatuhnya Dili pada tanggal 7 Desember ke tangan pasukan gabungan Apodeti, UDT, Kota dan Tralabista.”³²⁴ Pernyataan ini hanya menyebut secara selintas pada halaman tiga tentang ‘sukarelawan’ Indonesia yang terlibat dalam operasi itu. Enam hari kemudian Menteri Penerangan Indonesia mengatakan bahwa:

Para sukarelawan yang atas permintaan Apodeti, UDT, Kota dan Tralabista membantu Saudara-saudaranya di Timor Portugis tidak mungkin lagi ditahan oleh Pemerintah [Indonesia]³²⁵

242. Para wartawan Indonesia menyebarkan dan berkali-kali memberitakan kebohongan ini, yang memperkuat mitos bahwa Indonesia tidak menginvasi melainkan partai pendukung integrasi Timor yang kembali mengambil kekuasaan di wilayahnya dengan bantuan dari sejumlah kecil “sukarelawan” Indonesia.³²⁶ Sejarawan Indonesia Dr Asvi Warman Adam, seorang Profesor Penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan kepada Komisi bahwa mitos ini mempunyai dampak jangka panjang di Indonesia.³²⁷ Dalam menilai beberapa titik sejarah penting dia percaya bahwa perlu ada pertimbangan kembali di Indonesia berkaitan dengan periode ini, Dr Adam mengatakan kepada Komisi bahwa:

Istilah ‘sukarelawan’ jelas tidak benar sebab harus diakui bahwa mereka adalah tentara Indonesia.

243. Mengenai skala penyerangan terhadap Dili, Dr Adam mengatakan kepada Komisi bahwa serangan ini dapat “disejajarkan dengan serangan untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta [pada tahun 1958] yang merupakan operasi militer terbesar dalam sejarah perang Indonesia”.

Kekerasan besar-besaran terhadap penduduk sipil

244. Selain pembunuhan penduduk sipil yang sewenang-wenang, sejumlah pembunuhan besar-besaran terjadi selama beberapa hari pertama invasi. Komisi diberitahukan bahwa anggota komunitas Cina di Dili yang menjadi sasaran serdadu Indonesia, ketika sekelompok penduduk sipil dibunuh di daerah pusat kota di Colmera dalam dua hari pertama.³²⁸ Pada tanggal 8 Desember terjadi pembunuhan terhadap beberapa kelompok penduduk sipil di pelabuhan Dili, termasuk Isabel Lobato, isteri dari pemimpin Fretilin Nicolau Lobato, yang ditembak di bagian punggung di pagi hari, anggota Fretilin Rosa Muki Bonaparte dan wartawan Australia Roger East di sore hari.³²⁹ Bukti menunjukkan bahwa para anggota Fretilin ditarik keluar dari sekumpulan penduduk sipil yang kebingungan dan telah berkumpul di dekat pelabuhan. Orang-orang ini kemudian dibawa ke pelabuhan dan dibunuh.³³⁰ Komisi menerima bukti mengenai sebuah “daftar

incaran” ABRI yang berisi para individu yang menjadi sasaran pembunuhan, yang disusun selama bulan-bulan berlangsungnya operasi intelijen rahasia menjelang invasi besar-besaran.³³¹

245. Pada tanggal 8 Desember Jenderal Moerdani berkeliling di Dili didampingi oleh Kolonel Dading Kalbuadi, dan mengunjungi pelabuhan:

Siang itu Kolonel AL R. Kasenda, Kepala Staf Komando Tugas Gabungan, turun dari KRI Ratulangi untuk menginspeksi kota Dili. Inspeksi tersebut dilakukan dengan mengendarai kendaraan amfibi BTR-50 APC (pengangkut personil). Di pelabuhan Dili, Kapten AL R. Kasenda bertemu dengan Mayor Jenderal Benny Moerdani, lalu ia berjalan bersamanya menuju kantor Gubernur. Pada saat itu di jalanan masih tergeletak mayat-mayat Fretilin yang belum dikuburkan.³³²

246. Berbagai kelompok penduduk sipil lainnya dibunuh ketika pasukan Indonesia bergerak menuju markas Falintil di kaki bukit di selatan Dili. Komisi mendengar sejumlah kesaksian mengenai pembantaian 21 penduduk sipil di gedung *Assistência*, dekat sebuah basis Fretilin di gedung Matadouro:

*...mereka [ABRI] memisahkan yang laki-laki dari yang perempuan. Mereka membawa para lelaki itu ke sisi gedung yang tertutupi rumput yang tinggi...Segera setelah itu, kami mendengar suara tembakan dan ledakan sebuah granat. Tembakan berlangsung sangat lama...para lelaki yang telah dibawa ke sisi gedung itu semuanya telah dibunuh.*³³³

247. Pembunuhan penduduk sipil oleh pasukan Indonesia ini tampaknya merupakan sebuah pola yang terjadi berulang kali pada hari invasi.³³⁴ Sebuah pernyataan kepada Komisi mengenai satu pembantaian lain di daerah Caicoli di Dili tengah, mengatakan bahwa:

*Pada tanggal 7 Desember Indonesia melakukan invasi dengan pasukan terjun payung dini hari, mendarat di Dili. Pada saat itu komandan [Falintil] Sersan Constancio Soares ditembak mati tepat di depan toko Sang Thai Ho di Colmera. Tengah hari TNI menyerang markas besar polisi militer di Caicoli dan menangkap sekitar 50 orang. TNI memerintahkan mereka berbaris dan kemudian menembak mati mereka.*³³⁵

Para pemimpin Fretilin menyingkir ke pedalaman

248. Komisi mendengarkan banyak kesaksian dan pernyataan mengenai pengungsian ke pedalaman ketika invasi terjadi.³³⁶ Rencana Fretilin adalah untuk mengundurkan diri ke selatan, dengan memberikan perlawanan yang cukup untuk menghalang-halangi majunya Pasukan Indonesia. Sejumlah besar penduduk sipil Dili lari dengan mereka menuju Aileu.³³⁷

249. Walaupun ICRC telah memohon sebelum meninggalkan Dili pada hari-hari menjelang invasi besar-besaran, Fretilin membawa para tahanan UDT dan Apodeti dengan mereka ketika lari,

Pasukan invasi menduduki Baucau

250. Pada tanggal 9 Desember empat Kapal Perang Indonesia membawa para marinir Indonesia dan 1,500 Partisan Timor, dan dua kapal perang fregat Indonesia buatan Soviet meninggalkan perairan Dili menuju Baucau. Kira-kira pukul enam pagi tanggal 10 Desember, dengan dukungan Artileri Angkatan Laut, satu tim Marinir yang dipandu oleh Manuel Carrascalão di bawah komando Kolonel Dading Kalbuadi mendarat di sebuah pantai dekat Laga di Distrik Baucau. Komisi mendengar kesaksian bahwa serangan di Baucau hampir tidak menemui perlawanan bersenjata sehingga Pasukan Indonesia dapat menguasai kota itu dengan cepat.³³⁸

Harga invasi besar-besaran

251. Berbagai kekejaman yang dilakukan terhadap penduduk sipil di Dili pada hari-hari pertama invasi terdiri dari pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. Hampir tidak ada sanksi disipliner bagi pasukan Indonesia yang bertanggung jawab atas sejumlah tindakan seperti itu. Tragisnya, ini menjadi pola impunitas penuh atas kekerasan terhadap penduduk sipil yang menjadi ciri dalam konflik di tahun-tahun mendatang. Pada hari kesembilan invasi, Fretilin mengirimkan lagi satu telegram kepada Dewan Keamanan PBB. Menteri informasi Fretilin Alarico Fernandes melaporkan penjarahan yang merajalela di Dili, dan kehadiran 19 kapal di pelabuhan yang terlibat dalam penjarahan tersebut.³³⁹

252. Harga yang harus dibayar dalam hal kematian bagi pasukan Indonesia juga tinggi. Invasi pertama ABRI berhasil mencapai tujuan militer yaitu mengambil alih kota Dili dan Baucau, tetapi perencanaan yang buruk dan perubahan pada saat-saat terakhir mengakibatkan kekacauan dalam pendaratan Amphibi dan tingginya angka kematian pasukan terjun payung elit Kostrad dan Kopassandha. Jenderal Benny Moerdani, yang memainkan peran utama dalam merencanakan invasi itu, memberikan analisis berikut ini mengenai pasukan invasi Indonesia:

Pasukan (kami) tidak menerapkan disiplin, mereka saling menembak satu sama lain. Ini memalukan... Dari perspektif militer, kami tidak merasa bangga atas operasi tersebut.³⁴⁰

Tanggapan PBB terhadap invasi besar-besaran

253. Komisi mendengarkan kesaksian mengenai situasi PBB di New York pada saat itu dari David Scott, seorang pekerja keadilan sosial senior Australia, yang telah dikirim oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil ke New York untuk mendukung upaya José Ramos-Horta, tidak lama setelah terjadinya invasi:

Sekretaris Komite Keempat, yang tengah membahas laporan invasi oleh Indonesia, mengatakan pada saya bahwa sangat sedikit orang di New York dan di PBB yang mengetahui apapun tentang Timor. Delegasi Indonesia mengatakan bahwa 'kita pergi ke Timor itu seperti memadamkan api di dapur di rumah sebelah, dan setelah itu kita akan mundur.'

Keesokan harinya Ramos-Horta datang dengan Araujo, dan sebuah momen penting adalah diterimanya Ramos-Horta sebagai perwakilan rakyat Timor...dalam dua minggu berikutnya, Ramos-Horta...berkampanye dengan gigih untuk mengangkat kasus pengakuan dan mempertahankan permasalahan Timor di agenda PBB dan mendukung resolusi-resolusinya, yang menyerukan Indonesia untuk menarik diri, dan menegaskan hak Timor atas penentuan nasib sendiri.³⁴¹

254. Pada tanggal 12 Desember Majelis Umum mensahkan Resolusi 3485, yang mengutuk invasi itu dan menyerukan penarikan pasukan Indonesia dari Timor Portugis. Dewan Keamanan melangsungkan pertemuan tiga kali pada bulan Desember untuk mendiskusikan situasi di Timor-Leste, dan pada tanggal 22 Desember dengan suara bulat mengeluarkan resolusi 384 yang menuntut Indonesia untuk menarik pasukannya dan menegaskan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri.

255. Resolusi Dewan Keamanan menginstruksikan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengirim seorang utusan khusus ke Timor-Leste. Perwakilan itu, Winspeare Guicciardi, mengunjungi berbagai wilayah di Timor-Leste yang dikuasai oleh Indonesia pada akhir Januari 1976. Namun upayanya untuk bertemu dengan pimpinan Fretilin dihalang-halangi. Komisi mendengar kesaksian mengenai berbagai upaya untuk menyiapkan beberapa tempat pendaratan yang aman di pantai selatan, melalui siaran radio Fretilin ke sebuah radio-set di Darwin. Meskipun demikian, berbagai tempat yang memungkinkan untuk dijadikan pendaratan itu dibom oleh Militer Indonesia dan Pemerintah Australia menutup radio tersebut sehingga semakin mengacaukan upaya untuk berkomunikasi.³⁴² Indonesia juga mengancam akan menenggelamkan sebuah corvette Portugis yang akan digunakan untuk mendaratkan Guicciardi di pantai selatan Timor-Leste untuk pertemuan-pertemuan ini.³⁴³

256. Akibatnya adalah bahwa PBB tidak mendapatkan informasi yang baik mengenai situasi di Timor-Leste pada saat itu, dan PBB tidak berhasil mendengar pandangan kepemimpinan Fretilin di dalam wilayah itu atau melihat sendiri kondisi di sejumlah daerah yang dikuasai Fretilin. Setelah tanggapan awal ini, PBB tidak pernah mengambil langkah yang berarti untuk segera mengunjungi Timor-Leste. Debat kembali pada Sidang Umum, yang walaupun terus mengutuk invasi itu dan menegaskan kembali hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, tidak pernah melakukan tekanan yang berarti untuk memaksa Indonesia untuk menghentikan aksinya.³⁴⁴

3.11 Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan dan upaya Indonesia untuk meresmikan integrasi.

Tinjauan

257. Indonesia segera membentuk sebuah Pemerintahan Sementara pada tanggal 17 Desember 1975, yang sebagian besar terdiri dari para anggota Partai Politik Apodeti dan UDT yang ikut dalam invasi besar-besaran.³⁴⁵ José Ramos-Horta diterima di PBB sebagai juru bicara bagi rakyat Timor, dan kegiatan diplomatik saat itu sungguh menegangkan.

258. Kepemimpinan Fretilin telah menarik diri ke wilayah pedalaman, dengan membawa para tahanan UDT dan Apodeti yang sebelumnya ditahan di penjara mereka di Taibessi Dili. Ketika pasukan Indonesia bergerak mendekati ke markas Fretilin di Aileu, para anggota Fretilin melakukan pembantaian terhadap sejumlah besar tahanan ini. Ketika mundur dari pasukan Indonesia yang semakin mendekati, pembantaian tahanan terjadi lagi di Maubisse dan Same pada akhir Desember dan Januari 1976.

259. Sejumlah besar penduduk sipil Timor telah mengosongkan wilayah pemukiman di kota dan desa, dan menetap di berbagai daerah yang dikuasai Fretilin. Pada bulan Mei 1976, Fretilin mengadakan sebuah konferensi nasional untuk membahas strateginya. Fretilin merumuskan suatu strategi perlawanan nasional yang didasarkan pada penduduk sipil yang tinggal di pegunungan bersama para pejuang di sejumlah kawasan bebas. Warga sipil akan memberikan dukungan logistik kepada para pejuang Fretilin. Berbagai organisasi perempuan dan pemuda melakukan sejumlah kegiatan pendidikan dan kegiatan sosial lainnya, serta membentuk jaringan kesehatan. Secara umum, masyarakat yang tinggal di beberapa daerah ini berada di luar jangkauan militer Indonesia selama sebagian besar tahun 1976.

260. Pada tanggal 31 Mei 1976 Indonesia mencoba untuk mengesahkan pendudukannya atas Timor-Leste. Dalam sebuah upacara singkat di Dili, yang disebut sebagai "Tindakan Integrasi", Indonesia membentuk sebuah Majelis Rakyat yang beranggotakan sekitar 30 orang dari beberapa -distrik. Majelis itu membuat sebuah petisi kepada Presiden Soeharto, meminta integrasi Timor-Leste ke Indonesia. Anggota-anggota Majelis diterbangkan ke Jakarta untuk menyerahkan petisi itu kepada Presiden Soeharto, dan pada tanggal 17 Juli Soeharto menandatangani sebuah keputusan yang menyatakan bahwa Timor-Leste adalah bagian dari Indonesia. PBB menentang upaya ini melalui Resolusi 31/53 pada tanggal 1 Desember 1976, dan menyerukan diadakannya tindakan penentuan nasib sendiri yang dapat diterima secara internasional di wilayah itu.

ABRI melakukan konsolidasi; Indonesia mendirikan "pemerintahan sementara"

261. Menanggapi Invasi Indonesia terhadap Timor Portugis pada tanggal 7 Desember, Sidang Umum PBB mengesahkan Resolusi 3485 pada tanggal 12 Desember. Resolusi ini menyerukan penarikan pasukan Indonesia tetapi diabaikan oleh Indonesia. Pada tanggal 17 Desember Indonesia mendirikan Pemerintah Sementara Timor-Timur (PSTT), dengan Arnaldo dos Reis Araujo, Ketua Apodeti, sebagai Ketua, dan Francisco Lopes da Cruz, Ketua UDT, sebagai Wakil.³⁴⁶ Dua puluh empat pria ditunjuk memegang berbagai jabatan dalam pemerintahan sementara ini dan Dewan Pertimbangan. Enam belas orang di antaranya dari UDT dan Apodeti.³⁴⁷

262. Pada tanggal 18 Desember, Pemerintahan Sementara itu mengirim sebuah telegram kepada Presiden Soeharto untuk meminta bantuan militer:

Pemerintahan Sementara Timor Bagian Timur [sic] memohon kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan bantuan militer, sosial, dan ekonomi supaya kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Timor Bagian Timur [sic] dapat dipulihkan bebas dari gangguan dan ancaman sisa-sisa teroris [sic] yang ditinggalkan oleh Pemerintah Portugis.³⁴⁸

263. PSTT ini merupakan pemerintahan hanya dalam nama. Ia dibentuk dengan maksud untuk mempercepat proses integrasi Timor-Leste dengan Indonesia. Mario Carrascalão membenarkan ketidakberdayaan pemerintahan ini dalam pernyataannya kepada Komisi bahwa

*“saya tidak dapat menyatakan bahwa PSTT benar-benar sebuah pemerintahan”.*³⁴⁹

264. Indonesia tengah menghadapi perang diplomatik di PBB, di mana Indonesia mencoba untuk meredam kutukan internasional terhadap invasi Indonesia. Pada tanggal 22 Desember 1975 Arnaldo dos Reis Araujo mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menolak kunjungan sebuah tim pengamat ke wilayah itu karena alasan keamanan.³⁵⁰ Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan tanggal 22 Desember, Indonesia mendaratkan lagi sekitar 10,000 pasukan sekitar Natal.³⁵¹ Sementara komunitas internasional melakukan inisiatif perdamaian yang terbatas, berbagai satuan tempur ABRI bergerak maju sepanjang jalan-jalan utama, setelah menguasai Dili dan Baucau. Yang lainnya mendarat di titik-titik strategis sepanjang pantai selatan. Ini adalah sebuah proses yang lamban. Satuan-satuan ABRI bergerak dengan waspada.³⁵² Pada awal 1976 pergerakan utama yang pertama adalah ke selatan Dili untuk mengejar para tentara Fretilin yang telah mundur ke basis mereka di pedalaman.

Fretilin mundur, pembantaian tahanan

265. Fretilin menahan sejumlah besar* tahanan UDT dan Apodeti di basisnya yang terletak di Aileu.³⁵³ Terdesak oleh majunya pasukan Indonesia, Fretilin bersiap untuk mundur lebih jauh ke daerah pedalaman. Komite Sentral Fretilin terpecah. Pada akhir bulan Desember sebagian berada di Aileu, dan sebagian lagi di Maubisse.³⁵⁴ Dalam situasi seperti inilah Fretilin melakukan beberapa eksekusi massal terhadap para tahanan di daerah Aileu. Pembantaian yang pertama terjadi pada tanggal 26 Desember 1975 di Asirimou di Aileu. Komisi diberitahukan bahwa para anggota Fretilin membunuh sekitar 20 orang. Di antara mereka terdapat mantan kepala polisi Portugis Mayor Gouveia yang berpihak dengan UDT selama perang sipil.³⁵⁵ Pembunuhan selanjutnya terjadi di Saboria dan Aituri.³⁵⁶ Mantan Presiden Fretilin Xavier menyampaikan analisisnya tentang bagaimana pembantaian ini terjadi:

Kami di tengah peperangan...kami lari dari musuh kami, kami berlari, kami bawa orang-orang yang kami tahan, musuh-musuh kami yang kami tahan, bersama dengan kami...

Lalu kami harus memutuskan hal ini. Apakah kami tinggalkan mereka hidup-hidup di sini? Apakah kami berlari sendiri dan meninggalkan mereka? Atau kami bunuh mereka lalu lari?...

* Anggota UDT Antonio Serpa memberi kesaksian kepada Komisi bahwa dia ditahan oleh Fretilin di sebuah gudang kopi yang besar di Aileu bersama, dia mengira-ngira, 3000 tahanan. Lihat kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

Karenanya, beberapa dari mereka [anggota Fretilin] memutuskan untuk membunuh mereka, sehingga musuh tidak dapat membahayakan kami. Mungkin opini ini umum dimiliki, lebih kurang secara umum, oleh para pemimpin di semua tingkat.³⁵⁷

266. Pasukan Indonesia merebut Aileu pada tanggal 31 Desember 1975.³⁵⁸ Fretilin mundur lebih jauh lagi ke pedalaman, pertama ke Maubisse dan kemudian ke pantai selatan. Pembantaian tahanan terjadi lagi ketika Fretilin bergerak mundur. Komisi mendengarkan kesaksian mengenai sebuah pembantaian Fretilin terhadap lima tahanan di Maubisse pada akhir Desember, dari 31 tahanan di Sekolah Dasar di Same di daerah pantai selatan pada tanggal 29 Januari 1976,³⁵⁹ dan 8 tahanan di Hat Nipah, dekat Hola Rua, daerah pantai selatan pada akhir Januari atau awal Februari.³⁶⁰ Selain pembantaian yang terjadi di wilayah tengah, Komisi juga menerima kesaksian mengenai sebuah pembantaian Fretilin terhadap 37 orang di desa Kooleu di distrik Lautém, pada awal Januari 1976.³⁶¹

Pergerakan ABRI, awal tahun 1976

267. Pasukan dari Komando Tempur ke-2 Kostrad (Kopur II) bergerak melalui Maubisse, dan pada akhir Januari mereka bertempur untuk menguasai celah Fleixa yang strategis. Pada tanggal 23 Februari, pasukan ini tiba di Ainaro di mana mereka bergabung dengan tentara yang telah mendarat di Betano di daerah pantai selatan, dan dapat menguasai sementara rute tengah dari utara ke selatan. Front utama kedua terjadi di wilayah barat dekat perbatasan dengan Indonesia. Pasukan Brigade Infanteri ke-18 (Jawa Timur) bergerak melalui Bobonaro pada akhir Januari, kemudian melalui Atsabe dan Letefoho, sampai di Ermera pada tanggal 27 Maret 1976. Sementara pada tanggal 5 Februari, satu pasukan terjun payung lain turun di Suai di bagian barat pantai selatan, dan bergerak ke Timur menuju Zumalai. Militer Indonesia tidak bergerak di sepanjang pesisir utara di sebelah barat Dili hingga pertengahan tahun. Pada bulan Juni ABRI menyerang Liquica dan Maubara, sebelum melanjutkan ke daerah Ermera dalam serangkaian operasi singkat yang dimulai pada bulan Juli.³⁶²

268. Operasi di bagian Timur menyebar dari Baucau. Empat ribu tentara baru diterbangkan ke Baucau pada akhir Desember 1975 di mana mereka kemudian bergabung dengan berbagai unit yang sudah beroperasi di bawah Komando Lintas Udara Kostrad (Linud Kopur Kostrad).³⁶³ Pasukan ini melancarkan operasi penyerangan sepanjang tiga jalur utama. Dari Baucau, beberapa batalyon bergerak ke barat di sepanjang jalan pantai dan menguasai Manatuto pada tanggal 31 Desember. Dari Manatuto pasukan ini kemudian bergerak ke selatan menuju Soibada. Ofensif kedua bergerak ke arah selatan dari Baucau menuju Viqueque, di mana mereka bergabung dengan pasukan Marinir yang telah mendarat di Uatu-Lari di daerah pantai selatan. Pasukan ketiga menyerang pasukan Fretilin di Selatan Laga, di kaki bukit Gunung Matebian. Sasaran terakhir adalah Lautém di bagian Timur, dengan serangan pasukan terjun payung di Lospalos pada tanggal 2 Februari 1976 yang mendapat dukungan dari bala bantuan infanteri.³⁶⁴ Setelah menguasai sebagian besar kota utama Timor-Leste, pada bulan Agustus 1976 ABRI mendirikan Komando Pertahanan dan Keamanan Regional Timor-Leste (Kodahankam), membagi wilayah itu menjadi empat sektor operasional — Barat, Tengah dan Timur, juga Dili dan Oecusse.[†]

^{*} Operasi Shinta melawan Fatubesi, Operasi Tulada 1 melawan Hatolia, Operasi Tulada 2 melawan Railaco dan Operasi Tulada 3 melawan Leorema.

[†] Sektor A (Dili dan Oecussi), Sektor B (Barat—Liquica, Bobonaro, Ermera dan Covalia; kurang lebih 10 Batalyon), Sektor C (Tengah—Aileu, Ainaro, Manufahi dan Manatuto; kurang lebih delapan batalyon), dan Sektor D (Timur—Baucau, Viqueque, dan Lautem; kurang lebih dua belas batalyon).

Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan

269. Sejumlah besar* masyarakat sipil telah lari ke daerah pedalaman, untuk sementara aman dari militer Indonesia. Banyak kota hampir dikosongkan oleh penduduknya ketika mereka melarikan diri dari invasi.³⁶⁵ Pemandangan adalah pengalaman yang terjadi dimana-mana, dan banyak masyarakat sipil tidak mendapatkan tempat berlindung, makanan atau berbagai fasilitas kesehatan yang memadai.[†]

270. Kekerasan militer Indonesia terhadap penduduk sipil mengejutkan beberapa pemimpin politik Timor yang telah membantu dalam invasi. Mengemukakan keburukan situasi itu dan kelemahan posisinya sendiri, ketua PSTT, Arnaldo Araujo, menulis surat secara rahasia kepada Presiden Soeharto mengenai kekhawatirannya, pada bulan Juni 1976:

Kami mengakui bahwa perampokan terhadap bisnis pribadi, kantor pemerintahan, dan badan keuangan negara dapat terjadi karena emosi saat perang, tetapi sulit dimengerti mengapa hal ini berlanjut enam bulan kemudian, membiarkan semua orang dalam keadaan tidak aman yang kejam...Pagi dan malam hari, di rumah dan kantor saya, para janda, yatim piatu, anak-anak, dan kaum cacat meminta susu dan pakaian. Saya tak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis untuk mereka, karena Pemerintahan Sementara tidak memiliki apa-apa...³⁶⁶

271. Di Dili Militer Indonesia memulai kegiatan yang kelak menjadi pola penahanan dan penyiksaan pada periode ini, karena mereka berusaha untuk menguasai masyarakat sipil yang mereka curigai menjadi penghubung dengan mereka yang berada di gunung.³⁶⁷ Pada pertengahan 1976, para pengungsi Timor pertama dari sejumlah kamp di Timor Barat berhasil pergi ke Portugal. Mereka memberikan beberapa pernyataan saksi mata mengenai skala kekerasan pada saat invasi.

Fretilin menyusun kekuatan kembali

272. Dari tanggal 15 Mei sampai 2 Juni 1976 Fretilin mengadakan sebuah konferensi nasional di Soibada di daerah pedalaman timur untuk menentukan strateginya. Menyadari bahwa tidak mungkin untuk terus mengimbangi ABRI, Fretilin membuat keputusan untuk memobilisasi resistensi nasional. Strateginya mencakup resistensi semi-gerilya oleh Falintil. Hal ini akan didukung secara logistik oleh penduduk sipil, yang akan ikut dengan Fretilin di gunung dan hutan.³⁶⁸ Fretilin mengambil keputusan ini tidak dengan suara bulat. Semuanya menyetujui perlunya melakukan perang resistensi, tetapi tidak semua mendukung usul untuk melakukan revolusi sosial dengan masyarakat sipil. Francisco Xavier do Amaral menyatakan kekhawatirannya mengenai kebijakan ini, sementara yang lainnya, seperti para anggota sayap militer Fretilin, mengambil sikap netral.³⁶⁹

273. Untuk melaksanakan strategi baru ini, Fretilin membentuk sebuah struktur resistensi di sejumlah 'zona bebas' (*zonas libertadas*). Dalam berbagai zona ini terdapat basis resistensi (*bases de apoio*), dimana penduduk sipil dikelilingi oleh sebuah lingkaran pertahanan yang terdiri dari pasukan Falintil, dengan dibantu oleh kompi milisi Fretilin (Miplin) dan beberapa unit pertahanan sipil (*arma branca* or *força popular*).³⁷⁰ Di belakang garis itu, penduduk sipil, terutama perempuan, memberi dukungan logistik bagi para tentara. Fretilin menjalankan pendidikan politik

* Kemungkinan sebanyak 300,000 orang; lihat bab Pemandangan.

† Lihat sebagai contoh, kesaksian Manuel Carceres da Costa mengenai kota Lacló di Distrik Manatuto, dan Francisco Soares Pinto mengenai kota Iliomar di Distrik Lautem, keduanya di CAVR audiensi publik nasional mengenai Pemandangan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Desember 2003.

kepada penduduk sipil yang berada di sejumlah basis ini untuk membangun komitmen politik yang luas bagi pembebasan nasional. (lihat Bagian 5: Resistensi:Struktur dan Strategi).

274. Selain menjalankan sejumlah sekolah dan menanam tanaman pangan, juga ada berbagai upaya untuk memproduksi obat-obatan, walaupun dalam sebagian besar kasus orang-orang harus bergantung pada obat-obatan tradisional yang berbahan dasar tanaman.³⁷¹ Manuel Carceres da Costa menceritakan kepada Komisi mengenai kehidupan di berbagai daerah kekuasaan Fretilin di Lacló, distrik Manatuto pada tahun 1976:

Di hutan kami membentuk dua organisasi: Organização Popular da Mulher Timorese [OPMT – Organisasi Rakyat Perempuan Timor] sebuah organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Fretilin, dan Organização Popular Juventude de Timor [OPJT – Organisasi Rakyat Pemuda Timor] yaitu sebuah organisasi pemuda. Organisasi-organisasi ini membantu kami mengkoordinasi kegiatan di antara masyarakat. Misalnya kami bekerjasama untuk berkebun dan bercocok tanam, dan kami menanam jagung di sekitar kota kecil Lacló. Tentara Indonesia belum mencapai Lacló.³⁷²

275. Fretilin juga menjalankan penjara-penjara (Renal), di mana berbagai pelanggaran hak asasi manusia biasa terjadi.³⁷³

Indonesia Meresmikan Integrasi

276. Tidak lama setelah pertemuan Fretilin di Soibada, Indonesia merancang apa yang disebut sebagai sebuah Undang-undang Integrasi. Pemerintahan Sementara mengumpulkan sebuah badan yang disebut Majelis Rakyat selama bulan Mei 1976, yang diketuai oleh Guilherme Gonçalves. Majelis ini konon merupakan sekumpulan orang terpilih yang mewakili orang Timor. Para peserta dipilih oleh para pegawai pemerintah yang ditunjuk oleh Indonesia. Clementino Amaral berpartisipasi dalam Majelis tersebut mewakili Baucau, dan mengatakan kepada Komisi:

Proses apa ini? Mereka [pemerintah Indonesia] ingin dua orang dari tiap distrik mewakili distrik masing-masing, untuk membuat petisi yang meminta Indonesia mengizinkan kami masuk Indonesia. Di Baucau, bagaimana kejadiannya? Menyelenggarakan pemilihan umum? [Tidak.] Para pejabat yang dekat dengan mereka memilih dua orang tersebut.³⁷⁴

277. Para anggota Majelis menyusun sebuah petisi kepada Presiden Soeharto yang meminta Indonesia untuk mengabulkan integrasi. Mario Carrascalão mengemukakan bahwa ini merupakan satu-satunya fungsi yang dilakukan Majelis Rakyat:

Majelis Rakyat...yang bertemu sekali pada bulan Mei 1976, di sini, hanya membahas satu poin “perjanjiannya”, yakni, integrasi tanpa referendum...[satu-satunya] tujuan adalah membicarakan ‘petisi integrasi’ yang akan dikirimkan kepada Soeharto.³⁷⁵

278. Petisi ini ditandatangani oleh Arnaldo de Araujo sebagai ketua PSTT, dan Guilherme Gonçalves selaku kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), walaupun badan ini belum dibentuk.³⁷⁶ Mengklaim dirinya mewakili rakyat Timor, dan menyebut Deklarasi Balibo sebagai dasar bagi klaim tersebut, isi utama dari petisi singkat ini adalah agar Timor-Leste disatukan

dengan Indonesia tanpa dilakukannya sebuah referendum. Kelompok itu pun diterbangkan seluruhnya ke Jakarta dengan pesawat militer untuk menyampaikan petisi tersebut kepada Presiden Soeharto.³⁷⁷ Pada tanggal 7 Juni Arnaldo dos Reis Araújo, Guilherme Gonçalves, Francisco Xavier Lopes da Cruz dan Mario Carrascalão menyerahkan petisi itu kepada Soeharto di Jakarta.

279. Pada tanggal 24 Juni sebuah misi pencarian fakta para pejabat Indonesia dan sekelompok diplomat internasional yang terdiri dari sepuluh orang mengunjungi Dili, dengan didampingi oleh wartawan Indonesia dan wartawan asing, konon untuk memastikan keabsahan petisi tersebut. Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB juga diundang, tetapi ia menolak untuk bergabung dalam misi tersebut. Australia, AS dan Jepang juga menolak untuk berpartisipasi, walaupun Selandia Baru mengirim seorang perwakilan untuk mengamati (lihat Bab 7.1: Penentuan Nasib Sendiri, untuk isi laporan Perwakilan Selandia Baru dan analisa dari proses tersebut). Misi itu mengunjungi Timor-Leste selama satu hari. Mereka menghadiri sebuah upacara di mana Kepala PSTT Araújo menyampaikan pidato, dan kelompok itu mengunjungi beberapa kota yang dekat dengan Dili. Kunjungan mereka diawasi dengan ketat dan interaksi bebas dengan orang Timor, termasuk para anggota Majelis Rakyat, tidak diperbolehkan.³⁷⁸ Walaupun demikian, misi itu melaporkan bahwa sebuah pemerintahan yang efektif telah berjalan dengan baik dan Dewan Perwakilan Rakyat berjalan sebagai “alat demokrasi”. Misi itu juga menemukan adanya keinginan untuk melakukan integrasi tanpa referendum, yang mereka anggap sebagai mekanisme yang asing bagi orang Timor.³⁷⁹ Pada tanggal 17 Juli 1976 Presiden Soeharto menandatangani undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), meresmikan tindakan Indonesia mengintegrasikan Timor-Leste.[†]

280. Indonesia menyebut ini sebagai sebuah tindakan penentuan nasib sendiri yang sah. Tindakan ini tidak diakui oleh Portugal atau pun PBB, dan pada tanggal 1 Desember 1976 Sidang Umum PBB mengesahkan resolusi 31/53 yang menolak aneksasi Indonesia atas Timor-Leste dan menegaskan kembali seruannya bagi suatu tindakan penentuan nasib sendiri yang dapat diterima secara internasional.

Operasi Seroja berlanjut—pesawat Bronco OV-10 buatan AS mulai digunakan

281. Sekitar pertengahan hingga akhir 1976, pesawat serangan udara ke darat Bronco OV-10 pertama buatan AS tiba di Indonesia.³⁸⁰ Kekuatan udara menjadi bagian penting dari strategi ABRI di Timor-Leste. Albino do Carmo, Komandan Falintil di gunung daerah Bobonaro-Covalima, mengingat:

[†] Anggota-anggota internasional misi tersebut adalah Duta Besar Korea Selatan, Malaysia, Siria untuk Jakarta, the charge d'affaires of Afganistan dan Iraq, serta para perwira yang mewakili Panama, Yaman Selatan dan India.

[†] Hukum No. 7, 1976, Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia dan Pembentukan Propinsi Timor Timur.

Pada bulan Agustus [1976] ABRI berusaha menyerang Gunung Lakirin lagi. Satu kompi bersama Hansip [pertahanan sipil] muncul. Saya datang untuk melihat dan mengusir mereka. Dua komandan bagian saya terbunuh. Kami saling menembak, hanya berjarak 10-20 meter. Kemudian ABRI berusaha menguasai gunung yang lain, dari Suai mereka masuk wilayah Gunung Fohorua. Mereka memasuki wilayah tersebut tiga kali. Setiap kali kami mengusir mereka...Mereka menggunakan pesawat pengebom di Lela, dimana saya bermarkas. Pesawat-pesawat tersebut hanya meluncurkan roket-toket besar...Setiap minggu mereka menembaki tempat kami, penduduk sipil, sekolah. Mereka mencari lokasi yang penuh orang. Kerap kali mereka bahkan menembaki ternak. Mereka melakukannya dengan senapan mesin.³⁸¹

282. Penembakan dan pemboman udara digunakan untuk “memperlunak” berbagai sasaran menjelang sebuah serangan darat oleh pasukan infantri. Di Lolotoe, José Pereira mengingat perubahan dari penggunaan helikopter sampai bom-bom besar dan akhirnya Pesawat Bronco OV-10 buatan AS:

Pada tahun 1976 ABRI telah menggunakan pesawat terbang dan bom. Tahun 1976-1977 sering kali, dua atau tiga kali seminggu. [Pesawat udara] terbang cukup rendah. Pertama mereka menggunakan helikopter dan menembak. Mereka juga menggunakan pesawat terbang hitam besar. Mereka memakai bom. Dan ketiga mereka memakai pesawat udara besar dengan lubang di bagian belakang [Bronco OV-10]. Pesawat-pesawat ini dipakai sejak tahun 1976, kira-kira dimulai sekitar Agustus.³⁸²

283. Penggunaan kekuatan udara memberikan tekanan yang sangat besar kepada Fretilin, karena kekuatan bersenjata Falintil hanya senjata ringan. Ini menjadi faktor utama yang membuat penduduk sipil di gunung menyerahkan diri, dan memberikan kemenangan militer kepada ABRI atas Fretilin/Falintil pada tahun 1979.

Kebuntuan militer, akhir 1976

284. Pada akhir 1976, militer Indonesia mampu menguasai koridor jalan-jalan utama; jalur selatan dari Dili ke Ainaro dan Betano; jalur Baucau Viqueque; jalur Manatuto Laclubar, dan jalur Lautem ke Tutuala. Walaupun ABRI cukup menguasai daerah-daerah yang dapat dijangkau melalui jalan pesisir utara tersebut, berbagai daerah yang luas di pedalaman tetap berada di luar kekuasaan ABRI. ABRI mengharapkan dengan cepat dan mudah menguasai Timor-Leste, namun sebaliknya malah menghadapi perlawanan sengit dan amat baik dari Fretilin/Falintil. Perkembangan usaha ABRI untuk menguasai Timor-Leste berjalan lambat.

285. Walaupun Indonesia sudah menggunakan kekuatan udara tambahan yang dipasok dari Amerika Serikat, situasi pada akhir tahun 1976 itu pada dasarnya merupakan suatu kebuntuan. Pada bulan April 1976 sebuah laporan dari kedutaan besar Amerika mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi ABRI:

Jenderal Yogi (Soepardi, Asisten Perencanaan, Departemen Pertahanan)...memperkirakan kekuatan Fretilin sekitar 3000 dengan hanya 5000 dari 15000 pucuk senjata yang sejauh ini disita oleh Indonesia. Indonesia belum-belum sudah mengalami terkurasnya sumber daya, dengan kekurangan pasokan amunisi untuk senjata ringan, artileri, tank dan meriam angkatan laut.³⁸³

3.12 “Pengepungan dan penghancuran”: tahap akhir Operasi Seroja 1977-79

Tinjauan

286. Fretilin menghadapi persoalan besar mengenai apa yang harus mereka lakukan dengan penduduk sipil yang jumlahnya besar yang berada di berbagai basis mereka di pedalaman. Beberapa orang berpendapat bahwa sudah saatnya untuk mengubah strategi, dan memperbolehkan penduduk sipil menyerahkan diri dan kembali bermukim di kota. Pertentangan mengenai masalah ini menyebabkan terjadinya perpecahan berdarah dalam tubuh Fretilin dan disingkirkannya presiden Francisco Xavier do Amaral pada bulan Agustus 1977. Penahanan, penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang dilakukan oleh Fretilin selama periode ini.

287. Pada paruh kedua tahun 1977, operasi militer Indonesia semakin gencar, yang mencakup penghancuran sumber makanan di pedalaman dengan maksud untuk memisahkan masyarakat sipil dari resistensi bersenjata. Operasi ini mengakibatkan kematian masyarakat sipil dalam jumlah yang tak terkira akibat serangan langsung serta kelaparan dan wabah penyakit akibat dihancurkannya basis-basis Fretilin dan sumber makanan.

288. Dengan mundurnya Fretilin ke sejumlah kecil daerah yang lebih sempit, ABRI melancarkan *Operasi Cahaya*, dengan maksud untuk memaksa para pemimpin utama Fretilin menyerah dan sisa penduduk sipil yang ikut bersama mereka.³⁸⁴ Gunung Matebian di wilayah timur dan beberapa wilayah di Suai dan Ermera di wilayah barat menjadi ajang pengeboman udara yang paling gencar, yang mengakibatkan kematian skala besar dan pada akhirnya penyerahan diri puluhan ribu penduduk sipil. Para pemimpin utama Fretilin ditangkap, menyerahkan diri atau dibunuh, sehingga resistensi bersenjata yang tersisa kacau balau. Presiden Fretilin Nicolau Lobato terbunuh dalam pertempuran tanggal 31 Desember 1978.³⁸⁵ Xanana Gusmão berhasil lolos ke timur. ABRI melanjutkan operasi penumpasan sampai pada awal tahun 1979, dan pada bulan Maret 1979 menyatakan wilayah ini sudah ditaklukkan.

Penduduk sipil di gunung-gunung

289. Pada akhir tahun 1976 kehidupan dalam zona bebas (*zonas libertadas*) yang dikuasai Fretilin amat berat bagi rakyat sipil, tetapi pada umumnya mereka tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Militer Indonesia masih belum dapat secara permanen mengukuhkan kehadirannya di sejumlah wilayah pedalaman di mana berbagai zona ini berada. Penduduk sipil bersama Fretilin telah mampu menjalankan suatu fungsi dasar masyarakat yang dapat menyediakan berbagai kebutuhan pokok rakyat.³⁸⁶ Fokus mereka adalah menanam tanaman pangan serta pemberian perawatan kesehatan dasar dan pendidikan bagi anak-anak. Komisi mendengarkan kesaksian ahli dari Gilman dos Santos, seorang pegawai negeri pemerintahan tingkat provinsi Indonesia yang bekerja dengan masyarakat pengungsi pada akhir tahun 1970an dan kemudian menjadi staf LSM Amerika *Catholic Relief Services*:

*Menurut perhitungan saya, situasi pangan di hutan antara tahun 1975 dan 1977 tidak begitu buruk. Orang-orang tidak mengalami banyak masalah karena pada waktu itu mereka masih dapat bergerak dan bebas menanam tanaman sesuai musim. Mereka dapat menghasilkan bahan makanan. TNI hanya menguasai kota-kota kabupaten dan kecamatan, meskipun TNI melakukan serangan ke hutan-hutan.*³⁸⁷

290. Keadaan ini berubah secara dramatis dalam paruh kedua tahun 1977.

Kapasitas ABRI terkuras dan kepercayaan diri awal Fretilin

291. Menyusul situasi kebuntuan militer antara pasukan Indonesia dan Fretilin pada akhir tahun 1976, ABRI tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya tersebar di seluruh nusantara pada awal tahun 1977. ABRI terpaksa menarik sebagian pasukannya dari Timor-Leste untuk mendukung sejumlah operasi di Irian Jaya, Kalimantan Barat dan Aceh. ABRI juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pada pemilihan anggota DPR Indonesia pada bulan Mei, dan ABRI menempatkan kira-kira 100 batalyon di seluruh negeri.³⁸⁸ Berbagai pengaruh eksternal ini benar-benar mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan beberapa operasi tempur di Timor-Leste. Pengurangan pasukan ini dilaporkan dalam dokumen militer Indonesia:

Dalam kerangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 1977 total kekuatan TNI di Timor-Leste berkurang hingga sepertiga yang ada (yang lain ditugaskan) sebagai petugas keamanan pemilihan umum tahun 1977 di bagian lain di Indonesia.³⁸⁹

292. Bukti dan berbagai laporan Fretilin di bawah ini menengarai bahwa antara bulan Maret dan Juni 1977 terjadi pengurangan pasukan ABRI dan sejumlah operasi tempur yang cukup berarti.

293. Ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Fretilin. Selama paruh pertama tahun 1977, Radio Maubere Fretilin berulang kali menyiarkan pemberitahuan mengenai rendahnya semangat Indonesia dan berbagai kemenangan Falintil. Pada tanggal 20 Mei, misalnya, Menteri Informasi dan Keamanan Nasional, Alarico Fernandes melaporkan melalui radio bahwa 1.500 tentara Indonesia telah ditarik mundur dari wilayah itu.³⁹⁰ Pada tanggal 4 Juni dia melaporkan:

Serangan-serangan utama Indonesia yang terakhir terjadi sejak November [1975] hingga Februari [1976]. Meskipun mengerahkan ribuan pasukan, serangan-serangan ini dikalahkan dengan meminta banyak korban pasukan Indonesia...Sejak bulan Februari, serangan-serangan Indonesia dilakukan dengan skala kecil, yang bertujuan meraih sedikit kesuksesan menghancurkan posisi Fretilin di pegunungan dengan mengabaikan kota-kota yang dikuasai Indonesia.³⁹¹

294. Sementara propaganda Fretilin mebesar-besarkan keberhasilannya, paruh pertama tahun 1977 relatif merupakan periode yang positif bagi Resistensi. Pada bulan Mei, Alarico Fernandes menyatakan bahwa:

Produksi makanan di wilayah yang dikuasai Fretilin adalah sektor lain yang dibangun bersamaan dengan perjuangan bersenjata. Kami telah mencapai produksi maksimum yang diraih pada masa dominasi kolonial Portugis, ketika terjadi kelaparan dan penyakit...Penduduk di Timor-Leste bekerja keras melakukan rekonstruksi nasional. Kelaparan tidak sebanyak sebelumnya.³⁹²

AS memimpin dalam mempersenjatai kembali militer Indonesia

295. Pada awal tahun 1977 sebuah delegasi Subkomite Kongres AS mengunjungi Timor-Leste. Kunjungan mereka diatur dengan seksama oleh militer Indonesia, dengan membatasi

mereka ke berbagai daerah yang sudah mantap berada di bawah penguasaan Indonesia. Mereka tidak berupaya untuk bertemu dengan Fretilin atau pun sejumlah besar penduduk sipil di wilayah pedalaman. Selama masa kunjungan mereka sangat sedikit terjadi operasi tempur. Delegasi ini “tidak membuat kesimpulan tegas” sehubungan dengan perang.³⁹³ Pada tahun 1978, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Zbigniew Brzezinski memerintahkan bahwa “tekanan” terhadap masalah hak asasi di Indonesia agar diredam.³⁹⁴ Selanjutnya selama tahun 1978, Amerika Serikat dan pemerintah asing lainnya memberikan dukungan militer yang luas untuk Indonesia. Pada bulan Januari Amerika Serikat mengumumkan penjualan 16 unit F5, sebuah Skuadron A4, dan sebuah fasilitas pembuatan senapan M-16.³⁹⁵ Pada tahun yang sama Inggris mengumumkan niatnya untuk memasok pesawat Jet Hawk untuk serangan darat,³⁹⁶ sementara Australia memasok helikopter serta pesawat angkut.³⁹⁷ Ini menjadi pertanda yang jelas bagi Indonesia bahwa negara-negara Barat tidak menentang operasi militernya di Timor-Leste.

296. Pada tahun 1979, Amerika Serikat berusaha untuk menjelaskan kebungkamannya mengenai penggunaan berbagai senjatanya di Timor-Leste atas dasar bahwa perang tersebut sudah selesai. Sumbernya untuk membuat kesimpulan ini adalah Militer Indonesia:

Beberapa perlengkapan militer yang dipasok Amerika Serikat saat ini ada di Timor-Leste. Meskipun demikian, skala dan frekuensi perselisihan di Timor-Leste sudah begitu berkurang, sehingga menurut informasi terbaik yang ada perlengkapan itu sangat jarang digunakan dalam pertempuran.³⁹⁸

Perpecahan internal Fretilin dan pembersihan berdarah

297. Walaupun optimisme pada awal 1977 Fretilin menghadapi permasalahan dan perpecahan internal, yang berakibat pada terjadinya kekerasan. Pada tahun 1976* partai tersebut membunuh Aquilino Soares, *liurai* Quelicai, atas tuduhan menempatkan kepentingan lokal di atas kepentingan nasional.³⁹⁹ Belakangan pada tahun yang sama, satu lagi unit yang memisahkan diri, yang dipimpin Francisco Hornai di Illiomar, juga ditangkap dan dibunuh.⁴⁰⁰ Berbagai kejadian ini merupakan indikasi awal adanya perbedaan pandangan di antara para pemimpin Fretilin mengenai bagaimana menjalankan perjuangan, dan sebuah pertanda awal berbagai kekerasan yang akan digunakan oleh Fretilin untuk mendisiplinkan para kadernya.⁴⁰¹

298. Pada akhir tahun 1977 perawatan kepada orang yang sakit dan terluka, serta penyediaan makan kepada penduduk sipil, menjadi beban yang semakin berat bagi Fretilin. Presiden Fretilin ketika itu Francisco Xavier do Amaral mengatakan kepada Komisi bahwa kurangnya obat-obatan bahkan untuk penyakit yang biasa mengakibatkan semakin banyak penduduk sipil yang mati.⁴⁰²

299. Para anggota Komite Sentral Fretilin tidak sepaham mengenai beberapa persoalan, ketika para kader politik dan militer berselisih mengenai siapa yang seharusnya mengatur perjuangan. Yang menjadi kontroversi utama adalah peran penduduk sipil. Bagi para pemimpin Falintil, keharusan untuk membela penduduk sipil dalam jumlah besar membatasi kemampuan mereka untuk melakukan berbagai ofensif yang efektif. Presiden Fretilin Xavier do Amaral mendukung pandangan ini, dan menganggap perlu diambil suatu tindakan untuk menghindari penghancuran, dan sebagian besar penduduk diperbolehkan untuk menyerahkan diri dan melanjutkan resistensi dari berbagai kota dan desa. Para anggota Komite Sentral lainnya yakin bahwa rakyat adalah komponen penting dalam perjuangan rakyat, khususnya untuk memungkinkan partai melakukan revolusi sosial yang berdasar pada pendidikan politik bagi semua.⁴⁰³

* Sumber bulan bermacam-macam; Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 95 mengatakan November, sementara Chamberlain, *The Struggle in Illiomar*, mengutip Gusmao, *To Resist*, mengatakan Maret.

300. Pada bulan Agustus 1977 Komite Sentral Fretilin bertemu di Laline (Lacluta, Distrik Viqueque) dan bersepakat mengenai prinsip mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan tidak adanya kemungkinan dukungan dari luar, Resistensi memutuskan untuk memerangi ABRI sendiri. Terjadi pertentangan mengenai masalah ini. Menteri Informasi Alarico Fernandes menganggap kemerdekaan tidak mungkin dicapai tanpa dukungan dari luar.⁴⁰⁴ Karena penentangannya, Presiden Fretilin Xavier do Amaral tidak menghadiri rapat di Laline. Tidak lama kemudian, pada bulan September 1977, Fretilin menangkap dan memecatnya sebagai Presiden. Amaral menceritakan kejadian itu kepada Komisi:

Jadi seperti inilah ide saya. Kami harus mengirim penduduk untuk menyerah. Hanya laki-laki yang kuat dan dapat bertempur di peperangan tetap tinggal bersama Komite Sentral. Karena kami tidak tahu berapa tahun lagi perang ini berakhir...[Pada tahun 1976] mulai ada perbedaan pendapat dalam Fretilin....Beberapa orang berkata bahwa doktrin [Fretilin] ini tidak benar. Beberapa orang menyatakan bahwa doktrin ini benar tetapi orang-orang tidak mengikutinya secara tepat. Beberapa berkata doktrin ini baik. Kami mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain...Sejak saat ini mereka menangkap saya, memenjarakan saya, dan menuduh saya...Bahwa saya mengirim penduduk untuk menyerah supaya di masa yang akan datang ketika saya menyerahkan diri kepada Indonesia, Indonesia akan memberikan jabatan sebagai jenderal atau menteri kepada saya. Inilah argumen mereka yang menyerang saya...⁴⁰⁵

301. Suatu perintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Nicolau Lobato menuduh Francisco Xavier do Amaral sebagai seorang pengalah dan pengkhianat, serta “kejahatan-kejahatan” lain seperti korupsi, poligami, sabotase, kekerasan, feodalisme dan pembunuhan.⁴⁰⁶ Dia juga dituduh memulai gerakan saingan yang akan melemahkan Fretilin. Dia dipenjarakan di sebuah lubang, dipukuli dan diperlakukan dengan kejam.⁴⁰⁷ Akibat serangan ofensif ABRI, Francisco Xavier do Amaral melarikan diri pada tahun 1978, dan belakangan ditangkap oleh ABRI.

302. Pada tanggal 16 Oktober Nicolau Lobato terpilih sebagai Presiden baru. Tekanan dalam periode ini mendorong Fretilin untuk mengadopsi ideologi yang lebih radikal. Marxisme diumumkan,⁴⁰⁸ dan bersamaan dengan itu muncul sikap yang tidak toleran pada perbedaan pendapat. Penangkapan Amaral menjadi awal dari pembersihan di dalam tubuh Fretilin.⁴⁰⁹ Terjadi berbagai eksekusi publik,⁴¹⁰ dan banyak orang yang ditahan, diperlakukan dengan kejam dan dipaksa untuk mengadukan orang lain.⁴¹¹ Siapa pun yang diketahui berhubungan dekat dengan Amaral atau yang berkolaborasi dengan militer Indonesia ditangkap dan ditahan (lihat Bab 7.2: Pembunuhan tidak Sah dan Penghilangan Paksa, dan Bab 7.4.: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk).

ABRI mengintensifkan operasi militer: pengepungan dan penghancuran, Agustus 1977 sampai Agustus 1978

303. Operasi militer antara pertengahan tahun 1977 sampai pada awal 1979 seringkali disebut sebagai kampanye “pengepungan dan penghancuran.” Kampanye tersebut mempunyai dua tujuan yaitu, untuk menghancurkan kepemimpinan Fretilin dan untuk memaksa penduduk sipil yang tinggal di pedalaman yang bergunung-gunung menyerahkan diri kepada ABRI di dataran rendah.⁴¹²

304. Pada bulan Agustus 1977 ABRI melancarkan sebuah operasi militer besar baru,⁴¹³ yang didahului dengan pengerahan pasukan yang besar.⁴¹⁴ Data Komisi menunjukkan sebuah peningkatan dari tiga sampai lima batalyon pada bulan Juli menjadi tujuh belas batalyon pada bulan Agustus. Fokus awal dari ofensif ini adalah sektor barat, yang dikenal dengan nama sandi Operasi Sisir.⁴¹⁵ Seperti pada berbagai operasi sebelumnya, dukungan Artileri Angkatan Laut dan Udara adalah faktor penting bagi kemenangan ABRI. Di Fatumean, misalnya, pemboman udara adalah alasan utama menyerahnya pasukan Falintil/Fretilin dan penduduk sipil pada bulan November.⁴¹⁶ Di sektor Timur, Marinir menjalankan Operasi Bedah Marinir 77 dengan tujuan untuk menguasai jalur antara Quelicai dan Uatucarbau.⁴¹⁷

Penghancuran sumber pangan, Fretilin mundur ke gunung bersama penduduk sipil

305. Militer Indonesia bergerak keluar dari kota dan koridor jalan yang telah mereka kuasai pada bagian pertama Operasi Seroja. Fretilin terpaksa mundur, dan bukannya menyuruh penduduk untuk menyerah, Fretilin memutuskan untuk membawa serta penduduk sipil dengan mereka. Komisi diberitahu mengenai pembunuhan ternak dan penghancuran sumber pangan lainnya oleh militer Indonesia selama operasi-operasi ini. Manuel Carceres da Costa dari Lacro, Distrik Manatuto bersaksi:

Ketika kami menebang sebuah pohon sagu, datang prajurit Indonesia dan menyerang kami...Ketika tentara menembak seorang anggota Falintil bernama Hermenegildo, kami terpaksa meninggalkan makanan kami dan melarikan diri. Setelah serangan itu militer Indonesia menduduki daerah tersebut sehingga kami tidak dapat kembali lagi. Kerbau-kerbau dan ternak kami semua ditembak mati atau diusir. Kebun-kebun dan sawah kami dihancurkan.⁴¹⁸

306. Pemboman udara juga dilakukan terhadap lahan pertanian, sehingga memaksa Fretilin dan penduduk sipil mundur lebih jauh ke gunung-gunung, dan membuat hidup menjadi semakin sulit. Dengan tanaman pangan hancur, dan penduduk sipil tidak lagi dapat tinggal di daerah pemukiman di mana mereka dapat bercocok tanam, tetapi terpaksa harus tetap bergerak, banyak orang kemudian mati. Komisi mendengar banyak kesaksian mengenai penderitaan berat dan ketidakberdayaan penduduk sipil di gunung selama operasi militer ini. Orang tua dan anak-anak adalah yang paling banyak mati.⁴¹⁹ Militer Indonesia mematahkan basis-basis perlawanan Fretilin (*bases de apoio*) satu persatu, dan penduduk yang tersisa mundur ke daerah-daerah yang makin terpojok. Kehadiran demikian banyak penduduk sipil membuat Fretilin harus memikirkan perlindungan mereka, sehingga mengurangi kemampuannya untuk melakukan serangan balasan kepada ABRI.

Serangan di wilayah Tengah

307. Militer Indonesia terus melancarkan serangan selama musim hujan dan selama paruh pertama tahun 1978. Jumlah pasukan di wilayah tengah, yang sebelumnya hanya sedikit, ditambah sampai sebanyak yang berada di barat. Beroperasi di bawah komando Resimen Tempur (RTP) 11, pasukan ini melancarkan sebuah serangan di daerah Same-Kablaki-Fatuberliu.⁴²⁰ Akan tetapi, jumlah pasukan di bagian timur, jumlah pasukan tetap jauh lebih sedikit, dengan hanya empat sampai lima batalyon.[†] Selama musim hujan pasukan di timur menyerang pertahanan Fretilin di perbatasan Baucau-Viqueque antara Gunung Ossoala dan Gunung Mundo Perdido, dan juga melanjutkan penyerangan di bagian utara kaki Gunung

^{*} Hal Ini melibatkan Batalyon Infanteri 131, 511, 527, 612, 621, 733, dan 741.

[†] Termasuk Batalyon Infanteri 502 dan 503 Kostrad, Batalyon Infanteri 408, dan satu Batalyon Infanteri Marinir.

Matebian.⁴²¹ Selama periode ini kekuatan angkatan udara * digunakan di sektor barat dan tengah.⁴²²

Setelah pengeboman atas Kablaki mereka pergi ke Dululau dan Mamelau...Empat pesawat udara mengebom Dululau, dan...roket dan...meriam.⁴²³

308. Komisi mendengar kesaksian langsung para korban yang selamat dari berbagai serangan pengepungan ini, di mana banyak penduduk sipil yang mati. Maria José da Costa menceritakan kepada Komisi mengenai pengalamannya di wilayah pegunungan tengah:

Pada tahun 1978 musuh mengepung kami di Dolok dan banyak orang meninggal karena kelaparan. Semua persediaan makanan milik rakyat dibakar. Mereka mengepung kami dengan menyerang dari laut dengan kapal perang, dari udara dengan pesawat terbang, dan dari darat dengan membakar alang-alang dan mengirim pasukan angkatan darat. Pada waktu itu bulan Agustus yang merupakan musim kemarau. Tentara membuat api yang besar yang menjalar dengan cepat ibarat menyemprotkan bensin ke alang-alang. Banyak orang mati karena tidak dapat menghindari api yang mengepung kami.⁴²⁴

309. Tekanan dari pengepungan dan serangan yang tiada henti menciptakan gelombang manusia yang perlahan-lahan menyerahkan diri kepada militer Indonesia.

Operasi (atau Gerakan Cahaya): dengan sasaran para pemimpin Fretilin

310. Pada tanggal 6 April 1978 Letnan Jenderal Mohammad Yusuf ditunjuk sebagai Panglima ABRI. Dia mengambil alih kendali secara pribadi berbagai operasi di Timor-Leste, memotong wewenang Moerdani dan Kalbuadi.⁴²⁵ Di musim kering pada bulan Mei 1978 Operasi Cahaya pun dilancarkan.⁴²⁶ Operasi baru ini secara khusus menargetkan para pemimpin Fretilin. Tujuannya adalah agar para pemimpin yang berpengaruh menyerahkan diri sehingga masyarakat pun ikut menyerahkan diri secara besar-besaran, dengan demikian memisahkan masyarakat dari para gerilya. Komisi mendengar kesaksian Xanana Gusmão bahwa Operasi Cahaya ini lebih tepat disebut sebagai sebuah "gerakan", dan bahwa Menteri Informasi dan Keamanan Fretilin Alarico Fernandes merupakan sekutu utama militer Indonesia setelah dia menyerahkan diri pada bulan September 1978:

Pada bulan Oktober atau November 1978 kami yang dikepung mendengar bahwa Alarico sudah melaksanakan Operasi Cahaya ... Kami mendengar di radio bahwa Alarico sudah melakukan gerakan ...Dia bisa melihat bahwa Indonesia sangat kuat dan dia mengikuti Indonesia dan mencanangkan Operasi Cahaya.⁴²⁷

311. Walaupun secara geografis konflik ini terus berubah sampai awal 1978, seiring berjalannya waktu dan Resistensi semakin terdesak ke daerah yang lebih sempit, sifat konflik ini berubah menjadi suatu pengepungan. Karena semakin terdesak, para pemimpin Fretilin berupaya untuk mempertahankan resistensi yang terpadu. Sebuah naskah pidato Nicolau Lobato pada tanggal 20 Mei 1978 menunjukkan tekanan yang dihadapi Fretilin:

* Pesawat Bronco OV-10 yang disalurkan oleh AS.

“Akan tetapi mereka yang tidak bisa diyakinkan akan fakta tentang pertanyaan yang tidak bisa dijawab bahwa perjuangan kita adalah adil dan benar, bagi mereka yang berposisi dan bekerjasama secara fanatik dengan musuh untuk mengakhiri perjuangan kita, beberapa dari mereka yang telah gagal dalam hidup, mereka adalah bukan anggota Fretilin, mereka bukan bagian dari rakyat Maubere, mereka adalah musuh rakyat, mereka adalah pengkhianat Ibu Pertiwi. Persatuan ideologi yang telah diumumkan hanya akan dinyatakan ketika kita melaksanakannya secara praktis.”⁴²⁸

Operasi-operasi militer Indonesia di wilayah tengah dan timur, akhir tahun 1978: jatuhnya Matebian

312. Titik balik utama dalam operasi terjadi pada pertengahan tahun 1978. Antara bulan Agustus dan Desember 1977, pasukan tempur terkonsentrasi di sektor barat, dan selama paruh pertama tahun 1978 pasukan tempur tersebar dengan jumlah yang sama kuat di sektor barat dan pusat; sementara pengerahan pasukan di timur jauh lebih rendah. Pada pertengahan tahun 1978, perimbangan kekuatan akhirnya bergeser ke timur, dengan 13 batalyon tempur yang ditugaskan di timur di bawah komando RTP 18 Kostrad.⁴²⁹ Pengerahan ini melanjutkan proses pengepungan penduduk dan memuncak pada penyerangan terhadap Gunung Matebian. Operasi ini diatur dengan seksama, melibatkan sejumlah Batalyon Kostrad, Batalyon Infanteri Teritorial non-organik (eksternal), Batalyon Bantuan Tempur, Marinir, dan Angkatan Udara. Seorang mantan perwira Kostrad yang diwawancarai di Indonesia menceritakan tentang taktik yang digunakan selama penyerangan di Gunung Matebian:

Semua unit memiliki rute mereka sendiri dan menyerang dari berbagai arah. Sebelum melaksanakan serangan mereka berkoordinasi untuk menghindari saling tembak antar unit. Kami berencana menyerang pada waktu yang bersamaan dengan memakai formasi L. [Ini] semua dilakukan dengan pertimbangan keamanan dalam upaya menghindari terbunuhnya kawan seperjuangan kami.⁴³⁰

313. Ini menjadi serangan terbesar terakhir dalam operasi pengepungan dan penghancuran. Fretilin telah mempersiapkan Matebian sebagai wilayah pemunduran, dengan persediaan makanan. Ketika kampanye ini dimulai, Fretilin membawa orang-orang ke gunung, yang dipertahankan dengan kuat. Wilayah ini pada akhirnya jatuh pada tanggal 22 November, zona bebas terakhir yang ditundukkan.

314. Yang menjadi kunci kemenangan dalam serangan di Gunung Matebian adalah pemboman udara dengan menggunakan pesawat OV-10 Bronco, F-5 dan Sky Hawk A-4. Sebagian besar sumber mengatakan bahwa pemboman udara di Gunung Matebian dimulai pada bulan September atau Oktober 1978 dan berlangsung hingga pertengahan November.⁴³¹ Banyak pernyataan yang menggambarkan pengepungan yang tidak pandang bulu terhadap penduduk sipil dan pembantaian yang membinasakan.⁴³² Tomas Soares da Silva, yang pada saat itu berumur 16 tahun, menceritakan pemboman di Gunung Matebian itu:

⁴²⁸ Naskah ini kemudian diringkas dan disiarkan melalui radio dan dikirim ke Perwakilan Amerika Di PBB mengatakan: Lobato menyerukan, antara lain, persatuan rakyat Timor-Leste, semua pejuang dalam Komite Sentral Fretilin dan seruan persatuan ideologis. Persatuan ideologis yang dicanangkan hanya akan menjadi tulus ketika kami (Fretilin) menerapkannya.” Juga, bahwa mereka yang tidak masuk dalam Fretilin adalah musuh penduduk—(mereka adalah “pengkhianat ibu pertiwi [sic]. Telegram, US Mission UN New York to Secretary State Washington, *East Timor Question*, 7 Juli 1978.

*Di Gunung Matebian, pengeboman mulai terjadi bulan Oktober dan November. Satu [jenis] bom adalah bom gas. Apabila para pengebom menjatuhkan bom-bom tersebut pada pagi hari, banyak orang menjadi korban. Kita dapat melihat kapan terjadi ledakan ketika rumput terbakar. Bom-bom membakar rumput, dan di wilayah ini semuanya dihancurkan. Bilamana terjadi ledakan baunya seperti solar atau bensin.*⁴³³

Penyerahan diri: turun dari Matebian

315. Pada pertengahan November pemboman itu memaksa para pemimpin Fretilin menyerukan penduduk sipil untuk menyerahkan diri kepada musuh. Dalam otobiografinya Xanana Gusmão menulis:

*Segera musuh bergerak maju dan saya dikirim ke barat Matebian. Ledakan, kematian, bombardir, tangisan, dan mundur. Namun orang-orang tenang: mungkin pasrah, mungkin kami semua benar-benar siap untuk mati di sana. Pasukan kami mundur dan musuh merangsek maju. Satu dini hari, saya terbangun karena pengeras suara Pasukan Indonesia, yang menyerukan nama saya: "Adjunto Xanana, tidak perlu meneruskan pertempuran. Perintahkan orang-orang untuk menyerah!" Mereka masuk dari Uatucarbau sepanjang malam dan menguasai titik strategis.*⁴³⁴

316. Pada tanggal 22 November, diambil keputusan untuk menyerahkan diri di Matebian. Ketika penduduk sipil menuruni puncak gunung dan lembah panjang yang memisahkan Matebian Mane dan Matebian Feto, mereka disambut oleh para pasukan yang sudah menunggu. Beberapa orang dimasukkan ke kamp penahanan sementara, yang lainnya diinterogasi, dan yang lainnya disuruh kembali ke daerah asal mereka, baik di bawah pengawasan atau kembali sendiri.

317. Walaupun beberapa komandan Falintil seperti Xanana Gusmão berhasil lolos, hal ini memporakporandakan perlawanan Fretilin/Falintil. Dampak kehancuran dari kekalahan Fretilin sangat besar, dan Operasi Cahaya pada akhirnya mencapai beberapa kesuksesannya yang paling penting. Setelah sebelumnya Alarico Fernandes menyerah pada bulan September, empat anggota Komite Sentral lainnya menyerahkan diri pada akhir 1978 di Sektor Tengah Utara, di Remexio. Dengan penyerahan diri Alarico Fernandes, Fretilin kehilangan satu-satunya radio, yang merupakan alat koordinasi yang sangat penting. Kesuksesan utama ABRI diraih pada tanggal 31 Desember 1978 ketika tim Kopassus berhasil menyergap Presiden Fretilin Nicolau Lobato yang mengakibatkan luka parah di sebuah sungai dekat Maubisse.⁴³⁵

318. Komisi mendengar kesaksian ahli dari Pat Walsh mengenai hasil intensifikasi kampanye militer ini:

*Dari sudut pandang militer, ofensif ini sangat berhasil dalam menghancurkan Resistensi, meski sementara. Dari sisi kemanusiaan, ofensif ini merupakan bencana.*⁴³⁶

⁴³³ Kesaksian semacam ini menegaskan penggunaan bahan kimia terhadap penduduk sipil yang ditargetkan oleh Pasukan Udara Indonesia. Komisi memegang rekaman dokumenter mengenai pesawat OV-10 yang sedang dimuati dengan Opalm (*napalm* dalam versi Soviet) di pelabuhan udara Baucau pada akhir tahun 1970-an.

Setelah Matebean: serangan ABRI di wilayah tengah dan timur

319. Dengan jatuhnya basis Fretilin di Gunung Matebian dan penyerahan puluhan ribu warga sipil, pada awal 1979 militer Indonesia mengalihkan perhatiannya kepada sisa pasukan Fretilin dan penduduk sipil yang masih berada di Fatubesi, Distrik Ermera, dan Gunung Kablaki, yang terbentang di sepanjang perbatasan Ainaro-Manufahi, dan di lembah sungai Dilor. Serangan ABRI di Fatubesi mengakibatkan perpecahan dalam kepemimpinan Fretilin setempat, dan pada awal Februari salah satu faksinya menyerahkan diri, sementara mereka yang menolak untuk menyerah terus diburu. Di Gunung Kablaki, operasi infanteri memaksa sejumlah kelompok penduduk sipil yang tersisa untuk turun ke dataran yang lebih rendah di mana mereka menyerahkan diri atau ditangkap oleh pasukan yang sudah menunggu.⁴³⁷

320. Di selatan Manatuto Marinir, dengan didukung oleh pesawat, melakukan operasi lanjutan, yang diberi nama Operasi Pembersihan.⁴³⁸ Sementara itu, unit militer yang terlibat dalam penggempuran di Gunung Matebean berpindah dari Baucau ke Lautem dalam rangka pencarian sekelompok kecil pemimpin Fretilin dan para tentara Falintil yang lolos dari pengepungan.⁴³⁹ Pada bulan Februari Mau Lear pemimpin wilayah Timur ditangkap dan dibunuh.⁴⁴⁰ Orang-orang yang tertangkap dalam berbagai operasi ini dibawa ke kamp penampungan. Pada tanggal 26 Maret 1979 Operasi Seroja dibubarkan, dan ABRI menyatakan bahwa Timor-Leste "sudah ditaklukkan".

3.13 Penyerahan diri, pemukiman kembali dan kelaparan

Tinjauan

321. Periode antara akhir tahun 1977 sampai 1979 merupakan masa tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Timor-Leste. Kelaparan hebat terjadi akibat operasi militer besar-besaran Indonesia untuk menumpas Resistensi Fretilin. Tujuan militer lebih penting daripada korban manusia. Pengamat dari luar tidak diperkenankan masuk sampai krisisnya benar-benar memuncak dan jumlah kematian amat tinggi.

322. Penduduk sipil di beberapa gunung menyerahkan diri dalam jumlah besar mulai akhir tahun 1978. Setelah berbulan-bulan hidup selalu dalam pelarian untuk menghindari serangan, dan sumber pangannya dihancurkan oleh militer Indonesia, orang-orang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ketika mereka menyerah. Mereka ditampung dalam kemah-kemah sementara, tanpa persediaan pangan dan obat-obatan yang mencukupi. Penderitaan mereka diperburuk oleh kontrol militer atas operasi bantuan domestik Indonesia, dan larangan bagi lembaga internasional untuk masuk ke wilayah tersebut. Media internasional juga dilarang. Setelah pemindahan penduduk ke dalam kamp-kamp penampungan, prioritas pihak militer Indonesia atas keamanan sangat membatasi gerak-gerik penduduk sipil sehingga juga membatasi kemampuan mereka untuk bertani dan bercocok tanam pangan, yang semakin memperburuk kelaparan, kematian dan penderitaan dalam jumlah yang amat besar. Keinginan penguasa untuk memisahkan penduduk sipil dari Fretilin/Falintil mencapai puncaknya dengan pengungsian penduduk sipil ke pulau Ataúro mulai tahun 1980. Ribuan orang ditahan di pulau penjara itu, dan menderita penyakit dan kelaparan.

323. Setelah penundaan yang cukup lama, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan organisasi non-pemerintah Amerika Serikat *Catholic Relief Services* (CRS) diijinkan untuk memasuki wilayah tersebut pada akhir tahun 1979. Bekerja di bawah tekanan yang amat berat, upaya mereka sedikit banyak meringankan penderitaan penduduk dan menyelamatkan banyak nyawa.

Penyerahan dan eksekusi tahanan

324. Sebagian besar penyerahan terjadi sepanjang tahun 1978 ketika kampanye pengepungan semakin mendekat ke sejumlah posisi Resistensi. Kampanye pembomn dan pengepungan yang ketat, ditambah tawaran amnesti Presiden Soeharto pada tahun 1977 kepada para pejuang, tekanan akibat Operasi Cahaya mendorong penyerahan diri sejumlah tokoh Fretilin. Banyak di antara mereka yang awalnya diberi amnesti belakangan menghilang. Di antara mereka terdapat pemimpin-pemimpin terkemuka seperti Sera Key,⁴⁴¹ juga para kader, seperti mereka yang dieksekusi pada saat menyerahkan diri di Quelicai awal tahun 1979.⁴⁴² Ketika mereka turun dari gunung orang-orang diinterogasi oleh militer Indonesia guna mengidentifikasi dan memisahkan anggota Fretilin dan Falintil. Luis da Costa adalah Pastor di gunung pada saat itu. Ia selamat, dan pada tahun 1988 ia bersaksi di Lisabon mengenai penyerahan diri sekelompok kecil orang, yang sebagian besar kemudian dieksekusi:

Orang-orang mulai mati kelaparan, dan kami membawa banyak orang yang terluka, juga anak-anak dan keluarga-keluarga. Ingatan terburuk saya adalah mengenai jasad-jasad yang saya lihat ketika melewati Natarbora pada bulan Desember 1978 – ada jenazah setiap sepuluh meter, jasad-jasad yang mengering dari orang-orang yang mati kelaparan, ada yang berpelukan, ada yang bersandar di pohon-pohon. Saya menyerahkan diri di Barique pada tanggal 13 Maret 1979 dengan enam orang lainnya. Selama sebulan lamanya kami hanya makan dedaunan. Penyerahan diri kami dinegosiasi melalui perantara. Saya satu-satunya orang yang tidak dieksekusi.⁴⁴³

325. Pada tahun 1981 Administrator Apostolik Timor-Leste, Monsignor Martinho da Costa Lopes menantang Presiden Soeharto sendiri tentang bukti sejumlah penghilangan ini.⁴⁴⁴

Kamp-kamp penampungan sementara

326. Orang-orang yang tidak dibawa oleh militer kemudian ditahan. Selama akhir dasawarsa 1970-an dan sampai pertengahan dasawarsa 1980-an berbagai macam kamp digunakan untuk menampung penduduk yang menyerahkan diri. Berbagai kamp ini dikenal dengan banyak nama. Indonesia menyebutnya kamp pemukiman kembali, sementara beberapa pengamat internasional, dan banyak korban selamat orang Timor yang bersaksi di hadapan Komisi, menggunakan istilah “kamp konsentrasi.” Semua kamp ini memiliki ciri yang sama, yakni penelantaran dan pembatasan kebebasan bergerak. Tujuan penahanan ini adalah untuk memutuskan hubungan antara orang yang telah menyerah kepada ABRI dengan Falintil, untuk memutuskan dukungan penduduk sipil kepada pejuang gerilya, dengan demikian menghancurkan sisa-sisa resistensi yang tercerai berai di gunung dan hutan.

327. Pada tahap awal penyerahan diri, orang-orang ditampung dimana saja, termasuk di sekolah, toko-toko tua, barak-barak militer, atau bahkan di tempat terbuka. Awalnya tidak ada infrastruktur khusus untuk menampung mereka. Komisi mendengarkan kesaksian ahli dari Gilman dos Santos, yang pada tahun 1977 bekerja untuk pemerintah provinsi:

Orang-orang yang lari ke gunung turun pada tahun 1977, 1978 dan 1979. Mereka yang menyerah atau yang ditangkap oleh militer Indonesia, semuanya ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi, yang sangat tidak layak dihuni manusia manapun. Orang-orang ditempatkan di tenda-tenda besar darurat, yang dibuat dari daun palem atau rumput, dan mereka menahan semuanya, tanpa membatasi jumlah orang.⁴⁴⁵

328. Orang-orang pada umumnya berada dalam kondisi fisik yang lemah. Mereka sering kali menyerah setelah pengalaman yang buruk di gunung dimana banyak orang meninggal. Orang-orang yang datang ke kamp, tidak hanya luput dari kematian akibat perang, tapi juga dari kekurangan makan dan obat-obatan. Pengalaman kelaparan berlanjut di sejumlah kamp yang tidak memiliki fasilitas seperti sanitasi ataupun pasokan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang mendesak.

329. Pada tahun 1978, banyak kamp didirikan. Konon tujuan berbagai kamp ini adalah untuk memproses orang-orang yang telah menyerahkan diri sebelum dimukimkan di tempat lain. Menurut teori, proses ini seharusnya memakan waktu tiga bulan. Pengamanan sangat ketat, dan kamp-kamp tersebut dikelilingi oleh pos-pos militer dan Hansip. Gerak-gerik orang umumnya dibatasi pada radius 300 meter, sehingga sangat membatasi kemampuan mereka untuk

bercocok tanam atau mengumpulkan makanan. Orang-orang bertahan hidup dengan makanan apa saja yang dapat mereka kumpulkan di sekitar, ubi atau sagu kalau mujur, akar-akar dan umbi-umbian beracun kalau sial (lihat Bab 7.3.: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).

330. Lamanya waktu dalam kamp-kamp ini bervariasi sesuai dengan tingkat kerawanan suatu daerah, dan tergantung pada individu yang ditahan dan persepsi ABRI mengenai ancaman bahaya orang tersebut.⁴⁴⁶

Kamp penahanan jangka panjang dan strategi keamanan ABRI

331. Beberapa kamp penampungan sementara terus dipertahankan sebagai kamp penahanan jangka panjang. Desa pemukiman baru dibangun guna mendukung maksud ABRI menjalankan pemisahan penduduk sipil dari Fretilin dan Falintil. Pada akhir tahun 1979 jumlah penduduk di kamp penahanan melampaui 300.000,⁴⁴⁷ dan bila berbagai angka yang dilaporkan ABRI dari masa itu akurat, bisa saja melampaui 370.000.⁴⁴⁸ Militer perlu mengontrol jumlah orang yang sangat besar ini, sementara itu juga tetap fokus pada tugas menumpas resistensi gerilya bersenjata. Dalam beberapa kasus, kamp-kamp ini dibangun dimana sebelumnya tidak pernah ada pemukiman sama sekali. Seluruh desa dibawa dan dipaksa pindah, khususnya bila berada di daerah-daerah yang rawan. Pergerakan penduduk sangat dibatasi. Dokumen militer Indonesia dari masa itu menjelaskan bagaimana menjalankan kebijakan ini:

Setiap kali siapa pun keluar dari desa, ia harus memiliki surat jalan, dan setiap orang yang masuk ke suatu desa dari desa lain wajib lapor.

Tidak boleh ada kebun atau sawah penduduk yang letaknya jauh dari pemukiman atau desa.⁴⁴⁹

332. Keadaan ini menghasilkan kontrol atas penduduk sipil yang begitu ketat di sejumlah kamp sehingga mereka tidak dapat bercocok tanam sesuai pola tanam yang normal dan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Kontrol ini mengakibatkan penderitaan besar bagi banyak penduduk sipil yang ditahan dalam berbagai kamp ini, dan mengakibatkan kelaparan.⁴⁵⁰

333. Militer Indonesia terus mencurigai adanya hubungan antara penduduk yang ditahan dengan pejuang gerilya Fretilin. ABRI menggunakan anggota Hansip Timornya untuk memantau gerak-gerik penduduk. Hal ini menimbulkan keadaan saling curiga dan ketegangan di beberapa komunitas kamp. Di Dili dan kota-kota dimana penduduk sipil telah kembali juga terdapat banyak pusat penahanan. Penangkapan sewenang-wenang oleh militer marak terjadi, dan tidak pernah ada pengadilan resmi atas tahanan politik sampai bulan Desember 1983. (Lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Pengadilan Politik.) Selama tahun 1979-80 banyak orang yang ditahan kemudian menghilang. Militer Indonesia menggunakan beberapa tempat sebagai lokasi pembunuhan, seperti di Quelicai setelah penyerahan diri massal dari Matebian,⁴⁵¹ dan di pinggiran Dili di Areia Branca dan Tasitolu.⁴⁵²

Wilayah tertutup

334. Selama periode ini Timor-Leste ditutup dari dunia luar. Walaupun Indonesia telah menyatakan Timor-Leste sudah ditaklukkan, wilayah ini dalam banyak hal tetap terasa sebagai wilayah perang. Menutupi apa yang sebenarnya terjadi dari publik Indonesia, atau masyarakat internasional yang lebih luas, merupakan komponen penting dari strategi Indonesia untuk menguasai Timor-Leste. Akses media Indonesia ke Timor-Leste dikontrol dengan ketat, dan media internasional praktis dilarang. Lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan internasional tidak diperkenankan masuk ke Timor-Leste, dan delegasi resmi hanya diizinkan datang dalam berbagai kunjungan yang dikontrol ketat.

335. Komisi mendengarkan kesaksian dari Gilman dos Santos, mengenai isolasi ini:

Bahkan wartawan Indonesia tidak diizinkan untuk masuk ke sini. Mengenai telekomunikasi, izin untuk melakukan hubungan telepon jarak jauh atau internasional tidak diberikan. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada informasi yang dapat keluar dari sini. Dipisahkannya Timor-Leste dari dunia luar oleh Pemerintah Indonesia, khususnya ABRI, jelas menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia adalah untuk mempersulit masuknya bantuan dari negara-negara lain.⁴⁵³

336. Gereja Katolik merupakan satu-satunya organisasi independen yang tetap berada di Timor-Leste dengan jaringan internasional yang luas. Gereja perlahan membocorkan berita mengenai krisis yang melanda Timor-Leste, biasanya melalui surat-surat yang diselundupkan ke luar wilayah ini.

337. Pada bulan Juli 1979, Pat Walsh menyusun laporan mengenai krisis kemanusiaan di Timor-Leste untuk *Action for World Development*, sebuah LSM berbasis gereja di Australia. Ia memberi kesaksian pada Komisi bahwa laporan tersebut menyimpulkan bahwa di masa ini:

Upaya bantuan kemanusiaan Indonesia adalah prioritas yang jauh lebih rendah ketimbang operasi militer dan lembaga-lembaga independen tidak akan diizinkan masuk sampai Indonesia telah mencapai tujuan militernya.⁴⁵⁴

338. Walaupun berbagai LSM Australia mencoba untuk menginternasionalisasikan krisis kemanusiaan di Timor-Leste, pemerintah Australia memandang periode ini sebagai permulaan pengakuan *de jure*-nya bagi kedaulatan Indonesia atas wilayah ini. Posisi ini bertentangan dengan sebagian besar negara anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa.^{*} Sementara itu, warga Timor-Leste di luar wilayah tersebut juga mencoba untuk meningkatkan kesadaran internasional akan krisis kemanusiaan tersebut. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, submisi-submisi diajukan kepada Komite Dekolonisasi PBB di New York, dan resolusi-resolusi Majelis Umum PBB pada masa itu mulai mengacu pada kelaparan dan berbagai kebutuhan humaniter orang Timor-Leste. Hal ini memperkuat usaha yang dilakukan José Ramos-Horta dan rekan-rekannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴⁵⁵

339. Pemerintahan sipil Indonesia dan Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi satu-satunya lembaga yang memberi bantuan sampai 1979. Kekurangan sumber daya, dan ditambah dengan kontrol ketat militer Indonesia terhadap operasinya, bermacam lembaga ini tidak mampu memenuhi kebutuhan mendesak penduduk. Obat-obatan jarang tersedia; dan bantuan yang disalurkan melalui PMI seringkali masuk ke pasar gelap, di luar kemampuan orang Timor-Leste untuk membelinya.⁴⁵⁶

340. Setelah berbagai laporan mengenai bencana kemanusiaan dipublikasikan, pada bulan September 1978 sebelas Duta Besar negara asing dan beberapa wartawan mengunjungi Timor-Leste didampingi oleh Menteri Luar Negeri Dr Mochtar Kusumaatmadja.[†] Mereka mewakili pemerintah Kanada, AS, Australia, Jepang, Selandia Baru, India, Korea Selatan, Bangladesh, Mesir, Siria dan Irak. Mereka diberi tahu bahwa sekitar 125.000 orang telah turun dari gunung

^{*} Pemerintah Australia menjadikan 14 Februari 1979 sebagai tanggal Australia memulai proses pemberian pengakuan *de jure* kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste. Hari ini menandai dimulainya negosiasi antara Australia dan Indonesia mengenai cadangan minyak Laut Timor. Lihat bab Penentuan Nasib Sendiri.

[†] Sejumlah organisasi kemanusiaan melaporkan situasi ini; termasuk Australia Council for Overseas Aid (ACFOA); perwakilan World Vision Indonesia; dan Palang Merah Indonesia. Lihat kesaksian Pat Walsh kepada CAVR dalam audiensi publik nasional tentang Kelaparan dan Pemindahan Paksa, 28-29 Juli 2003.

dengan 20-30.000 dari mereka berada dalam kondisi yang amat mengenaskan. Empat Duta Besar (dari Australia, Kanada, Jepang dan AS) menyerukan untuk segera dilakukan operasi bantuan kemanusiaan internasional.⁴⁵⁷ Walaupun dalam keadaan mendesak seperti itu, satu tahun berlalu sebelum ICRC dan LSM Amerika *Catholic Relief Services* (CRS) tiba di Timor-Leste untuk menyediakan bantuan darurat. Hal ini terjadi setelah ABRI merampungkan Operasi Seroja, seperti yang disebut di atas.

Bantuan ICRC dan CRS

341. LSM Amerika Serikat *Catholic Relief Services* (CRS) menjalankan misi survei awalnya pada bulan Mei 1979. Komisi menerima submisi dari CRS, termasuk berbagai dokumen dari masa itu, yang memberi banyak informasi mengenai skala krisis tersebut dan kurangnya sumber daya untuk menanggulangnya. Pada bulan Oktober 1979, CRS dan ICRC memulai operasi bantuan darurat. Salah satu yang terlibat adalah Gilman dos Santos, yang meninggalkan posisinya sebagai pegawai negeri pada tahun 1979 dan bergabung dengan tim darurat CRS. Ia bersaksi di hadapan Komisi bahwa kantornya bekerja 18-20 jam sehari, tujuh hari per minggu. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa sementara banyak orang dalam pemerintahan sipil Indonesia yang membantu kerja darurat CRS dan ICRC, pihak militer dan polisi Indonesia bersikap tidak mendukung dan menciptakan banyak halangan bagi pekerja bantuan.⁴⁵⁸

342. Jelas bahwa Indonesia tidak menggunakan sumber dayanya secara memadai untuk mencegah atau menanggapi kelaparan. CRS pernah dua kali kekurangan pasokan dan terpaksa meminjam beras kepada Bulog (Badan Urusan Logistik), yakni badan penyalur beras pemerintah Indonesia, yang menyimpan stok berlebih di Dili pada masa di mana sejumlah besar penduduk menderita kelaparan dan penyakit yang berkaitan dengan kelaparan di dalam kamp-kamp yang dikuasai militer.⁴⁵⁹

343. Komisi mendengarkan kesaksian dari Pat Walsh bahwa CRS dan ICRC bekerja keras dan efisien. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa selama 18 bulan berikutnya, ICRC bersama Palang Merah Indonesia membantu 80.000 pengungsi di 15 desa dan menyelamatkan banyak nyawa. Walsh mengatakan bahwa selama periode ini, CRS menghabiskan AS\$4 juta mendistribusikan 17.000 ton pangan serta obat-obatan, pakaian, sabun, benih, peralatan pertanian dan kerbau.⁴⁶⁰ Mengingat skala krisis, dan dibandingkan dengan jumlah lembaga bantuan internasional dan tingkat bantuan yang diberikan dalam krisis di Timor-Leste pada akhir tahun 1999, paket bantuan ini relatif kecil dan penyampaiannya yang tertunda terbukti sangat lambat bagi banyak orang. Kontrol militer Indonesia atas pendistribusian bantuan adalah hambatan utama usaha pemberian bantuan. Sementara Komisi menerima banyak kesaksian mengenai bagaimana pentingnya bantuan yang terbatas ini, baik CRS maupun ICRC tidak membahas persoalan dasar konflik internasional tersebut yang menjadi penyebab bencana kelaparan tersebut.

Ataúro sebagai pulau penjara

344. Ataúro memiliki sejarah digunakan sebagai pulau penjara oleh rezim yang silih berganti di Timor-Leste. Pemerintahan Kolonial Portugis sudah lama menggunakannya, seperti halnya pasukan pendudukan Jepang selama Perang Dunia II. Rezim pendudukan Indonesia memulai kebijakan serupa pada tahun 1980. Komisi menerima kesaksian ahli bahwa ini merupakan kepanjangan dari kebijakan memisahkan penduduk sipil yang dianggap dapat menjadi basis dukungan di masa mendatang bagi Resistensi bersenjata. Gilman dos Santos memberikan kesaksian:

Pada tahun 1980, ABRI dan pemerintah setempat kembali memindahkan secara paksa orang-orang yang dicurigai memiliki keluarga yang menjadi pejuang kemerdekaan yang berada di hutan-hutan, ke pulau Ataúro.⁴⁶¹

345. Para korban selamat juga bersaksi kepada Komisi bahwa kebijakan ini dijalankan bersama oleh militer dan pemerintahan sipil.⁴⁶²

346. Sebagian orang pertama yang dikirim ke Ataúro adalah mereka yang ikut dalam pemberontakan (*levantamentos*) selama masa ini. Para tersangka pendukung serangan 10 Juni 1980 atas stasiun TV di Dili dibawa ke Ataúro setelah ditahan dan disiksa mereka di Dili.⁴⁶³ Orang yang datang kemudian termasuk sejumlah keluarga pejuang Resistensi, yang banyak datang dari berbagai distrik setelah operasi 'pagar betis' tahun 1981.⁴⁶⁴ Komisi mendengarkan kesaksian warga Mauxiga di pegunungan tengah yang diasingkan di Ataúro pada bulan Agustus 1982, setelah percobaan pemberontakan.⁴⁶⁵

347. Komisi mendengarkan kesaksian ahli dari Ceu Lopes Federer, seorang pekerja kemanusiaan Timor bersama ICRC di Ataúro antara tahun 1980-82. Ia menceritakan kepada Komisi bahwa kapal yang datang dengan tahanan di Ataúro pada umumnya adalah perempuan, anak-anak dan orang tua. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa banyak yang diperdaya sampai percaya bahwa mereka hanya akan dibawa dari rumahnya selama satu atau dua hari, dan bahwa mereka datang hampir dengan tangan hampa.⁴⁶⁶

348. Tingkat kematian sangat tinggi. Ceu Lopes Federer mengingat kembali terjadinya wabah epidemi kolera akibat kondisi kamp-kamp yang mengenaskan, dan tingkat kematian yang tinggi di antara anak-anak.⁴⁶⁷ Walaupun pengamanan di Ataúro lebih longgar dibandingkan di daratan utama, pulau ini dikenal memiliki sumber makanan dan air yang terbatas, dan ribuan tahanan yang datang menghadapi berbagai kesulitan berat.

349. Laporan ICRC ketika itu membenarkan bahwa pemindahan penduduk ke Ataúro telah "menipiskan" sumber makanan di pulau tersebut, sehingga lembaga tersebut menerapkan program makanan darurat.⁴⁶⁸ Kesaksian kepada Komisi dari para korban selamat menceritakan mengenai pentingnya nilai bantuan ini dalam menyelamatkan nyawa.⁴⁶⁹ Perkiraan jumlah total populasi tahanan bervariasi, dan kemungkinan besar melampaui 4000.⁴⁷⁰ Ceu Lopes Federer mengatakan kepada Komisi bahwa ia membuat daftar sampai tahun 1982, ketika ia meninggalkan pulau tersebut, yang mencantumkan 6.400 nama orang yang pernah ditahan di Ataúro.⁴⁷¹ Komisi juga diberi tahu bahwa Militer Indonesia melakukan pelanggaran seksual terhadap banyak perempuan di pulau tersebut.⁴⁷²

350. Pada pertengahan 1980-an para tahanan dipindahkan keluar pulau tersebut, walaupun dalam banyak kasus tampaknya mereka dipindahkan ke berbagai kamp di daratan utama yang disebut desa binaan, dan bukannya dikembalikan ke daerah asal mereka, dimana mereka menjalani proses indoktrinasi ideologi Pancasila Indonesia.⁴⁷³

Berbagai kamp Penahanan ditutup

351. Pada tahun 1982-1983 sebagian besar orang diizinkan untuk meninggalkan kamp penahanan. Beberapa orang kembali ke desa asal mereka, apabila memungkinkan. Yang lainnya mendirikan desa baru, yang sering diberikan nama desa aslinya, yang kini telah ditinggalkan. Yang lainnya bermukim di desa jenis baru, yang disebut desa pemukiman.⁴⁷⁴

352. Penduduk di ibu kota Dili bertambah pesat pada awal dasawarsa 1980-an. Pada tahun 1975 penduduknya kurang lebih 28.000 jiwa, akan tetapi Kantor Statistik Indonesia menghitung jumlah penduduk di distrik Dili 67,039 jiwa pada tahun 1980.⁴⁷⁵ Pola baru urbanisasi ini memungkinkan aparat militer Indonesia untuk memantau penduduk lebih mudah. Jaringan

informan, Kartu Tanda Penduduk dan kebebasan gerak yang terbatas serta penahanan sewenang-wenang menjadi ciri dari masyarakat yang dikontrol ketat ini.⁴⁷⁶

353. Selama periode ini, antara tahun 1978 dan awal dasawarsa 1980-an, Militer Indonesia menjalankan program pemukiman yang secara radikal dan permanen mengubah pola pemukiman di Timor-Leste. Masyarakat Timor secara tradisional tinggal di dusun-dusun kecil yang terdiri dari beberapa rumah dimana beberapa keluarga inti tinggal, yang dalam bahasa Tetum disebut knua. Pola pemukiman terdahulu yang tersebar di pegunungan diubah dengan paksa menjadi penduduk yang pada umumnya tinggal di pesisir yang terkonsentrasi di berbagai kota sepanjang jalan utama. Tujuan strategis untuk memisahkan penduduk sipil dari pejuang Resistensi di gunung-gunung, dan menahan mereka di wilayah dimana mereka dapat dengan mudah dipantau, merupakan pergeseran fundamental dalam gaya hidup orang Timor. Walaupun suasana penahanan ini melonggar pada pertengahan dasawarsa 1980-an dengan diizinkan penduduk untuk meninggalkan kamp mereka, pola perubahan pemukiman dasar ini masih terasa sampai sekarang.

3.14 Operasi Keamanan

Tinjauan

354. Dengan Timor-Leste dinyatakan takluk pada bulan Maret 1979, Militer Indonesia memfokuskan diri pada operasi-operasi pembersihan yang lebih kecil dan pengawasan ketat terhadap penduduk di seluruh wilayah. Sisa-sisa Resistensi bersenjata ada di sejumlah kantong yang terisolasi.

355. Pada bulan Juni 1980, satu dari sejumlah kelompok yang mampu bertahan ini melancarkan serangan ke ibu kota Dili, yang mengejutkan ABRI, dan menunjukkan bahwa Resistensi masih aktif. Militer Indonesia menanggapi serangan ini dengan melakukan ratusan penahanan dan lebih dari 100 pembunuhan. Banyak tahanan yang dipenjara pada masa ini dikirim ke Ataúro (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa).

356. Pada tahun 1981 Militer Indonesia melancarkan serangan besar-besaran yang bertujuan menghancurkan sisa-sisa kelompok Resistensi. Serangan ini menggunakan taktik yang dikenal dengan sebutan kakis, atau "pagar betis." Sejumlah besar penduduk sipil, yang masih menderita akibat konflik di pegunungan dan penganiayaan di berbagai kamp tahanan ABRI, dipaksa bertugas untuk berjalan kaki melintasi wilayah itu dalam barisan seperti "pagar", dengan maksud untuk menjebak anggota Resistensi bersenjata yang masih tersisa. Perempuan, anak-anak dan lelaki, termasuk orang tua, dipaksa ikut operasi ini. Kelaparan, sakit dan perlakuan buruk oleh militer merupakan pengalaman lazim yang dirasakan penduduk sipil. Banyak yang mati. Tugas-paksa ini juga mengalihkan sejumlah besar penduduk sipil dari ladang mereka selama musim tanam, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kelaparan, terutama karena gangguan terhadap pertanian selama tahun-tahun operasi militer besar-besaran sebelumnya.

357. Secara militer, operasi ini gagal menghancurkan gerakan Resistensi bersenjata yang sering bisa lolos dari "pagar" itu. Lebih dari 4000 orang yang dianggap sebagai "simpatisan Fretilin" ditahan dan dipenjarakan di pulau Ataúro ataupun kamp pemukiman-kembali lainnya yang dikontrol ABRI.

Situasi di Dili dan di seluruh Timor-Leste, 1979-1980

358. Dengan tertangkap atau terbunuhnya para pemimpin utama gerakan Resistensi, Resistensi bersenjata dihancurkan dan mayoritas penduduk sipil Timor-Leste di pegunungan ditangkap dan menyerahkan diri di bawah kontrol mereka, militer Indonesia pada awal tahun 1980 merasa yakin bahwa operasi militer besar di Timor-Leste telah selesai. Komando Pasukan Gabungan Operasi Seroja dibubarkan, dan Komando Operasi Militer pun dipindahkan dari Dili ke Bali, yang berarti bahwa Timor-Leste kini berada dalam struktur komando regional standar ABRI. Pada saat yang sama, kendali pemerintahan sipil secara resmi dialihkan dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) kepada Kementerian Dalam Negeri (Depdagri). Secara militer, ABRI meneruskan berbagai operasi pembersihan untuk mengamankan kekuasaannya, namun secara umum, periode setelah penutupan Operasi Seroja secara komparatif cukup sepi dalam hal operasi militer.

359. Militer Indonesia terus mempertahankan peran dominan di dalam dan selama pengembangan pemerintahan sipil. Kehidupan bagi sebagian besar warga sipil pada masa itu penuh ketegangan dan ketakutan.⁴⁷⁷ Dalam sebuah submisi dari Asosiasi Mantan Tahanan Politik Timor-Leste (*Associação dos Ex-Prisioneiros e Detidos Políticos de Timor Leste*, Assepol), Komisi mendengar bahwa sepanjang masa ini, dengan membengkaknya jumlah penduduk di Dili, para agen intelijen Indonesia terlihat di mana-mana. Assepol mengatakan kepada Komisi bahwa tidak ada proses peradilan di tahun-tahun akhir dasawarsa 1970-an dan awal dasawarsa 1980-an ini, dan militer memiliki kekuasaan yang tak terbatas untuk melakukan penangkapan dan

penyiksaan sewenang-wenang.⁴⁷⁸ Banyak kesaksian individu kepada Komisi mendukung hal ini, dan menceritakan bahwa mereka diambil dari rumah mereka pada malam hari, atau dikumpulkan oleh militer untuk diinterogasi dan disiksa.⁴⁷⁹ Komisi telah membuat peta pusat penahanan dan interogasi di Dili dan Baucau selama tahun-tahun ini, banyak di antaranya tidak resmi, namun dioperasikan oleh militer Indonesia. Jumlah pusat penahanan dan interogasi ini jauh melebihi kebutuhan wajar sebuah negara demokratis yang dikelola berdasarkan aturan hukum (lihat Lampiran dari Laporan ini).

360. Di seluruh Timor-Leste militer Indonesia mengembangkan struktur territorialnya disertai dengan pemindahan penduduk dan berbagai perubahan demografis, sebagai akibat dari perpindahan besar pada periode itu. Di setiap desa di Timor-Leste ABRI menempatkan seorang petugas babinsa, dan khususnya di sejumlah wilayah rawan, ada tim orang-orang seperti ini yang disebut Tim Pembina Desa (TPD). Pos-pos militer ini bekerja erat dengan Pertahanan Sipil (Hansip) yang beranggotakan orang-orang Timor, dan membantu militer Indonesia untuk mengontrol ketat segala lapisan masyarakat Timor-Leste. Dengan demikian di banyak wilayah negeri ini, orang-orang tinggal di beberapa desa pemukiman yang baru di bawah pengawasan ketat militer.

361. Situasi kelaparan akut yang terkait dengan sejumlah kampanye militer tahun 1977-78 dan berbagai kamp tahanan militer telah distabilkan oleh sejumlah upaya dari lembaga bantuan internasional, CRS dan ICRC. Namun demikian, pada tahun 1980, komunitas-komunitas belum mendapat peluang untuk pulih dari tahun-tahun traumatis akibat konflik ini. Peninggalan yang menyengsarakan itu mencakup kerentanan terhadap kelaparan dan sakit akibat penganiayaan selama konflik serta hilangnya tahun-tahun masa tanam dan panen yang normal.

Pemberontakan pertama: Dili, Juni 1980

362. Pada tanggal 10 Juni 1980, Falintil melancarkan sebuah serangan ke Dili, ke pemancar televisi baru di Marabia.⁴⁸⁰ Serangan ini benar-benar mengejutkan ABRI. Ini adalah pemberontakan (*levantamento*) besar pertama setelah kekalahan telak Fretilin pada akhir tahun 1978. Nama *levantamento* [kebangkitan] digunakan oleh Gerakan Resistensi untuk memberi suatu rasa tujuan bersama bagi sesuatu yang sebenarnya merupakan serangan militer terbatas yang dilakukan oleh berbagai kelompok kecil Falintil yang masih bertahan, yang telah menyusun kekuatan kembali pada bulan-bulan sebelumnya. Serangan ke Dili membuktikan daya tahan Gerakan Resistensi serta perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan Militer Indonesia. Serangan tersebut dilancarkan sampai Lahane dan Becora di pinggiran Dili. Salah seorang anggota pasukan penyerang mengatakan kepada Komisi bahwa tujuan dari serangan itu adalah "untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Fretilin masih ada."⁴⁸¹

363. Sebuah komunike kedutaan Amerika Serikat menyebutkan bahwa serangan itu mungkin akan menimbulkan tanggapan yang sangat keras:

Serangan pemberontak ke daerah pinggiran ibu kota propinsi ini telah mendatangkan kesulitan dan rasa malu bagi para pejabat keamanan, dan bisa diperkirakan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya serangan itu.⁴⁸²

364. Pihak Militer Indonesia terkejut sekaligus dipermalukan dengan keberanian serangan dari pihak Resistensi yang dianggap sudah dikalahkan. Ratusan orang ditahan dalam pembersihan militer di ibukota. Komisi menerima informasi bahwa lebih dari 100 orang terbunuh, dan bahwa penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya terhadap para tahanan umum terjadi (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa). Banyak tahanan diasingkan ke Atauro.⁴⁸³

“Pagar betis”: Operasi Kikis

365. Hampir setahun kemudian, pada pertengahan tahun 1981, ABRI melancarkan sebuah operasi besar-besaran yang menggabungkan personel militer dengan puluhan ribu penduduk sipil yang membentuk “pagar betis” manusia. “Pagar” ini berjalan kaki melintasi daerah-daerah yang luas di wilayah itu untuk mencari dan menangkap pasukan Falintil yang tersisa, dengan tujuan utama untuk menangkap ataupun membunuh Xanana Gusmão. Taktik ini disebut operasi kikis,⁴⁸⁴ berhasil digunakan untuk memerangi berbagai pemberontakan di Indonesia, dimana penduduk setempat mendukung tujuan militer untuk menghancurkan pemberontakan. Taktik ini juga telah digunakan beberapa kali di Timor-Leste pada tahun-tahun sebelumnya.⁴⁸⁴ Namun di Timor-Leste, tidak seperti di Indonesia, militer kekurangan elemen yang sangat penting, yakni dukungan rakyat. Meski bisa menangkap banyak orang Timor, baik sipil maupun pejuang, namun pagar itu tidak berhasil secara substansial menghancurkan Falintil.

366. Sebelum operasi tersebut dijalankan, ICRC menghentikan kegiatannya di daratan utama Timor-Leste, dan CRS meninggalkan Timor-Leste pada bulan November 1980 setelah menyelesaikan program daruratnya. Militer Indonesia pada dasarnya bebas menjalankan kikis terlepas dari pengawasan internasional.

Mobilisasi massal penduduk sipil

367. Operasi tahun 1981, yakni Kikis terbesar yang pernah dilakukan di Timor-Leste, diberi nama sandi Operasi Keamanan.⁴⁸⁵ Militer Indonesia melibatkan sekurangnya lima belas batalyon territorial, atau sekitar 12.000 prajurit, dari luar Timor-Leste dan pasukan tambahan yang tak diketahui jumlahnya untuk tugas tempur.⁴⁸⁶ Orang-orang Timor menyatakan bahwa lebih dari 15 batalyon pasukan terlibat.⁴⁸⁷ Operasi besar tampaknya terjadi di Sektor D,[†] yakni wilayah Baucau, Lautem dan Viqueque.⁴⁸⁸ Penduduk sipil direkrut paksa sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO). Secara resmi ABRI merekrut penduduk sipil lelaki berusia 12-35 tahun, namun kenyataannya, anak laki-laki yang jauh lebih muda dan pria dewasa yang jauh lebih tua, serta para perempuan, juga dilibatkan.⁴⁸⁹ Kelompok-kelompok orang ini ditempatkan di kesatuan militer tertentu untuk operasi ini. Jumlah total penduduk sipil yang dilibatkan sangat besar. Sebuah dokumen militer tahun 1982 menyebutkan bahwa operasi ini menyertakan “60.000 penduduk sipil selain Wanra dan Ratih.”[‡] ⁴⁹⁰ Sumber-sumber Marinir menunjukkan lebih banyak lagi yang dilibatkan, dengan menyebutkan adanya delapan batalyon dan 120.000 milisi binaan yang bergerak dari timur ke barat, dan tujuh batalyon dengan 25.000 milisi binaan yang bergerak dari barat ke timur, yang dimaksudkan untuk “menundukkan musuh di Aitana”.⁴⁹¹

368. Pagar manusia ini mulai berjalan pada pertengahan tahun 1981 dari Tutuala di titik paling timur Timor-Leste. Dari sini, kesatuan militer dan para TBO sipil berjalan ke arah barat menuju sebuah garis yang menghubungkan Com-Raca-Lospalos-Iliomar. Mereka membentuk sebuah pagar manusia yang membentuk barisan utara-selatan, dan menyapu medan untuk mencari Falintil. Tampak bahwa pagar ini berfungsi dalam dua hal, sebagai garis depan yang bergerak maju di depan pasukan ABRI dan menyapu untuk mencari Falintil, maupun sebagai tembok penjepit di mana kesatuan-kesatuan ABRI berusaha menggiring Falintil. Apapun tujuannya, taktik ini gagal menangkap kelompok Falintil dalam jumlah yang memadai untuk mengakhiri gerakan resistensi, dan banyak orang yang terlibat dalam pagar manusia itu tidak bertemu dengan Falintil sama sekali. Namun demikian, Komisi menerima kesaksian tentang para tawanan yang

⁴⁸⁴ ‘Kikis’ berarti ‘menggerus’ atau ‘merontokkan’. *Budiardjo dan Liem menerjemahkan “kikis” menjadi “chipping-away”* (*The War Against East Timor*, hal. 223).

[†] Meski fokus dari operasi ini adalah di Timur, namun di Barat, militer Indonesia merekrut TBO untuk ikut serta dalam sebuah kampanye kecil *kikis* di kawasan antara Cassa dan Ainaro. Tidak ada catatan tentang penangkapan anggota Fretilin di sektor itu.

[‡] Wanra (Perlawanan Rakyat) dan Ratih (Rakyat Terlatih) adalah dua dari empat tipe utama tenaga bantuan militer yang digunakan oleh ABRI. Dua lainnya adalah Hansip (Pertahanan Sipil) dan Kamra (Keamanan Rakyat). Lihat bab Rezim Pendudukan.

dieksekusi. Seorang TBO mengatakan kepada Komisi bahwa lima orang yang ditangkap oleh kesatuan militer dimana dia ditugaskan, dekat Cacavem di Iliomar, langsung dieksekusi.⁴⁹²

369. Pada bulan Juli 1981, satu pagar lainnya mulai berjalan dari koridor Venilale-Ossu-Viqueque dan bergerak ke arah timur laut.⁴⁹³ Kedua pagar ini bertemu di barisan pegunungan Matebian dengan maksud untuk mengepung Falintil dan menggiring mereka ke tempat yang lebih rendah. Sejauh itu, operasi ini belum berhasil melakukan penangkapan yang berarti. Setelah pengepungan Gunung Matebian, tahap akhir Operasi Kikis pun dimulai. Pasukan dan TBO kembali menyalir dari wilayah tengah ke pantai selatan, dan terus bergerak maju ke arah barat. Pagar ini bergerak mendekati daerah Lacluta, Viqueque, sementara dari timur, barisan lainnya bergerak maju untuk menemui mereka.

Pembantaian Lacluta

370. Ketika gerak maju itu mencapai daerah Lacluta pada bulan September terjadi pembantaian yang, menurut seberapa besar kesaksian, membunuh ratusan orang. Tidak ada hitungan yang pasti. Monsignor Costa Lopes menyatakan bahwa 500 orang terbunuh.⁴⁹⁴ Pihak penguasa Indonesia mengakui ada 70 orang yang terbunuh.⁴⁹⁵ Sumber-sumber lain menyebutkan jumlah korban berada di antara dua angka itu.⁴⁹⁶ Komisi menerima bukti mengenai pembantaian massal terhadap orang-orang sipil, termasuk perempuan dan anak-anak pada saat ini. Komisi juga mendengar mengenai pembantaian yang kedua terhadap paling sedikit 20 orang.[†] Indonesia mengklaim sebuah kemenangan militer di daerah itu sepanjang masa ini, dengan menyebutkan bahwa 450 anggota Fretilin telah ditangkap dan 150 pucuk senjata disita, namun tidak menyebutkan tentang korban.⁴⁹⁷ Kebanyakan sumber lainnya mengatakan bahwa ini merupakan pembantaian penduduk sipil secara brutal.⁴⁹⁸ Pembantaian itu diyakini telah terjadi di dekat Batu Santo Antonio di lereng Gunung Aitana. Seorang pejuang Falintil mengingat kembali pembunuhan penduduk sipil di daerah itu oleh militer Indonesia:

Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri bagaimana militer Indonesia, Batalion 744, membunuh penduduk sipil di hadapan saya. Mereka menangkap orang-orang yang tak bersenjata itu, mengikat mereka kemudian menikam mereka sampai mati. Ada seorang perempuan hamil yang ditangkap dan dibunuh begitu saja, saya melihat kejadian itu dari jarak dekat, sekurangnya 100 meter dari tempat kejadian.⁴⁹⁹

Konsekuensi operasi

Hasil militer

371. "Pagar" ini jauh lebih berhasil dalam menangkap orang-orang yang masih bersembunyi di hutan dibandingkan menangkap pejuang Falintil, walaupun ada berbagai kesaksian tentang kesatuan Falintil yang dihancurkan.⁵⁰⁰ Untuk menjelaskan kegagalannya untuk menangkap banyak anggota Falintil, tampak mungkin bahwa dalam banyak kasus, pagar ini membiarkan Falintil untuk melintasi barisan itu. Komisi diberitahu tentang satu kejadian orang meloloskan diri dari "pagar" itu.

[†] Wawancara dengan José de Jesus dos Santos, Dili, 28 Juni 2004. Dia mengatakan bahwa kontak terjadi di antara 1 dan 10 September.

[†] Wawancara dengan Anacleto Ximenes, Cairui, Manatuto, 12 Maret 2004 dan dengan Sebastião de Cunha, Manatuto, 12 Mei 2004.

Saat kami lewat, banyak orang tahu, namun mereka melihat kami bukan seperti melihat manusia, tapi seperti melihat binatang yang melintasi pos mereka. Saya masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana saya melangkah di depan seorang musuh [orang Timor yang merupakan anggota pagar itu], namun mereka memandangi saya seolah saya ini seekor anjing, kemudian menyuruh saya pergi.⁵⁰¹

372. Mungkin juga telah ada kerja sama antara Falintil dan para TBO asal Timor:

...saat kami sampai di [lokasi] pemancar Telkom, ada banyak [anggota] Fretilin di sana. Tetapi karena telah ada kontak [dengan para TBO], Fretilin melewati saja pasukan [ABRI] Komandan Peleton Falo Chai.⁵⁰²

373. Ada juga kemungkinan bagi Falintil untuk lolos dari barisan-barisan itu:

Kami berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil, 3-4 orang, kemudian pada malam hari kami mencari cara untuk melintas di belakang mereka.⁵⁰³

Berbagai konsekuensi kemanusiaan

374. Operasi militer ini mengakibatkan berbagai konsekuensi kemanusiaan yang sangat berat di saat penduduk Timor belum pulih dari bencana kelaparan dan penderitaan yang traumatis akibat Operasi Seroja dan kondisi kamp tahanan. Sebelum militer memulai operasi ini, mereka mengharuskan kehadiran bantuan internasional yang memang sudah terbatas untuk meninggalkan wilayah ini.⁵⁰⁴ Ini saja merupakan berita buruk bagi sebuah masyarakat yang sangat rapuh dan terisolasi. Memaksa penduduk sipil pedesaan dengan jumlah sedemikian besar untuk ikut dalam berbagai operasi militer pada paruh kedua tahun 1981 telah memasukkan mereka ke dalam kondisi yang luar biasa keras. Para TBO, banyak di antaranya anak-anak, dibawa ke daerah-daerah pertempuran, dan akibatnya, mereka sering menjadi korban.⁵⁰⁵ Penduduk sipil lainnya yang dipaksa ikut serta lebih banyak direkrut sebagai Ratih⁵⁰⁶ daripada Wanra, yang berarti bahwa mereka tidak dibayar, melainkan hanya menerima "penghargaan" tertentu atas keikutsertaan mereka. Mereka juga tidak diberi cukup makan. Banyak orang mati selama berjalan kaki melintasi wilayah yang berat.⁵⁰⁷

375. Operasi ini berlangsung selama musim tanam tahun 1981, dan karena sejumlah besar petani subsisten dipaksa ikut serta mereka tidak bisa menanam tanaman pangan mereka. Pada bulan Nopember 1981 Monsignor Lopes menulis surat ke Australia tentang akan datangnya bencana kelaparan, yang menimbulkan keprihatinan internasional.⁵⁰⁸ Pada bulan Maret 1982 mantan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam mengunjungi Timor-Leste, dan bertemu dengan Monsignor Lopes. Whitlam kemudian secara terbuka membantah klaim Lopes.⁵⁰⁹ Sebuah kunjungan oleh Dewan Gereja Dunia beberapa bulan berikutnya menemukan hal yang berbeda:

Jelas bahwa sejumlah besar orang telah dimukimkan kembali, dan masih ada banyak anak yang kurang makan. Kemanapun kami pergi, orang-orang menyebutkan makanan dan tempat tinggal sebagai masalah utama mereka...kesan kami ialah bahwa banyak orang ingin kembali ke rumah tradisional dan tanah mereka di bukit-bukit.⁵¹⁰

376. Indonesia mengklaim telah menangkap 4500 “simpatisan Fretilin” selama operasi ini, dan telah mengirim 3000 orang di antaranya ke Ataúro, dan 1500 orang lainnya di-relokasikan ke daerah-daerah lain.⁵¹¹ Namun, Komisi menerima banyak kesaksian yang menyatakan bahwa mereka yang tertangkap adalah penduduk sipil dan bahwa sangat sedikit pejuang yang ditangkap dalam Operasi Kikis, dan bahwa sebagian besar dari mereka yang diasingkan ke Ataúro adalah perempuan, anak-anak, dan mereka yang lanjut usia.⁵¹²

3.15 Membangun kembali Resistensi

Tinjauan

377. Resistensi yang dipimpin oleh Fretilin nyaris dihancurkan oleh operasi pengepungan dan pembasmian tahun 1978-79. Sebagian besar pimpinan senior Fretilin dan Falintil terbunuh, tertangkap, atau menyerahkan diri dalam periode ini. Sisanya yang masih hidup, dalam kelompok terpisah, berupaya sekuat tenaga untuk menghimpun kekuatan kembali. Tiga anggota Komite Sentral yang masih bertahan dan melarikan diri ke wilayah timur, salah satunya adalah Xanana Gusmão. Sebagai pemimpin, Xanana Gusmão melaksanakan Konferensi Reorganisasi Nasional pada bulan Maret 1981 yang memulai proses perluasan Gerakan Resistensi menjadi sebuah front persatuan nasional yang lebih luas, dan mengubah arah taktis resistensi bersenjata menjadi perang gerilya. Sebuah pertemuan rahasia dengan pemimpin Gereja Katholik di Timor-Leste, Monsignor da Costa Lopes, merupakan sebuah langkah penting ke arah tujuan persatuan nasional di antara para pihak yang bertentangan pada tahun 1975, yakni UDT dan Fretilin.

378. Pada tahun-tahun awal perang dan pendudukan, Gereja merupakan penghubung satu-satunya dan vital ke dunia luar. Dalam tahun-tahun ini, Gereja telah mengalami transformasi dari benteng sistem kolonial Portugis menjadi suara bagi rakyat biasa Timor.

Sejumlah anggota Fretilin yang bertahan setelah serangan 1978-1979

379. Serangan militer Indonesia pada tahun 1978-1979 menghancurkan strategi “perlawanan rakyat” Fretilin, dimana penduduk sipil dalam jumlah besar hidup dalam perlindungan ataupun kontrol Fretilin, menyediakan dukungan logistik bagi Falintil dan dimobilisasikan secara politik untuk mendukung Resistensi. Keunggulan teknologi dan jumlah pasukan militer Indonesia sangat menguntungkan dalam sebuah perang yang berbasis posisi konvensional. Apalagi, dengan adanya puluhan ribu penduduk sipil di basis-basisnya, Fretilin terpaksa lebih sering menempuh strategi perlindungan daripada penyerangan terhadap ABRI. Periode perlawanan gabungan sipil-militer ini berakhir dengan jatuhnya *zonas libertadas* Fretilin pada tahun 1978.

380. Penduduk yang selamat menyerahkan diri dan turun dari pegunungan, sengsara akibat operasi pemboman dan pengepungan dan umumnya berada dalam kondisi yang sangat buruk.⁵¹³ Mereka berjumlah sampai 300.000 orang.⁵¹⁴ Militer Indonesia menyaring orang-orang yang menyerahkan diri dan memisahkan mereka yang diyakini sebagai kader Falintil atau Fretilin. Banyak yang hilang atau dieksekusi (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa). Penduduk sipil yang tersisa berada di bawah kontrol militer di sejumlah kamp sementara dan kemudian di berbagai kamp tahanan jangka panjang, sebagaimana dirinci di atas (lihat Bab 7.3.: Pemandahan paksa dan Kelaparan).

381. Fretilin telah kehilangan sebagian besar pemimpin tingkat menengah dan seniornya. Falintil berada dalam situasi berantakan karena telah kehilangan sebagian besar personil, pimpinan dan persenjataannya. Personil yang bertahan berada dalam situasi terisolasi dan tanpa sarana untuk berhubungan satu sama lain. Fase pertama Resistensi pun usai. Resistensi terorganisir mampu bertahan karena dua sebab. Pertama, bertahannya beberapa pemimpin utama Fretilin yang mampu membangun kembali Resistensi. Kedua, bertahannya penduduk yang, meski secara fisik tidak lagi terpisah dari pasukan pendudukan Indonesia, namun pada

akhirnya mampu membangun sebuah bentuk baru resistensi klandestin yang mendukung apa yang telah menjadi suatu perang gerilya klasik yang dijalankan oleh Falintil.

Menyusun kekuatan kembali

382. Menjelang jatuhnya Matebian, pada tanggal 22 Nopember 1978, beberapa pemimpin politik dan komandan militer⁵¹⁵ berhasil menerobos kepungan dan melarikan diri ke wilayah timur. Yang memimpin kelompok ini adalah Xanana Gusmão. Pada saat yang sama, sejumlah kesatuan Falintil yang lain dikirim ke barat untuk bergabung dengan Falintil di Sektor Timur-Tengah (*Centro Leste*). Sebagian besar dari kesatuan ini tak pernah bisa melewati barisan penjagaan Baucau-Viqueque yang dikontrol militer Indonesia, dan hanya satu kompi yang tiba di sektor Timur-Tengah.⁵¹⁵

383. Kelompok kecil yang melarikan diri dari Matebian menyusun kekuatan kembali di barisan pegunungan Legumau sebelah timur Baguia, yang berada di luar jangkauan ABRI. Mereka mencoba sebuah strategi baru perlawanan bawah tanah, menanggalkan tampilan militer mereka, berpakaian seperti penduduk sipil dan menyembunyikan senjata mereka.⁵¹⁶ Tujuan mereka adalah mencari dan menghubungi para anggota Komite Sentral, Falintil serta penduduk sipil yang selamat, dan untuk menilai perkembangan situasi. Xanana Gusmão mengenang tindakannya setelah meloloskan diri dari Matebian:

Kami langsung pergi [ke Timur]. Begitu tiba di sana, kami mulai menyusun strategi, dan masing-masing dari kami mempelajari apa itu [perang] gerilya. Karena saya sebelumnya telah menjalin kontak dengan kelompok bawah tanah [dari] saat [kami dulu berada di] basis perlawanan [bases de apoio], maka saya langsung pergi ke Mehara pada tanggal 7 Desember....Kami mencari [anggota resistensi]. Dari Dili mereka [anggota klandestin] mengatakan kepada kami bahwa ada sejumlah kecil pasukan [Falintil], tapi mereka tidak bisa menghubungi pasukan itu, banyak dari mereka telah menyerahkan diri. Saya mengirim dua kelompok ke Centro [kawasan tengah] untuk mencari, [tapi] mereka mengatakan bahwa mereka tidak menemukan pasukan, tidak bertemu dengan penduduk sipil seorangpun di sana.⁵¹⁷

384. Ketiga anggota Komite Sentral Fretilin yang selamat di timur, yakni Xanana Gusmão, Txay, dan Mauhunú, mendiskusikan kebutuhan untuk menyusun kekuatan kembali dan mengembangkan sebuah strategi perlawanan baru pada awal tahun 1979. Beberapa regu pencarian berangkat menuju kawasan tengah dan barat untuk berupaya menghubungi para anggota lain yang selamat, khususnya para pemimpin senior dari Komite Sentral Fretilin.⁵¹⁸ Ini merupakan tugas yang sulit dan berbahaya. Sebagian regu pencarian diserang, dan sebagian lainnya lenyap sama sekali. Kelompok yang dipimpin oleh Xanana Gusmão diserang oleh ABRI di dekat Remexio pada bulan Maret, tetapi sebagian kecil anggotanya bisa lolos dan kembali ke Mehara di timur. Pada bulan yang sama, tiga kompi Falintil dihabisi oleh tentara Indonesia di dekat Lore, distrik Lautem.⁵¹⁹ Gusmão menceritakan pencarian ini:

⁵¹⁵ Kelompok kecil ini mencakup José Alexandre Gusmão, Mau Hodu, Taur Matan Ruak, dan Nino Konis Santana.

Kami tidak tahu siapa [dari Komite Sentral Fretilin] yang masih hidup. Kami mencari di tempat-tempat lain, [tapi] kami tidak bisa memutuskan, kami tahu bahwa beberapa orang sudah mati...Klandestina mencari anggota-anggota Komite Sentral yang selamat di hutan-hutan dari Centro sampai Fronteira....Pada tahun 1980 kami menyeberangi jalan Baucau-Viqueque untuk mencari, mengumpulkan informasi, mendatangi desa-desa, bertanya kepada orang-orang di sepanjang jalan menuju perbatasan [Fronteira]...dari Henrique Belmiro dan kawan-kawan, kami mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi [anggota Komite Sentral].⁵²⁰

385. Kendati demikian, upaya pencarian itu mencapai keberhasilan. Mereka menemukan beberapa kantong kecil Resistensi dan pasukan Falintil yang selamat. Ada beberapa kelompok kecil di Laline dan Uaimori, kelompok David Alex di Matebian, beberapa lagi di Manatuto, serta yang lainnya.⁵²¹ Dalam upaya pencarian lainnya pada bulan Mei 1980, Xanana Gusmão menghubungi para anggota Resistensi di kawasan tengah, yakni Same dan Ainaro, dan menemukan para anggota yang selamat di dekat Dili.⁵²² Di kawasan Barat mereka hanya menemukan satu kelompok.⁵²³ Selain mencari lokasi anggota Resistensi yang selamat, para gerilyawan juga menghubungi penduduk sipil untuk membentuk kelompok-kelompok klandestin di dalam wilayah yang dikontrol militer Indonesia.

386. Komisi mendengarkan kesaksian dari Francisco Guterres (Lu Olo), yang pada akhir dasawarsa 1970-an merupakan seorang kader Fretilin di pegunungan. Dia menceritakan tentang kelegaan yang dia rasakan ketika Xanana Gusmão tiba di kamp-nya:

Ketika kami mendengar bahwa kakak kami, Xanana Gusmão, telah datang, hati kami merasa tenang...ketika dia kembali, kami semua berlari ke arahnya dan memeluknya...kemudian kami mendengar bahwa Mauhunu masih hidup, dan di Lospalos seorang ajudante anggota Komite Sentral juga masih hidup. Hanya tiga orang ini yang masih hidup.

Bagaimana kami bisa melanjutkan perang ini? Kakak kami, Xanana, seperti sang arsitek atau pembangun. Dia berkata, 'kita bisa membuat sebuah perahu, dan kita semua bisa mengangkat perahu ini, lalu mendayungnya maju. Walau ini akan sulit, kita bisa melakukannya.' Kami semua sepakat dengan kakak kami...kami sangat percaya kepadanya...⁵²⁴

Konferensi Reorganisasi Nasional pada bulan Maret 1981

387. Gerakan Resistensi yang bertahan kehilangan kepemimpinan, koordinasi, dan struktur.* Karena gagal menemukan para anggota Komite Sentral lainnya yang selamat, dan dengan tertangkapnya Txay, Sera Key, dan Solan oleh ABRI, maka pada tahun 1980 Xanana Gusmão memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan dan mengorganisir sebuah pertemuan nasional Fretilin:

* Sebagai contoh, serangan Falintil ke pemancar televisi Marabia pada bulan Juni 1980, yang diuraikan di bagian 3.13, dilakukan oleh sebuah kelompok dari kawasan Utara-Tengah secara lepas dari kelompok yang selamat yang berbasis di Timur.

Maka saya memutuskan [ini] pada bulan September...karena saya tahu bahwa semua anggota Komite Sentral telah mati...tidak ada yang lebih senior dari saya, kecuali Mau Hunu. Tapi saya mengenalnya, jadi saya memutuskan untuk mengambil alih agar kami bisa melakukan reorganisasi.⁵²⁵

388. Xanana Gusmão bermaksud mengkonsolidasikan dan merestrukturisasikan Resistensi sebagai sebuah perang gerilya, yang didasarkan atas berbagai pelajaran dari pengalaman, maupun dari teori:

Sejak 1979 kami berusaha mempelajari perang gerilya dan bagaimana menerapkannya di Timor. Kami belajar di dalam hutan, [kami] belajar tentang perang di Vietnam, perang di Kuba, macam apapun dari [perang] gerilya, kami pikir perang-perang itu tidak akan cocok karena kondisi-kondisinya berbeda. Itulah sebabnya mengapa pada tahun 1979, kami menghabiskan waktu satu tahun untuk mempelajari bagaimana perang gerilya [seharusnya dilakukan]. Dari sini kami melakukan reorganisasi, apa yang bisa kami lakukan dengan [kelompok-kelompok] gerilya kecil, merencanakan aktivitas politik, aktivitas militer, dan bagaimana keduanya saling berhubungan.⁵²⁶

389. Berdasarkan berbagai kontak sepanjang tahun 1979-80, Gerakan Resistensi menyelenggarakan sebuah “Konferensi Reorganisasi Nasional” pada bulan Maret 1981 di Maubai, Lacluta.⁵²⁷ Struktur serta kepemimpinan politik dan militer Gerakan Resistensi direorganisasi, dan Dewan Revolusioner Perlawanan Nasional (CRRN) pun dibentuk untuk mengendalikan keseluruhan Gerakan Resistensi ini.⁵²⁸ CRRN dimaksudkan untuk menjadi sebuah forum payung bagi semua elemen pro-kemerdekaan, bukan hanya Fretilin, dan merupakan langkah signifikan untuk menjauh dari kebijakan garis keras tahun 1977 ketika Fretilin dinyatakan sebagai sebuah partai Marxis-Leninis (*Partido Marxista-Leninista Fretilin*, PMLF), serta menuju persatuan nasional.⁵²⁹

390. Xanana Gusmão dipilih untuk menempati semua posisi pimpinan—Komisaris Politik Nasional PMLF, Panglima Besar Falintil dan Presiden CRRN.⁵³⁰ Sebuah Komite Sentral baru pun dibentuk,^{*} yang terdiri atas para pemimpin baik yang ada di Timor-Leste maupun yang di luar negeri.⁵³¹ Struktur Falintil dirumuskan kembali, dan para pemimpin baru diangkat.⁵³² Sebuah strategi perang gerilya pun diputuskan secara resmi, dimana beberapa ratus pasukan Falintil yang selamat akan menyebar ke seluruh pelosok negeri ini.⁵³³ Karena telah dikalahkan sebagai sebuah kekuatan militer konvensional, maka Falintil akan bergerak dalam berbagai kelompok gerilyawan kecil yang berpindah-pindah dan tidak lagi berupaya untuk memusatkan kekuatannya dalam menghadapi militer Indonesia. Para gerilyawan akan didukung oleh sebuah struktur klandestin di daerah perkotaan. Idenya ialah bahwa sebuah struktur klandestin di bawah CRRN akan beroperasi melalui pusat-pusat Resistensi nasional di tingkat distrik (cernak) dan sel-sel kecil di tingkat desa yang terdiri atas empat sampai tujuh orang (nurep). Untuk mengatur Gerakan Resistensi baru tersebut negeri ini dibagi menjadi tiga kawasan—kawasan Timur, Funu Sei Nafatin (“perjuangan masih berlanjut”); kawasan Tengah, Nakroma (“cahaya”); dan kawasan perbatasan, Haksolok (“kesenangan”).⁵³⁴

* Anggota-anggota Komite Sentral yang diangkat di Timor-Leste adalah Xanana Gusmão (Comissario Política Nacional), Mauhunu, Mau-hodu, Bere Malae Laka, Kilik Wae Gae (Reinaldo Correia), Nelo (Dinis Carvalho), Sakinere, Holy Natxa, Lere Anan Timor (Tito da Costa), Harin dan Mauk Moruk (Paulino Gama). Anggota-anggota yang diangkat di luar negeri adalah Abílio Araújo (Sekretaris Umum), Mári Alkatiri, Roque Rodrigues, José Luís Guterres, Guilhermina Araújo, José Ramos-Horta dan Rogério Lobato.

Pertumbuhan Gerakan Perlawanan

391. Setelah reorganisasi politik dan militer kapasitas Gerakan Resistensi perlahan-lahan tumbuh. Struktur klandestin dimaksudkan untuk mendukung para gerilyawan, dan juga membangun jaringan dengan berbagai kelompok lain, termasuk dengan mereka yang punya hubungan erat dengan pihak Indonesia. Sebuah jaringan klandestin yang berbasis sel mulai dikembangkan, termasuk di dalam Dili. Dalam upaya untuk mengontrol jaringan klandestin ini, militer Indonesia mengembangkan berbagai jaringan intelijennya sendiri yang luas sampai ke tingkat desa. Di semua desa ada kehadiran militer. Sebagian desa memiliki babinsa (petugas non-jabatan pembina desa), sedangkan sejumlah desa lainnya memiliki TPD, "tim pembina desa", tergantung pada seberapa bergolaknya sebuah desa atau daerah.⁵³⁵ Dokumen militer Indonesia dari tahun 1983 menunjukkan adanya pengawasan luas terhadap penduduk dengan tujuan untuk "melindungi" masyarakat dari pengaruh propaganda GPK (gerilyawan):

Menunjuk orang-orang terpercaya seperti katuas (para tetua) untuk membantu para ketua RT...Setiap katuas harus bisa mengetahui secara pasti aktivitas keluarga-keluarga yang berada di bawah binaannya; misalnya, saat mereka pergi ke ladang, pergi untuk mengumpulkan kayu, meminta izin untuk pergi ke desa lain, menggembalakan ternak, pergi ke pasar, dan seterusnya.

Menunjuk seorang "informan" di masing-masing kelompok yang terdiri atas 10-15 keluarga ini yang dipimpin oleh seorang katuas. Informan ini harus bisa mengikuti, secara diam-diam, semua aktivitas kesepuluh sampai lima belas keluarga ini.⁵³⁶

392. Komisi mendengarkan kesaksian tentang berbagai konsekuensi bila dicurigai sebagai seorang anggota aktif Gerakan Klandestin Resistensi, yakni terus-menerus terancam penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan. Di distrik Ainaro, sejumlah tebing karang di Builico dikenal oleh militer Indonesia sebagai Jakarta II. Bila penduduk Ainaro hilang setelah ditahan, pihak militer pun menjelaskan kepada para keluarga dan komunitasnya bahwa mereka telah dibawa ke Jakarta, padahal kenyataannya mereka telah dibawa ke tebing curam di Builico, dan dilemparkan dari, tebing karang ini. Tidak diketahui berapa jumlah orang yang telah dilemparkan sampai mati antara tahun 1981-1983.⁵³⁷

393. Kehadiran militer sampai ke tingkat desa ini, yang disertai dengan pengawasan yang ketat, sering mengakibatkan berbagai ketegangan yang mendorong terjadinya kekerasan. Pembelotan beberapa ratus anggota kesatuan pembantu ABRI asal Timor ke Falintil di Viqueque pada tahun 1983 merupakan sebuah contoh yang mencolok.⁵³⁸ Pembelotan ini merupakan bagian dari pola pemberontakan lebih besar oleh Gerakan Resistensi yang terjadi pada tahun 1982 sampai 1983. Efektivitas mata rantai antara jaringan klandestin dan gerilyawan ditunjukkan oleh berbagai dokumen militer dari tahun 1982 yang menunjukkan fokus militer untuk menghabisi bermacam struktur klandestin.⁵³⁹ Tanda paling jelas tentang regenerasi Fretilin dan kegagalan ABRI untuk menghancurkan Falintil adalah adanya gencatan senjata yang disepakati dengan ABRI pada bulan Mei 1983 (lihat bagian berikut).

Gerakan perlawanan di bawah pimpinan Xanana Gusmão: menuju persatuan nasional

394. Sejak invasi tahun 1975, Fretilin telah mendefinisikan diri sebagai pengejawantahan Gerakan Resistensi. Ini mulai berubah beberapa tahun sesudah reorganisasi tahun 1981. Pada bulan September 1982, Xanana Gusmão dan Monsignor Martinho da Costa Lopes bertemu secara rahasia di desa Mehara, distrik Lautém.⁵⁴⁰ Pada pertemuan ini, Monsignor Lopes menyoroti perlunya persatuan nasional antara Fretilin dan UDT. Pertemuan ini, dan seruan untuk

persatuan politik, penting terutama karena selama konflik internal tahun 1975, UDT telah mengklaim bahwa mereka membela prinsip Gereja Katholik dalam menghadapi ancaman komunis.⁵⁴¹ Kenyataan bahwa pemimpin Gereja Katholik di Timor-Leste bertemu dengan pemimpin Fretilin sekaligus pemimpin Gerakan Resistensi adalah sinyal jelas bahwa Gereja tidak memandang Fretilin sebagai komunis, dan seruan Monsignor Lopes untuk persatuan nasional menunjukkan pemahamannya tentang Gerakan Resistensi lebih sebagai perjuangan nasionalis daripada perjuangan kiri ideologis.

395. Pada tahun 1983, Komite Sentral Fretilin mendeklarasikan persatuan nasional sebagai garis politik resminya.⁵⁴² Ini merupakan acuan jelas bagi permusuhan UDT-Fretilin. Untuk bisa meningkatkan kemungkinan kerjasama multi-partai, Fretilin mengubah beberapa kebijakannya terdahulu yang radikal. Sebagai contoh, pada tahun 1983 Fretilin berpartisipasi dalam sebuah gencatan senjata dan beberapa negosiasi dengan militer Indonesia. Hal ini sebelumnya tidak dibenarkan berdasarkan kebijakannya yang tegas “negosiasi—tidak dan tak akan pernah.”⁵⁴³ Pada tahun 1984, Fretilin menanggalkan ideologi Marxis-Leninis yang telah dideklarasikan pada tahun 1977 dan disertakan ke dalam nama partai itu pada tahun 1981. Dengan tindakan ini, Fretilin mencabut basis sosial-revolusioner dari sikapnya terdahulu demi mendukung sebuah platform nasionalis yang lebih terbuka.

396. Proses perubahan yang ditempuh oleh Fretilin ini bukan tanpa tentangan. Orang-orang garis keras partai seperti Kilik Wae Gae (Kepala Staf Falintil) dan Mauk Moruk (Komandan Brigade Merah) memandang perubahan politik ke arah sikap yang lebih moderat ini sebagai suatu kompromi yang tak bisa diterima.⁵⁴⁴ Sebuah percobaan kudeta oleh faksi ini gagal, dan akhirnya oposisi terhadap berbagai kebijakan baru ini pun pudar.⁵⁴⁵ Arah baru di bawah payung CRRN ini memperluas platform politik Resistensi dan akhirnya menciptakan oposisi dengan basis yang lebih luas terhadap pendudukan Indonesia.

Gereja Katholik

397. Gereja Katholik, di bawah kepemimpinan berani Monsignor Martinho da Costa Lopes, telah memainkan peran sangat penting di dalam negeri Timor-Leste selama tahun-tahun awal pendudukan. Dari yang sebelumnya merupakan pembantu pemerintahan kolonial Portugis yang ultra-konservatif, komposisi Gereja kemudian berubah selama era Indonesia. Dengan perginya banyak pastor dan suster Portugis setelah invasi dan pendudukan Indonesia, komposisi Gereja menjadi lebih “di-Timorisasi-kan”. Selain para pastor asal Timor, ada juga para pastor asal Indonesia maupun internasional. Ketiga kelompok ini memainkan peran yang berbeda. Banyak pastor asal Indonesia cenderung mendukung pemerintah Indonesia, sedangkan pastor internasional, yang harus memperoleh persetujuan visa dari pemerintah Indonesia, mengambil sikap tidak terlibat politik secara lebih terbuka.⁵⁴⁶ Yang paling signifikan, banyak pastor asal Timor termobilisasi sebagai akibat dari penderitaan sangat besar yang mereka saksikan pada tahun-tahun awal ini.

398. Anggota-anggota Gereja di Timor-Leste sering kali bertentangan dengan Vatikan, yang tidak mendorong para pastornya untuk terlibat dalam persoalan-persoalan seperti Hak-hak Asasi Manusia ataupun politik Resistensi. Sekalipun demikian, karena kebijakan resmi Vatikan tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste, Gereja Katolik di wilayah ini tetap langsung di bawah pengawasan Vatikan, bukan termasuk bagian dari gereja Indonesia. Jaringan Katolik Internasional menyediakan satu-satunya penghubung antara Timor dan dunia luar pada tahun-tahun ketika wilayah ini benar-benar tertutup. Para suster dan pastor menulis surat ke luar negeri di masa ketika hampir tidak ada media internasional yang mengamati berbagai kejadian di dalam wilayah ini, dan ketika, lepas dari adanya kehadiran ICRC yang hanya kadang-kadang, tidak ada organisasi internasional lain yang diperbolehkan masuk ke wilayah ini. José Ramos-Horta

⁵⁴¹ Beberapa jajaran kepastoran asal Timor mendukung—dan digunakan oleh—rezim Indonesia, ditugaskan untuk posisi-posisi kewenangan di pemerintahan propinsi. Lihat Smythe, *The Heaviest Blow*, hal. 37.

mengatakan kepada Komisi bahwa antara tahun 1975-1979 sumber-sumber Gereja memainkan peran satu-satunya dan yang sangat penting dalam menyampaikan informasi tentang kondisi di Timor-Leste kepada dunia luar.⁵⁴⁷

399. Pada tahun 1983, Gereja membuat sebuah keputusan yang terbukti vital bagi keberlangsungan budaya masyarakat Timor. Gereja di Timor-Leste memutuskan bahwa bahasa resmi peribadatan adalah bahasa Tetum. Akibatnya Keuskupan Dili memohon izin Vatikan untuk menggunakan Tetum sebagai bahasa Misa. Vatikan setuju, dan ini dilaksanakan selama masa jabatan Uskup Belo.⁵⁴⁸ Hal ini meningkatkan identitas Timor di Gereja Katholik, dan menambah rasa perlindungan yang ditawarkan bagi masyarakat biasa di masa-masa yang sangat sulit.

400. Rasa perlindungan yang ditawarkan oleh Gereja adalah faktor utama penduduk dalam jumlah besar beralih memeluk Agama Katolik selama masa pendudukan. Pada tahun 1973 sekitar 28% dari jumlah penduduk menyatakan diri Katolik.⁵⁴⁹ Menjelang tahun 1980, Biro Statistik Indonesia mencatat sebanyak 80% dari jumlah penduduk wilayah ini memeluk Agama Katolik.⁵⁵⁰ Ideologi negara Indonesia yang mengharuskan warga negaranya memeluk satu dari lima agama resmi kemungkinan mempengaruhi penyebaran ajaran Katolik ini.

401. Sikap blak-blakan Monsignor da Costa Lopes membawa pada pengunduran dirinya secara paksa pada tahun 1983. Setahun kemudian, dia berpidato di depan Komite Keuskupan Amerika Serikat untuk Pembangunan Sosial dan Perdamaian Dunia, mengundang perhatian tentang peran Gereja yang sangat penting sebagai pelindung masyarakat Timor-Leste:

Di tengah genosida kultural dan psikologis yang ditimpakan oleh tentara Indonesia kepada kami, Gereja Katholik telah muncul sebagai satu-satunya organisasi yang dipercaya oleh masyarakat Timor-Leste...Apapun yang masyarakat ketahui, mereka beritahukan kepada para pastor. Gereja Timor-Leste telah mendengarkan dengan seksama selama hampir sembilan tahun sejak invasi Indonesia. Dengan kewenangan tertinggi, Gereja Timor-Leste bisa mengatakan bahwa ia mengetahui kesengsaraan maupun aspirasi terdalam rakyat Timor.⁵⁵¹

3.16 Gencatan senjata tahun 1983 dan masa sesudahnya

Tinjauan

402. Pada tahun 1982, Indonesia melaksanakan pemilihan umum (pemilu) nasionalnya di Timor-Leste untuk pertama kalinya. Dengan selesainya Operasi Keamanan, sekali lagi militer Indonesia menilai bahwa wilayah ini sudah tenang. Di Timor-Leste, mayoritas besar, yakni 99% pemilih, dilaporkan telah memilih Golkar, alat politik Presiden Soeharto. Pemilu ini disusul dengan perubahan drastis dalam personil sipil dan militer di jajaran pemerintahan Indonesia. Mantan anggota senior UDT, Mário Carrascalão, diangkat sebagai Gubernur, dan Kolonel Purwanto mengambil alih sebagai pimpinan militer di wilayah ini. Menghadapi gerakan klandestin yang sedang bangkit mendukung Falintil yang baru berhimpun kembali, Militer Indonesia mencari jalur berbeda untuk mengatasi Resistensi, negosiasi. Panglima Falintil, Xanana Gusmão, mengadakan pembicaraan dengan Kolonel Purwanto, dan untuk sementara waktu yang singkat, sebuah gencatan senjata sementara pun berlaku.

403. Namun demikian, begitu dilantik sebagai Presiden, Soeharto segera mengangkat Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI. Jenderal Moerdani adalah salah seorang arsitek pengambilalihan Timor-Leste oleh militer Indonesia, dan dia tidak punya banyak waktu untuk sebuah solusi damai bagi masalah-masalah di Timor-Leste. Dalam waktu cepat setelah pengangkatan Moerdani, Monsignor Lopes ditekan untuk turun dari posisinya sebagai kepala Gereja Katholik, dan dia pun meninggalkan wilayah ini. Gencatan senjata itu pecah di kota kecil sebelah timur Kraras pada bulan Agustus 1983 setelah para anggota sebuah kesatuan Hansip asal Timor, bersama beberapa pejuang Falintil, membunuh 12 tentara Indonesia. Militer Indonesia menanggapi kejadian ini dengan serangkaian pembantaian atas penduduk sipil setempat dan penumpasan di kawasan timur dengan berbagai operasi baru.

Pemilu Indonesia di Timor-Leste: 1982

404. Dengan selesainya Operasi Keamanan, militer Indonesia tampaknya sekali lagi berkesimpulan bahwa mereka telah berhasil mengamankan wilayah ini.⁵⁵² Ketika pemilu nasional Indonesia diselenggarakan pada tahun 1982, ini juga diselenggarakan untuk pertama kalinya di Timor-Leste. Militer bertanggung jawab untuk menjaga keamanan bagi pelaksanaan pemilu di seluruh kepulauan Indonesia, dan ini membutuhkan jumlah pasukan yang besar, dan ditambah dengan rasa percaya diri militer Indonesia yang meningkat, barangkali telah turut menyebabkan pengurangan secara tajam jumlah pasukan di Timor-Leste pada masa ini. Pers Indonesia melaporkan bahwa pemilu berlangsung di Timor-Leste tanpa insiden apapun;⁵⁵³ namun para informan asal Timor menyebutkan bahwa telah terjadi gelombang penangkapan sebelum pemungutan suara:⁵⁵⁴

Di Viqueque militer terus-menerus berpatroli selama menjelang pemilu dan saat berlangsungnya pemilu. Setiap malam [militer] keluar-masuk rumah-rumah untuk memeriksa apakah ada orang yang datang atau pergi. Juga pada tanggal 4 Mei, sehari sebelum pemilu, ada serangan-serangan Fretilin di beberapa desa. Semua tempat pemungutan suara di sekitar Viqueque pun dipindahkan ke kota Viqueque.⁵⁵⁵

405. Hasil pemilu di Timor-Leste menunjukkan lebih dari 99 persen suara memilih Golkar, partainya Presiden Soeharto yang berkuasa. Hal ini, ditambah dengan penghitungan suara yang sangat cepat, menunjukkan dengan kuat adanya hasil yang dimanipulasi. Kemungkinan motif

bagi manipulasi suara ditunjukkan setahun berikutnya ketika Gubernur Mário Carrascalão menyatakan bahwa:

Orang-orang telah diberitahu bahwa dengan memilih Golkar, mereka akan menunjukkan pandangan mereka tentang integrasi dengan Indonesia.⁵⁵⁶

406. Dalam peristiwa itu, Indonesia menggunakan suara sebagai bukti tentang adanya dukungan bagi Indonesia. Xanana Gusmão tidak menahan-nahan sarkasme-nya dalam pesannya kepada PBB pada tahun 1982:

...partai-nya Soeharto memenangkan pemilu lagi. Di Timor-Leste, di bawah todongan senjata, semua penduduk memberikan suara yang mendukung Golkar. Sebuah paradoks yang mengherankan, Timor-Leste dan Irian Jaya merupakan 'propinsi kesayangan' Soeharto dan pendukung kuat Golkar!⁵⁵⁷

Perubahan personil sipil dan militer Indonesia, dan berbagai aksi Resistensi

407. Setelah pemilu, terjadi perubahan drastis di jajaran personil utama sipil dan militer Indonesia di Timor-Leste. Pada bulan September 1982, Mário Viegas Carrascalão, seorang mantan anggota senior UDT yang bekerja di Kementerian Luar Negeri Indonesia di New York sejak tahun 1977 sampai 1981, dilantik sebagai Gubernur. Pada waktu yang hampir bersamaan, Komandan Korem 164, Kolonel Adolf Sahala Radjagukguk, digantikan oleh Kolonel Purwanto.

408. Selama masa ini, Gerakan Resistensi melakukan dua langkah utama. Pertama, pada bulan Agustus 1982, pasukan Falintil melancarkan serangan besar ke sebuah pos militer Indonesia di Mauchiga, Ainaro, yang sering disebut sebagai *levantamento* (pemberontakan) 1982. Komisi mendengar kesaksian tentang berbagai konsekuensi dari serangan ini terhadap penduduk sipil Mauchiga. Banyak yang dikumpulkan dan diasingkan ke Ataúro,⁵⁵⁸ sementara banyak perempuan dijadikan sasaran pelanggaran seksual yang berulang kali dan terus-menerus (lihat Bab 7.7: Pelanggaran Seksual). Kedua, pada bulan September 1982, ada pertemuan rahasia antara Xanana Gusmão dan Monsignor Lopes, sebagaimana diuraikan di atas. Ini merupakan tanda bagi militer Indonesia bahwa dukungan terhadap Fretilin sungguh sangat luas, dan yang mengancam pemberitaan tentang Fretilin sebagai sebuah kekuatan gerilya komunis yang terisolasi.

Pendekatan baru militer Indonesia: negosiasi

409. Pada tahun 1983, ABRI mengupayakan sebuah taktik baru berupa negosiasi dengan Gerakan Resistensi. ABRI pernah mengatasi berbagai pemberontakan yang ingin memisahkan diri selama dasawarsa 1950-an dengan cara ini, dan pemain kunci dalam negosiasi-negosiasi di masa itu adalah Panglima ABRI, Jenderal Yusuf, yang turut dalam negosiasi di Sulawesi untuk menyelesaikan pemberontakan Permesta pada akhir dasawarsa 1950-an.⁵⁵⁹ Agaknya Yusuf menyetujui inisiatif ini, yang mungkin datang dari Komandan Militer Timor-Timur yang baru, Kolonel Purwanto, yang memiliki kewenangan untuk memulai berbagai kontak di tingkat lokal yang akhirnya membawa pada terjadinya sebuah gencatan senjata resmi. Pada akhir tahun 1982 dan awal 1983, militer Indonesia mulai membuat sejumlah kesepakatan di tingkat lokal. Berbagai kontak awal untuk gencatan senjata lokal di Lautém dilakukan di Pupuru dan Pasikenu, di luar Lospalos, dan pada bulan Februari 1983 kontak-kontak terjadi setiap minggu.⁵⁶⁰ Di antara pemimpin Fretilin yang terlibat dalam beberapa kontak awal ini serta perjalanan keliling Jakarta,

⁵⁵⁶ Komisi tidak bisa memberikan keterangan tentang tanggal pasti pengangkatan Purwanto. Radjagukguk masih menjabat sebagai komandan pada tanggal 8 Juli 1982, dan Purwanto sudah menjadi komandan Korem 164 pada akhir 1982.

yang dimaksudkan untuk meyakinkan mereka tentang kebaikan Indonesia, adalah Falo Chai⁵⁶¹ (Fernando Teles) dan Jose da Conceição, yang merupakan mediator kunci dalam proses ini.⁵⁶² Militer Indonesia mengupayakan kontak-kontak serupa dengan Fretilin/Falintil di daerah koridor Venilale-Ossu, dimana David Alex (Daitula) merupakan komandan utama Falintil yang terlibat.⁵⁶³ Seorang mantan Hansip mengenang:

Saya dan ipar laki-laki saya pergi ke Venilale, bertemu dengan Mayor Iswanto, [dan] melakukan kontak damai. Dia ingin bertemu dengan orang-orang dari hutan, ingin mengetahui politik mereka. Apakah mereka menginginkan kemerdekaan atau integrasi? Saya ditugaskan untuk mencari orang-orang di dalam hutan, melakukan kontak damai. Saya berhasil. Pertama-tama saya bertemu mereka di Ossulari. Di sana [saya] bertemu dengan komandan peleton, Makikit. Saya bertanya kepadanya: "Apakah anda menginginkan kemerdekaan ataukah integrasi?" Saya menanyakan itu kepadanya. Dia menjawab: "[Rakyat] Timor-Leste lebih [menginginkan] kemerdekaan daripada integrasi."⁵⁶⁴

410. Berbagai pertemuan lokal antara para pejabat Indonesia dan Falintil membuka jalan bagi beberapa kontak di tingkat yang lebih tinggi. Pada tanggal 20 Maret, dua orang Mayor Indonesia dan beberapa pejabat militer berpangkat lebih rendah bertemu dengan Xanana Gusmão di Liaruka, desa Buburaka, di sub-distrik Ossu. Pada pertemuan ini Fretilin mengajukan empat tuntutan: (1) penarikan tanpa syarat pasukan Indonesia dari Timor-Leste; (2) sebuah misi penjaga perdamaian PBB; (3) sebuah referendum yang bebas dan adil; dan (4) kehadiran Fretilin/Falintil yang berkelanjutan untuk menjaga keamanan selama proses ini.⁵⁶⁵ Kolonel Purwanto kemudian terbang ke Bali untuk mengadakan diskusi di tingkat Kodam. Tiga hari kemudian, pada tanggal 23 Maret, Kolonel Purwanto sendiri bertemu dengan Xanana Gusmão di dekat Larigutu, di sub-distrik Venilale (Baucau). Gubernur Mário Carrascalão juga hadir. Pertemuan ini rupanya menghasilkan penandatanganan sebuah kesepakatan gencatan senjata antara Militer Indonesia dan Fretilin/Falintil.⁵⁶⁶ Yang lainnya mengikuti, dan gencatan senjata pun menyebar ke seluruh wilayah ini.

Gencatan Senjata

411. Militer Indonesia menolak mengakui bahwa mereka melakukan "negosiasi," dan hanya menyebutnya sebagai "pembicaraan". Indonesia tidak menginginkan publisitas internasional mengenai persoalan ini. Namun status konflik selama periode ini pada kenyataannya adalah sebuah gencatan senjata.⁵⁶⁷ Pada akhir bulan Juli 1983, gencatan senjata masih berlaku.⁵⁶⁸ Penghentian permusuhan memungkinkan para pemimpin Resistensi untuk bebas mengunjungi desa, kota kecil, dan bahkan berbagai pusat perkotaan. Ada beberapa pertemuan lokal antara ABRI dan Fretilin/Falintil, termasuk di Lore, Beaço, Waitame, Macadique, Ossu, Laissorlai dan Hatubuiliko. Pada pertemuan-pertemuan ini, dimainkan pertandingan-pertandingan yang bersifat rekreasi, seperti bola voli, bahkan pasokan-pasokan disediakan bagi Fretilin/Falintil.⁵⁶⁹

412. Bagi penduduk umum, penghentian-sementara ini signifikan. Menurut Monsignor Lopes:

...pada bulan Juni, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, helikopter-helikopter Indonesia mengangkut makanan dan obat-obatan untuk para gerilyawan di pegunungan, dan membawa anggota gerilyawan yang sakit dan terluka ke rumah sakit Dili....

¹ Pertemuan ini juga dihadiri oleh Aleixo Ximenes, Verissimo Quintão, Jose da Conceição dan Okan.

Masyarakat sangat senang dengan penghentian- sementara perang ini dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, bisa menanam tanaman pangan yang layak.⁵⁷⁰

413. Fretilin dan Falintil menggunakan gencatan senjata ini untuk keuntungannya, baik untuk konsolidasi internal maupun membangun jaringan dengan orang-orang Timor yang bekerja pada Indonesia.⁵⁷¹ Falintil memasuki gencatan senjata ini dengan perspektif ketidakpercayaan. Pengalamannya adalah “amnesti” tipu-daya pada akhir dasawarsa 1970-an, dimana setelah itu, banyak pemimpin Fretilin yang menyerahkan diri hilang. Dokumen CRRN yang dikeluarkan pada bulan Juli 1983 menegaskan perspektif ini. Dokumen itu merinci sejumlah pembunuhan dan kekejaman, dengan menyebutkan nama dan memberikan contoh-contoh kasus pembunuhan, serta memberikan keterangan tentang kenaikan pangkat kemiliteran bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut.⁵⁷²

Pengangkatan Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI: 1983

414. Selama bulan Maret 1983, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Indonesia mengangkat Soeharto sebagai Presiden dalam masa jabatan yang keempat kalinya. Ini berakibat pada sebuah perubahan besar di dalam ABRI yang mempengaruhi gencatan senjata yang rapuh di Timor-Leste. Pada tanggal 28 Maret, Presiden Soeharto melantik Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI. Moerdani, salah seorang arsitek invasi Timor-Leste, membawa pengaruh yang jauh dari sikap kompromi mengenai perdamaian di wilayah ini.

Monsignor Lopes dicopot

415. Salah satu tindakan pertama Moerdani sebagai Panglima ABRI adalah menekan Utusan Paus untuk Indonesia, Monsignor Pablo Puente, untuk mencopot Monsignor Lopes dari jabatan kepala Gereja Katolik di Timor-Leste. Moerdani, yang juga seorang Katolik, memandang pertemuan Monsignor Lopes dengan Xanana Gusmão pada bulan September 1982 sebagai pengkhianatan. Beberapa minggu kemudian Lopes mengajukan pengundurkan dirinya, meskipun dia menyatakan bahwa dirinya telah dipaksa untuk mengundurkan diri.⁵⁷³ Penggantinya, Carlos Felipe Ximenes Belo yang relatif masih muda, diangkat langsung oleh Vatikan bukannya dipilih oleh pastor-pastor Timor lewat pemilihan.⁵⁷⁴

416. Pada tanggal 13 Mei, dalam satu penampilan terakhirnya di depan publik sebelum meninggalkan Timor-Leste selamanya, yakni pada acara hari raya Katolik Penampakan Bunda Maria, Monsignor Lopes mengecam kekejian yang dilakukan pasukan pendudukan. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal itu di depan publik.⁵⁷⁵ Dia pergi secara diam-diam dengan membawa bukti rinci bahwa sebuah gencatan senjata umum telah disepakati, dalam acara pertemuan yang tidak dipublikasikan oleh Indonesia.

Gencatan senjata dirongrong

417. Sejak awal, Panglima ABRI yang baru, Jenderal Benny Moerdani, tidak yakin akan manfaat sebuah gencatan senjata. Pada tanggal 12 April Jenderal Moerdani mengunjungi Baucau untuk bertemu dengan stafnya yang bertanggung jawab untuk urusan Timor-Leste. Keesokan harinya dia memanggil Gubernur Mário Carrascalão ke Baucau. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2003, Mário Carrascalão mengenang pertemuan ini:

⁵⁷⁰ Juga pada bulan Maret, Panglima Kodam XVI/Udayana, Brigadir Jenderal Dading Kalbuadi, digantikan oleh Brigadir Jenderal Damianus Soetarto.

Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan semuanya berputar di sekitar jaminan. Moerdani bertanya:

“Jika diselesaikan secara damai, apakah ada jaminan bahwa Timor-Timur akan tetap merupakan bagian dari Indonesia? Bagaimana yang dirasakan rakyat? Itulah [yang] ingin kami ketahui.”

Saya [Carrascalao] berkata: “Bagaimana saya bisa tahu, Pak?”

Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam, pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian Benny Moerdani mengakhiri pertemuan itu lebih cepat... Benny Moerdani memberi waktu tiga bulan. Dia berkata:

“Saya akan memberi Soetarto [Panglima Kodam Udayana] dan Purwanto [waktu], dengan dibantu oleh Gubernur, untuk membantu Timor-Timur secara damai.”⁵⁷⁶

418. Gubernur Mário Carrascalão memainkan peran menonjol dalam memajukan berbagai pembicaraan yang diselenggarakan selama gencatan senjata. Pada akhir Mei, Xanana Gusmão mengirim sebuah pesan yang meminta untuk bertemu dengan Carrascalão, yang membawa pada sebuah pertemuan pribadi di Ariana, beberapa kilometer dari Venilale (Baucau). Namun demikian, ruang manuver Carrascalão terbatas. Jakarta menyiarkan berita tentang gencatan senjata itu pada tanggal 10 Juni, namun tidak mempublikasikan rinciannya, seperti tuntutan Falintil untuk sebuah referendum, sebagaimana yang telah disepakati. Tak lama setelah itu, Moerdani mengirim sepucuk surat kepada Xanana Gusmão:

Jangan kira bahwa kalian bisa mendapat bantuan dari negara-negara lain. Tidak ada negara di dunia ini yang bisa membantu kalian. Negara kami sendiri telah siap untuk menghancurkan kalian kalau kalian tidak mau bersikap kooperatif terhadap republik kami. Kami sedang mempersiapkan sebuah operasi—Operasi Persatuan—yang akan dilancarkan pada bulan Agustus.⁵⁷⁷

419. Batas waktu gencatan senjata selama tiga bulan yang ditentukan Moerdani ketika itu akan berakhir pada bulan Juli. Dia merencanakan operasi baru itu untuk dilaksanakan pada bulan Agustus guna memberi kesempatan kepada delegasi parlemen Australia yang akan berkunjung ke wilayah ini pada akhir Juli. Kemauan Moerdani untuk melancarkan serangan baru ini mengabaikan keprihatinan Menteri Luar Negeri Indonesia bahwa operasi baru ini akan berpengaruh negatif terhadap pembahasan tentang Timor-Leste yang dijadwalkan pada pertemuan Majelis Umum PBB di bulan September.⁵⁷⁸

420. Ada kemungkinan bahwa gencatan senjata ini dirongrong dari dalam ABRI sendiri, dengan maksud untuk melanjutkan perang. Militera pernah menyatakan ernah menyatakan sebelumnya bahwa mereka menganggap operasi-operasi di Timor-Leste sebagai sarana latihan yang berharga bagi pasukan-pasukannya.⁵⁷⁹ Seorang figur yang mungkin terlibat dalam melakukan perongrongan seperti itu adalah Kapten Prabowo Subianto, yang pada waktu itu merupakan wakil komandan Detasemen 81, Kopassandha.⁵⁸⁰ Seminggu setelah Moerdani menyetujui gencatan senjata itu pada bulan April, Kolonel Purwanto meminta untuk bertemu dengan Gubernur Mário Carrascalão di pantai, Dili. Menurut Carrascalão, Purwanto mengatakan kepadanya:

⁵⁷⁶ Pada tahun 1983, untuk pertama kalinya sejak 1975, pembahasan di Majelis Umum PBB ditunda. Pembahasan ini ditunda sampai pertemuan Majelis Umum ke-39 setahun berikutnya.

*Apa yang pernah saya khawatirkan kini terjadi. Dia, Prabowo, kembali ke Timor-Leste. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, tak seorangpun, baik sipil ataupun militer, bisa memasuki atau meninggalkan Timor-Leste tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya dia datang dan pergi ke pelosok—ke Viqueque, sekitar Bibileu. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, saya tidak tahu lagi.*⁵⁸¹

421. Komisi menerima bukti bahwa Prabowo ditempatkan di sektor bagian timur Timor-Leste saat itu. Beberapa sumber menyatakan kepada Komisi bahwa Prabowo terlibat dalam operasi untuk membawa penduduk sipil turun dari Gunung Bibileu, dimana tidak lama kemudian beberapa ratus orang dibunuh ABRI. Komisi juga menerima bukti keterlibatan Kopassus dalam pembunuhan-pembunuhan ini (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa).

422. Baik militer Indonesia maupun Falintil menggunakan gencatan senjata ini untuk keuntungan militernya sendiri, sebagaimana dilaporkan oleh delegasi Kedutaan Amerika Serikat yang berkunjung ke Dili pada bulan Mei 1983:

Fretilin punya peluang untuk mengorganisir pasukannya dan mengembangkan kepemimpinannya. Pada saat yang sama, kesatuan-kesatuan keamanan Indonesia jadi mengetahui berapa anggota Fretilin, dimana mereka berada dan siapa saja mereka, karena nama-nama telah didaftar dan telah diambil foto-foto. Berkumpulnya anggota-anggota Fretilin juga memungkinkan pasukan Indonesia untuk menyerang, jika pembicaraan gagal...⁵⁸²

423. Pada tanggal 28 Juli, satu delegasi parlemen Australia tiba di Dili. Mereka menghabiskan waktu empat hari di Timor-Leste dari sepuluh hari kunjungannya ke Indonesia. Delegasi ini tidak mencoba untuk bertemu dengan Fretilin. Namun di dekat Baucau delegasi ini dihentikan oleh empat anggota Falintil. Terjadi diskusi singkat, dan anggota Falintil tersebut memberikan sepucuk surat kepada delegasi parlemen itu.⁵⁸³ Surat ini menyebutkan bahwa:

Bahkan selama pembicaraan-pembicaraan (perdamaian)...mereka (ABRI) terus (sic) membunuh gerilya FRETILIN (sic) yang ingin mendekati kamp-kamp agar bisa berhubungan dengan orang-orangnya.

424. Data Komisi mendukung pernyataan ini. Selama masa gencatan senjata, ABRI melakukan serangkaian pelanggaran, termasuk penyiksaan dan pembunuhan, khususnya penangkapan sewenang-wenang atas orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin.⁵⁸⁴

Berakhirnya Gencatan Senjata

425. Setelah usaha-usaha untuk merongrong Gencatan Senjata yang muncul dari dalam tubuh militer Indonesia sendiri, pada tanggal 8 Agustus, orang-orang Timor di Kraras (Lacluta, Viqueque) menyerang dan membunuh sekelompok sipil ABRI. Mereka kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Indonesia menjelaskan kejadian ini sebagai sebuah serangan yang tak beralasan terhadap “serdadu-serdadu yang tak bersenjata”.⁵⁸⁵ Para anggota Falintil menguraikannya sebagai sebuah *levantamento* (pemberontakan), serangan gabungan Hansip-Falintil terhadap ABRI itu dimaksudkan untuk menggugurkan klaim Indonesia bahwa mereka telah mengalahkan Falintil.⁵⁸⁶ Orang-orang Timor menjelaskan bahwa tentara Indonesia telah membunuh sejumlah penduduk sipil di daerah itu selama gencatan senjata.⁵⁸⁷ Para anggota batalyon sipil pada waktu itu melecehkan seorang perempuan Timor. Kejadian ini segera memicu sebuah serangan gabungan Falintil-Hansip yang membunuh sekurangnya 12 tentara.⁵⁸⁸

426. Tanggapan ABRI adalah tindak kekerasan yang dahsyat terhadap penduduk sipil. Anggota Hansip yang terlibat dalam pembunuhan tentara Indonesia itu telah membelot ke Falintil.^{*} Penduduk sipil dari desa telah melarikan diri - sebagian, yang kebanyakan adalah para lelaki yang cukup kuat, ke hutan, dan sebagian lainnya ke Viqueque. Pasukan dari Batalyon 501 memburu mereka. Para lelaki dikumpulkan dan ditembak di daerah Tahuben. Kelompok lebih kecil yang kebanyakan terdiri atas para lelaki tua, perempuan dan anak-anak ditangkap di Viqueque dan ditembak di sebuah lokasi dekat Buikarin. Laporan-laporan tentang korban mati pada waktu itu melebihi 200 orang.⁵⁸⁹ Militer Indonesia sendiri mengakui 80 orang.⁵⁹⁰ Pada tahun 1985, Uskup Belo kemudian mendaftarkan nama 84 korban mati.⁵⁹¹ Orang-orang yang selamat dipaksa tinggal di Lalerek Mutin, dimana diperkirakan ada sebagian besar orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit.⁵⁹² Sampai saat ini, Kraras dikenal sebagai 'desa para janda'.⁵⁹³

427. Gencatan senjata selesai. Karena "solusi damai"-nya telah gagal, Kolonel Purwanto pun digantikan oleh Kolonel Rudito.⁵⁹⁴ Pada tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, Jenderal Moerdani mengumumkan berbagai rencana barunya untuk menghancurkan Gerakan Perlawanan:

*Kali ini kita akan memukul mereka tanpa ampun.*⁵⁹⁵

428. Operasi Persatuan dimulai pada bulan September 1983.[†] Operasi ini memfokuskan diri ke wilayah Timur dimana Falintil masih kuat, dan menampilkan Kopassandha sebagai pasukan garis depan untuk pertama kalinya, dengan didukung kuat oleh kekuatan udara.⁵⁹⁶ Satu penyebab bagi hal ini mungkin adalah pembelotan massal Hansip ke Falintil setelah peristiwa Kraras.⁵⁹⁷ Militer Indonesia kekurangan tenaga manusia dan sangat tidak mempercayai para prajurit asal Timor. Operasi ini memicu terjadinya perpindahan besar-besaran orang-orang ke kota.

429. Operasi-operasi ICRC berhenti di wilayah daratan utama, dibatasi hanya di pulau Ataúro. Orang-orang garis keras militer sekali lagi berkuasa.⁵⁹⁸ Gereja Katolik merupakan satu-satunya lembaga independen yang tersisa di Timor-Leste. Tetapi Gereja di Timor-Leste sangat terisolasi dari Gereja di Indonesia dan Vatikan, yang umumnya bungkam tentang situasi hak asasi manusia di wilayah ini. Pada tahun 1983, untuk pertama kalinya konferensi Keuskupan Indonesia mengungkapkan dukungan bagi rakyat Timor-Leste yang menderita dan menyerukan adanya pengertian dan kejujuran dari para pembuat kebijakan.⁵⁹⁹ Meski ini bisa menjadi sebuah permulaan yang signifikan, namun Konferensi Keuskupan itu kemudian menjaga jarak dari posisi dukungan ini.

^{*} Suatu pengaruh tambahan yang menyebabkan pembelotan Hansip tersebut mungkin adalah kebijakan militer pada waktu itu yang menurunkan pangkat Hansip/Wanra menjadi Ratih. Ratih memiliki status yang lebih rendah dan tidak dibayar. Lihat Korem 164 Insop/03/II/1982 tentang Perlawanan Rakyat Terlatih, hal. 16-18.

[†] Juga dikenal sebagai Operasi Sapu Bersih.

3.17 Konsolidasi dan awal perubahan: 1984-1991

Tinjauan

430. Sepanjang bagian besar dasawarsa 1980-an, Timor-Leste tetap tertutup bagi dunia luar. Falintil meneruskan resistensi gerilya bersenjata dan kehadiran ABRI/TNI di wilayah tersebut tetap tinggi. Akan tetapi operasi militer besar berkurang pada paruh kedua dasawarsa tersebut, dan Pemerintah Indonesia berupaya untuk “menormalisasikan” wilayah ini dengan menjalankan sejumlah kebijakan dan program nasional penting, termasuk kebijakan transmigrasi dan pendidikan.

431. Proses restrukturisasi Resistensi yang dimulai pada tahun 1981 terus berlanjut sepanjang dasawarsa ini. Pada tahun 1983 persatuan nasional diumumkan sebagai kebijakan Resistensi, dan pada tahun 1988 Dewan Nasional Resistensi Maubere (CNRM) menjadi badan tertinggi Resistensi, dengan tujuan untuk membangun basis nasionalis. Falintil dipisahkan dari Fretilin, dan Panglimanya Xanana Gusmão mengundurkan diri dari partai, sebagai upaya lebih jauh untuk menunjukkan pendekatan yang inklusif ini.

432. Dom Carlos Felipe Ximenes Belo menggantikan Monsignor Martinho Lopes da Costa sebagai Administrator Apostolik dari Diocese Dili, dan pada tahun 1988 dinobatkan sebagai Uskup. Selama dasawarsa tersebut, ia menjadi semakin lantang dalam membela rakyat Timor-Leste, dan suratnya pada akhir tahun 1988 kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menyerukan PBB untuk memenuhi tugas dekolonisasinya di Timor-Leste berdampak besar secara internasional.

433. Gerakan pemuda Resistensi mulai tumbuh sejak pertengahan dasawarsa 1980-an, khususnya di sejumlah sekolah di Dili. Karena banyak mahasiswa Timor-Leste yang kuliah di Indonesia, gerakan ini meluas ke organisasi mahasiswa pada akhir dasawarsa tersebut. Aktivisme pemuda sangat menonjol selama kunjungan Paus Yohanes Paulus II di akhir tahun 1989. Baik Pemerintah Indonesia maupun Resistensi berupaya untuk memanfaatkan kunjungan Paus di Timor-Leste ini untuk meraih keuntungan politis bagi masing-masing pihak, karena kunjungan tersebut memiliki arti rohani yang penting bagi masyarakat yang sebagian besar beragama Katolik. Para mahasiswa dari gerakan klandestin yang tengah berkembang mengambil kesempatan ini untuk memberitahukan Paus dan media internasional yang menyertainya mengenai hasrat mereka untuk penentuan nasib sendiri, dengan mengadakan demonstrasi publik besar-besaran pertama sejak invasi Indonesia tahun 1975. Ini menjadi awal dari sebuah siklus demonstrasi dan penumpasan pada dasawarsa 1990-an.

434. Secara umum PBB tidaklah begitu efektif selama periode ini dalam upaya mencari solusi politik yang langgeng mengenai masalah Timor-Leste. Warga Timor-Leste dalam diaspora dan masyarakat sipil internasional mengandalkan Komite Dekolonisasi dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk tetap mempertahankan persoalan ini dalam agenda PBB. Ketika Tembok Berlin runtuh pada tanggal 9 November 1989, dan menandai akhir dari konteks Perang Dingin yang telah mewarnai konflik ini sejak invasi dan pendudukan Timor-Leste, peristiwa ini membawa harapan baru bagi penyelesaian damai dan pasti mengenai konflik ini.

Perkembangan Resistensi

435. Pada awal dasawarsa 1980-an sebagian besar penduduk sipil melakukan urbanisasi dan bermukim di berbagai kota dan desa, daripada ikut Falintil di gunung-gunung. Menjelang pertengahan dasawarsa 1980-an masa penahanan massal telah lewat. Indonesia memulai proses normalisasi di Timor-Leste. Berbagai lembaga negara seperti pemerintah provinsi, parlemen daerah, dan berbagai departemen pelayanan masyarakat telah didirikan, dengan pegawai dan mulai berfungsi. Hal ini membuat Indonesia mulai dapat menjalankan sejumlah program pembangunan nasionalnya di Timor-Leste, sehingga ada benarnya bahwa Indonesia

melaksanakan program yang membawa pembangunan di wilayah ini pada periode ini. Akan tetapi, penilaian yang lebih seksama mengenai berbagai program ini menunjukkan adanya penekanan pada infrastruktur pendudukan, khususnya pembangunan jalan dan gedung pemerintahan. Bidang lain yang mendapat anggaran pembiayaan pemerintah yang cukup penting adalah pembangunan sekolah. (Lihat Bab 7.9.: Hal-hak Sosial dan Ekonomi Dan Bagian 4: Rejim Pendudukan). Indonesia mempunyai haraoan tinggi bisa menarik simpati pemuda Timor.

436. Perubahan-perubahan visi dan struktur Resistensi pada tahun 1981 dan 1983 memerlukan waktu untuk menjadi matang. Sementara itu Xanana Gusmão berupaya untuk mengambil serangkaian langkah praktis bagi masa depan jangka panjang Resistensi. Pada tanggal 7 September 1985, pemuda Katolik menulis secara rahasia kepada Xanana Gusmão, untuk meminta klarifikasi tentang posisi Resistensi mengenai masa depan perjuangan dan segala tantangan yang dihadapinya. Xanana Gusmão menulis sebuah tanggapan yang rinci dalam pesannya tanggal 20 Mei 1986 kepada Pemuda Katolik di Timor-Leste dan Mahasiswa di Indonesia.⁶⁰⁰ Ia menyerukan para pemuda untuk tetap teguh memegang identitas Timornya dan perjuangan akan hak-haknya. Pesan ini menunjukkan betapa Gusmão menganggap penting generasi muda dalam reposisi Resistensi.

437. Pada bulan Desember 1988, Xanana Gusmão membuat berbagai perubahan fundamental dalam Resistensi, dalam apa yang dikenal sebagai Penyesuaian Kembali Struktur Resistensi atau RER. Berbagai perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya membangun basis Resistensi nasional seluas-luasnya. CRRN dibubarkan, dan digantikan oleh Dewan Nasional bagi Resistensi Maubere (*Concelho Nacional da Resistência Maubere*, CNRM), yang dimaksudkan untuk menjadi organisasi yang memayungi semua partai politik yang mendukung kemerdekaan. Falintil dideklarasikan sebagai tentara nasionalis yang netral, dan tidak lagi sebagai bagian dari Fretilin. Xanana Gusmão sendiri mengundurkan diri dari Fretilin, untuk menjadi Presiden CNRM, sementara terus menjadi Panglima Falintil.⁶⁰¹ Pembentukan CNRM merupakan langkah besar menuju konsolidasi dan memberi mekanisme politik praktis pada gagasan persatuan nasional. Selama dasawarsa 1980-an, berbagai kelompok klandestin mulai menjamur, khususnya di kota-kota. Jumlah kelompok ini meningkat selama akhir dasawarsa 1980-an, namun karena faktor bahayanya kegiatan klandestin ini sebagian besar berupa kelompok kecil dan terisolasi, dengan hanya sedikit jaringan yang berbasis luas. Sadar akan hal ini, CNRM lalu membentuk *Comité Executivo da CNRM na Frente Clandestina* (Komite Eksekutif CNRM bagi Front Klandestin, atau yang lebih dikenal sebagai *Comité Executivo*, CE) pada tahun 1990.⁶⁰² Tugas CE adalah untuk mengkoordinasikan, mengarahkan dan memantau segala kegiatan bawah tanah. Komite ini membangun hubungan dengan kelompok-kelompok bawah tanah di seluruh Timor-Leste atau di luar negeri, termasuk di Indonesia.⁶⁰³

438. Berbagai perubahan pada gerakan Resistensi ini juga memperkuat front diplomatik eksternal, diaspora internasional orang Timor-Leste dan masyarakat sipil internasional. Pada tahun 1983, setelah ada larangan Pemerintah Australia sejak masa invasi Indonesia, sebuah delegasi Fretilin berhasil melakukan kunjungan ke Australia dan berbicara di hadapan 1.500 hadirin dari berbagai kalangan di Melbourne. Hal ini memberi banyak semangat kepada warga Timor-Leste di Australia, yang sampai saat itu kesulitan untuk mempengaruhi publik Australia tanpa dukungan langsung dari para pemimpin kunci.⁶⁰⁴ Pada dasawarsa 1980-an, warga Timor-Leste yang lari dari Timor-Leste pada dasawarsa 1970-an sudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru seperti Portugal dan Australia, dan menjadi lebih efektif dalam perjuangan bagi pengakuan internasional. (Lihat Bab 7.1.: Hak Penentuan Nasib Sendiri)

439. José Ramos-Horta terus melakukan kunjungan ke mana-mana, untuk memupuk dukungan di setiap Negara yang ia kunjungi. Ia bekerja keras untuk menggalang dukungan masyarakat sipil internasional serta melalui jalur-jalur diplomatik resmi. Misalnya, kunjungannya ke Jepang pada bulan Maret 1985 adalah atas undangan beberapa kelompok warga masyarakat Jepang, dan dia dapat memperkenalkan masalah Timor-Leste langsung ke publik Jepang.⁶⁰⁵ Dengan dukungan dan terkadang bimbingan berbagai kelompok masyarakat sipil, warga Timor-

Leste lainnya juga meningkatkan upaya lobi internasional yang lebih luas selama dasawarsa 1980-an.

Represi dan pemenjaraan

440. Tanggapan Indonesia atas semakin menguatnya perlawanan klandestin selama dasawarsa 1980-an adalah dengan meningkatkan fokus kepada Resistensi dan mencari cara untuk melenyapkannya. Salah satu caranya adalah dengan membawa tahanan politik Timor-Leste keluar wilayah ini. Pada tahun 1983, 69 orang tahanan yang diduga terlibat dalam pemberontakan Kraras dibawa dari penjara Balide ke Kupang di Timor Barat, Indonesia. Hanya empat belas dari tahanan ini kembali ke Timor-Leste.⁶⁰⁶ Para tahanan, yang biasanya adalah tersangka anggota resistensi klandestin, sering dipindahtangankan dari satu aparat keamanan ke aparat lain, dan siksaan dan penganiayaan merupakan hal biasa. Selama periode ini, para tahanan terkadang dibawa ke berbagai tempat seperti Bali untuk diinterogasi.⁶⁰⁷ Sebagai konsesi bagi normalisasi prosedur administrasi selama dasawarsa 1980-an, para tahanan politik kadang kala dibawa ke pengadilan untuk diadili. Namun, pengadilan-pengadilan seperti ini sering kali hanya merupakan sekedar bayang-bayang dari keadilan dan tidak terlalu mempedulikan hak-hak para tersangka.

441. Penjara Cipinang di Jakarta yang dijaga ketat digunakan untuk menahan para tahanan Timor-Leste selama periode ini. Komisi mendengarkan kesaksian dari aktivis hak asasi manusia Indonesia Ade Rostina Sitompul, yang menjadi pengunjung reguler tahanan Timor-Leste di penjara Cipinang mulai tahun 1987. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa pada tahun 1987, terdapat 47 tahanan politik Timor-Leste di Cipinang, dan kondisi pengamanan terhadap mereka jauh lebih ketat dibandingkan para tahanan yang lain.⁶⁰⁸ Jauh dari keluarga menjadi penderitaan terberat bagi para tahanan Timor-Leste yang dibawa ke penjara-penjara di Jawa atau daerah lain di Indonesia. (Lihat Bab 7.6: Pengadilan Politik)

Kebangkitan gerakan pemuda klandestin

442. Pada pertengahan dasawarsa 1980-an sejumlah sel klandestin pelajar dibentuk di berbagai Sekolah Menengah di Dili. Sekitar tahun 1986, OJECTIL (*Organização de Juventude Católica de Timor-Leste*, Organisasi Pemuda Katolik Timor-Leste)[†] dibentuk oleh para aktivis pelajar yang berbasis di *Externato de São José*,⁶⁰⁹ yang kemudian menjadi organisasi berbasis nasional. Banyak di antara para siswa ini menjalani masa kanak-kanaknya di hutan selama masa invasi dan perang besar-besaran. Banyak yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Resistensi di hutan.⁶¹⁰ Mereka membentuk apa yang akan menjadi dasar bagi generasi baru resistensi yang akan terus berlanjut pada dasawarsa 1990-an.

443. Pada tahun 1986, Universitas Timor-Leste (Untim), Perguruan Tinggi pertama di Timor-Leste, dibuka di Dili. Sebelumnya, pada tahun 1985, Gubernur Mário Viegas Carrascalão menjalankan kebijakan pendidikan yang memperluas kesempatan mahasiswa Timor-Leste melanjutkan pendidikannya di berbagai universitas di Indonesia. Ini merupakan perkembangan penting dalam kesempatan pendidikan bagi anak-anak muda Timor-Leste, dan berdampak penting pada hubungan antara kalangan nasionalis dan aktivis hak asasi manusia Timor-Leste dan rekan-rekan mereka dari Indonesia. (Lihat Bab 7.1: Hak Penentuan Nasib Sendiri, bagian Masyarakat Sipil.)

[†] Beberapa contoh adalah kunjungan ke Konferensi Pasifik yang Bebas Nuklir dan Merdeka di Vanuatu tahun 1983 oleh Abílio Araújo dan Roque Rodrigues, dan ke Konferensi Perempuan Dunia di Nairobi oleh Emilia Pires dan Ines de Almeida tahun 1985.

[†] Setelah 1991 OJECTIL berganti nama menjadi OJETIL (*Organização de Juventude de Timor-Leste*), yang menghapus kata Católica, untuk mengedepankan ciri nasionalisnya.

444. Kelompok Mahasiswa Klandestin Renetil (*Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste*, Resistensi Nasional Pelajar Timor-Leste) berdiri pada tahun 1988 di Bali, dan beroperasi di Bali dan Jawa.⁶¹¹ Dalam suasana kontrol yang ketat atas kegiatan politik mahasiswa pada jaman rezim Orde Baru, mahasiswa Timor-Leste juga mendirikan sebuah organisasi yang lebih moderat, yakni Impettu (Ikatan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar Timor-Leste) untuk beroperasi sebagai wadah mahasiswa Timor-Leste di Indonesia yang lebih dapat diterima oleh penguasa. Ini menjadi alat penting bagi aktivisme mahasiswa selama dasawarsa 1990-an.⁶¹²

Gereja Katolik

445. Pada tahun 1983, Carlos Filipe Ximenes Belo menjadi Administrator Apostolik diosis Dili, menggantikan Monsignor Martinho da Costa Lopes sebagai kepala Gereja di Timor-Leste. Walau mendapat tekanan dari Indonesia, Vatikan tetap menolak untuk mengakui Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia. Pada tanggal 19 Juni 1988 Belo diberi gelar Uskup Lorum, sebuah diosis di Itali yang sudah tidak berjalan lagi.⁶¹³

446. Monsignor Belo tidak banyak dikenal di Timor-Leste ketika ia mulai menjalankan posisinya sebagai kepala Gereja. Dia berada di luar negeri belajar di Portugal dari tahun 1968 sampai 1974, dan sekali lagi dari bulan Agustus 1975 sampai tahun 1981, ketika ia kembali ke Kolese Fatumaca di Baucau. Seperti pendahulunya Martinho Lopes, Belo segera membuktikan diri sebagai pemimpin yang independen, dan tidak akan tinggal diam menyaksikan kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Baru berusia empat puluh tahun ketika diangkat menjadi uskup, Belo memusatkan perhatian keuskupannya pada pemuda Timor-Leste. Mulai akhir dasawarsa 1980-an sampai akhir dasawarsa 1990-an, tugas sehari-hari sebagai uskup membuat dia selalu sadar tentang memanasnya ketegangan antara para pemuda Timor-Leste yang ingin mendapat kebebasan lebih banyak dan aparat militer Indonesia yang berupaya menumpas segala tanda resistensi pemuda. Di tahun-tahun berikutnya kediaman Uskup Belo menjadi tempat berlindung bagi banyak pemuda yang mencari perlindungan dari militer dan agen-agenya.

447. Pada bulan Februari 1984, karena sangat tersentuh dengan dampak operasi "Pagar Betis" militer Indonesia, ia menulis kepada Lopes, menceritakan buruknya kondisi orang-orang yang terkepung oleh kampanye ini, dan orang-orang lain yang dipenjarakan, serta pihak militer yang menjadikan berbagai Sekolah Katolik sebagai sasaran pengeledahan dan interogasi para siswanya.⁶¹⁴ Pada tahun 1985 ia dengan lantang berbicara menentang program Keluarga Berencana Pemerintah Indonesia, yang ia pandang dipaksakan terhadap rakyat Timor-Leste.⁶¹⁵

448. Pada tahun 1988, ketika pasukan keamanan melancarkan pembersihan yang represif sebelum kunjungan singkat Presiden Soeharto ke wilayah ini, Uskup Belo merespon dengan menyiapkan sebuah pernyataan yang akan dibacakan di seluruh gereja di wilayah ini pada tanggal 5 Desember:

Kami tidak setuju dengan sistem yang biadab ini dan mengutuk kebohongan propaganda yang mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak ada di Timor-Leste.⁶¹⁶

449. Surat ini sampai ke kalangan pers internasional, dan dikutip di *the New York Times* pada tanggal 22 Januari 1989.

450. Pada tanggal 6 Februari 1989, Uskup Belo menulis sebuah surat yang lebih mengesankan lagi, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Javier Perez de Cuellar. Dalam surat itu ia meminta Sekretaris Jenderal "untuk memulai proses dekolonisasi yang demokratis dan sesungguhnya di Timor-Leste untuk diwujudkan melalui referendum."⁶¹⁷ Ia menyangkal klaim Indonesia bahwa rakyat Timor-Leste telah memilih untuk berintegrasi,

menganggap bahwa Portugal melihat berjalannya waktu sebagai solusi, dan menyatakan bahwa “sementara itu kami perlahan mati sebagai suatu bangsa dan negara.” Surat ini dikirimkan dari luar Timor-Leste karena alasan keamanan. Walaupun tidak mendapat tanggapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa selama bertahun-tahun, surat ini memberi dampak yang berarti. Bagi Uskup Belo ini mendatangkan tekanan yang besar baik dari penguasa Indonesia maupun dari Vatikan.⁶¹⁸

Situasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa

451. Pada tahun 1982 keadaan politik di Portugal mengalami perkembangan penting yang pada waktunya memberi dampak bagi perjuangan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste. Partai Sosialis Mário Soares mengambil alih pemerintahan dan secara efektif mengakhiri masa ketidakstabilan dan kelumpuhan yang telah menjangkiti politik Portugis sejak Revolusi Bunga tahun 1974. Tidak lama kemudian, pemerintahan Mário Soares mengaktifkan kembali dukungan bagi perjuangan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor-Leste, dan penerusnya menggunakan sebaik-baiknya posisi baru Portugal di Uni Eropa untuk mendukung perjuangan ini. (Lihat Bab 7.1.: Hak Penentuan Nasib Sendiri.)

452. Pada tahun 1982, apa yang sebelumnya adalah peristiwa tahunan Majelis Umum, yakni resolusi yang menyerukan penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste, hampir saja dikalahkan; resolusi ini didukung oleh 50 negara, ditentang oleh 46, dengan 50 lainnya tidak memberi suara. Mosi ini juga mengimbau Sekretaris Jenderal untuk memulai pembicaraan dengan semua pihak terkait untuk “mencapai penyelesaian yang menyeluruh mengenai masalah Timor-Leste.”⁶¹⁹

453. Hal ini tampaknya menjadi kemenangan diplomatik yang berarti bagi Indonesia. Komisi mendengarkan kesaksian dari Mantan Pejabat Senior PBB Francesc Vendrell bahwa ini merupakan masa ketika dalam komunitas internasional:

*Tidak ada yang percaya bahwa orang Timor...benar-benar dapat melawan dan...semuanya percaya bahwa hanyalah soal waktu sebelum Timor-Leste diakui oleh semuanya sebagai bagian dari Indonesia.*⁶²⁰

454. Sejumlah warga Timor-Leste di pengasingan di luar negeri memberi kesaksian kepada PBB selama masa ini. Upaya diplomatik ini dipimpin oleh José Ramos-Horta. Ian Martin, Sekretaris Jenderal Amnesty International dari tahun 1986 sampai 1992, mengenang José Ramos-Horta di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa itu:

*Saya ingat bagaimana José Ramos-Horta terlihat sendiri tanpa teman di Aula Delegasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, ketika hampir semua diplomat yakin bahwa hanyalah soal waktu sebelum penggabungan oleh Indonesia atas Timor-Leste diterima oleh komunitas internasional seutuhnya...*⁶²¹

455. Pada tahun 1983, perdebatan mengenai Timor-Leste ditangguhkan untuk memberi waktu bagi Sekretaris Jenderal memperoleh kemajuan dalam konsultasinya untuk mencapai solusi yang tuntas. Namun sebenarnya, Portugal takut untuk membawanya ke Majelis Umum setelah hampir kalah pada tahun 1982. Sekretaris Jenderal pada waktu itu Javier Perez de Cuellar menafsirkan para pihak yang terlibat dengan sempit, yakni hanya Portugal dan Indonesia. Para pemimpin Timor-Leste sama sekali tidak dilibatkan. Apa yang disebut perundingan tigapihak pertama antara Portugal, Indonesia dan perwakilan PBB diadakan pada tahun 1983. Mereka tidak mencapai banyak kemajuan dalam berbagai pembicaraan ini, karena tidak ada pihak yang mau mengalah.

456. Walaupun persoalan Timor-Leste disahkan dalam agenda Majelis Umum PBB setelah 1983, selama dasawarsa 1980-an terdapat dua mekanisme penting bagi pembahasan internasional mengenai persoalan Timor-Leste, yakni Komisi Hak Asasi Manusia dan Komite Khusus untuk Dekolonisasi PBB. Pada tahun 1985, persoalan ini dihapuskan dari agenda Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi mendengar kesaksian dari Francesc Vendrell mengenai inisiatifnya untuk memperbolehkan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi untuk menampung berbagai submisi baik dari sejumlah lembaga non-pemerintah maupun pemerintah.⁶²² Ini memungkinkan antara 20 sampai 25 LSM internasional untuk melakukan perjalanan tahunan ke New York untuk mengajukan petisi kepada Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. Sejumlah LSM internasional besar sering kali menyerahkan waktu bicara mereka bagi para utusan asal Timor-Leste (Lihat Bab 7.1.: Hak Penentuan Nasib Sendiri, bagian Masyarakat Sipil.) Hal ini mungkin menjadikan Timor-Leste sebagai topik yang paling diperdebatkan oleh Komite Dekolonisasi. Pada tanggal 14 September 1989, Sekretaris Jenderal PBB Javier Perez de Cuellar menerbitkan laporan mengenai kemajuan yang sudah dicapai, dan menyimpulkan bahwa usulan kunjungan ke Timor-Leste oleh Misi Parlemen Portugal akan dapat membantu dalam upaya mencari solusi yang bisa diterima secara internasional.

Kunjungan Paus Yohanes Paulus II

457. Kunjungan Paus Johannes Paulus II ke Timor-Leste pada tanggal 12 Oktober 1989 merupakan peristiwa yang menggembirakan dan melegakan bagi banyak orang di wilayah yang tertindas ini. Ini juga merupakan suatu peristiwa bersejarah, karena baru kali ini Timor-Leste mendapat kunjungan seorang kepala negara sepanjang masa pendudukan Indonesia. Kontingen besar media internasional yang menyertai kunjungan Sri Paus memberi kesempatan publisitas yang belum pernah ada sebelumnya selama empat belas tahun pendudukan. Harapan orang-orang sangat tinggi. Para pendukung kemerdekaan menantikan suatu kecaman atas pendudukan Indonesia. Indonesia menantikan pengakuan integrasi dan penggabungan Gereja Timor-Leste ke dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Simpati Paus terhadap tekanan yang dihadapi oleh para rohaniwan Gereja Timor ditunjukkan dalam sebuah pertemuan antara mereka yang juga dihadiri oleh pihak berwenang Indonesia; muncul sebuah pertanyaan mengenai bahasa apa yang akan digunakan dalam pertemuan tersebut, dan agar terdapat kerahasiaan antara Sri Paus dan para pastor Timor-Leste, bahasa Italia dipilih. Sebagian besar rohaniwan Timor pernah belajar di Roma.⁶²³

458. Sri Paus meniti sebuah garis diplomatik yang rumit selama di Timor-Leste, dengan tidak menunjukkan posisi yang jelas mengenai status politik wilayah ini. Dia secara terbuka mengakui penderitaan orang Timor, dan mendatangkan kenyamanan spiritual dan moral bagi banyak orang. Dalam khotbahnya Paus Johannes Paulus II mengatakan:

*Apakah makna dari menjadi garam di bumi dan cahaya dunia di Timor hari ini? Sudah selama bertahun-tahun hingga saat ini, anda telah mengalami kehancuran dan kematian sebagai akibat konflik; anda sudah tahu apa artinya menjadi korban kebencian dan perjuangan. Banyak orang yang tidak berdosa meninggal, sementara yang lainnya terus menjadi mangsa pembalasan dan dendam...Penghormatan bagi hak-hak yang menjadikan hidup lebih manusiawi harus dengan tegas dijamin; hak-hak perorangan dan hak bagi keluarga-keluarga.*⁶²⁴

459. Sebelum kunjungan tersebut, pihak berwenang Indonesia telah menahan sejumlah aktivis pemuda untuk mencegah kemungkinan terjadinya demonstrasi selama kunjungan Sri Paus.⁶²⁵ Berbagai upaya ini terbukti tidak berhasil, dan demonstrasi yang kemudian terjadi menjadi peristiwa penting dalam kegiatan gerakan klandestin pemuda.

460. Ketika Paus Johannes Paulus II merampungkan misanya yang diperkirakan dihadiri sekitar 100.000 orang di Tasitolu di sebelah Barat kota Dili, sekelompok kecil pemuda merentangkan sejumlah spanduk dan meneriakan slogan yang menyerukan kemerdekaan dan hak asasi manusia. Terjadi beberapa bentrokan dengan aparat keamanan dan polisi Indonesia yang menjadi sebuah peristiwa memalukan bagi Indonesia.

461. Ini merupakan demonstrasi terbuka pertama dalam sebuah kunjungan internasional sejak masa invasi Indonesia. Hal ini semakin memberanikan para pemuda dan mengakibatkan tumbuhnya sejumlah kelompok baru dan mendorong kerja sama di antara mereka. Pemimpin pemuda klandestin Constancio Pinto belakangan menulis:

Tahun 1989 menandakan awal aksi non-kekerasan di kota-kota dan pedesaan. Sebelumnya, walaupun orang-orang terorganisir dalam kelompok-kelompok kecil, wawasan mereka hanya terbatas pada sel-sel mereka sendiri. Terkadang mereka merasa, 'Apakah hanya kita yang berjuang untuk ini? Bagaimana dengan yang lain?' Ketika gerakan-gerakan protes mulai terjadi, orang-orang tiba-tiba membuka pikiran dan persepsi mereka: "Bukan hanya kita yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri! Yang lain juga!" Selanjutnya semakin mudah bagi kita. Ketika kita mulai mendekati mereka, kita bisa mengatakan bahwa kita sudah melakukan ini, jadi mari kita lakukan ini bersama.⁶²⁶

462. Pihak penguasa Indonesia menahan banyak orang pada hari-hari sesudah demonstrasi ini dalam upaya untuk menumpas munculnya tanda resistensi baru ini. Komisi mendengar banyak kesaksian mengenai interogasi dan penyiksaan.⁶²⁷

463. Ketika Duta Besar Amerika Serikat John Monjo datang ke Timor-Leste pada bulan Januari 1991 dalam misi pencarian fakta mengenai dugaan penahanan dan penyiksaan yang terjadi setelah demonstrasi pada saat kunjungan Sri Paus, terjadi demonstrasi di luar Hotel Turismo dimana ia menginap. Lusinan anak muda meneriakan slogan menentang pendudukan Indonesia dan menyerahkan sebuah pernyataan tertulis kepada PBB untuk menjalankan sebuah referendum mengenai status politik Timor-Leste. Pemimpin pemuda Gregorio Saldanha menceritakan kepada Komisi:

*Demonstrasi [pada saat kunjungan] Duta Besar AS berlangsung selama tiga hari. Hari pertama hanya ada beberapa orang, pada hari kedua semakin banyak yang ikut, dan pada hari ketiga bukan hanya yang muda-muda, tetapi yang tua juga ikut, termasuk ibu-ibu, yang berdoa dengan rosario di jalanan.*⁶²⁸

464. Lebih banyak penangkapan dan penyiksaan terjadi setelah serangkaian demonstrasi ini, dan pihak intelijen Indonesia menggandakan upaya mereka untuk mengendalikan gerakan klandestin pemuda.⁶²⁹

Jakarta membuka Timor-Leste

465. Ketika Presiden Soeharto menandatangani keputusan pada bulan Desember 1988 yang memberi Timor-Leste "status yang setara" dengan ke-26 provinsi lainnya di Indonesia, wilayah ini yang sebelumnya benar-benar tertutup bagi pengunjung internasional, kini dibuka.⁶³⁰ Hal ini memberi kesempatan baru bagi rakyat Timor untuk berhubungan dengan dunia luar. Walaupun berada jauh dari jalur pariwisata Asia, antara tahun 1989 dan 1991 lebih dari 3000 pengunjung

internasional datang ke Timor-Leste. Ini termasuk wartawan, pekerja LSM dan aktivis yang berkunjung dengan visa turis, yang membawa informasi masuk dan keluar dan banyak di antaranya menjadi pendukung lantang setelah melihat situasi di Timor-Leste (lihat Bab 7.1.: Hak Penentuan Nasib Sendiri).

466. Pada bulan September 1990, pengacara dan aktivis buruh Australia Robert Domm berkunjung ke Timor-Leste dan dengan bantuan jaringan klandestin berhasil mewawancarai Xanana Gusmão di persembunyiannya di gunung. Wawancara ini merupakan wawancara langsung pertama dengan pemimpin gerilya. Wawancara ini disiarkan oleh *Australian Broadcasting Commission* (ABC) dan semakin meningkatkan pamor dan status internasional Xanana Gusmão.⁶³¹ Pembalasan militer Indonesia terhadap orang-orang yang turut membantu mengadakan wawancara ini sungguh kejam.

467. Jumlah orang Timor-Leste yang belajar dan bekerja di Indonesia juga meningkat sebagai konsekuensi pembukaan Timor-Leste ini. Hal ini memungkinkan kalangan nasionalis Timor di antara mereka untuk membangun hubungan dengan masyarakat sipil Indonesia dan mancanegara yang bekerja atau tengah berkunjung ke Jakarta, termasuk para wakil media. Hal ini memberi dampak mendalam kepada gerakan hak asasi manusia dan pro-demokrasi baik di Indonesia dan Timor-Leste pada dasawarsa 1990-an.⁶³²

Perkembangan Internasional menjelang akhir dasawarsa 1980-an

Perjanjian Celah Timor

468. Pada tanggal 11 Desember 1989, Pemerintah Australia dan Indonesia menandatangani sebuah perjanjian tentang eksploitasi sumber daya alam Celah Timor. Hal ini tidak mengejutkan Xanana Gusmão, yang sebelumnya sudah mengkritik Pemerintah Australia dalam berbagai pesannya sejak tahun 1986, ketika ia mengatakan bahwa Australia berupaya mencari solusi mengenai persoalan Timor-Leste untuk mendapatkan akses ke sumber daya alam di Laut Timor.⁶³³ Organisasi-organisasi hak asasi manusia, para wartawan dan aktivis di seluruh dunia mengkritik perjanjian tersebut, dan hal ini menjadi sumber pertentangan yang terus-menerus. Upacara penandatanganan dilakukan di atas pesawat yang terbang melintas di atas Laut Timor, dan foto Menteri Luar Negeri Gareth Evans dan Ali Alatas menjadi alat paling disukai gerakan solidaritas internasional dalam upayanya untuk menyorot segala ketidakadilan dalam persoalan Timor-Leste.

Akhir Perang Dingin

469. Runtuhnya Tembok Berlin pada tanggal 9 November 1989 secara dramatis menandai akhir dari Perang Dingin. Ini juga mengakhiri konteks geopolitis yang mewarnai konflik sejak masa invasi tahun 1975. Gerakan sosial untuk kebebasan di seluruh dunia juga mendorong semangat banyak warga Timor-Leste. Dogma yang diusung oleh banyak kalangan komunitas internasional bahwa pendudukan dan integrasi Indonesia atas Timor-Leste tidak dapat dicegah, walaupun tidak sah secara hukum, tampak semakin sulit untuk dipertahankan. Dunia sedang mengalami perubahan.

⁶³¹ Perjanjian ini dibatalkan oleh Australia dan Indonesia pada tahun 1999, dan digantikan dengan Kesepakatan Laut Timor antara Australia dan Timor-Leste yang baru merdeka tahun 2002.

3.18 Titik Balik

Tinjauan

470. Gerakan kemerdekaan Timor-Leste berubah pada dasawarsa 1990-an. Fokus bergeser dari kampanye gerilya ke kampanye diplomatik, dengan dukungan kuat dari berbagai kelompok mahasiswa di Timor-Leste dan Indonesia, dan dukungan internasional yang semakin meningkat. Pergeseran ini didukung oleh tiga kejadian penting: Pembantaian Santa Cruz, penangkapan Xanana Gusmão, dan penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Uskup Belo dan José Ramos-Horta.

471. Pembantaian Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991 mengubah secara permanen cara dunia memandang pendudukan Timor-Leste oleh Indonesia. Difilmkan oleh media asing yang hadir untuk kunjungan delegasi Parlemen Portugis, serangkaian gambar pembunuhan massal berdarah dingin terhadap anak-anak muda memobilisasi sebuah era baru gerakan solidaritas internasional sehingga tidak memungkinkan lagi pemerintah-pemerintah dunia untuk mengabaikan penindasan di Timor-Leste. Film ini juga menunjukkan ketidaksenangan generasi muda Timor-Leste terhadap rezim Indonesia, yang mengklaim telah berhasil merebut hati dan pikiran mereka.

472. Xanana Gusmão tertangkap pada bulan November 1992. Setelah diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dia tetap memimpin Resistensi dari penjara Cipinang di Jakarta. Resistensi memperlebar langkah-langkah diplomatik berdasarkan pada keinginan tanpa syarat untuk berdialog dengan Indonesia. Rencana Damai CNRM dilancarkan pada tahun 1993 untuk mendorong usaha ini. Xanana Gusmão semakin diterima oleh masyarakat internasional sebagai figur penting dalam pencarian solusi damai. Setelah Santa Cruz, dialog tripartit yang disponsori PBB antara Portugal dan Indonesia dihidupkan kembali.

473. Selama dasawarsa 1990-an, gerakan mahasiswa di Timor-Leste dan Indonesia semakin menguat dan menjadi amat penting bagi perjuangan kemerdekaan. Di Timor-Leste, para aktivis masih mengalami penindasan, namun berjuang agar suara mereka didengar. Di Indonesia, para mahasiswa Timor-Leste membangun hubungan yang baik dengan para aktivis hak asasi manusia dan pro-demokrasi Indonesia dan melakukan sejumlah kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang perjuangan penentuan nasib sendiri yang sedang berlanjut.

474. Pada bulan Oktober 1996, Komite Nobel mengumumkan penganugerahan Hadiah Perdamaian bagi Uskup Belo dan José Ramos-Horta, yang terbukti menjadi sebuah suntikan semangat bagi perjuangan penentuan nasib sendiri. Kofi Annan mulai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Januari 1997, dan membawa sebuah pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah Timor-Leste.

Pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991

475. Pembantaian pemuda Timor-Leste di pemakaman Santa Cruz oleh para serdadu Indonesia pada tanggal 12 November 1991 merupakan sebuah titik balik dalam perjuangan rakyat Timor untuk diakui secara internasional. Untuk pertama kali sejak invasi tahun 1975, kebrutalan militer Indonesia terhadap warga sipil terekam dalam film oleh media internasional. Film yang diselundupkan keluar dari wilayah tersebut beberapa hari setelah pembantaian awal, ditayangkan oleh berbagai televisi di seluruh dunia dan menyingkap keadaan sebenarnya tentang pendudukan Indonesia yang selama itu dicoba disembunyikan oleh Jakarta. Penindasan yang keras oleh militer Indonesia terhadap rakyat Timor-Leste biasa ini tidak lagi bisa disangkal.

476. Komisi mendengarkan dari mantan pejabat senior PBB Francesc Vendrell tentang dampak kejadian ini di PBB:

*Insiden Santa Cruz adalah kejadian bersejarah yang penting bagi Timor-Leste dan mengangkat kembali seluruh masalah Timor-Leste ke kancah politik di PBB. Untuk itu kita sebaiknya menganggap mereka yang meninggal di Pemakaman Santa Cruz sebagai pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan Timor-Leste.*⁶³⁴

477. Kejadian di pemakaman Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991, dan hari-hari sesudahnya dicakup dalam bab-bab khusus dalam laporan ini. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan, dan Kekerasan Seksual; dan Bab 7.7: Kekerasan Seksual). José Ramos-Horta menceritakan kepada Komisi bahwa film yang diambil oleh Max Stahl tentang kejadian ini adalah bukti kunci, dan setelah itu orang tidak dapat lagi menuduhnya mengarang-ngarang cerita mengenai penindasan terhadap rakyat Timor-Leste yang berusaha⁶³⁵ mengekspresikan harapan mereka untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.

478. Beberapa minggu sebelum terjadinya pembantaian, para aktivis di Timor-Leste tengah mempersiapkan diri untuk kunjungan delegasi parlemen Portugis.⁶³⁶ Terdapat desas-desus tentang rencana pertemuan antara delegasi tersebut dengan Xanana Gusmão, dan harapan sangat tinggi. Gerakan klandestin mempersiapkan demonstrasi. Satu kelompok pemuda menulis berbagai spanduk di halaman Gereja Motael di pantai Dili. Kelompok ini dipantau oleh intelijen Indonesia dan keributan dengan militer Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober dan salah seorang anggotanya, Sebastião Gomes, ditembak mati. Walaupun kunjungan delegasi Portugis dibatalkan, pada tanggal 11 November Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, Pieter Kooijmans berada di Dili. Gerakan klandestin memutuskan untuk tetap mengadakan demonstrasi untuk mengenang pembunuhan Sebastião Gomes setelah misa pemakaman di Gereja Motael pada pagi hari tanggal 12 November 1991. Ada upaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar demonstrasi tersebut berlangsung damai dan tertib.⁶³⁷

479. Tentara, polisi dan agen intelijen Indonesia berjaga di sepanjang jalan-jalan kota Dili selama demonstrasi dari Gereja Motael tersebut, sepanjang pantai dan terus ke selatan ke pemakaman Santa Cruz. Sebagian demonstran berjalan dari Motael, sementara sebagian bergabung di tengah perjalanan dan lebih banyak lagi yang bergabung di pemakaman. Kemudian spanduk dikibarkan yang mengimbau keterlibatan PBB di Timor-Leste, mendukung Xanana Gusmão dan penentuan nasib sendiri. Keadaan sangat menegangkan, karena keterbukaan seperti ini tidak diperkirakan sebelumnya. Ada berbagai kesaksian, namun yang jelas dalam perjalanan seorang tentara Indonesia ditusuk dan dibawa dalam keadaan cedera. Pernyataan resmi Indonesia tentang kejadian tersebut menjelaskan bahwa hal tersebut memprovokasi kemarahan militer dan berlanjut dengan pembantaian. Akan tetapi, bukti tidak mendukung kesimpulan tersebut. Penembakan dimulai ketika para demonstran tiba di pemakaman Santa Cruz. Tentara menembaki dengan senjata-senjata otomatis ke arah demonstrasi damai dan tidak bersenjata, yang banyak di antaranya lari ke kompleks pemakaman tersebut. Komisi mendengar kesaksian bahwa para tentara kemudian mengepung pemakaman Santa Cruz, lalu masuk dan membunuh orang-orang yang tadinya tidak terluka atau hanya terluka ringan dengan menusuk mereka dengan pisau bayonet.⁶³⁸ Simplicio Celestino de Deus, seorang yang berhasil selamat dari pembantaian tersebut, mengatakan kepada Komisi:

*Banyak yang terbunuh di dalam pemakaman tapi lebih banyak lagi yang terbunuh di luar pemakaman ketika mereka sedang berlari atau diambil dari tempat persembunyiannya di rumah-rumah dan tempat lain, lalu dibunuh.*⁶³⁹

480. Banyak pemuda yang diangkut menggunakan truk, ke rumah sakit militer Wira Husada di Lahane, Dili, ke pusat-pusat interogasi, atau dibunuh begitu saja. Ratusan pemuda lari ke kediaman Uskup Belo mencari perlindungan. Uskup Belo menghubungi Gubernur Mario Carrascalão, dan pergi ke Santa Cruz dimana dia melihat sejumlah tubuh orang yang terbunuh dan terluka, dan kemudian mengunjungi Rumah Sakit Wira Husada dimana dia melihat hasil pemukulan yang parah.⁶⁴⁰ Komisi mendengarkan kesaksian yang menyebutkan tentang serangkaian pembunuhan dalam hari-hari sesudahnya ketika pasukan keamanan Indonesia memburu orang-orang yang mereka curigai terlibat dalam unjuk rasa tersebut.⁶⁴¹ Komisi juga mendengar tentang orang-orang hilang yang belum ditemukan, dan tentang kekerasan seksual terhadap para perempuan muda di Santa Cruz.⁶⁴²

481. Setelah pembantaian Santa Cruz, Renetil (*Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste*) dan Felectil (*Frente Estudantil Clandestina de Timor-Leste*) melakukan demonstrasi di depan kantor perwakilan PBB di Jakarta.⁶⁴³

482. Dalam beberapa hari dan bulan berikutnya ratusan orang ditahan. Kantor Nasional Komisi di Balide ketika itu digunakan untuk menahan banyak orang, dan ruangan yang digunakan telah diberi nama sebagai ruangan Santa Cruz untuk mengenang kejadian tersebut. Sebagian orang diadili dan dijatuhi hukuman penjara untuk waktu yang lama.⁶⁴⁴ Komisi mendengarkan kesaksian dari pengacara Indonesia Luhut Pangaribuan dan aktivis Ibu Ade Rostina Sitompul, yang berkunjung ke Dili setelah pembantaian tersebut, tentang berbagai usaha dari para pengacara hak asasi manusia Indonesia untuk membela para tahanan dan tentang ketidakadilan proses tersebut.⁶⁴⁵

483. Perkiraan independen menyebut jumlah orang yang terbunuh mencapai 271 orang, dan 250 orang dinyatakan hilang.⁶⁴⁶ Ratusan orang ditangkap dan ditahan sehubungan dengan kejadian tersebut. Penyelidikan oleh pihak Indonesia (Komisi Penyelidikan Nasional, KPN) yang ditugaskan untuk menyelidiki pembantaian tersebut gagal memenuhi harapan. Pada awalnya mereka menyebut bahwa 19 orang terbunuh di Santa Cruz, namun dihadapkan dengan kecaman internasional terhadap upaya menutup-nutupi tersebut, angkanya naik menjadi 50. Bukti lebih jauh bahwa kepemimpinan senior ABRI memaklumi pembantaian tersebut terjadi pada tanggal 14 November ketika Panglima ABRI Try Sutrisno dikutip mengatakan kepada para lulusan AKABRI bahwa:

*Penjahat-penjahat seperti ini harus ditembak, dan kita akan menembak mereka.*⁶⁴⁷

484. Komisi melakukan survei di lingkungan di Dili dan secara umum mencatat informasi mengenai pembantaian Santa Cruz melalui proses pengambilan pernyataan. Melalui proses ini Komisi juga menerima kesaksian tentang pembunuhan dan penghilangan lebih lanjut oleh militer Indonesia terhadap mereka yang dicurigai terlibat demonstrasi, termasuk di distrik-distrik. Misalnya, di Sorolau (Ainaro, Ainaro) empat aktifis klandestin dibunuh oleh tentara yang diidentifikasi sebagai anggota Kopassus dan Milsas Timor.⁶⁴⁸ Atas dasar penelitian ini, meski Komisi tidak bisa menentukan secara tepat berapa orang yang masih hilang, Komisi yakin bahwa angka 200 bukan perkiraan yang mengada-ada. Komisi mencatat dalam Audiensinya serta kegiatan lainnya bahwa pembantaian Santa Cruz masih merupakan persoalan yang tidak terpecahkan yang sangat penting bagi banyak orang dan keluarga, dan bagi negara ini secara keseluruhan, dan yakin bahwa penyelidikan yang lebih menyeluruh dibanding penyelidikannya perlu dilakukan (lihat Bab 7.2: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa).

Dampak internasional Santa Cruz

485. Berita pembantaian Santa Cruz menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, dan berakibat pada meningkatnya aksi solidaritas secara dramatis. Banyak wartawan asing dan pekerja LSM berkunjung ke Timor-Leste mengharapkan kedatangan misi Portugis. Sejumlah orang tersebut

telah menyaksikan pembantaian tersebut dan berperan penting memberitahu dunia pada beberapa bulan dan tahun berikutnya, termasuk memberi kesaksian pada Komisi Hak Asasi Manusia PBB. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa pembantaian tersebut telah memicu Portugal, dimana terjadi serangkaian protes massal dan seruan untuk tindakan PBB. (Lihat Bab 7.1: Hak Penentuan Nasib Sendiri, bagian Masyarakat Sipil.)

486. Beberapa negara, khususnya Australia, berusaha mendukung penjelasan pihak Indonesia bahwa ini adalah tindakan yang tidak biasa oleh “oknum” dalam militer Indonesia. Meskipun begitu, pembantaian tersebut dan fokus pada masalah lebih luas tentang pendudukan Indonesia atas Timor-Leste yang dihasilkannya menjadi sebuah bencana relasi publik bagi Indonesia. Tanggal 12 November menjadi tema perjuangan bagi diaspora Timor dan para aktivis hak asasi manusia di berbagai negara di seluruh dunia hingga tahun 1999, dengan peringatan tahunan yang ditandai dengan berbagai demonstrasi dan hening cipta.

Penangkapan Xanana Gusmão

487. Xanana Gusmão ditangkap oleh militer Indonesia pada tanggal 20 November 1992 di sebuah rumah di Lahane, Dili.[†] Berita tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh Timor-Leste dan dunia. Pada awalnya ia dibawa ke Bali, dan kekhawatiran pertama para pendukung adalah keselamatan fisiknya. Di Dili orang-orang yang diduga melindungi Xanana Gusmão ditahan dan disiksa dengan kejam.⁶⁴⁹ Sebuah kampanye internasional untuk menekan Indonesia agar menjamin keselamatannya mulai dijalankan. Xanana Gusmão ditampilkan dalam sebuah wawancara Televisi Indonesia pada tanggal 25 November dimana ia sepertinya menyatakan menolak perjuangan Resistensi. Ia dibawa kembali ke Dili untuk diadili pada bulan Mei 1993, dan pada tanggal 17 Mei, dia berdiri untuk membacakan pembelaannya. Hakim pengadilan menghentikannya hanya selang beberapa menit setelah ia mulai membacakan pembelaannya, dengan menyatakan bahwa pembelaannya “tidak relevan”. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dibawa ke penjara Cipinang di Jakarta yang dijaga ketat (lihat Bab 7.6.: Pengadilan Politik). Namun, pembelaan Xanana Gusmão sepanjang dua puluh tujuh halaman diselundupkan ke luar negeri dan disebarluaskan ke dunia internasional. Ia menolak klaim Indonesia atas Timor-Leste dan mengulangi seruan perjuangan penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste.

488. Penangkapan Xanana Gusmão merupakan pukulan telak bagi pihak Resistensi, dan penguasa Indonesia yakin bahwa itu akan menjadi akhir dari perjuangan kemerdekaan. Akan tetapi, hal tersebut justru menciptakan kondisi bagi dia untuk tampil sebagai seorang pemimpin terhormat dunia, setelah 17 tahun di pegunungan dan hutan-hutan Timor-Leste, sementara ia terus memimpin Resistensi dari sel penjaranya. Xanana Gusmão mengatakan kepada Komisi bahwa ia banyak belajar selama di penjara Cipinang, tempat ia ditahan bersama dengan para tahanan politik Indonesia dari seluruh pelosok Indonesia. Dia memberitahu Komisi bahwa pengalaman tersebut memberinya:

Kesempatan untuk meraih pengetahuan lebih baik tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk demokrasi dan kebebasan. Ini membantu saya untuk mengurangi dan kemudian menghilangkan rasa benci yang terakumulasi di hutan selama 17 tahun. Saya menjadi mengerti persamaan obyektif yang menyatukan kita dengan rakyat Indonesia...Pengertian ini memungkinkan saya bahkan untuk berbicara dengan bekas-bekas musuh dan Jenderal-Jenderal Indonesia.⁶⁵⁰

[†] Pada 9 April 2005, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kepala Negara pertama yang mengunjungi Pekuburan Santa Cruz, dalam rangka penghargaan dan rekonsiliasi.

[†] Xanana Gusmão ditangkap di rumah Aliança Araujo. Selama bertahun-tahun secara sembunyi-sembunyi ia pergi ke Dili untuk melakukan berbagai pertemuan dalam banyak kesempatan.

Jaringan klandestin pelajar

Di Timor-Leste dan kebangkitan kekuatan-kekuatan paramiliter

489. Selama dasawarsa 1990-an gerakan klandestin pemuda perkotaan berkembang, dan mengambil risiko besar untuk menyampaikan informasi dan melakukan berbagai demonstrasi ketika para tamu luar negeri datang ke Timor-Leste. Aparat keamanan Indonesia melanjutkan pendekatan tangan-besinya terhadap resistensi pemuda, dan pada dasawarsa 1990-an merubah strateginya dalam usaha memerangi gerakan yang terus tumbuh ini. Mulai pertengahan dasawarsa 1990-an, perhatian baru diarahkan kepada operasi paramiliter dan intelijen di wilayah ini. Kelompok-kelompok bersenjata yang kemudian dikenal sebagai pasukan "Ninja" merajalela di jalanan kota Dili pada malam hari, menciptakan suasana ketakutan di kalangan penduduk karena banyak orang yang hilang dalam operasi-operasi rahasia ini.⁶⁵¹ Polisi anti huru-hara, Brimob, tampak hadir di mana-mana dan sangat mengancam, khususnya di Dili dimana demonstrasi mahasiswa sering terjadi.

490. Selama tahun-tahun tersebut terdapat banyak titik-titik rawan yang dapat menimbulkan konfrontasi antara pemuda Timor-Leste dengan pasukan keamanan Indonesia. Agama kadang digunakan untuk memprovokasi kekerasan. Di Remexio (Aileu) pada bulan Juni 1994, seorang serdadu Indonesia datang ke sebuah misa dan menghina Ekaristi. Dua minggu kemudian di Universitas Timor-Timur (UNTIM), ratusan mahasiswa berunjuk rasa, menuntut kemerdekaan.⁶⁵² Persaingan antara warga asli Timor-Leste dan pendatang dari Indonesia dapat menyebabkan bentrokan penuh kekerasan. Di Baucau pada bulan Januari 1995, ketegangan antara pendatang dari Sulawesi dengan orang-orang lokal meledak di pasar pusat. Dalam usaha menghentikan kerusuhan tersebut, militer Indonesia menembaki beberapa orang, dan belakangan mengakui bahwa tiga orang tewas.⁶⁵³ Beberapa hari kemudian, pada tanggal 9 Januari 1995, para mahasiswa di UNTIM menandai hari dialog tripartit di Jenewa dengan sebuah unjuk rasa yang menuntut dibebaskannya Xanana Gusmão dan agar PBB menerapkan resolusi-resolusinya tentang Timor-Leste. Orang-orang asing yang berkunjung menyaksikan demonstrasi ini dan penumpasan yang menyusul kemudian, dimana enam belas orang demonstran ditahan dan disiksa.⁶⁵⁴

Gerakan mahasiswa di Indonesia

491. Hubungan antara kaum nasionalis Timor-Leste dengan para aktivis hak asasi manusia Indonesia mulai terjalin padadasawarsa 1980-an ketika para tahanan politik Timor ditahan di berbagai penjara di Jawa.⁶⁵⁵ Organisasi-organisasi mahasiswa Renetil dan Impettu (Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemuda Timor-Leste), memainkan peran yang semakin penting pada dasawarsa 1990-an dalam mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ini. Awalnya para aktivis mahasiswa Timor-Leste menjadi terlibat di gerakan-gerakan protes Indonesia tentang sejumlah masalah seperti Waduk Kedungombo dan persengketaan tanah di Jawa Tengah pada tahun 1990. Aktivis hak asasi manusia Indonesia Nugroho Katjasungkana menceritakan kepada Komisi mengenai kesibukan para aktivis Indonesia untuk menjatuhkan rezim Soeharto yang korup dan tidak adil pada dasawarsa 1980-an. Dia mengingat keterlibatan orang Timor-Leste dalam tindakan-tindakan ini, dengan mencatat bahwa:

*Keterlibatan orang Timor dalam perjuangan demokrasi di Indonesia mendahului keterlibatan orang Indonesia dalam perjuangan penentuan nasib sendiri Timor-Leste.*⁶⁵⁶

492. Renetil mengembangkan strategi yang disebutnya 'Indonesianisasi' konflik tersebut.⁶⁵⁷ Para mahasiswa Timor-Leste menjadi aktif dalam gerakan pro-demokrasi Indonesia yang mulai tumbuh,⁶⁵⁸ Dan bendera Timor sering terlihat dalam berbagai demonstrasi yang menyuarakan perubahan di Indonesia pada dasawarsa 1990-an.⁶⁵⁹ Sejumlah kelompok Indonesia, yang sebelumnya sibuk dengan agenda pro-demokrasinya sendiri dan tidak sadar akan situasi di Timor-Leste perlahan mulai mengidentifikasi masalah Timor-Leste dengan akar permasalahan mereka sendiri, yakni rezim Orde Baru Soeharto.⁶⁶⁰

493. Kelompok-kelompok Indonesia yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste dibentuk di sejumlah kota di seluruh Jawa, khususnya setelah pembantaian Santa Cruz.⁶⁶¹ Di Jakarta pada tahun 1991, beberapa LSM membentuk Komisi Gabungan Pembela Timor-Leste, yang pada tahun 1998 digantikan oleh Fortilos (Forum Solidaritas Rakyat Timor Lorosae). Pada tahun 1995 di Jakarta, SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere) dibentuk dan kemudian pada tahun 1997 Solidamor (Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor-Leste) dibentuk. Di Kupang pada tahun 1998, para aktivis mahasiswa dan LSM membentuk Forsolidareste (Forum Solidaritas Timor-Leste). Para aktivis Indonesia dan banyak aktivis Timor menghubungkan demokratisasi Indonesia sebagai sebuah prakondisi bagi penentuan nasib sendiri Timor-Leste. Wilson B. Nurtias dari kelompok solidaritas Indonesia SPRIM mengatakan bahwa rakyat Indonesia dan Timor-Leste adalah "penumpang dari sebuah kapal, yang sedang menghadapi bajak laut yang sama."⁶⁶²

494. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an para mahasiswa Timor-Leste menggunakan sebuah taktik yang menjadikan sejumlah kedutaan asing di Indonesia sebagai benteng. Sudah sejak tahun 1989, para pemuda Timor mencari suaka politik di berbagai kedutaan di Jakarta karena takut terhadap kekerasan oleh pasukan keamanan Indonesia.⁶⁶³ Pada dasawarsa 1990-an, taktik tersebut digunakan sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan perhatian media tentang perjuangan yang tengah berlangsung untuk menginternasionalkan masalah penentuan nasib sendiri. Yang paling spektakuler yang kemudian dikenal sebagai aksi lompat pagar terjadi pada tahun 1994, pada saat KTT para pemimpin regional *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC). Saat pertemuan APEC dilangsungkan di Bogor, dekat Jakarta, dan media dunia sedang berkumpul untuk meliput peristiwa tersebut, 29 orang Timor-Leste melompati pagar Kedutaan AS di Jakarta pada tanggal 12 November dan menuntut untuk bertemu dengan Presiden Clinton yang tengah berkunjung. Selama sehari-hari para mahasiswa Timor-Leste yang terkepung tampil di berbagai halaman depan media masa, di Jakarta dan seluruh dunia, dengan tuntutan pembebasan Xanana Gusmão dan penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. Meskipun mereka tidak bertemu dengan Presiden Clinton, negosiasi berhasil dilakukan dan mereka diberi suaka politik ke Portugal. Ini adalah sebuah prestasi hubungan publik hebat yang diatur oleh Renetil.⁶⁶⁴

495. Aksi lompat pagar di kedutaan lain terjadi di tahun-tahun berikutnya, hingga sejumlah kedutaan di Jakarta mengambil berbagai langkah pengamanan untuk mencegah para mahasiswa Timor-Leste memasuki tempat mereka. Pada bulan November 1995, lima orang memasuki Kedutaan Prancis dan diberi suaka di Portugal.⁶⁶⁵ Dan pada tanggal 7 Desember 1995, sejumlah pemuda melompat pagar kedutaan Belanda dan Rusia untuk menarik perhatian kepada hari peringatan invasi Indonesia ke Timor-Leste.⁶⁶⁶ Sejumlah wawancara yang dilakukan oleh Komisi menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari strategi yang dikoordinasikan dengan baik oleh Renetil, yang beroperasi dengan hubungan langsung dengan kepemimpinan Xanana Gusmão di penjara Cipinang.⁶⁶⁷

496. Selama dasawarsa 1990-an, para anggota Renetil bergerak untuk menguasai posisi strategis di organisasi mahasiswa yang diakui Negara, Impettu, yang keanggotaannya adalah wajib bagi semua mahasiswa Timor-Leste. Hal ini memungkinkan para anggota Renetil untuk berorganisasi secara terbuka sebagai anggota Impettu dan pada pertengahan dasawarsa 1990-

⁶⁵⁷ Berbagai universitas terkemuka menjadi basis gerakan kelompok pro-demokrasi termasuk FKMJ, (*Forum Komunikasi Mahasiswa Jember*), SMID (*Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi*), dan KPRP (*Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan*).

an para anggota Renetil secara efektif telah menguasai Impettu.⁶⁶⁸ Seiring makin besarnya suara yang mengimbau perubahan rezim menjelang akhir dasawarsa 1990-an, cabang-cabang Impettu bersatu dalam sebuah kepemimpinan tunggal, yakni DPP Impettu (Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar Timor-Leste), yang dikepalai oleh Wakil Sekretaris Jenderal Renetil.⁶⁶⁹

Rencana Damai CNRM dan inisiatif-inisiatif diplomatik

497. Pada awal dasawarsa 1990-an CNRM secara aktif berusaha berdialog dengan Indonesia. Dengan dukungan LSM internasional dan berbagai kelompok masyarakat sipil, Kampanye Dialog Timor dilancarkan (lihat Bab 7.1.: Hak Penentuan Nasib Sendiri). Pada tahun 1993 CNRM menawarkan rencana tiga-tahap untuk perdamaian, yang pada dasarnya adalah demiliterisasi Timor-Leste, sebuah periode otonomi transisional, dan pada akhirnya sebuah tindakan penentuan nasib sendiri untuk menentukan status politik permanen wilayah tersebut. Mereka mengajukan Rencana Damai tersebut pertama ke Uni Eropa dan kemudian ke PBB, dan menunjukkan peningkatan signifikan dukungan aktif oleh Portugal. Pemerintah Indonesia menolak rencana tersebut. Meskipun demikian rencana tersebut tetap ditawarkan selama dasawarsa 1990-an sebagai suatu fokus upaya diplomatik CNRM dan sebagai tanda keinginan mereka untuk mencari solusi melalui dialog.⁶⁷⁰ Sementara itu Portugal memulai lagi pembicaraan dengan Indonesia pada tahun 1992, setelah menghentikan hubungan setelah pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991.

498. José Ramos-Horta melanjutkan kampanye diplomatiknya berdasarkan rencana perdamaian ini. Saat Indonesia berada di bawah tekanan yang meningkat menyusul terungkapnya pembantaian Santa Cruz, dan sebagian kalangan internasional merasa berkepentingan untuk mencapai solusi bagi Timor-Leste, Indonesia tetap berada dalam posisi yang relatif kuat pada awal dasawarsa 1990-an. Portugal dan Indonesia melanjutkan kembali pembicaraan tripartit di bawah dukungan Sekjen PBB. Akan tetapi, Komisi mendengar dari mantan Pejabat Senior PBB Francesc Vendrell bahwa tahun-tahun awal dan pertengahan dasawarsa 1990-an ini adalah masa dimana Ramos-Horta harus berjuang keras untuk menghindari solusi diplomatik yang buruk bagi Timor-Leste.⁶⁷¹ Dengan dukungan orang-orang Timor-Leste di luar negeri, dan gerakan solidaritas internasional yang makin luas, ia bekerja keras untuk meningkatkan profil internasional pemimpin CNRM, Xanana Gusmão dan untuk meyakinkan para pemimpin dunia bahwa solusi politik itu mungkin.

Kasus Pengadilan Internasional: Portugal vs Australia, 1991-95

499. Pada tahun 1991 Portugal mengajukan Australia ke Pengadilan Internasional sehubungan dengan perjanjian Celah Timor yang ditandatangani dengan Indonesia pada tahun 1989. Portugal tidak bisa mengajukan Indonesia ke pengadilan ini, karena Indonesia belum mengakui yurisdiksi Pengadilan tersebut. Keputusannya diumumkan pada tahun 1995, dan meskipun kasus tersebut tidak berhasil membatalkan perjanjian tersebut, kasus tersebut memberikan sebuah pernyataan penting dalam mendukung hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri yang tengah diperjuangkan.⁶⁷²

500. Portugal berargumen bahwa Australia telah melanggar Hukum Internasional dengan membuat perjanjian bersama Indonesia untuk membagi kekayaan alam milik rakyat Timor-Leste. Portugal berkata bahwa hal tersebut melanggar haknya sebagai penguasa pemerintahan dari wilayah yang tak berpemerintahan sendiri tersebut, dan juga hak rakyat Timor-Leste.

501. Karena sebuah masalah teknis hukum sebagian besar hakim mengatakan bahwa mereka tidak bisa mempertimbangkan kasus tersebut. Semua pemasalahan dalam kasus tersebut berkisar seputar legalitas tindakan yang telah dan terus dilakukan Indonesia di Timor-Leste, sehingga mereka berkata bahwa mereka tidak dapat mempertimbangkan kasus tersebut

jika Indonesia bukan merupakan salah satu pihak. Akan tetapi, dua orang hakim tidak setuju dengan pandangan ini dan mereka secara tegas memberi pendapat berbeda. Mereka mempertimbangkan pentingnya kasus tersebut dan memberikan berbagai temuan penting tentang kewajiban Negara-negara dalam hubungannya dengan hak penentuan nasib sendiri dalam konteks Timor-Leste. Hakim Weeramantry dan Hakim Skubiszewski keduanya mengakui hak atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Mereka juga memperingatkan bahwa Negara-negara yang ikut dalam perjanjian seperti itu memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan rakyat Timor-Leste dan kekuasaan pemerintahan yang sah (Hakim Skubiszewski), dan bahwa perjanjian seperti itu kemungkinan telah melanggar berbagai kewajiban yang dilimpahkan kepada mereka oleh prinsip-prinsip umum Hukum Internasional (Hakim Weeramantry).⁶⁷³

Hadiah Nobel Perdamaian, 1996

502. Penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian 1996 bagi Uskup Belo dan José Ramos-Horta adalah sebuah momen pendorong baru bagi perjuangan rakyat Timor-Leste untuk diakui secara internasional. Penghargaan tersebut memberi pengakuan bagi perjuangan kedua orang tersebut, yang pengalamannya selama masa pendudukan Indonesia sangat berbeda tetapi visi tentang identitas rakyat Timor dan harga diri manusia tetap sama. Penghargaan tersebut juga menandingi usaha bertahun-tahun yang dilakukan penguasa Indonesia untuk mengecilkan kredibilitas kedua orang tersebut, dan membuka pintu para pemimpin dunia kepada mereka dan perjuangan Timor-Leste.

503. Pidato penganugerahan tahun 1996 membicarakan tentang konflik tersebut:

Konflik di Timor-Leste telah disebut sebagai "konflik yang terlupakan"....Jarang sekali sinisme politik dunia didemonstrasikan lebih jelas dari ini....Dua orang penerima Hadiah Perdamaian tahun ini, Carlos Filipe Ximenes Belo dan José Ramos-Horta, telah bekerja tanpa lelah, dan dengan pengorbanan pribadi yang besar, bagi rakyat mereka yang tertindas. Dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit, mereka telah mempertahankan rasa kemanusiaan dan kepercayaan mereka akan masa depan.⁶⁷⁴

504. Dalam pidato penerimaannya, Uskup Belo membicarakan mengenai harapannya bahwa hadiah tersebut dapat memajukan perjuangan Timor-Leste:

Saya sangat percaya bahwa saya berada di sini dasarnya sebagai suara dari rakyat Timor-Leste yang tidak bersuara yang spiritnya bersama saya hari ini, jika tidak secara langsung. Dan apa yang diinginkan rakyat adalah perdamaian, diakhirinya kekerasan dan dihormatinya hak asasi mereka. Adalah harapan saya yang paling besar bahwa Hadiah Nobel untuk perdamaian tahun 1996 ini dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁶⁷⁵

505. Dengan Anugerah Nobel Perdamaian yang diterimanya, José Ramos-Horta memulai kampanye diplomatik yang ambisius. Pada awal tahun 1997 ia berkunjung ke Afrika Selatan. Pada bulan Juli tahun itu ketika Presiden Afrika Selatan Mandela bertemu dengan Presiden Soeharto di Jakarta, ia meminta bertemu dengan Xanana Gusmão yang sedang dipenjara. Presiden Soeharto awalnya menolak permintaan tersebut, dengan mengatakan bahwa Xanana Gusmão hanyalah seorang kriminal. Ketika Presiden Afrika Selatan mengingatkan Soeharto bahwa orang lain pun dulu berkata begitu tentangnya, Soeharto kemudian memperbolehkan. Berita tentang pertemuan pribadi tersebut sampai ke tangan pers dunia, dan meningkatkan profil Xanana Gusmão sebagai seorang negarawan untuk perdamaian.

506. Di Timor-Leste, Anugerah Nobel Perdamaian tersebut menunjukkan kepada rakyat Timor bahwa mereka tidak dilupakan oleh masyarakat internasional, dan meningkatkan harapan untuk bantuan internasional dalam pencarian sebuah solusi bagi konflik tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa

507. Di pertengahan dasawarsa 1990-an terjadi perubahan personalia yang bertanggung jawab atas masalah Timor-Leste di markas PBB New York. Francesc Vendrell pertama-tama menjadi Direktur untuk Asia Tenggara dan Pasifik dan kemudian Asia dan Pasifik. Pejabat yang bertanggung jawab atas urusan Timor-Leste adalah Tamrat Samuel. Vendrell dan Samuel terus menjadi Pejabat Sekretariat Utama yang menangani Timor-Leste sampai Konsultasi Rakyat tahun 1999. Francesc Vendrell mengatakan kepada Komisi tentang dilanjutkannya dialog tripartit dan tentang usaha-usaha dia dan Samuel untuk melibatkan Timor-Leste dalam diskusi tentang masa depan kawasan tersebut.⁶⁷⁶ Pada bulan Januari 1994, Samuel bertemu dengan Xanana Gusmão di penjara Cipinang, begitupun Vendrell pada bulan Desember tahun itu. Pada tahun 1994, mereka juga berkunjung ke Timor-Leste untuk bertemu langsung dengan orang-orang Timor dari semua latar belakang politik, juga dengan para pendeta dan biarawati Katolik. Dia mengenang:

*Salah satu hal yang sangat menggugah saya adalah besarnya kepercayaan semua orang pada PBB...perasaan tanggungjawab yang menurut saya dirasakan oleh saya dan Tamrat, bahwa kami harus melakukan yang terbaik atas nama rakyat yang hanya dapat mengandalkan dukungan PBB.*⁶⁷⁷

508. Vendrell mengatakan kepada Komisi tentang kesulitan PBB ketika rakyat Timor-Leste sendiri berada di luar proses diskusi dialog tripartit itu. Kendala ini memicu inisiatif bagi pembentukan Dialog Menyeluruh Antar-Timor (All-Inclusive intra-East Timorese Dialogue, AIETD). Gagasannya, seperti yang dijelaskan Vendrell pada Komisi, adalah:

*[Jika] mereka [rakyat Timor-Leste] bersatu dan mereka dibiarkan sendiri, mereka mungkin saja menyadari bahwa mereka memiliki banyak persamaan dan mungkin mencapai sebuah usulan bersama tentang Timor-Leste.*⁶⁷⁸

509. Indonesia menyetujui mekanisme ini, meskipun Indonesia bersikeras bahwa AIETD tidak diperbolehkan untuk membahas status politik Timor-Leste. AIETD yang pertama diadakan di Austria pada bulan Juni 1995, dengan peserta dari semua latar belakang politik. Uskup Belo juga menghadiri pertemuan tersebut, meskipun Xanana Gusmão tetap berada di penjara di Jakarta. Tiga pertemuan AIETD setelah itu diadakan, pada bulan Maret 1996, Oktober 1997 dan Oktober 1998. Meskipun berbagai pertemuan tersebut tidak menghasilkan rencana praktis ataupun hasil-hasil resmi, tapi untuk pertama kalinya sejak tahun 1975, PBB terlibat dalam menyatukan rakyat Timor-Leste dari semua latar belakang untuk bersama-sama membahas berbagai perbedaan mereka dan mencari landasan yang sama.

510. Kofi Annan mulai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Januari 1997, dan membawa serta fokus baru bagi masalah Timor-Leste. Pada bulan Februari 1997, dia mengangkat diplomat Pakistan Duta Besar Jamsheed Marker sebagai Utusan Pribadinya untuk Timor (PRSG). Ini sangat memperkuat kerja Francesc Vendrell dan Tamrat Samuel di Sekretariat PBB, dan tim ini mengunjungi Portugal, Indonesia dan Timor-Leste pada masa yang makin bergolak antara tahun 1997 sampai 1998.

3.19 Dari Reformasi ke pengumuman tentang Konsultasi Rakyat

Tinjauan

511. Berbagai peristiwa tahun 1997 bergerak dengan cepat. Krisis finansial Asia melanda Indonesia pada akhir tahun 1997. Krisis ini menguak korupsi dan kebobrokan yang mewabah dalam rezim Soeharto. Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia diguncang oleh berbagai demonstrasi rakyat yang menuntut turunnya Soeharto dan reformasi besar-besaran yang dikenal sebagai Reformasi. Para mahasiswa Timor memainkan peran aktif dalam berbagai demonstrasi ini. Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri, dan Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih tugas sebagai Presiden.

512. Sementara itu, aktivitas diplomatik sangat sibuk sejak Hadiah Nobel 1996, dan Xanana Gusmão menerima kunjungan para tamu yang mewakili para pemimpin dunia dan sejumlah organisasi penting secara reguler di sel penjaranya di Jakarta. Pihak Resistensi melakukan reorganisasi dan menyelenggarakan konferensi penting di Peniche pada bulan April 1998 dimana CNRM diubah menjadi *Conselho Nacional da Resistência Timorese* (Dewan Nasional Perlawanan Timor, CNRT). Ini dimaksud untuk memperluas basis gerakan kemerdekaan.

513. Di Timor-Leste, suasana Reformasi, dan melonggarnya kontrol militer membuka jalan untuk diskusi terbuka tentang status politik wilayah tersebut untuk pertama kalinya dalam masa pendudukan Indonesia. Tuntutan referendum untuk membiarkan rakyat Timor-Leste menentukan nasib mereka meraih momentum di paruh kedua tahun 1998. Akan tetapi, pada akhir tahun tersebut militer Indonesia telah melakukan reposisi. Penarikan pasukan ternyata hanya tipuan, dan pada akhir 1998 semakin banyak bukti yang menunjukkan strategi TNI untuk membentuk, mempersenjatai dan mendanai para milisi pro-integrasi di seluruh negeri untuk mencegah segala upaya benar-benar untuk penentuan nasib sendiri.

514. Dengan penggantian Soeharto, PBB dan masyarakat internasional meningkatkan tekanannya pada Indonesia untuk mencapai sebuah solusi untuk masalah Timor-Leste. Diskusi antara Portugal dan Indonesia awalnya berkisar seputar paket otonomi khusus bagi Timor-Leste, dengan pandangan berbeda-beda apakah ini merupakan sebuah solusi atau hanya satu tahap dalam sebuah proses penentuan nasib sendiri. Pada bulan Januari 1999, Presiden Habibie mengejutkan banyak orang dalam pemerintahannya sendiri ketika dia menyatakan bahwa Indonesia akan memperbolehkan rakyat Timor-Leste untuk menentukan sendiri masa depan mereka, termasuk kemerdekaan jika itu memang adalah kehendak mereka. Negosiasi antara Portugal dan Indonesia diarahkan untuk merampungkan suatu mekanisme untuk melaksanakan pilihan ini.

515. Pada bulan-bulan awal tahun 1999, ketika negosiasi-negosiasi tengah berlangsung, strategi TNI mengembangkan milisi bersenjata semakin dipercepat. Keterbukaan politik yang relatif pada pertengahan tahun 1998 telah hilang, dan kekerasan selalu menjadi ancaman terhadap para pendukung pro-kemerdekaan. Pembantaian di Dili dan Liquiça oleh milisi yang didukung TNI mengejutkan masyarakat internasional, seiring dengan makin banyaknya rakyat Timor-Leste yang mengungsi karena takut akan kekerasan.

516. Negosiasi antara Portugal dan Indonesia mencapai puncaknya dengan apa yang dikenal sebagai Kesepakatan 5 Mei, yang menetapkan modalitas untuk sebuah Konsultasi Rakyat yang memungkinkan rakyat Timor-Leste untuk menerima atau menolak paket otonomi khusus; penolakan akan mengarah pada kemerdekaan. Indonesia menolak untuk menyerahkan tanggung jawab keamanan selama pemungutan suara dan tanggung jawab ini diberikan pada polisi Indonesia. Masyarakat internasional merasa bahwa mereka tidak mampu mendesak Indonesia lebih jauh lagi tentang masalah ini, meskipun terdapat makin banyak bukti tentang keterlibatan militer dan polisi Indonesia dalam kekerasan terhadap para pendukung pro-kemerdekaan.

517. Pemungutan suara ditetapkan dilakukan pada bulan Agustus 1999, untuk memungkinkan Parlemen Indonesia mensahkan hasilnya pada bulan September.

Jatuhnya Soeharto

518. Pada bulan Mei 1997 alat politik pemerintahan Orde Baru, Golkar, terpilih kembali dalam pemilihan parlemen nasional, dengan memenangi 74% jumlah suara.⁶⁷⁹ Tidak lama setelah itu krisis keuangan Asia muncul di Thailand pada bulan Juli 1997 dan segera menjangkiti Indonesia. Bersama dengan jatuhnya Rupiah ke tingkat 18.000 terhadap Dollar AS pada Januari 1998 dan bantuan IMF, Soeharto dipilih kembali sebagai Presiden oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada bulan Maret 1998. Ketika Soeharto membentuk kabinet yang dianggap banyak orang didominasi oleh para kroni rezim tersebut, protes rakyat semain berkobar. Tuntutan pengantian rezim oleh berbagai gerakan pro-demokrasi mendapat dukungan dari kalangan elit Indonesia. Pada bulan Mei, Ketua MPR Harmoko menanggapi secara positif tuntutan kaum reformis, sementara Panglima ABRI Jenderal Wiranto memberikan dukungan militer untuk reformasi. Dua orang pemimpin oposisi yang muncul, Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais, memberi indikasi kesiapan mereka untuk mengambil alih kekuasaan.

519. Tekanan rakyat meledak selama bulan Mei, yang menyebabkan jatuhnya Soeharto. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia kemudian menemukan bahwa kekerasan dalam periode ini telah didalangi, dengan mengidentifikasi 20 orang anggota militer dan sipil di belakang berbagai kerusuhan tersebut.⁶⁸⁰ Pada tanggal 18 Mei, dengan dikuasainya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) oleh para mahasiswa, Soeharto kehilangan sebagian besar dukungannya. DPR meminta pengunduran dirinya. Pada malam hari tanggal 20 Mei, Jenderal Wiranto juga mengimbau pengunduran diri Soeharto, dan pada tanggal 21 Mei, Soeharto turun dari kursi kepresidenan.

520. Peristiwa ini memberikan seorang Kepala Negara baru bagi Indonesia, Presiden BJ Habibie, yang segera menerapkan sejumlah reformasi yang luar biasa. Slogan utama pada periode tersebut adalah "Korupsi, Kolusi dan Nepotisme", yang sering disebut KKN, dan yang mampu merangkum apa yang dianggap penyakit yang paling mewabah dari rezim Soeharto. Masyarakat sipil juga mengemukakan berbagai masalah lain seperti kebutuhan untuk menentang militerisme dan diakhirinya impunitas pihak militer. Agenda reformasi mempengaruhi Indonesia dalam banyak cara. Komposisi elit politik Indonesia berubah, dan meskipun banyak politisi yang terkait rezim Soeharto selamat dari kejatuhan Soeharto sejumlah politisi baru meningkat pamornya. Hal ini mendatangkan pluralisme ke perdebatan politik yang sudah lama ditekan selama kekuasaan Soeharto. Selain itu, kebebasan media dan debat publik yang kuat memastikan sejumlah besar masalah dapat dibahas secara terbuka dan banyak dari permasalahan tersebut mendapat perhatian politik yang berujung pada perubahan.

521. Presiden Habibie dianggap oleh banyak pihak hanya sebagai Presiden sementara. Sebagai Wakil Presidennya Soeharto dia dianggap sangat dekat dengan rezim Orde Baru, meskipun dia tidak memiliki pengikut yang besar atau basis kekuatan di dalam rezim tersebut. Sebagai Presiden, dia harus hati-hati melangkah di antara militer yang kuat dan beberapa kelompok agama utama seperti sejumlah organisasi Islam sambil merundingkan langkah reformasi. Di kabinetnya dia mempertahankan Wiranto sebagai Panglima Militer maupun Menteri Pertahanan.

522. Banyak pihak di kalangan masyarakat internasional menganggap ide status politik Timor-Leste sebagai suatu masalah yang tertutup selagi Presiden Soeharto masih berkuasa. Dengan kepergiannya, dan dalam iklim reformasi di Indonesia, tiba-tiba tercipta ruang untuk diskusi.

523. Gagasan tentang status otonomi khusus bagi Timor-Leste bukanlah hal yang baru, akan tetapi pada zaman Soeharto tidak pernah dipertimbangkan secara serius. Barangkali tidak ada yang lebih tahu tentang hal ini daripada Menteri Luar Negeri, yang sudah lama menjabat, Ali

Alatas tentang berbagai masalah bagi negaranya di arena internasional yang ditimbulkan oleh posisi Indonesia dan berbagai tindakannya di Timor-Leste. Dia sebelumnya telah mengusulkan perubahan status Timor-Leste dalam Indonesia, dengan menawarkan otonomi khusus bagi Timor-Leste sebagai satu kemungkinan solusi. Soeharto menolak ide-idenya.⁶⁸¹ Pada tanggal 6 Juni 1998, komite Politik dan Keamanan dalam kabinet ini mendukung sebuah usulan untuk "otonomi luas" bagi Timor-Leste, dengan syarat masyarakat internasional mengakui kedaulatan Indonesia. Menteri Luar Negeri Alatas membawa usulan ini kepada Presiden Habibie pada tanggal 8 Juni dan kepada Kabinet pada tanggal 9 Juni. Presiden Habibie secara tak terduga mengumumkannya kepada media internasional pada tanggal 9 Juni.

524. Dalam waktu sembilan bulan, ide ini untuk menawarkan paket otonomi khusus pada Timor-Leste akan berubah menjadi penerimaan resmi Indonesia untuk melakukan tindakan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Timor-Leste.

CNRT dan kampanye diplomatik

525. Pintu menjadi terbuka bagi José Ramos-Horta di seluruh dunia setelah dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian, dan dia bekerja keras memanfaatkan hal ini untuk menggalang dukungan bagi kampanye diplomatik bagi kemerdekaan. Hal tersebut juga memberikan sebuah dimensi internasional pada pembelaan lantang Uskup Belo terhadap hak asasi rakyat Timor-Leste, dan sangat meningkatkan perhatian internasional kepada Timor-Leste.

526. Setelah pertemuan pada tahun 1997 dengan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, status Xanana Gusmão di mata dunia menguat dan ini diikuti prosesi para tamu penting ke sel penjara Cipinangnya selama 1998 dan 1999.

527. Pada bulan April 1998, pihak Resistensi meraih suatu tonggak sejarah dalam perkembangannya, ketika para pemimpin partai politik besar Timor-Leste dan juga berbagai organisasi non-politik, termasuk Gereja Katolik, bertemu di Peniche di Portugal dan membentuk CNRT. Xanana Gusmão terpilih sebagai Presiden, dengan Ramos-Horta sebagai Wakil Presiden dan utusan pribadinya. Pembentukan CNRT melengkapi perkembangan bertahap Resistensi dari sebuah partai tunggal dengan dasar Fretilin menjadi organisasi dengan basis luas termasuk para mahasiswa, Organisasi Non Pemerintah, dan kalangan Gereja Katolik.

528. Pembentukan CNRT memposisikan Resistensi dengan baik untuk menghadapi kejadian-kejadian yang berkembang cepat di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia khususnya. [Lihat Bab 7.1.: Hak Penentuan Nasib Sendiri]

Dampak Reformasi di Timor-Leste

529. Pengumuman Presiden Habibie tentang usulan status baru bagi Timor-Leste, ditambah optimisme tuntutan untuk reformasi, menciptakan dukungan kuat publik untuk kemerdekaan di wilayah tersebut.

530. Pada tanggal 9 Juni di Dili, pertemuan publik untuk membahas masa depan wilayah tersebut dihadiri oleh banyak perwakilan aspirasi Timor-Leste, termasuk para komandan gerilya dan pro-integrasi yang setia, para pemimpin CNRT, anggota masyarakat sipil dan gerakan klandestin. Juga hadir pada kesempatan itu Gubernur pro-integrasi, Abilio Soares, yang pidatonya tentang usulan status khusus bagi Timor-Leste tidak diterima dengan baik. Banyak menganggap ini sebagai tindakan setengah hati, dan pertemuan tersebut sepakat untuk menuntut diadakannya sebuah referendum supaya rakyat dapat menentukan masa depan mereka.

531. Pada tanggal 23 Juni, sebuah demonstrasi besar di Dili secara terbuka menyerukan kemerdekaan. Khawatir akan kemungkinan konsekuensi yang terjadi karena sikap sangat gamblang tersebut, Uskup Belo dan kepemimpinan CNRT segera mengimbau sikap yang lebih lunak, dan mengulang kembali keinginan mereka untuk sebuah periode transisi sebelum membahas kemerdekaan.

532. Sejak bulan Juni, berbagai kelompok mahasiswa^{*} secara berani memimpin debat publik yang mulai menggeliat, dan memimpin serangkaian demonstrasi besar baik di Timor-Leste maupun di Indonesia. Pada bulan Juli, Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor-Leste (ETSSC) yang baru saja dibentuk mengerahkan para mahasiswa untuk melakukan perjalanan ke seluruh Timor-Leste untuk melakukan sejumlah dialog tingkat desa, menjelaskan perkembangan terakhir dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Tanpa memperdulikan penentangan militer di beberapa daerah, mereka⁶⁸² mendengar beragam tuntutan kuat untuk penarikan mundur TNI dan untuk sebuah referendum.

533. Pada bulan September, dua Uskup Timor-Leste mengadakan pertemuan di Dare untuk mendorong rekonsiliasi antara para tokoh Timor yang mendukung integrasi dengan Indonesia dan yang mengupayakan kemerdekaan. CNRT secara terbuka menyatakan dirinya sebagai suatu lembaga publik yang sah pada bulan September, dan menempati sebuah kantor di Dili Selatan. Demonstrasi mahasiswa yang memprotes kehadiran militer dan menuntut sebuah referendum terjadi secara rutin selama periode ini. Keterbukaan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama masa pendudukan Indonesia. TNI di Timor-Leste tetap waspada, tetapi menahan diri dan tidak bertindak langsung melawan demonstrasi ini.

Munculnya Para milisi

534. Menjelang akhir tahun 1998, ketegangan mulai meningkat dan keterbukaan dari beberapa bulan sebelumnya mulai mendapat tekanan. Pada awal bulan Oktober sebuah kelompok pro-otonomi Timor menekan Gubernur untuk memaksa pengunduran diri para pegawai negeri yang bergabung dalam Forsarepetil, (Forum Sarjana Pro-Referendum dan Pembangunan Timor-Leste) sebuah kelompok pro-referendum kalangan akademisi dan pegawai negeri. Hal ini memicu demonstrasi besar selama dua hari di Dili menentang tindakan Gubernur. Basilio Araújo, seorang juru bicara pro-integrasi, kemudian menggambarkan pada Komisi latar belakang dari keputusan ini:

Kami sekitar 20 orang, kami yang berasal dari grup itu, dan kami menyebut diri kami pro-integrasi...Kami bertemu dengan Pak Abilio [Soares, Gubernur] dan mendesaknya untuk membuat sebuah dekrit mengenai orang-orang yang telah memihak pada kemerdekaan: 'Cukup, tanggalkan pakaian sebagai seorang pejuang kemerdekaan, dan jangan bekerja pada pemerintah, jangan bermuka dua.' Tn. Abilio membuat dekrit tersebut, tapi ditekan oleh pemerintah pusat dan kemudian menariknya kembali.⁶⁸³

535. Pada tanggal 8 Agustus penarikan mundur pasukan yang sangat dipublikasikan menyumbang pada persepsi bahwa situasi di Timor-Leste telah membaik. Indonesia mengklaim bahwa mereka hanya memiliki kurang dari 6000 serdadu di wilayah tersebut, dan konon telah menarik mundur pasukan khususnya (Kopassus), yang kerap dituduh bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat.⁶⁸⁴ Tetapi dokumen militer yang dibocorkan pada bulan itu membuktikan sebaliknya. Jumlah pasukan masih 21.540 orang, termasuk Kopassus, dan bukannya melakukan pengurangan pasukan besar-besaran seperti yang dilaporkan ke media, kekuatan militer TNI justru perlahan meningkat.⁶⁸⁵ Dokumen-dokumen tersebut

^{*} Renetil dan Impettu di Indonesia; ETSSC di Timor-Leste.

menunjukkan bahwa TNI mengembangkan jaringan kelompok paramiliter di sebagian besar distrik. Dua belas tim ditempatkan di sebelas distrik, yang sebagian besar di antaranya terkait dengan unit Kopassus. Kelompok-kelompok ini membentuk basis milisi yang dengan cepat direkrut dalam bulan-bulan berikutnya.⁶⁸⁶ Pihak militer kemudian menyangkal bahwa para milisi tersebut adalah bagian integral struktur formalnya.

536. Tanda pertama perilaku yang akan datang dari para anggota paramiliter ini, yang belakangan akan dikenal sebagai milisi, terjadi pada bulan November ketika ABRI dan anggota milisi Ablai, yang banyak di antaranya adalah pegawai negeri pemerintah daerah setempat, membalas serangan Falintil atas Koramil di Alas, Distrik Manufahi. Pada tanggal 9 November, Falintil membunuh tiga serdadu, menculik 13 prajurit, dan mencuri 36 senapan. Masyarakat mencari perlindungan ke Gereja Alas sesudah serangan tersebut. Pada tanggal 13 November ABRI membalas serangan Falintil dan wilayah tersebut diliputi kekerasan.⁶⁸⁷ Pihak militer Indonesia dan milisi memasuki gereja tersebut, dan memukuli mereka yang berada di dalam. Militer menahan penduduk sipil di seluruh wilayah itu untuk mencari Falintil. Komisi menerima kesaksian tentang penyiksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ABRI terhadap mereka yang ditahan.⁶⁸⁸ Paling tidak delapan orang terbunuh oleh ABRI atau milisi. Suatu penyelidikan ICRC menemukan sembilan orang yang tewas dalam serangan balasan tersebut, termasuk dua orang prajurit yang dibunuh oleh Falintil.⁶⁸⁹ Pembunuhan tersebut, yang terjadi setelah berbulan-bulan keterbukaan yang agak canggung, menimbulkan sejumlah protes keras di Dili. Setelah para mahasiswa menduduki gedung parlemen, sebuah tim pencari fakta segera dibentuk dari berbagai kelompok masyarakat sipil, tetapi tidak diperbolehkan masuk ke wilayah tersebut oleh pihak militer.⁶⁹⁰ Wartawan internasional melakukan perjalanan ke Alas dan mengamati anggota non-militer bersenjata menguasai daerah tersebut, yang mengindikasikan permulaan peran milisi sebagai garis terdepan kampanye militer melawan kemerdekaan.⁶⁹¹

537. Kelompok milisi telah lama hadir di Timor-Leste. Tetapi, milisi yang muncul pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999 sebagian besar terkait langsung dengan TNI bukan karena kesetiaan mereka pada *liurai*^{*} seperti kebiasaan sebelumnya.⁶⁹² Sebagian dari para milisi baru ini memiliki akar dalam pasukan bantuan militer[†] yang dibina TNI sejak akhir dasawarsa 1970an. Sebagian besar pemimpin milisi memiliki hubungan luas dengan Kopassus melalui beragam kelompok paramiliter lama di Timor-Leste.⁶⁹³ Contohnya adalah Joanico Césarino Belo, yang menjadi komandan milisi di wilayah Timur, Sektor A,[‡] yang sudah menjadi tenaga bantuan operasi (TBO) sejak masa kecilnya.⁶⁹⁴ Komandan Sektor B yang terkenal kejam, Eurico Guterres, memiliki latar belakang dalam paramiliter Gadapaksi pada dasawarsa 1990-an. Yang lainnya, Joni Marques dari Tim Alfa di Lautém, memiliki hubungan lama dengan Kopassus. TNI merekrut secara luas pada tahun 1998 dan tahun 1999 untuk membangun kepemimpinan inti ini.⁶⁹⁵ Anggota milisi lainnya termasuk anggota TNI dari Timor Barat dan Timor-Leste.⁶⁹⁶ Sebagian bergabung karena terpaksa. Yang lainnya ikut karena motivasi uang dan prestise (lihat Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas).

538. Peran militer dalam membentuk milisi-milisi ini segera menjadi jelas. Indikator penting adalah bahwa pejabat penting militer di Timor-Leste menghadiri acara pelantikan kelompok milisi.⁶⁹⁷ Para pemimpin milisi sendiri menyatakan bahwa TNI telah mempersenjatai mereka.⁶⁹⁸ Dan yang lebih meyakinkan lagi, para pejabat senior TNI[§] sendiri menyatakan bahwa mereka mempersenjatai berbagai kelompok tersebut.⁶⁹⁹ Jenderal Wiranto, Panglima ABRI mengakui keterlibatan TNI dalam milisi.⁷⁰⁰ Hubungan ini mulai terlihat jelas sejak akhir tahun 1998 ketika berbagai kelompok milisi mulai muncul. Dokumen militer belakangan memberikan bukti meyakinkan tentang pasokan senjata oleh TNI kepada milisi,⁷⁰¹ dan Tomás Gonçalves yang

^{*} Milisi di beberapa wilayah dibentuk dengan pengaruh keluarga *liurai*, contohnya keluarga Carvalho di Cassa.

[†] Ini termasuk Hansip, Ratih, Wanra, Kamra (Polisi), serta TBO – Tenaga Bantuan Operasi.

[‡] Pembagian sektor (A, B, dan C) mengikuti komando sektor tempur di bawah Kopassus yang membagi Timor-Leste menjadi tiga wilayah.

[§] Komandan Kodim Supardi pada 28 Januari, dan Komandan Kodam IX Adam Damiri pada 7 Februari. Mereka berdua diketahui mempersenjatai para milisi.

belakangan membelot dari milisi membenarkan keterlibatan unit intelijen Kopassus dan pejabat militer penting seperti Suratman, Sudrajat dan Damiri dalam perekrutan.⁷⁰²

539. Cepatnya para milisi tersebut muncul dan konsistennya perilaku mereka menunjukkan adanya kekuatan organisasi besar di belakang mereka.⁷⁰³ Ini adalah TNI, yang dalam iklim keterbukaan Reformasi membutuhkan sebuah pasukan yang dapat menyerang gerakan pro-kemerdekaan Timor-Leste yang terorganisasi dengan rapih. Salah satu alasan milisi lebih banyak dipersenjatai dengan senjata buatan sendiri adalah untuk menciptakan kesan bahwa milisi adalah gerakan spontan berbasis rakyat. Ini adalah sebuah muslihat besar, karena TNI memberikan senjata otomatis setidaknya bagi sebagian kelompok milisi serta berbagai dukungan logistik dan keamanan.⁷⁰⁴

Xanana Gusmão mengimbau toleransi

540. Pada akhir tahun 1998, meskipun meningkatnya ketegangan akibat kekerasan di Alas, penduduk Dili terus menyatakan secara terbuka hasrat mereka akan perubahan. Pada tanggal 12 November, warga melakukan demonstrasi publik pertama untuk mengenang pembantaian Santa Cruz. Malam itu, rakyat diam di rumah, dan menghiasi semua jalan kota Dili dengan ribuan lilin untuk mengenang orang yang meninggal. Pesan Tahun Baru Xanana Gusmão terfokus pada ide CNRT tentang otonomi transisional, dan mengusulkan menahan diri bagi suara-suara yang menginginkan referendum langsung. Dan yang paling penting, dia mengimbau toleransi menghadapi berbagai tekanan yang meningkat:

Mari kita berkonsentrasi untuk...meraih: diakhirinya kekerasan militer; sebuah iklim toleransi politik yang lebih besar. Pendirian ini bertujuan untuk mencegah lebih banyak korban Timor-Leste yang jatuh. Para penjajah mempersenjatai rakyat Timor-Leste dan menyuruh mereka untuk membunuh saudara-saudari mereka sendiri. Daripada membiarkan diri kita terhanyut dalam rasa marah, mari kita berusaha berpikir dalam sikap politik yang seimbang. Jika tidak, kita akan terjebak dalam permainan para penjajah; kita akan memperkuat argumen Indonesia bahwa Timor-Leste terancam sebuah perang saudara baru.⁷⁰⁵

Negosiasi tentang paket otonomi

541. Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas berkunjung ke New York untuk menyampaikan gagasan otonomi kepada Sekjen PBB Kofi Annan pada tanggal 18 Juni. Pada bulan Agustus, Indonesia menyetujui pembicaraan tiga phak bersama PBB dan Portugal tentang otonomi khusus. Utusan Pribadi Sekjen PBB untuk Timor-Leste, Duta Besar Jamsheed Marker, mengelola proses negosiasi, yang bertujuan mencapai kesepakatan tentang isi dari paket otonomi khusus sebelum akhir tahun. Hambatan utama tampaknya adalah pertanyaan apakah otonomi yang diusulkan merupakan sebuah tahap menuju penentuan nasib sendiri atau sebuah tujuan akhir. Portugal memandang otonomi sebagai sebuah transisi menuju tindakan penentuan nasib sendiri, yang sesuai dengan rencana yang dibentuk sejak lama oleh CNRM/CNRT. Indonesia memiliki perspektif berbeda, dan memandang otonomi sebagai sebuah konsesi akhir, yang akan menutup persoalan tentang Timor-Leste di arena internasional. Pembicaraan awal menghususkan pada isi dari paket otonomi tersebut bukan pada pertanyaan politik tersebut.

542. Dubes Marker juga berusaha melibatkan para pemimpin Timor-Leste ke dalam proses tersebut. Sejak penunjukkannya pada tahun 1997, Marker telah berusaha memperluas cakupan keterlibatan PBB lebih dari pembicaraan tiga arah dengan Portugal dan Indonesia. AIETD adalah hasil dari maksud ini, dan Marker telah mengembangkan hubungan kerja dengan para pemimpin

utama Timor. PBB melakukan konsultasi antara lain dengan Xanana Gusmão, José Ramos-Horta, Uskup Belo dan Uskup Nascimento tentang rincian cetak biru untuk otonomi yang dibuat untuk PBB.

543. Ketegangan di dalam Timor-Leste meningkat pada akhir tahun 1998. Di satu sisi ada dorongan rakyat untuk membuka dialog politik dan sebuah referendum; di sisi lain ada strategi militer untuk mengembangkan milisi pro-integrasi bersenjata untuk menghancurkan gerakan referendum. Hal tersebut menjadi semakin jelas bagi pemerintah utama internasional yang terlibat dalam masalah ini bahwa paket otonomi saja tidak akan menyelesaikan masalah.

544. Pada tanggal 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia John Howard menulis surat kepada Presiden Habibie, sebuah dokumen yang dianggap sangat mempengaruhi pemikiran Presiden Habibie. Sementara Perdana Menteri Howard menegaskan kembali bahwa Australia lebih suka Timor-Leste menjadi bagian dari Indonesia, dia memberi contoh Kesepakatan Matignon mengenai Kaledonia Baru Perancis dan menganjurkan bahwa sebaiknya Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan otonomi khusus dengan "mekanisme kajian" yang akan secara efektif menjadi referendum beberapa tahun ke depan:

Untuk itu, layak dipertimbangkan, sebuah cara menanggapi keinginan rakyat Timor untuk sebuah tindakan penentuan nasib sendiri dengan cara yang menghindari sebuah keputusan awal dan akhir mengenai tentang masa depan provinsi tersebut.⁷⁰⁶

545. Saran untuk menghindari solusi yang cepat dan final bagi Timor-Leste ini sejalan dengan PBB, yang menganjurkan periode otonomi lima sampai tujuh tahun. Tapi, ini dipandang oleh Indonesia sebagai sebuah perubahan kebijakan yang besar oleh pendukung internasionalnya yang paling setia, sebuah perubahan yang mengakui hak rakyat Timor untuk penentuan nasib sendiri. Ketika cerita tentang surat Australia tersebut sampai ke publik, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menjelaskan pada tanggal 12 Januari bahwa "kami lebih suka sebuah susunan dimana Timor-Leste memiliki tingkat otonomi yang tinggi tapi tetap menjadi bagian Indonesia secara hukum."⁷⁰⁷

546. Presiden Habibie dan Menteri Luar Negeri Alatas sangat menginginkan resolusi mengenai negosiasi dengan Portugal sebelum pemilihan parlemen Indonesia yang akan dilakukan pada tanggal 7 Juni 1999, yang dapat menghasilkan pengangkatan Presiden baru. Surat PM Howard yang asli dikirim ke Presiden Habibie pada tanggal 21 Januari. Presiden Habibie menulis sebuah catatan di pinggir yang berisi:

Jika, setelah 22 tahun, rakyat Timor-Leste tidak dapat merasakan persatuan dengan rakyat Indonesia...akan layak dan bijaksana, jika dengan sebuah keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Provinsi ke 27 Timor-Leste dapat dengan terhormat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷⁰⁸

547. Terdapat banyak spekulasi tentang penyebab perubahan Habibie, dan mungkin terlalu dibesar-besarkan surat Perdana Menteri dan perubahan kebijakan Australia. Tetapi, jelas bahwa Presiden Habibie menyadari sempitnya kesempatan untuk memberi dampak terhadap masalah yang tak berkesudahan ini, dan bahwa dia lebih terbuka pada pengaruh pandangan liberal internasional dibanding pendahulunya dan banyak orang-orang ini yang masih memegang posisi kuat di Indonesia.

⁷⁰⁶ Pada saat itu, Presiden Republik Indonesia tidak langsung dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).

548. Pada tanggal 27 Januari 1999, sebelum kerangka otonomi khusus dirampungkan, Indonesia mengumumkan perubahan kebijakannya: Indonesia akan memberi Timor-Leste kesempatan untuk menolak tawaran otonomi khusus tersebut. Jika rakyat Timor-Leste menolak paket otonomi tersebut, Indonesia akan mencabut undang-undangnya bulan Juni 1976 yang memasukkan wilayah tersebut ke dalam Republik Indonesia. Empat orang jenderal TNI yang kuat masuk dalam keanggotaan Kabinet Presiden Habibie. Adalah sesuatu yang luar biasa bahwa mereka menerima kebijakan ini, dan penjelasan yang mungkin adalah bahwa mereka yakin mayoritas pemilih Timor-Leste dapat diyakinkan untuk memilih melanjutkan integrasi dengan Indonesia.⁷⁰⁹

549. Sebuah pemungutan suara yang jelas akan memberi penyelesaian yang pasti pada permasalahan Timor-Leste, sebuah masalah yang telah mengganggu Indonesia sejak lama. Jenderal Wiranto mengusulkan tidak perlu ada periode transisi, pendapat yang juga dimiliki oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, yang mengatakan:

Kenapa Indonesia harus membayar, jika Timor-Leste tidak menghendakinya? Jika tawaran kami tidak bisa diterima, saya tidak akan memberi alternatif dimana mereka meminta 5-10 tahun dan kemudian referendum.⁷¹⁰

550. Xanana Gusmão dipindahkan dari penjara Cipinang yang dijaga ketat ke tahanan rumah pada tanggal 10 Februari 1999. Sementara masih ditahan dan dibatasi ruang geraknya untuk memainkan peran penuh untuk mencari solusi bagi Timor-Leste, dia menerima banyak pengunjung Timor-Leste, Indonesia dan tamu terkemuka internasional di rumah yang menjadi tempat tahanan di Salemba, Jakarta dan semakin diakui sebagai seorang negarawan internasional. Sementara itu masih terdapat tahanan dan narapidana politik Timor-Leste lainnya yang mendekam di berbagai penjara di Indonesia.

Teror Milisi yang makin meningkat

551. Beberapa minggu sebelum pengumuman tanggal 27 Januari oleh Presiden Habibie di Jakarta, lebih dari 4000 orang mengungsi di katedral Suai yang belum selesai dibangun.⁷¹¹ Mereka berusaha menghindari kekerasan yang dilakukan oleh sebuah kelompok milisi yang berbasis di Cassa (Ainaro), yang kemudian dikenal sebagai milisi Mahidi (Mati Hidup dengan Indonesia). Kelompok yang dipimpin oleh Cândia Carvalho, anak dari keluarga liurai lokal, melaksanakan sejumlah besar pembunuhan kejam yang diarahkan pada para pemimpin CNRT lokal. Salah satu yang paling kejam, pada tanggal 23 Januari 1999, di kota kecil Galitas, seorang perempuan hamil dibunuh, dan bayinya digorok keluar dari perutnya.⁷¹² Tiga hari kemudian, CNRT menulis kepada Sekjen PBB:

Memang benar bahwa banyak dari "pasukan-pasukan" ini adalah warga Timor-Leste. Yang tragis bagi kami adalah bahwa ini digambarkan sebagai perang saudara oleh pihak otoritas—rakyat Timor melawan rakyat Timor. Kami menyadari adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat kami. Kami juga menyadari mengapa perbedaan ini ada. Kami tidak memiliki sumber daya ataupun kekuatan untuk mengendalikan apa yang sedang terjadi.⁷¹³

552. Menyusul pembunuhan di Mauboke, (Maubara, Liquiça) dan menjelang pembunuhan di Gereja Liquiça, pada tanggal 5 April Xanana Gusmão mengeluarkan pernyataan kemarahan yang merestui 'perlawanan rakyat' melawan kekerasan milisi yang terus berlanjut.⁷¹⁴ Hari berikutnya milisi membunuh sebanyak enam puluh orang pengungsi di Gereja Liquiça, dengan kehadiran dan keterlibatan militer dan Brimob. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa, bagian tahun 1999) Pejabat senior TNI terlihat di gereja tersebut persis

sebelum kejadian tersebut.⁷¹⁵ Milisi kemudian membunuh tujuh orang di Cailaco (Bobonaro) pada tanggal 12 April. Setelah demonstrasi massal di depan kantor Gubernur di Dili dimana pemimpin Aitarak Eurico Guterres memerintahkan milisi untuk “menangkap dan membunuh (para pendukung kemerdekaan) bila perlu”,⁷¹⁶ milisi mengamuk di Dili. Di rumah Manuel Carrascalão mereka membunuh 12 orang.⁷¹⁷ Menteri Luar Negeri Irlandia David Andrews sedang melakukan pertemuan di Dili dengan Komandan Militer Timor-Leste Kolonel Tono Suratman pada waktu itu, dan melihat dia menerima laporan tentang pembantaian itu dan tidak melakukan apa-apa. Milisi juga menyerang dan membakar sejumlah kantor satu-satunya surat kabar di wilayah tersebut, *Suara Timor-Leste* (STT). Meskipun secara tradisional STT menjadi juru bicara kebijakan Indonesia, pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999, STT memberikan liputan yang relatif netral tentang kekerasan yang meningkat dan dukungan terhadap referendum, yang membuat marah para pendukung setia integrasi. Di tengah-tengah meningkatnya kekerasan pada bulan April, para pastor dan suster Gereja Katolik mengadakan parade perdamaian dengan membawa lilin menyala sepanjang jalan-jalan di Dili dalam upaya menenangkan situasi.

553. Dalam tiap kasus ini pembunuhan-pembunuhan tersebut mempunyai unsur yang sama yaitu dukungan langsung dan keterlibatan militer, pelakunya adalah milisi, sasarannya adalah para pendukung kemerdekaan, dan pembuangan mayat secara sistematis oleh militer yang menyulitkan penghitungan jumlah kematian yang pasti. Pola-pola ini sangat menunjukkan keterlibatan TNI dalam melaksanakan operasi.⁷¹⁸ Kekerasan ini dirancang untuk menciptakan ilusi sebuah konflik antara rakyat Timor-Leste bersenjata. Pembantaian Liquiçá dan Dili kemudian dijelaskan oleh Kolonel Suratman terjadi karena diprovokasi oleh serangkaian tembakan dari kalangan pendukung kemerdekaan.⁷¹⁹ Tapi penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada kejadian dimana para korban memiliki senjata.⁷²⁰

554. Pada tanggal 20 April, Jenderal Wiranto terbang ke Dili untuk mengawasi para pemimpin kemerdekaan dan otonomi Timor-Leste menandatangani perjanjian perdamaian untuk menghentikan kekerasan. Ini menutupi fakta bahwa kekerasan tersebut adalah pembunuhan orang-orang sipil tidak bersenjata yang sedang mencari perlindungan, dan sama sekali bukan konflik antara dua kelompok bersenjata. Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) dibentuk, dimana di dalamnya juga terdapat pihak militer, polisi, dan pemerintahan sipil.⁷²¹ Wakil CNRT dan Falintil juga dilibatkan.

Kesepakatan 5 Mei

555. PBB menyerahkan proposal berisi rencana otonomi pada bulan Februari 1999, yang disebut SARET (Special Autonomous Region of East Timor). Indonesia akan tetap mengendalikan masalah luar negeri, mata uang, pertahanan dan keuangan, sementara *East Timorese Regional Council* akan memiliki wewenang luas dalam membuat undang-undang dan mengendalikan polisi dan pengadilan. TNI hanya akan digunakan untuk pertahanan eksternal, selain itu akan di tempatkan di barak-barak.

556. Pada bulan Maret, Indonesia memutuskan pemungutan suara langsung. Indonesia menginginkan keputusan tersebut tidak dapat disangkal dan final. Pemungutan suara akan disebut ‘Konsultasi Rakyat’, menghindari penggunaan kata referendum yang menyatakan secara tidak langsung penentuan nasib sendiri dan pilihan berdaulat bagi rakyat Timor-Leste, yang menurut Indonesia telah terjadi melalui petisi Pemerintahan Sementara Timor-Leste pada tahun 1976, tentang integrasi dan Undang-Undang no. 7 tahun 1976, tentang integrasi Timor-Leste ke Indonesia sebagai provinsi ke 27.

557. Dengan makin memburuknya situasi keamanan dialog yang disponsori PBB antara Portugal dan Indonesia pada tanggal 22 April membahas sejumlah masalah keamanan untuk melucuti senjata milisi, mengurangi jumlah anggota TNI, membatasi Falintil di barak-barak, dan penetapan polisi sipil. Tetapi Menteri Luar Negeri Alatas menolak untuk menyetujui hal-hal spesifik.⁷²² Baik Amerika Serikat maupun Australia memberitahu Perwakilan Khusus Sekretaris

Jenderal, Jamsheed Marker,⁷²³ untuk tidak membahayakan negosiasi dengan penekanan yang terlalu besar pada keamanan.

558. Pada tanggal 5 Mei Indonesia dan Portugal menandatangani sejumlah persetujuan tentang implementasi pemungutan suara. Indonesia menginginkan hasil sebelum Rapat MPR pada bulan September agar dapat disahkan dalam undang-undang Indonesia. Tanggal yang disetujui adalah 8 Agustus. Hal ini memberikan jadwal ketat dan kesempatan yang terbatas. Kata-kata yang disetujui tentang pemungutan suara meminta rakyat Timor apakah mereka menerima atau menolak otonomi khusus yang ditawarkan bagi Timor-Leste dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian tersebut menekankan “sebuah pemungutan suara yang langsung, rahasia dan umum” (artikel 1), dan bahwa “tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menjaga perdamaian dan keamanan...sehingga sebuah referendum dapat berjalan dalam suasana yang bebas intimidasi, kekerasan atau campur tangan dari kedua belah pihak.” (artikel 3). Mereka juga mendefinisikan sebuah periode interim sesudah pemungutan suara, dengan kehadiran PBB yang mencukupi di Timor-Leste. Pedoman SARET merupakan bagian dari perjanjian tersebut, dimana PBB bertanggungjawab untuk menjalankan kampanye informasi tentang mereka. Baik Indonesia maupun Portugal dilarang untuk berkampanye untuk opsi apapun.

Pengaturan keamanan dalam Kesepakatan 5 Mei

559. Kesepakatan 5 Mei gagal mendefinisikan tanggungjawab keamanan secara memadai. Polisi Indonesia secara formal diberi tanggungjawab untuk keamanan. Polisi baru saja dipisahkan dari militer, dan masih berada di bawah komando Jenderal Wiranto, Menteri Pertahanan. Perjanjian tersebut mengalokasikan 300 orang polisi sipil internasional tak bersenjata untuk mendukung sejumlah tim elektoral PBB, dan kemudian ditambah dengan 50 orang perwira penghubung, yang dianggap lebih layak untuk berhubungan dengan TNI.

560. Kesepakatan tersebut menuntut “kenetralan absolut TNI,” tetapi gagal memaksa TNI mengurangi jumlahnya atau melucuti senjatanya. Mereka menyatakan, secara samar, bahwa KPS yang baru dibentuk bertanggungjawab untuk peletakan senjata⁷²⁴ José Ramos-Horta, menyadari kekurangan pengaturan keamanannya, tidak menghadiri penandatanganan kesepakatan tersebut. Dia sebelumnya telah memperingatkan PBB, dalam sebuah surat pada Kofi Annan, bahwa Timor-Leste tidak bisa merasa aman “dengan ‘pengamanan’ yang disediakan oleh tentara yang sama dan kelompok kriminal yang telah merubah negara ini menjadi sebuah neraka.”⁷²⁵ PBB tidak menyadari bahaya dari pengaturan keamanan ini, dan Sekretaris Jenderal menulis ke Indonesia mempertanyakan sejumlah kekhawatiran. Dia menunjukkan kesiapannya untuk membatalkan pemungutan suara jika keamanan tak dapat memadai. Tetapi surat ini tidak resmi dan syarat-syaratnya tidak disetujui oleh Indonesia. Hal ini melemahkan PBB selama proses tersebut. Ian Martin, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal kemudian menulis bahwa meskipun dengan susunan keamanan yang lebih ketatpun “PBB masih akan menghadapi dilema yang akan muncul: apakah melanjutkan atau tidak dalam kondisi-kondisi keamanan yang jelas-jelas melanggar perjanjian Indonesia.”⁷²⁶

561. Pada tanggal 5 Mei Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Johnny Lumintang mengirim telegram ke komando Daerah Militer Bali (Kodam IX Udayana) meminta dilakukannya persiapan rencana evakuasi bagi Timor-Leste. Ini menghasilkan rencana pasca pemungutan suara pihak polisi dan militer untuk, antara lain, mengevakuasikan hampir seperempat juta orang dari Timor-Leste. Rencana tersebut menunjukkan antipati TNI terhadap beragam aktor masyarakat sipil, termasuk para pemimpin kemerdekaan dan para mahasiswa, Gereja, pengamat internasional dan PBB, yang jelas bertentangan dengan netralitas yang diwajibkan oleh

⁷²³ Rencana-rencana operasional termasuk Operasi Cabut [yang gagal mencapai tujuannya]; Operasi Wira Dharma 99 yang dilaksanakan oleh Korem, dan Operasi Hanoi Lorosae II yang dilaksanakan oleh Polisi. [Koleksi dokumen Yayasan Hak].

Kesepakatan 5 Mei. Baik polisi maupun TNI tidak memberi tahu PBB tentang adanya rencana ini sampai beberapa saat menjelang pemungutan suara.⁷²⁷

3.20 Konsultasi Rakyat

Tinjauan

562. Staf PBB mulai mendarat di Timor-Leste pada akhir bulan Mei 1999, untuk membentuk Misi Perserikatan Bangsa di Timor-Leste (UNAMET). Selama bulan Juni, staf elektoral internasional UNAMET, polisi sipil dan pejabat penghubung militer ditempatkan di ketigabelas kabupaten di wilayah tersebut. Hanya ada waktu kurang dari empat bulan untuk menghadapi Konsultasi Rakyat.

563. Tingkat tindak kekerasan yang meningkat pada bulan April, menjadi agak mereda dengan kedatangan staf PBB dan semakin banyaknya kehadiran rombongan media massa luar negeri dan pengamat Konsultasi Rakyat. Meski demikian, mereka yang bertanggung jawab terhadap pembantaian pada bulan April masih berkeliaran dan ketegangan masih tinggi. Kelompok militan di seluruh wilayah masih didukung oleh Militer dan Polisi Indonesia dan ada upaya untuk mengesahkan keberadaan mereka dalam sistem pemerintahan militer Indonesia.

564. Upaya nyata untuk mendamaikan perwakilan yang pro-kemerdekaan dan pro-otonomi oleh tokoh-tokoh Timor-Leste, gagal membuahkan hasil, sebagian penyebabnya karena upaya tersebut tidak menyinggung peran TNI dalam tindak kekerasan yang terjadi. Pasukan Falintil sendiri masuk ke barak-barak mereka. Sebaliknya, pasukan TNI dan milisi pro-otonomi tidak dikembalikan ke barak. Pelucutan senjata para milisi sebelum Konsultasi Rakyat lebih bersifat seremonial ketimbang kenyataan sebenarnya.

565. UNAMET menunda dimulainya pendaftaran pemilih atas alasan keamanan pada bulan Juni, dan Ian Martin terbang ke Jakarta untuk membicarakan masalah ini dengan Panglima Besar TNI, Jenderal Wiranto. Pendaftaran pemilih pun dilaksanakan, dan dalam waktu 22 hari sudah terdaftar sebanyak 451.792 pemilih.⁷²⁸

566. Hampir 40.000 orang mengungsi akibat tindak kekerasan yang terjadi sebelum kedatangan UNAMET, dan karena intimidasi milisi pengungsian terus berlanjut hingga beberapa minggu menjelang pemilihan. Kebanyakan para pengungsi berasal dari bagian barat kabupaten Bobonaro, Covalima dan Liquiçia. Sebagian pengungsi lari ke Timor Barat sebelum Konsultasi Rakyat. Dalam situasi yang tegang dan kadang-kadang diwarnai kekerasan tersebut kampanye umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kelompok pro-otonomi menggelar sejumlah rapat akbar. Sedang pendukung pro-kemerdekaan hanya sekali mengadakan rapat akbar, di ibukota pada hari terakhir masa kampanye.

567. Pada awalnya dijadwalkan pada tanggal 8 Agustus, Konsultasi Rakyat diundur ke tanggal 30 Agustus. Pada hari Konsultasi Rakyat itu para pemilih telah memadati semua tempat pemungutan suara di seluruh wilayah jauh sebelum jam dimulainya pemungutan suara. Hal yang luar biasa, sebanyak 98,6 persen pemilih terdaftar mendatangi tempat pemungutan suara. Setelah memberikan suara, para pemilih bergegas kembali ke rumah, yang mencerminkan betapa tegangnya situasi saat itu.

568. Suara dibawa ke Dili untuk dihitung. Di sejumlah tempat, kekerasan terhadap staf PBB dan pendukung pro-kemerdekaan terjadi menjelang berakhirnya hari pemilihan. Selama hari-hari setelah Konsultasi Rakyat, serangan yang dilakukan oleh milisi pro-otonomi semakin meningkat. Di tengah ancaman tindak kekerasan, UNAMET mengumumkan hasil Konsultasi Rakyat pada pagi hari tanggal 4 September. Sebanyak 78,5 persen pemilih secara tegas menolak usulan

otonomi khusus dalam wadah Republik Indonesia, dan hanya 21,5 persen yang memilih otonomi khusus.

Penempatan UNAMET

569. Petugas PBB mendarat di Timor-Leste beberapa saat setelah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei untuk menilai situasi dan bantuan yang dibutuhkan misi pemilihan. Staf UNAMET mulai bekerja pada akhir bulan Mei, dan pada tanggal 4 Juni bendera PBB dikibarkan di kantor PBB di Dili. Staf UNAMET berdatangan selama bulan Juni, yang terdiri dari petugas pemilihan sipil, polisi sipil tak-bersenjata dan perwira-penghubung militer dari negara-negara di seluruh dunia. Petugas warga Timor yang berjumlah sekitar 4000 pada hari pemungutan memainkan peranan penting sebagai petugas penterjemah, administrasi dan logistik, serta staf pendukung dalam kegiatan pendaftaran dan pemungutan suara. Mereka bekerja di bawah pimpinan Ian Martin yang merangkap jabatan sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Konsultasi Rakyat di Timor dan Ketua Misi PBB untuk Timor. (UNAMET).[†] Konsultasi Rakyat pada awalnya ditetapkan tanggal 8 Agustus, sehingga jadwal pelaksanaannya menjadi sangat ketat.

Komisi Pemilihan

570. Kesepakatan 5 Mei menetapkan adanya Komisi Pemilihan yang independen. Sekretaris Jenderal PBB menunjuk tiga ahli internasional terkemuka untuk Komisi tersebut.[‡] Komisi tersebut benar-benar independen dari UNAMET dan PBB di New York, dan bertanggung jawab untuk memastikan setiap tahap Konsultasi Rakyat Umum tersebut. Komisi juga merupakan wasit terakhir atas semua keluhan atau tentangan terhadap proses tersebut.

571. Anggota komisi tiba di Dili sesaat setelah dimulainya masa pendaftaran dan terus mengamati setiap fase proses Konsultasi Rakyat.

Pilihan

572. Pertanyaan yang diajukan kepada orang Timor dalam kertas suara dibagi menjadi dua bagian, di mana pemilih diminta untuk memilih satu opsi. Pilihan didasarkan penerimaan atau penolakan terhadap tawaran paket otonomi khusus, yang didasar pada Wilayah Otonomi Khusus yang diusulkan atau dikenal dengan nama SARET. Kertas suara berbunyi:

Apakah anda menerima tawaran otonomi khusus untuk Timor-Leste dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ? atau “Apakah anda menolak tawaran otonomi khusus untuk Timor-Leste, yang akan mengakibatkan Timor-Leste berpisah dari Indonesia?”

[†] Personel UNAMET Internasional terdiri dari tim pemilihan yang bermaskas di Dili dan delapan petugas regional yang dijabat oleh 28 staf profesional dan sekitar 500 sukarelawan PBB, 275 orang polisi. 15 pejabat politik, 9 petugas informasi umum, 271 staf administrasi dan staf pendukung, dan 16 petugas keamanan, semuanya berasal dari lebih 70 negara. Sebelumnya yang tidak termasuk dalam misi adalah sebanyak 50 perwira penghubung-militer yang diikutkan pada bulan Juni, setelah pengakuan internasional terhadap peran utama TNI dan pentingnya upaya untuk mempengaruhi mereka. Lihat, Martin, *Self Determination In East Timor*, hal. 38-39 dan hal. 41-42.

[‡] Ian Martin telah bekerja untuk PBB dan organisasi internasional lainnya pada sejumlah jabatan senior dari 1985 sampai 1999. Ia adalah Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional tahun 1986-1992, dan sebelumnya Ketua Departemen Peneliti Kawasan Asia Pasifik di Amnesti. Ian Martin memberi kesaksian kepada Komisi mengenai periode UNAMET pada acara dengar pendapat nasional mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, tanggal 15-17 Maret 2003.

[‡] Hakim Joham Kriegler (Ketua Komisi Pemilihan Afrika Selatan) yang memimpin Komisi, Pat Bradley (Pejabat Pemilihan untuk Irlandia Utara) dan Bong-Scuk Shon (Ketua Komisi Pemilihan Nasional Republik Korea Selatan).

573. Indonesia dan Portugal dilarang keras oleh Kesepakatan 5 Mei untuk mendukung salah satu opsi tersebut. Mandat UNAMET meliputi kewajiban untuk memberikan penjelasan umum kepada rakyat Timor-Leste tentang rincian tawaran otonomi khusus tersebut. Hal ini dilakukan melalui televisi, radio dan selebaran.⁷²⁹

Koordinasi Pemerintah Indonesia untuk Konsultasi Rakyat

574. Indonesia membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor-Leste (Satgas P3TT), yang bertanggung jawab terhadap Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta. Pihak militer dalam Satuan Tugas ini diwakili oleh Jenderal Zacky Anwar Makarim, pejabat TNI paling senior di Timor-Leste selama Konsultasi Rakyat. Satuan Tugas ini adalah penghubung pertama bagi UNAMET, yang stafnya mengadakan rapat hampir tiap hari dengan anggota Satuan Tugas.⁷³⁰

Kehadiran Masyarakat Internasional di Timor-Leste

575. Dengan kehadiran PBB di Timor-Leste, masyarakat internasional mengalir deras ke wilayah yang selama ini merupakan kawasan tertutup bagi mereka. Rombongan media massa internasional meliput persiapan Konsultasi Rakyat, dan wakil surat kabar dan jurnal internasional terkemuka juga berada di sana. UNAMET memberikan izin kepada sekitar 600 wartawan dalam Konsultasi Rakyat tersebut.⁷³¹

576. Sejumlah pemerintah negara-negara asing kunci melakukan pemantauan diplomatik ketat atas situasi di Timor-Leste selama periode UNAMET tersebut. Amerika Serikat membentuk cabang konsulat dari Kedutaan Besarnya di Jakarta dan delegasi Kongres Amerika mengunjungi Timor-Leste bulan Agustus. Australia khususnya menempatkan staf konsulatnya dalam jumlah yang besar di Dili.

577. Portugal dan Indonesia mengirim tim pemantau yang masing-masing berjumlah sekitar 50 anggota, yang berkeliling di seluruh kawasan selama pendaftaran, kampanye dan persiapan terakhir menjelang pemilihan.⁷³² Mereka mengawasi pada hari Konsultasi Rakyat di sejumlah tempat pemungutan suara di seluruh wilayah termasuk penghitungan suara yang dilakukan di Dili. Selain pemantau resmi dari Portugis dan Indonesia tersebut, UNAMET menyiapkan sekitar 2.300 pemantau resmi, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi peraturan tata tertib yang memastikan kenetralan mereka. Hampir 500 pemantau internasional datang bersama delegasi pemerintah mereka, seperti dari Australia, Brazil, Kanada, Chili, Irlandia, Selandia Baru, Spanyol dan Uni Eropa. Selain itu, hadir dalam jumlah besar wakil organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah baik dari dunia internasional, Indonesia maupun Timor. Dua LSM, yakni Carter Center dan IFET (Federasi Internasional untuk Timor), membentuk berbagai tim pemantau di tingkat kabupaten.⁷³³

578. Kehadiran masyarakat internasional ini belum pernah terjadi dalam sejarah Timor-Leste. Selama masa 25 tahun kehadiran Indonesia di sana tidak dapat dibayangkan bahwa kawasan tersebut akan begitu terbuka bagi masyarakat internasional. Setelah berbulan-bulan terjadi tindak kekerasan berdarah terhadap masyarakat sipil hingga menjelang Kesepakatan 5 Mei, ketika nyaris tidak ada masyarakat internasional di Timor-Leste, keberadaan masyarakat internasional di seluruh kawasan tersebut memastikan tingkat pemantauan yang mungkin berperan besar terhadap berkurangnya serangan yang dilakukan oleh milisi atau TNI.

Pemantau dari Timor-Leste dan Indonesia

579. UNAMET memberikan izin bagi sekitar 1700 pemantau dari LSM Timor-Leste dan Indonesia untuk mengawasi Konsultasi Rakyat. Banyak di antara mereka berasal dari organisasi mahasiswa dan aktivis, akan tetapi mereka semua harus mematuhi tata tertib UNAMET untuk

pemantau resmi untuk menjamin kenetralan mereka.⁷³⁴ UNAMET mengizinkan CNRT dan UNIF (Front Bersama untu Otonomi Timor) untuk menunjuk pemantau, yang dikenal sebagai wakil partai, untuk mengawasi Konsultasi Rakyat dan penghitungan suara.

Pengamanan untuk Konsultasi Rakyat

580. Situasi keamanan yang rawan di seluruh wilayah tetap menjadi ancaman yang paling besar bagi proses Konsultasi Rakyat. Meski operasi militer besar oleh militer Indonesia dan milisi tidak mungkin terjadi tanpa diketahui masyarakat internasional, militer Indonesia tidak melucuti senjata milisi atau pun melarang kehadiran mereka yang menakutkan di tengah masyarakat. Setelah pembantaian massal pada bulan April di Gereja Liquiça dan di rumah Manuel Carrascalao di Dili, tidak ada upaya untuk menyelidiki dan menahan mereka yang bertanggung jawab. Tiadanya sanksi hukum atas tindak kejahatan yang terjadi di akhir tahun 1998 dan awal 1999 masih tetap berlangsung, meskipun PBB dan masyarakat internasional hadir di sana.

581. Kesepakatan 5 Mei memberikan tanggung jawab formal kepada Polisi Indonesia untuk memastikan keamanan selama Konsultasi Rakyat. Pengaturan ini ternyata sangat tidak memadai. Masalah kelembagaan utamanya adalah status subordinasi Polri terhadap TNI. Meski terdapat pemisahan kelembagaan antara komando TNI dengan Polri sejak bulan April 1999, keduanya masih di bawah kendali Menteri Pertahanan, Jenderal Wiranto. Ada budaya yang berakar kuat perihal dominasi TNI terhadap Polri dalam berbagai masalah operasional. Keberadaan TNI dalam jumlah yang besar di seluruh wilayah Timor-Leste hingga ke tingkat masyarakat memberikan tekanan yang besar kepada polisi dalam kapasitasnya untuk bertindak secara mandiri sebagai penjaga hukum dan ketertiban.

582. Polisi secara konsisten terbukti tidak mampu atau tidak berminat untuk mengendalikan kekerasan yang terjadi selama Konsultasi Rakyat. Alasan lain atas hal ini adalah kehadiran dalam jumlah besar polisi anti huru-hara, yakni Brimob, yang terkenal dengan kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan di Timor-Leste selama dasawarsa 1990-an. Jumlah polisi, khususnya jumlah Brimob, selama periode Konsultasi Rakyat bertambah hingga menjadi 8000 personel.⁷³⁵ Polisi secara umum gagal untuk merespon secara cepat kekerasan yang dilaporkan atau menahan para pelaku kejahatan. Hal ini memberi keleluasaan kepada mereka yang melakukan tindak kekerasan dan intimidasi di seluruh wilayah. Contoh nyata hal ini adalah ketika polisi gagal bertindak terhadap serangan yang dilakukan oleh milisi Besi Merah Putih (BMP) terhadap konvoi kemanusiaan pada tanggal 4 Juli, meski secara khusus polisi telah ditugaskan untuk memberikan perlindungan.⁷³⁶ Lebih celaka lagi, polisi secara langsung dan berulang-ulang terlibat mendukung kekerasan yang dilakukan oleh milisi. Contoh paling nyata adalah pembunuhan Bernardino Augusto Guiteres pada tanggal 26 Agustus 1999 yang ditembak mati oleh Brimob di Becora, Dili, sementara para milisi mengamuk tidak jauh dari sana.⁷³⁷

583. Pejabat-Penghubung Militer UNAMET (MLO) tidak dapat memperoleh informasi yang akurat dari TNI mengenai jumlah tentara dan penempatan mereka, meskipun diyakini bahwa jumlah TNI di Timor-Leste lebih dari 15.000 personel.⁷³⁸ Meski Xanana Gusmão terus berupaya bernegosiasi agar TNI mengurangi jumlah tentara dan menarik sisa pasukan ke barak kabupaten, Militer Indonesia masih terus ditempatkan hingga di tingkat desa di seluruh kawasan Timor-Leste.⁷³⁹

584. Kesepakatan 5 Mei tidak memuat ketentuan langsung mengenai masuknya TNI, milisi atau Falintil ke barak, atau pun pelucutan senjata mereka. Tetapi hal ini diserahkan kepada Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) yang dibentuk oleh Jenderal Wiranto pada tanggal 21 April setelah terjadinya pembunuhan massal di Liquica dan Dili pada bulan itu. KPS bertanggung

⁷³⁴ KPS terdiri dari dua anggota CNRT/Falintil dan dua pro-integrasi, yang digambarkan sebagai pihak yang berkonflik, bersama dengan anggota militer Indonesia, polisi dan pemerintah setempat. Tidak ada wakil masyarakat sipil dan PBB

jawab “dengan bekerja sama dengan PBB, (untuk) menyusun peraturan tata tertib yang harus ditaati oleh semua pihak, selama periode sebelum dan sesudah Konsultasi Rakyat, untuk peletakan senjata dan mengambil langkah-langkah untuk melakukan perlucutan senjata“. KPS terbukti tidak efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya, meski anggota Komisi telah menandatangani Kesepakatan pada tanggal 18 Juni bahwa kedua belah pihak akan menghentikan semua tindak kekerasan dan menyerahkan semua senjata kepada pihak yang berwenang.⁷⁴⁰

Kekerasan oleh TNI-Milisi: Juni-Juli

585. Banyak sekali bukti yang ada menggambarkan TNI yang memberi pengarahan kepada kampanye pro-otonomi dan kekerasan oleh para milisi.⁷⁴¹

586. Setelah Kesepakatan 5 Mei, TNI menggambarkan milisi sebagai kelompok pertahanan sipil. Bupati Dili mendirikan Pam Swakarsa (Pengamanan Swakarsa) pada tanggal 17 Mei 1999. Keputusan ini menyebutkan bahwa Gubernur, Komandan Korem (Danrem), dan Kepala Kepolisian Wilayah sebagai penasihat utama Pam Swakarsa, dan Eurico Guterres sebagai “Komandan Operasional”. Di antara 2.650 anggota Pam Swakarsa yang terdaftar di Dili, 1.521 orang di antaranya adalah anggota Aitarak.⁷⁴² Ini memberikan tingkat keabsahan tertentu bagi milisi, yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki.⁷⁴³ Gambaran yang secara luas dibentuk oleh mereka adalah Timor-Leste akan menjadi “lautan api” jika orang Timor-Leste memilih merdeka. Sebagai petunjuk atas hal ini jauh-jauh hari sebelum referendum, pimpinan TNI di Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman, dalam wawancara dengan TV Australia dalam program tayang *Sunday* mengenai peristiwa terkini, pada bulan Juni, mengatakan:

Saya ingin menyampaikan pesan ini kepada anda. Apabila pihak pro kemerdekaan menang, tidak hanya pemerintah Indonesia yang harus menghadapi hal-hal yang mengikutinya. PBB dan Australia juga harus menyelesaikan persoalan ini dan yah, jika ini terjadi, maka tidak akan ada pemenang. Semuanya akan dihancurkan. Timor-Leste akan musnah. Akan lebih buruk dari 23 tahun yang lalu.⁷⁴⁴

587. Komisi mendengarkan kesaksian dari Ian Martin atas bukti yang dikumpulkan oleh staf UNAMET mengenai keterkaitan antara TNI dengan pemerintah daerah dan kelompok milisi. Ia menulis:

Dari staf kita yang masuk ke sejumlah kabupaten dan kecamatan, kita menjadi lebih paham tentang kegiatan milisi. Kita jadi makin mengerti bahwa para milisi telah dibentuk, dipersenjatai dan diperintah oleh TNI, dan memiliki hubungan dengan pemerintah setempat. Kita secara langsung mendapati milisi dilatih dan diperintah oleh TNI dan kami mengatakan hal tersebut secara terbuka.⁷⁴⁵

Dare II

588. Pada tanggal 25-30 Juni, Uskup Belo dan Nascimento melakukan upaya lebih lanjut untuk mempertemukan warga Timor pro-integrasi dan pro-kemerdekaan. Pertemuan Perdamaian dan Rekonsiliasi Dare II ini diadakan di Jakarta, yang memungkinkan Xanana Gusmão ikut serta

yang tidak disertakan. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, Komnas HAM, juga termasuk KPS. Lihat Martin, *Self Determination*, hal. 30 dan 70.

dalam pertemuan ini. Ini pertama kali sejak tahun 1975 ia dapat bertemu dengan José Ramos-Horta yang diizinkan datang bersama-sama dengan wakil warga Timor pro-kemerdekaan di pengasingan. Sementara diskusi diadakan dalam suasana yang hangat, pertemuan tidak menetapkan rencana mengenai tindakan untuk melanjutkan dialog yang berkelanjutan antara berbagai pihak dalam upaya mengurangi permusuhan dan penggunaan kekerasan.

589. Serangkaian serangan milisi di Timor-Leste terjadi setelah pertemuan Dare II tersebut. Pada tanggal 29 Juni Milisi Dadarus Merah Putih menyerang kantor UNAMET di Maliana, dan pada tanggal 4 Juli milisi Besi Merah Putih menyerang konvoi kemanusiaan antara Liquiça dan Dili.⁷⁴⁶ Ian Martin mengatakan kepada Komisi mengenai pertemuan rutin UNAMET dengan anggota sipil dan militer Satuan Tugas Indonesia, di mana ia bersama rekan kerjanya secara terus-menerus mengungkapkan keprihatinannya. Ia mengatakan kepada CAVR bahwa pada tanggal 7 Juli, setelah serangan tersebut, ia terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan Jenderal Wiranto untuk memberikan bukti secara langsung yang didapat PBB mengenai kaitan antara TNI dan milisi.⁷⁴⁷

590. Kekerasan dan keterlambatan yang disebabkan oleh milisi menyebabkan adanya kegiatan diplomatik yang tinggi yang pada akhirnya berhasil memaksa pihak Indonesia untuk meningkatkan situasi keamanan di sana. Pada tanggal 12 Juli, Satuan Tugas Indonesia berkunjung ke Timor-Leste, dengan ditemani Jenderal Wiranto. Dalam beberapa hari kekerasan berkurang dan, sambil menekankan bahwa pemilihan dapat ditunda sewaktu-waktu, Sekretaris Jenderal PBB memberikan persetujuannya bahwa pemilihan dapat dilangsungkan.⁷⁴⁸

Pendaftaran Pemilih

591. Kesepakatan 5 Mei menetapkan tanggal 16 Juli sebagai hari terakhir dimulainya pendaftaran pemilih. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mengadakan sidang pada bulan September dan hanya MPR saja yang memiliki wewenang untuk mengesahkan Undang-Undang tentang hasil Konsultasi Rakyat tersebut. Agar hal ini dapat terwujud, maka pemilihan harus dilaksanakan akhir Agustus. Di bawah tekanan internasional yang semakin kuat, pendaftaran pemilih dapat dimulai tanggal 16 Juli.

592. Tanggal 20 Juli, Sekretaris Jenderal Kofi Annan melaporkan kepada Dewan Keamanan:

Aktivitas milisi, yang telah menyebabkan banyak warga Timor mengungsi sehingga mereka tidak mendapatkan kebebasan dan keamanan, yang nyata-nyata bermaksud untuk mempengaruhi pilihan politik, merupakan tantangan yang paling mendasar terhadap proses Konsultasi Rakyat yang bisa diterima.⁷⁴⁹

593. Sekretaris Jenderal juga mengatakan bahwa kegiatan CNRT telah dibatasi, akses bagi media independen terbatas, dan kampanye pro-otonomi telah dimulai sebelum waktu yang telah ditentukan, dan pegawai pemerintah menggunakan jabatan dan dana untuk melakukan kampanye pro-otonomi, dan pegawai negeri sipil ditekan untuk memilih pro-otonomi.⁷⁵⁰

594. Iklim ketakutan yang diciptakan oleh kelompok milisi dan kelompok pro-otonomi menyebabkan 40.000 orang mengungsi pada bulan Juni.⁷⁵¹ Karena terus berlangsungnya tindak kekerasan maka jumlah pengungsi bertambah menjadi 60.000 pertengahan pada bulan Juli (Lihat Bab 7.3.: Pemindahan Paksa dan Kelaparan, seksi tahun 1999). Beberapa di antara mereka adalah pemimpin pro-kemerdekaan yang rumah dan desanya menjadi sasaran. Banyak pengungsi yang semata-mata menghindari tindak kekerasan dan intimidasi. Beberapa orang mencari perlindungan di kota yang agak besar di Timor-Leste, sementara yang lain mencari perlindungan ke Timor Barat. Dalam situasi keamanan yang rawan, kampanye pendidikan

pemilih oleh UNAMET menekankan pada kerahasiaan pemungutan suara dan janji PBB yang akan tetap berada di Timor-Leste setelah Konsultasi Rakyat.

595. Meski terdapat permasalahan dan keterlambatan tersebut pendaftaran pemilih oleh UNAMET tidak dapat mendapat hambatan, dan 451.792 pemilih bisa didaftar, baik di Timor-Leste maupun di luar negeri. Hal ini jauh melampaui perkiraan, dan menunjukkan tekad rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib politik mereka meski harus menghadapi intimidasi dan kekerasan. Komisi pemilihan menentukan bahwa proses pendaftaran sah, yang menjadi dasar yang kuat untuk menyelenggarakan Konsultasi Rakyat.⁷⁵²

Kampanye

Kelompok Pro-Kemerdekaan

596. Dalam situasi ketakutan yang secara terus-menerus diciptakan oleh milisi selama awal tahun 1999, pimpinan CNRT memilih melakukan kampanye secara diam-diam. Mereka yakin bahwa rasa nasionalisme warga Timor yang telah dibangun selama 24 tahun masa resistensi terhadap pendudukan Indonesia membuat kampanye pro-kemerdekaan menjadi tidak perlu. Sebaliknya, tindakan mereka lebih berpusat pada rekonsiliasi yang dapat menciptakan situasi yang stabil dan damai dimana UNAMET dapat menyelenggarakan pemungutan suara.

597. Pada Bulan Maret 1999, Xanana Gusmão meminta mahasiswa untuk ikut berperan sebagai motor “penggerak” kampanye, karena jika CNRT sendiri yang melakukannya akan sangat berbahaya. Pada bulan April, kantor CNRT di Dili dihancurkan oleh milisi dan sebagian pemimpinnya bergerak secara sembunyi-sembunyi. Selama masa ini, sebanyak 800 mahasiswa kembali ke Timor-Leste dari universitas di seluruh Indonesia. Banyak kelompok mahasiswa tergabung dalam *Presidium Juventude Loriku Ass'wain Timor Lorosa'e*.[†] Banyak yang kembali ke kampung halaman mereka atau pun tinggal di Dili. Di Dili, para pelajar memfokuskan diri pada upaya mengkoordinasikan kampanye informasi dan mempublikasikan lambang CNRT pada kertas suara. Kegiatan mereka mencakup mendiskusikan rekonsiliasi, informasi terkini mengenai persiapan Konsultasi Rakyat, dan menyampaikan perintah CNRT. Sebagai medianya adalah fotokopi bulletin, karena pada awalnya pemilik percetakan tidak mau menanggung risiko untuk mencetak bahan seperti ini. Presidium juga mendirikan radio Matebian Lian (Suara Matebian), yang meskipun dicekal, masih terus mengudara.

598. Peran mahasiswa ini menanggung resiko, dan mereka menjadi sasaran selama kampanye.⁷⁵³ Pada tanggal 20 Mei, Milisi Aitarak membunuh dua anggota DSMPPT di Hera, yang diduga melibatkan TNI.⁷⁵⁴ Milisi Laksaur membunuh dua mahasiswa lagi di Covalima.⁷⁵⁵ Berdasarkan perintah CNRT, para mahasiswa tidak merespon tindak kekerasan yang dilakukan para milisi. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari meluasnya konflik di antara kelompok warga Timor yang dapat diklaim oleh TNI sebagai perang saudara.

599. Pada tanggal 1 sampai 4 Juli Xanana Gusmao bertemu dengan delegasi CNRT di rumah tahanannya di Salemba, yang menghadiri Pertemuan Dare II di Jakarta, bersama anggota CNRT lainnya membentuk tim kampanye CNRT yang bernama Komisi untuk Perencanaan dan Koordinasi Kampanye (*Comissão de Planeamento e Coordinacao de Capanha*, CPCC). CPCC bertemu di Dili tanggal 9 Juli dan merumuskan rencana kampanyenya. Kampanye ini menekankan pada kampanye diam-diam dari pintu ke pintu, khususnya dimaksudkan untuk mengenalkan lambang CNRT dan untuk membangun rasa persatuan nasional serta stabilitas. Bendera CNRT baru saja dikibarkan secara umum di Timor-Leste dan banyak warga yang belum

[†] Tempat pemungutan suara luar didirikan di lima lokasi di Indonesia, Australia, dan Eropa.

[†] Dewan Solidaritas Mahasiswan Timor-Leste (ETSSC) merupakan pengecualian utama. Organisasi ini memilih tidak beraliansi dengan CNRT, yang dianggapnya telumuri dengan politik partisan tahun 1975.

begitu kenal dengan bendera tersebut. CPCC juga menerbitkan surat kabar *Vox Populi*, dengan oplah harian 1,300 dan membuat program radio dengan nama yang sama.⁷⁵⁶

Kelompok Aktif Pro-Otonomi

600. Pada awal tahun 1999 sejumlah organisasi terbentuk yang kemudian menjadi sayap politik kampanye pro-otonomi. Pada tanggal 27 Januari, Forum Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan (FPDK) resmi berdiri, yang dipimpin Walikota Dili, Domingos Soares. Pada bulan April, Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT) berdiri dan dipimpin oleh bekas Presiden UDT Fransisco Lopes da Cruz. Organisasi lainnya, Front untuk Otonomi Timor Timur (UNIF) berdiri pada tanggal 23 Juni.

601. FPDK dan berbagai organisasi kembarannya yang semuanya pro-otonomi memiliki kaitan erat dan didanai oleh pemerintahan sipil.⁷⁵⁷ Mereka secara teratur mengikuti pertemuan tripartit militer-polisi-pemerintah (Muspida), meskipun mereka tidak punya jabatan resmi. Saat kedatangan UNAMET, kampanye gabungan kelompok pro-otonomi dan milisi telah berlangsung selama beberapa waktu. Orang-orang ditekan untuk secara terang-terangan menyatakan kesetiaannya terhadap Indonesia, dengan mengikuti unjuk rasa maupun menaikkan bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Satu sasaran pemaksaan ini adalah para pegawai negeri sipil. FPDK melakukan kampanye tersebut untuk mendiskreditkan UNAMET, yang diliput secara luas di Indonesia dan melalui bermacam saluran diplomatik Indonesia.⁷⁵⁸

602. Pembentukan UNIF pada tanggal 23 Juni bertujuan untuk menggabungkan berbagai kelompok pro otonomi di bawah suatu badan, yang dipimpin oleh sejumlah pemimpin senior Timor Timur pro integrasi. Basilio Araújo mengatakan pada Komisi:

UNIF...mencakup kami semua, dan memiliki kepemimpinan [presidium] kolektif termasuk Lopes [da Cruz, Duta Besar Khusus Indonesia dan ketua BRTT], Armindo [Soares, Ketua DPRD Timor Timur], Domingos [Soares, Walikota Dili dan Ketua FPDK], dan Joao Tavares [‘Kepala Komandan’ semua kelompok milisi] dari PPI, sehingga kepemimpinan kolektif merupakan kelompok tunggal, dan saya melanjutkan sebagai juru bicara kelompok ini, sementara masih menjadi juru bicara FPDK.⁷⁵⁹

Pemerintahan sipil Indonesia di Timor-Leste

603. Pemerintahan Sipil di Timor-Leste melakukan kampanye untuk “mensosialisasikan” paket otonomi khusus yang bertentangan dengan Kesepakatan Mei, yang telah melimpahkan tanggung jawab tersebut hanya kepada UNAMET. Pendekatannya merupakan perpaduan antara pemaksaan dan insentif, mengambil keuntungan dari pengaruh pemerintah terhadap pegawai negeri sipil. Dalam surat edaran kepada Kepala Instansi Vertikal dan Otonomi tertanggal 28 Mei 1999, Gubernur menginstruksikan bahwa pegawai negeri sipil yang terlibat aktivitas melawan pemerintah Indonesia harus dipecat.⁷⁶⁰ Pemerintah juga mendanai demonstrasi pro-otonomi di seluruh wilayah, di mana milisi bersenjata aktif bergerak dan melakukan pemaksaan pada masyarakat setempat.⁷⁶¹

604. Selain kegiatan kampanye, pemerintah sipil juga terlibat sangat jauh dalam mendanai dan mengorganisasikan milisi. Pada bulan Mei Gubernur José Abilio Osorio Soares menulis kepada para Bupati meminta proposal anggaran untuk Pam Swakarsa dan untuk “pengeluaran

⁷⁵⁶ PPI- Pasukan Perjuangan Integrasi yang dipimpin oleh João Tavares; kelompok yang menjadi payung bagi disatukannya kelompok-kelompok milisi bersenjata yang lama dan yang baru muncul pada tahun 1999.

yang berkaitan...dengan rencana otonomi".⁷⁶² Tiap distrik menerima bagian dari dana Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang mungkin mencakup dana dari Bank Dunia. Penyaluran dana ini disetujui oleh Gubernur,⁷⁶³ dan mencakup penyaluran dana untuk polisi, yang digunakan untuk sosialisasi paket otonomi.⁷⁶³

Periode kampanye resmi

605. Kampanye secara resmi dimulai pada tanggal 14 Agustus, dan hanya berlangsung singkat. Jadwal kegiatan di seluruh negeri telah disusun melalui kerjasama dengan staf UNAMET, dalam upaya untuk mengatur berbagai rapat dan kampanye keliling guna menghindari perpecahan antara para pendukung pro integrasi dan pro otonomi. CNRT tak dapat membuka kantornya di tiga kabupaten karena ancaman kekerasan,^{*} sedang sejumlah kantor CNRT lainnya dengan cepat menjadi sasaran dan dipaksa untuk tutup. Diantara kantor yang harus ditutup termasuk Dili pada 17 Agustus, Manatuto 19 Agustus dan Ainaro 21 Agustus.⁷⁶⁴ Pelajar dan kelompok masyarakat sipil memainkan peranan kunci dalam kampanye pro kemerdekaan. Belakangan sejumlah bukti dokumenter menunjukkan bahwa TNI memasukkan CNRT, DSMPTT dan OJETIL dalam daftar 'kekuatan musuh' nya dalam rencana operasinya untuk referendum.[†]
⁷⁶⁵

606. Pembunuhan terus berlanjut selama masa kampanye, terutama antara tanggal 14 dan 16 Agustus, yang membuat CNRT terpaksa mengakhiri kegiatan kampanyenya di distrik-distrik pada tanggal 19 Agustus. CNRT melakukan kampanye keliling di Dili pada tanggal 25 Agustus. Ribuan orang datang dan memberi dukungan, dan suasana di Dili ketika itu aman dan damai. Akan tetapi, kericuhan terjadi di Dili keesokan harinya, setelah kampanye terakhir oleh kelompok pro-otonomi. Delapan orang terbunuh, termasuk Augusto Guterres, pelajar yang ditembak Brimob di Becora. Malam itu, kantor Renetil dan CNRT dibakar. Gelombang kekerasan oleh para pendukung pro-otonomi menandai berakhirnya kegiatan kampanye di Dili.

Situasi Keamanan Memburuk: Agustus

607. Penjelasan yang dikemukakan Komandan Militer Timor-Leste Tono Suratman tentang masa kampanye menunjukkan dua hal, yaitu Indonesia tetap berkeras bahwa TNI telah memikul tanggung jawab keamanan meskipun ketentuan dalam Kesepakatan 5 Mei secara spesifik menugaskan polisi memikul tanggung jawab ini, dan tetap dipertahankannya gambaran bahwa apa yang terjadi di Timor-Leste adalah perang sipil dan bukannya konflik yang direkayasa:

Keamanan harus dibuat kondusif sebelum referendum...Indonesia, dalam hal ini polisi dan TNI, menerapkan hal ini dan bertanggung jawab atas persoalan-persoalan dan turunannya, masalah penegakan hukum...Secara pribadi saya merasa tanggung jawab keamanan TNI sangat berat. Waktu untuk menenangkan situasi sangat singkat...sementara sejarah kekerasan antar orang Timor-Leste berumur 23 tahun, atau lebih...⁷⁶⁶

608. Selama masa kampanye, TNI bersikukuh dengan argumentasi bahwa kelompok milisi bersenjata adalah reaksi warga Timor terhadap Falintil, dengan sepenuhnya mengabaikan peran TNI dalam membentuk dan mendukung kelompok milisi bersenjata atau bahkan konflik antara TNI dan Falintil yang berlangsung selama 24 tahun.

^{*} Bobonaro, Ermera, Liquica.

[†] Operasi Wira Dharma 1999.

609. Penggambaran TNI yang keliru tentang konflik yang terjadi dan penolakan atas status tentaranya membuat negosiasi untuk perdamaian dan stabilitas menjadi sulit. TNI tidak pernah sekali pun mengungkapkan kepada UNAMET MLO tentang jumlah pasukannya di wilayah tersebut.⁷⁶⁷ Menghadapi situasi ini, Xanana Gusmão sebagai Panglima Falintil menuntut pengurangan minimum pasukan TNI dan penempatan mereka di barak-barak. Sementara itu, komandan TNI, Wiranto, menuntut agar Falintil dilucuti. Meskipun TNI tidak mengurangi jumlah pasukannya, Falintil secara sepihak menarik pasukannya ke barak-barak dengan tujuan untuk membuktikan bahwa Falintil bukanlah sumber kekerasan yang terjadi dan mendesak TNI untuk menanggapi dengan mundur ke barak dan melucuti para milisi. Pada tanggal 12 Agustus, ke 670 prajurit Falintil telah berada di barak-barak mereka.

610. Meski demikian, TNI tidak menarik mundur pasukannya ke berbagai barak di tingkat kabupaten, dan anggota milisi tetap menebar ancaman dengan bebas di tengah-tengah masyarakat di seluruh wilayah Timor. Berhari-hari setelah kelompok Falintil mengurung diri di barak-barak mereka, para pemimpin milisi mengumumkan bahwa mereka akan meletakkan senjata. UNAMET menyaksikan upacara penyerahan senjata oleh milisi kepada polisi di empat kabupaten antara tanggal 16 dan 19 Agustus. Tapi UNAMET menyaksikan bahwa jumlah senjata yang diserahkan itu "hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya dimiliki oleh milisi."⁷⁶⁸

611. Meskipun para pemimpin pro-integrasi menuduh Falintil sering bertindak melampaui batas selama periode tersebut, investigasi UNAMET jarang menemukan bukti atas tuduhan-tuduhan tersebut. Hanya dua kejadian kekerasan yang dilakukan oleh pro-kemerdekaan dapat dibuktikan. Dalam satu insiden, seorang pendukung kemerdekaan membunuh seorang pendukung pro-integrasi pada tanggal 12 Juli, dan seorang anggota milisi Aitarak dibunuh di Becora pada tanggal 29 Agustus.⁷⁶⁹

612. Selain berperan dalam Satuan Tugas Pelaksanaan Musyawarah Umum di Timor-Leste, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim tampaknya dipercaya dengan tugas menjalankan kampanye milisi.⁷⁷⁰ Pada tanggal 18 Agustus Delegasi Kongres Amerika Serikat menyaksikan terjadinya tindak kekerasan di Suai dan kesaksian mereka kemudian berakibat pada dicopotnya Makarim dari jabatannya, termasuk Komandan Kodim di Bobonaro dan Covalima. Alasan di balik pencopotan ini adalah, beberapa prajurit secara terpisah bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang terjadi, suatu pendekatan yang sama sekali tidak membantu mengendalikan tindakan melebihi batas yang dilakukan oleh TNI sebagai sebuah lembaga. Pada tanggal 13 Agustus, Kolonel Tono Suratman diganti oleh Komandan Korem yang baru yang berlatar belakang Kopassus, Koloner Noer Muis.⁷⁷¹

613. Pada tanggal 24 Agustus, Sekretaris Jenderal PBB memberikan sambutannya di hadapan Dewan keamanan, dengan mengutip pernyataan Komisi Elektoral independen, bahwa masa pemilihan "tak pernah lepas dari intimidasi, kekerasan atau gangguan (sebagaimana yang disyaratkan dalam Kesepakatan 5 Mei)".⁷⁷²

Persiapan terakhir Konsultasi Rakyat

614. Masa kampanye formal berakhir pada tanggal 26 Agustus. UNAMET mempekerjakan 4000 warga Timor untuk membantu pelaksanaan Konsultasi Rakyat di 200 TPS di seluruh negeri.⁷⁷³ Semua staf diminta untuk bersikap netral secara politis dan diatur oleh staf pemilihan internasional. Kelompok-kelompok pengamat dan media massa internasional tiba dalam jumlah besar beberapa hari menjelang tanggal 30 Agustus, guna memastikan bahwa pemungutan suara itu berjalan di bawah pengawasan masyarakat internasional.

⁷⁶⁷ Keempat lokasi pengurangan diri Falintil adalah Uaimori (260 prajurit), Atalari, Baucau (70 prajurit), Poetete, Ermera (153 prajurit) dan Aiassa, Bobonaro (187 prajurit). Petugas Perantara Militer UNAMET menyaksikan keempat lokasi tersebut dan bertemu dengan para prajurit Falintil. Lihat Martin, *Menentukan Nasib Sendiri*, h. 73.

Konsultasi Rakyat

615. Tanggal 30 Agustus 1999 menandai dimulainya hari bersejarah di Timor-Leste. Meski mengalami intimidasi dan kekerasan selama berbulan-bulan, pada hari itu rakyat di seluruh negeri keluar rumah dengan penuh semangat untuk memberikan suara mereka. Banyak yang berdandan dengan memakai pakaian terbaik mereka. Dan di desa-desa, orang berjalan kaki selama berjam-jam untuk memberikan suara. Menjelang fajar, 50% rakyat yang telah mendaftar untuk memilih, telah menunggu di luar TPS-TPS yang tersedia, untuk memberikan suara.⁷⁷⁴ orang-orang menunggu dengan sabar dalam antrian panjang Di sebagian besar TPS, dan segera pulang setelah selesai memilih. Sejumlah TPS dibuka sejak pukul 6.30 pagi hingga pukul 4.00 sore, meskipun di beberapa tempat Konsultasi Rakyat telah selesai dilakukan menjelang sore.

616. Pengamat dan media internasional mengomentari semangat dan martabat rakyat Timor, yang setelah mengalami kekerasan selama 24 tahun tidak membiarkan intimidasi dalam beberapa bulan terakhir untuk mencegah mereka menggunakan hak mereka untuk menentukan masa depan mereka. Rakyat Timor memberikan suara dalam jumlah besar, yaitu 98,6% dari jumlah keseluruhan yang mendaftar. Berbeda dengan suasana pada 26 Agustus yang penuh kekerasan, hari itu suasana tenang di sebagian wilayah. Meski begitu, milisi membunuh dua staf lokal UNAMET di Atsabe. Seorang saksi dari Civpol (Polisi sipil PBB) melihat TNI di tempat kejadian⁷⁷⁵

617. Segera setelah pemungutan suara selesai, sebelum penghitungan dan pengumuman hasil, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, menegaskan pandangan Pemerintah Indonesia bahwa pemungutan suara tersebut sah:

*Saya sangat berbesar hati dan senang hati mengatakan bahwa [pemungutan suara tersebut] sungguh berjalan bebas dan damai, dan karenanya keputusan yang adil dari Konsultasi Rakyat.*⁷⁷⁶

618. Namun Juru Bicara pro integrasi, Basilio Araujo mengeluarkan daftar 37 pelanggaran yang diduga dilakukan oleh staf UNAMET dan mengklaim bahwa pemungutan suara tersebut tidak adil. Komisi Pemilihan menanggapi protes para pendukung pro-integrasi dengan mengadakan musyawarah selama satu setengah hari pada tanggal 2-3 September. Komisi Pemilihan akhirnya menyimpulkan:

Apapun kebenaran yang mungkin ada dalam pengaduan oleh orang per orang tentang dugaan pelanggaran dan/atau keberpihakan yang dilakukan oleh staf pemilihan, tak satu pun dari pengaduan tersebut, baik secara perorangan maupun kelompok, menggagalkan proses tersebut⁷⁷⁷

Penghitungan dan hasil

619. Untuk memastikan kerahasiaan pemungutan suara, kertas suara dihitung di Dili. Sore hari, tanggal 30 Agustus, staf UNAMET dari berbagai tempat pemungutan suara membawa kertas suara ke markas kabupaten di bawah pengawasan polisi PBB. Semua kertas suara tersebut disimpan di bawah penjagaan ketat polisi PBB, dan dibawa ke pusat penghitungan di Dili dengan helikopter atau konvoi darat oleh staf UNAMET dan polisi PBB pada tanggal 31 Agustus. Di Maliana, helikopter yang mengangkut kertas suara ditembak, dan di Gleno dan Atsabe di Distrik Ermera, tim UNAMET yang membawa kotak suara mendapat intimidasi dari kelompok milisi.⁷⁷⁸ Penghitungan dilakukan secara terpusat di Dili. Tidak ada laporan hasil tersendiri dari kabupaten dan daerah, yang ada hanya hasil tunggal untuk seluruh wilayah pemilihan. Ini dilakukan untuk menjamin keamanan di berbagai daerah yang mungkin menjadi sasaran kekerasan karena

afiliasi politik mereka dan juga untuk membantah saran gerakan pro-otonomi agar wilayah bisa saja dibagi agar mencerminkan hasil regional.

620. Di pusat penghitungan, yaitu di Museum Dili di Comoro, petugas pemilihan UNAMET di seluruh Timor berkumpul untuk melakukan penghitungan. Para pengamat internasional termasuk delegasi resmi dari Indonesia dan Portugis, memiliki akses masuk ke pusat penghitungan dan turut menyaksikan seluruh tahapan proses penghitungan. Banyak kontingen media internasional meninggalkan Timor-Leste segera setelah pemilihan yang berjalan damai itu selesai. Begitu juga para pengamat internasional.

621. Kerusuhan yang didalangi oleh kelompok milisi pecah beberapa hari setelah Konsultasi Rakyat. Pada tanggal 1 September, kelompok milisi tiba di Dili dan melancarkan serangan terhadap para pendukung pro-kemerdekaan yang lokasinya berdekatan dengan gedung UNAMET di Balide. Media internasional berhasil mengambil gambar seorang pria yang sedang berlari menyelamatkan diri namun tertangkap dan dicincang hingga tewas oleh milisi. Ratusan warga mengungsi di sekolah yang terletak di sebelah gedung UNAMET. Di Ermera, kerusuhan pecah, dan UNAMET mengevakuasi stafnya ke Dili. Pada tanggal 2 September di Maliana, milisi mengepung kantor UNAMET dan melancarkan tembakan dan membakari rumah-rumah. Dua orang staf UNAMET dari Timor tewas.

622. Penghitungan suara terus berlanjut tanpa henti, di tengah-tengah situasi keamanan yang kian memburuk. PBB bertekad untuk mengumumkan hasil pemungutan suara secara bersamaan, masing-masing oleh Sekretaris Jenderal PBB di New York pada tengah malam tanggal 3 September dan oleh Perwakilan Khusus PBB di Dili, Ian Martin, pada pagi hari tanggal 4 September. Setelah berkonsultasi dengan Satuan Tugas Indonesia, pengumuman pada pagi hari di Dili dianggap dapat memberikan kontrol yang lebih baik bagi situasi keamanan pada jam-jam berikutnya.⁷⁷⁹

623. Pada pukul 9 pagi, Sabtu 4 September, Ian Martin membacakan hasil pemungutan suara di Hotel Makhota di Dili: 21,5% memilih paket otonomi khusus dan 78,5%menentanginya. Komisi Pemilihan telah pula menyiapkan pertimbangan akhir mengenai pemungutan suara:

Komisi dapat menyimpulkan bahwa Konsultasi Rakyat telah terlaksana dengan adil menurut prosedur dan sesuai dengan Perjanjian New York, dan telah secara akurat mencerminkan keinginan rakyat Timor. Tidak diragukan lagi bahwa mayoritas rakyat di daerah konflik ini ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia.⁷⁸⁰

3.21 Indonesia meninggalkan Timor-Leste: Bumi Hangus

Tinjauan

624. Dengan diumumkankannya hasil pemungutan suara, PBB meminta Indonesia untuk memastikan situasi keamanan di wilayah Timor.⁷⁸¹ Tekanan diplomatik pun digunakan untuk memastikan tercapainya tujuan akhir ini, namun ketentuan untuk memberi perlindungan kepada rakyat Timor-Leste tetap tak mencukupi. Kejadian pada bulan September dan Oktober 1999 menjadi pembahasan dua proses hukum dan sejumlah laporan investigasi, baik oleh warga Timor-Leste dan Indonesia, serta organisasi dan lembaga internasional, termasuk PBB.

625. Militer Indonesia dan milisi diketahui telah membunuh antara 1200 hingga 1500 warga Timor-Leste pada tahun 1999, 900 orang diantaranya dibunuh setelah Konsultasi Rakyat. Masing-masing, mereka membunuh 400 orang lewat pembunuhan massal, dan sisanya dibunuh secara terpisah.⁷⁸² Para korban tersebut tewas dengan cara yang mengenaskan, banyak yang ditebas dengan golok, dan di antara mereka yang sempat menyelamatkan diri, banyak yang kehilangan anggota tubuhnya dan menderita gangguan kesehatan yang berkepanjangan. Secara khusus, para pembunuh itu mengincar dan mengeksekusi para pemimpin CNRT dan keluarga mereka.⁷⁸³ Penganiayaan, kekerasan seksual, dan pemindahan warga secara paksa terjadi di seluruh wilayah Timor-Leste.⁷⁸⁴ Lebih dari separuh penduduk, yaitu 550.000 orang, melarikan diri dari rumah mereka, termasuk 250.000 orang yang dipaksa atau diintimidasi untuk pindah ke Timor Barat.⁷⁸⁵ [Lihat Bab 7.3.: Pemindahan Paksa dan Kelaparan]. Milisi juga membunuh warga yang mencari perlindungan di gereja. Para pastor dan para biarawati juga menjadi sasaran pembunuhan. TNI dan milisi bekerja sama untuk menerapkan strategi kekerasan massal di seluruh wilayah Timor-Leste.

626. Perhatian dunia terpusat pada markas UNAMET di Dili, tempat mengungsi beberapa staf UNAMET dan wartawan internasional yang masih tersisa di wilayah tersebut. Kegiatan diplomasi yang sangat gencar terjadi di belakang layar dan kadang-kadang di depan umum untuk menekan Indonesia agar memenuhi kewajibannya menjaga keamanan atau menyetujui didatangkannya pasukan internasional untuk memulihkan situasi keamanan di Timor-Leste. Tidak satu negara pun mau bertindak melindungi rakyat Timor-Leste tanpa persetujuan dari Indonesia. Para pemimpin Timor-Leste berupaya meyakinkan negara-negara kuat di dunia dan di wilayah ini agar mau melakukan intervensi demi menyelamatkan rakyat Timor-Leste. Di PBB, di KTT APEC yang diadakan di New Zealand, di Portugal dan Roma, di Jakarta dan Australia, para pemimpin itu tidak berhenti bekerja.

627. Karena TNI menunjukkan sikap enggan mengendalikan kerusuhan yang terjadi, sementara tim Dewan Keamanan telah berada di Dili dan Jakarta, pada tanggal 12 September Presiden Indonesia, Habibie, akhirnya menyetujui hadirnya pasukan internasional. Seminggu kemudian, komandan pasukan internasional untuk Timor-Leste atau Interfet asal Australia, Mayor Jenderal Peter Cosgrove, tiba di Dili, yang diikuti oleh pasukannya sehari kemudian. Saat TNI meninggalkan Timor-Leste, mereka menghancurkan 70% infrastruktur utama, rumah-rumah, dan bangunan, mereka juga menghancurkan seluruh desa dan menjarah harta benda rakyat Timor-Leste.⁷⁸⁶

628. Xanana Gusmão kembali ke Timor-Leste pada tanggal 22 Oktober, dan pada tanggal 25 Oktober Dewan Keamanan PBB membentuk Pemerintahan Transisi PBB atau UNTAET (United Nations Transitional Administration for East Timor), yang dipimpin oleh Sérgio Vieira de Mello.

⁷⁸¹ Komisi Para Ahli PBB tahun 1999-2000, Unit Kejahatan Berat dan panel hakim di Timor-Leste, Pengadilan Ad Hoc HAM di Jakarta, laporan KPP-HAM Indonesia dan laporan Profesor Geoffrey Robinson untuk Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mungkin merupakan laporan terbaru yang paling penting.

Tugas menangani krisis kemanusiaan dan membangun kembali negara Timor-Leste yang tercabik-cabik, telah menunggu.

Tindak Kekerasan sesudah pengumuman hasil pemungutan suara

629. Tindak kekerasan pasca Konsultasi Rakyat yang mulai terjadi pada tanggal 30 Agustus sore hari dan terus berkembang selama hari-hari penghitungan suara semakin meningkat setelah pengumuman hasil Konsultasi Rakyat pada tanggal 4 September. Di Dili, karena takut akan ancaman adanya pembalasan terhadap mereka yang memilih pro-kemerdekaan, rakyat berduyun-duyun pergi ke Dare di kaki bukit di belakang kota untuk mengungsi di berbagai tempat seperti markas ICRC, rumah Uskup Belo, dan kompleks keuskupan Dili, dan sekolah yang terletak di sebelah markas UNAMET. Sementara staf UNAMET pindah ke markas Balide setelah hasil Konsultasi Rakyat diumumkan.

630. Pada tanggal 5 September, Milisi Aitarak, TNI dan polisi, menyerbu kantor keuskupan Dili, memisahkan dengan paksa staf UNAMET orang Timor dan anggota CNRT, dan membunuh antara 15 dan 20 dari 300 orang yang mengungsi di tempat tersebut.⁷⁸⁷ Militer memindahkan wartawan yang tersisa dan menyelamatkan para pengungsi lokal ke markas Balide, tempat orang-orang internasional berkumpul hingga evakuasi mereka. Pada tanggal 6 September kelompok milisi dengan sangat kejam memaksa keluar 7.000 orang yang sedang mengungsi di dalam markas ICRC dan di rumah Uskup Belo yang terletak di tepi pantai Dili, yang kemudian mereka hancurkan. Belakangan, orang-orang tersebut dibawa ke Timor Barat sebagai bagian dari rencana darurat yang disebut Hanoin Lorosae II (Operasi Mengenang Lorosae II) yang disusun oleh polisi beberapa bulan sebelumnya, sebagaimana disebutkan di atas.

631. Pada hari yang sama di pantai selatan Suai, milisi Laksaur, dengan disaksikan pemerintah daerah dan polisi daerah serta pimpinan militer, membunuh antara 27 dan 200 orang dari 2.000 pengungsi yang tersisa di dalam gereja.⁷⁸⁸ Di antara mereka yang pertama kali dibunuh adalah tiga Pastor Katolik, yang ditebas dengan golok oleh anggota milisi. Penggalian tubuh korban yang dilakukan kemudian menunjukkan di antara yang terbunuh itu terdapat wanita dan anak-anak.⁷⁸⁹ penyelidikan dan kesaksian dari para saksi menunjukkan adanya keterlibatan pasukan teritorial TNI.⁷⁹⁰

632. Pembunuhan Pastor Katolik menandakan bahwa Gereja Katolik menjadi sasaran. Gereja telah lama mempunyai hubungan yang tegang dengan otoritas Indonesia yang berkuasa, tetapi hingga kerusuhan pasca Konsultasi Rakyat, anggota gereja belum pernah menjadi sasaran pembunuhan. Hari-hari setelah penyerangan di Suai, tindakan menjadikan Pastor Katolik sebagai sasaran tampaknya menjadi pola yang juga terlihat di distrik-distrik lain. Komisi mendengar kesaksian oleh saksi mata tentang para pastor yang sengaja dijadikan sasaran ketika mereka mencoba mencegah terjadinya kekerasan:

Saya melihat Padre Francisco mengangkat tangan dan berkata kepada Milisi Laksaur/Mahidi, "Cukup. Berhenti menembak. Kita semua orang Timor. Hentikan ini semua." Dia berteriak karena melihat begitu banyak korban yang jatuh, tetapi milisi Laksaur/Mahidi mengabaikan permintaan beliau. Kemudian salah satu anggota milisi...mendekati Padre. Dia pura-pura memeluk Padre, kemudian membawa beliau dari tempat tinggalnya ke Gua Maria dan kembali lagi. Kemudian dia menembak Padre Francisco, tetapi beliau tidak langsung meninggal, jadi dia mengambil pedangnya dan menikam beliau satu kali di dada. Padre Francisco meninggal saat itu juga."⁷⁹¹

633. Ketika ketegangan dan kekerasan meningkat di seluruh negeri, orang-orang melarikan diri dari rumah-rumah mereka mencari keselamatan di sejumlah hutan dan gunung. Ribuan orang berjejal mencari perlindungan di berbagai barak pertahanan Falintil.

634. Secara umum, tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI dan milisi paling parah terjadi di beberapa distrik di bagian barat. Di distrik-distrik tersebut dekat dengan perbatasan Timor Barat di mana jumlah Falintil lebih sedikit, hubungan TNI dan milisi justru paling kuat. Pada tanggal 7 September, Wakil Komandan Falintil Taur Matan Ruak merasa sangat putus asa, dan mengancam akan melancarkan pembalasan dari markasnya di Uaimori. Berbicara dengan Taur Matan Ruak melalui telepon satelit, Xanana Gusmão melarangnya melakukan tindakan balas dendam tanpa mempedulikan jumlah nyawa dan penderitaan, dengan alasan bahwa setiap tindakan balas dendam akan menciptakan perang sipil yang memang telah lama dicoba direkayasa oleh TNI, apalagi jika harus kehilangan dukungan internasional yang merupakan satu-satunya harapan untuk selamat.⁷⁹² Sikap disiplin Falintil secara umum tetap utuh meskipun ada begitu banyak provokasi. Sejumlah pembunuhan yang dilakukan oleh para pendukung kemerdekaan atau anggota Falintil yang dilaporkan terjadi pasca Konsultasi Rakyat, kebanyakan terjadi di distrik-distrik di bagian barat.⁷⁹³

TNI Resmi Mengambil Kendali

635. Pada tanggal 4 September TNI melakukan reorganisasi kepemimpinan di Timor di bawah komando Mayor Jenderal Adam Damiri dari Kodam IX Udayana, yang mengambil kendali secara resmi dari pihak polisi. Pada tanggal 5 September, Jenderal Wiranto bertemu dengan para milisi dan pimpinan TNI di Timor-Leste, dan kemudian dengan Uskup Belo, yang meminta agar Wiranto mengendalikan para milisi.⁷⁹⁴ Pada tanggal 6 September, Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal Jamsheed Marker mendesak agar pihak Indonesia mengundang pasukan internasional, namun permintaan ini ditolak dengan keras. Presiden Habibie mengumumkan pemberlakuan darurat militer pada hari berikutnya, dengan menunjuk Mayor Jenderal Kiki Syahnakri sebagai Komandan. Ia kemudian menggantikan satuan teritorial dengan pasukan Kostrad, teori yang ada adalah tentara teritorial ini telah bertindak karena hubungan emosi dengan wilayah tersebut dan tentara baru diharapkan dapat bertindak dengan cara yang lebih profesional.

636. Kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi setelah TNI mengambil alih kendali secara resmi. Berbagai serangan ini mengikuti pola pembunuhan yang sama oleh milisi yang melibatkan TNI, seringkali disaksikan langsung oleh personel senior TNI. Banyak pembunuhan memiliki pola yang sama: sejumlah pembunuhan itu terjadi setelah meningkatnya kekerasan, dengan sasaran para individu yang telah dipilih, dan mereka mempunyai kesamaan prosedur yang berlanjut dengan pembuangan mayat secara sistematis dengan menggunakan truk dimana semua bukti menunjukkan adanya dukungan oleh pihak militer.⁷⁹⁵ Pola yang lain termasuk persenjataan, yang mengandalkan senjata rakitan, pisau, pedang, dan beberapa senjata otomatis.⁷⁹⁶ Ancaman, pemukulan, perkosaan dan pembakaran rumah yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya kini dilakukan secara sistematis dalam skala besar. Milisi membakar Timor-Leste dengan bensin yang disediakan oleh militer, yang seringkali dibawa dengan mobil pemadam kebakaran tetapi tangki kendaraan diisi dengan bensin. Mereka mengangkut barang-barang hasil jarahan ke atas truk-truk militer. Tidak mungkin pemenuhan kebutuhan logistik yang luar biasa banyaknya ini terjadi tanpa keterlibatan TNI.⁷⁹⁷

637. Komisi juga menerima sebuah submisi yang berisi kesaksian tentang artefak budaya Timor-Leste yang tak bernilai yang telah dibawah oleh pejabat Indonesia dari gedung yang dikenal sebagai Museum Dili di Comoro selama kekerasan pada September 1999.⁷⁹⁸ Museum tersebut telah dibuka oleh pejabat Indonesia pada tahun 1995 dan menyimpan lebih dari 3000 obyek, termasuk tais kuno, keramik tradisional, keranjang tradisional serta pahatan di batu dan kayu yang dikeramatkan. Submisi ini mengutip hasil wawancara dengan Virgilio Simith, anggota senior CNRT pada tahun 1999 yang bertanggungjawab untuk Urusan Kebudayaan. Pada susunan Kabinet pertama RDTL setelah 20 Mei 2002, Virgilio Simith adalah Sekretaris Negara

untuk Budaya, Pemuda dan Olahraga. Virgilio mengatakan bahwa kebanyakan obyek-obyek tersebut telah dibawa ke Museum di Kupang, dan terdapat sekitar 68 kain tais Timor. Dia menuturkan bahwa selama perundingan untuk isu-isu tidak dibahas antara Indonesia dan Timor-Leste selama masa Administrasi UNTAET, perwakilan Indonesia telah menjelaskan bahwa dipindahkannya artefak-artefak tersebut “ karena tidak menentunya suasana politik di Timor-Leste, sehingga obyek-obyek tersebut ‘diamankan’”. Namun demikian Virgilio mengatakan bahwa dia mengerti bahwa para pejabat di Kupang tetap menjaga obyek-obyek tersebut yang “dibeli dengan dana dari Indonesia dan oleh sebab itu menjadi bagian dari hak milik Indonesia”. Virgilio Smith mengatakan bahwa dia percaya banyak obyek, khususnya tais telah di jual di beberapa kota Indonesia, seperti Ubud, di Bali sejak 1999.⁷⁹⁹

638. Kekerasan dan perbudakan seksual meluas pada masa ini. Komisi mendengar khususnya dari banyak perempuan di Suai yang menceritakan pengalaman mereka setelah terjadinya pembantaian masal di gereja pada tanggal 6 September, ketika mereka dibawa ke dekat sekolah dan diperkosa berulang kali sebelum dipaksa melewati perbatasan. Banyak juga yang ditahan sebagai budak pemuas nafsu seksual.⁸⁰⁰

639. Pembunuhan yang terjadi tanggal 8 September di Maliana menggambarkan pola tersebut dengan baik. Setelah kekerasan meningkat truk TNI membawa milisi ke kantor Polres, yang menjadi tempat mengungsi ratusan orang. Di hadapan petugas TNI dan polisi, milisi memilih dan mengeksekusi 13 pimpinan CNRT di antara mereka yang mencari perlindungan itu.⁸⁰¹ Tiga belas orang yang lolos dari pembunuhan masal diburu dan dibunuh dengan golok pada hari berikutnya. Beberapa hari kemudian insiden yang serupa terjadi jauh dari pengetahuan orang lain, di daerah terisolasi yakni Distrik Oecusse. Milisi Sakunar memisahkan dan membunuh pimpinan CNRT di Passabe. Setelah itu, diperkirakan sebanyak 170 orang terbunuh pada bulan setelahnya, korban terakhir dibunuh hanya dua hari sebelum tibanya pasukan Interfet yang terlambat di distrik tersebut.⁸⁰²

Markas UNAMET

640. Sementara kekerasan terus terjadi di daerah tersebut, personel UNAMET yang tidak bersenjata mengungsi ke markas regional mereka. Ian Martin bersaksi di hadapan Komisi mengenai situasi di markas selama periode ini, dan mengenai usaha-usaha PBB untuk mengupayakan campur tangan internasional. Ia menceritakan tentang serangan langsung terhadap personel dan kantor UNAMET di distrik, serta keputusan untuk menarik tim regional UNAMET ke markas Dili. Seorang polisi PBB ditembak oleh milisi dengan menggunakan senjata berdaya ledak tinggi di Liquiça dan hanya diselamatkan oleh jaket anti peluru yang dikenakannya; di Baucau polisi menembakkan senjata api otomatis selama lebih dari dua puluh menit setinggi dada ke kantor UNAMET, tempat lebih dari 70 staf mengungsi. Ketika staf kantor regional Baucau dievakuasi ke lapangan udara, TNI dan milisi berusaha mencegah dilakukannya evakuasi staf UNAMET yang asal Timor ke Dili. Pada tanggal 5 September sebagian besar tim regional UNAMET telah menarik diri dari distrik ke Markas Dili. Ia mengingat bahwa staf UNAMET asal Timor menjadi sasaran khusus, dan menceritakan hal itu kepada Komisi:

Staf lokal UNAMET termasuk orang-orang pertama yang dibunuh setelah TPS ditutup dan di hari-hari sesudahnya. Lima belas staf UNAMET orang Timor diketahui atau dipercaya kehilangan nyawa mereka...Saya memohon pada Komisi untuk mencatat keberanian yang ditunjukkan oleh staf lokal UNAMET, yang mana tanpa jasa mereka PBB tidak akan bisa memenuhi mandatnya untuk menjalankan pemilihan.⁸⁰³

641. Staf UNAMET terperangkap di markasnya di Balide. Tim yang meninggalkan markas di Dili untuk mencari makanan dan minuman di gudang UNAMET ditembak. Segelintir orang asing

yang masih di Dili melarikan diri ke markas ini, bersama sejumlah orang Timor yang mencari tempat perlindungan. Pada tanggal 5 September, tembakan senjata otomatis yang terjadi secara terus menerus terdengar dari dekat markas dan setelah dua puluh menit serangan, orang-orang dalam jumlah besar yang mencari perlindungan di sekolah mulai melompati tembok berkawat menuju markas UNAMET. Ada sekitar 1500 orang dalam kelompok ini. Ini berarti terdapat lebih dari 3.000 orang yang berada di markas UNAMET, dengan sedikit makanan, dan air serta kondisi kebersihan yang sangat kurang.

642. Pada tanggal 6 September, selain staf Gereja, tidak ada lagi orang asing di Timor-Leste di luar markas UNAMET. TNI mengepung markas tersebut, sehingga mereka berhasil melakukan langkah pertama untuk menutup Timor-Leste dari dunia luar. Di antara yang terperangkap di markas adalah beberapa wartawan internasional. Dengan menggunakan telepon genggam dan sambungan satelit mereka menceritakan keadaan ke seluruh dunia. Namun sementara media dunia terfokus pada masalah pengepungan markas UNAMET di Dili, media tidak mempunyai foto tentang kekerasan dan perusakan sistematis yang terjadi di seluruh daratan Timor-Leste.

Meningkatnya Tekanan Internasional

643. Para tokoh Timor-Leste yang berada di luar sangat sibuk melakukan aktivitas diplomasi untuk meminta campur tangan internasional. Xanana Gusmão akhirnya dibebaskan dari penjara oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 7 September, dan diserahkan kepada UNAMET di Jakarta. Untuk menghindari adanya upaya pembunuhan, ia dibawa ke Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, kemudian dari sini diterbangkan ke Darwin, Australia. Uksup Belo dievakuasi ke Baucau setelah tempat tinggalnya diserang, dan dari sana ia kemudian diterbangkan ke Darwin pada tanggal 7 September dengan menggunakan pesawat udara milik PBB. Ia terbang ke Roma dan Lisbon untuk mencari dukungan. José Ramos-Horta dan yang lainnya pergi ke Auckland, di Selandia Baru, dimana para pemimpin regional dan dunia berkumpul untuk mengikuti pertemuan tahunan APEC. Di seluruh dunia, khususnya di Australia dan Portugal, demonstrasi masa, yang digerakkan oleh gerakan solidaritas non-pemerintah dan orang-orang Timor yang berada di pengasingan, mengusahakan campur tangan internasional. Lewat foto-foto yang kuat kesannya walau terbatas jumlahnya dari markas UNAMET di Dili, dan pesan dari wartawan serta orang-orang lain di markas tersebut, informasi mereka mendominasi berita internasional dan terus menekan Indonesia dan meminta pemimpin dunia untuk melakukan campur tangan.⁸⁰⁴

644. Sekjen PBB, Kofi Annan, melakukan diplomasi pribadi yang sifatnya mendesak. Upaya pertamanya bertujuan meminta Indonesia untuk memenuhi kewajiban keamanan. Presiden Habibie menentang gagasan Sekjen PBB untuk melibatkan pasukan pemelihara perdamaian internasional, yang dilakukan dengan hubungan langsung lewat telepon pada tanggal 5 September, dan sebagai pengganti mengeluarkan Kepres pemberlakuan darurat militer di wilayah ini. Sekjen PBB meningkatkan tekanan pada Indonesia dengan mengumumkan kepada publik bahwa tindakan lebih lanjut harus dipertimbangkan jika keadaan tidak membaik di Timor-Leste dalam jangka waktu 48 jam.⁸⁰⁵

645. Sebelum diadakan Konsultasi Rakyat, dan sekali lagi pada tanggal 1 September, Portugal meminta pengerahan pasukan perdamaian internasional. Australia telah melakukan persiapan secara diam-diam seandainya diperlukan intervensi militer, dengan menyiapkan pasukan sejak akhir tahun 1998. Selandia Baru juga mempersiapkan diri. Namun demikian, tidak ada satu negarapun yang siap melakukan intervensi militer tanpa seizin Indonesia.⁸⁰⁶ Pada tanggal 4 September, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, mengumumkan secara terbuka keinginannya untuk memimpin pasukan internasional ke Timor-Leste, jika Indonesia setuju dan jika Australia menerima mandat dari Dewan Keamanan PBB. Sekjen PBB, Kofi Annan dan Perdana Menteri Australia John Howard mengadakan kontak secara terus menerus untuk mengupayakan hal ini, mencari persetujuan Indonesia atas pengiriman pasukan internasional dan pengumpulan koalisi untuk membentuk pasukan yang dapat ditempatkan segera.

646. Pada tanggal 5 September Dewan keamanan PBB mengirim Misi ke Jakarta dan Timor-Leste. Utusan ini meninggalkan New York pada tanggal 6 September, diiringi oleh Francesc Vendrell, Utusan Pribadi Sekjen PBB. Utusan ini mulai mengadakan pertemuan pada tanggal 8 September. Mereka bertemu dengan Presiden Habibie, Megawati Soekarnoputri, yang kemungkinan calon penggantinya, seorang staf delegasi UNAMET yang telah meninggalkan markas Dili dan langsung terbang ke Jakarta, serta Jenderal Wiranto. Mereka juga bertemu dengan Xanana Gusmão, yang baru saja dibebaskan. Utusan ini mendesak agar mereka dapat terbang menuju Timor-Leste.

647. Pada tanggal 10 September, Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Mary Robinson, terbang ke Darwin untuk menemui staf UNAMET asal Timor dan pengungsi yang telah dievakuasi. Ia berbicara kepada publik tentang perlunya pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dibawa ke pengadilan.⁸⁰⁷

648. Sementara itu, berkumpulnya para pemimpin politik dan ekonomi dunia dalam pertemuan puncak APEC secara tidak sengaja menjadi ajang yang baik untuk membicarakan situasi Timor-Leste. Pernyataan yang berpengaruh datang dari Bank Dunia dan IMF. Presiden Bank Dunia James Wolfensohn menulis langsung kepada Presiden Habibie pada tanggal 8 September yang menekankan perlunya Indonesia memulihkan keamanan dan ketertiban serta menghormati hasil Konsultasi Rakyat. Indonesia, masih rentan dari segi ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997, semakin mendapatkan banyak tekanan. Ketika Presiden Amerika Serikat tiba di pertemuan puncak APEC pada tanggal 11 September, ia mengumumkan penangguhan penjualan senjata ke Indonesia. Inggris dan Uni Eropa juga mengumumkan hal yang sama.

649. Pada tanggal 11 September Misi Dewan Keamanan PBB terbang ke Dili. Jenderal Wiranto terbang ke Timor-Leste mendahului Misi PBB tersebut. Ketika utusan tiba, situasi Dili relatif tenang, yang menunjukkan kemampuan TNI untuk menjaga keamanan apabila ia memilih untuk melakukannya.⁸⁰⁸ Misi Dewan Keamanan ini mendapat penjelasan singkat di markas TNI, dan bertemu dengan staf UNAMET serta orang-orang Timor-Leste yang terusir yang berada di markas tersebut. Misi ini kembali ke Jakarta pada hari itu juga, karena Dewan Keamanan sedang mengadakan rapat di New York untuk membahas situasi di Timor-Leste. Rapat Dewan Keamanan berakhir hampir enam jam, dengan lima puluh delegasi yang turut berbicara.⁸⁰⁹ Dukungan bagi intervensi internasional di Timor-Leste menjadi tinggi, dengan banyak negara yang meminta persetujuan Indonesia atas tindakan ini.

650. Pengasingan Indonesia karena kejadian di Timor-Leste benar-benar mencapai puncaknya. Pada tanggal 12 September, dengan Misi Dewan Keamanan masih berada di Jakarta, Presiden Habibie mengadakan rapat Kabinet. Setelah itu, ia menelpon Sekjen PBB untuk meminta bantuan guna memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor-Leste, dan segera setelah itu mengumumkan hal ini melalui saluran TV dan radio nasional Indonesia.

651. Dengan mendapat izin dari Indonesia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264 (1999) pada tanggal 15 September, yang memberikan mandat kepada pasukan multinasional dengan kekuasaan Bab VII penuh untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor-Leste. Ian Martin memberikan kesaksian kepada Komisi bahwa hanya setelah adanya komitmen internasional inilah ia kemudian membuat keputusan untuk menutup markas UNAMET Dili. Ia menjelaskan kepada Komisi bahwa sebelumnya, pada tanggal 8 September, ia menyarankan agar UNAMET menarik diri tetapi pertemuan dengan staf senior menunjukkan bahwa mereka bersedia tinggal selama orang Timor-Leste bersama mereka di markas.⁸¹⁰ Pada tanggal 10 September evakuasi pertama memindahkan sebagian besar staf UNAMET, termasuk beberapa staf asal Timor, meninggalkan 80 sukarelawan untuk tinggal bersama orang Timor-

⁸⁰⁷ Kelima anggota utusan adalah Martin Andjabal dari Namibia, Dubes Jeremy Greenstock dari Inggris, Dubes Danilo Türk dari Slovenia, Dubes Hasmy Agam dari Malaysia, dan Menteri Alphons Hamer, Wakil Presiden Dewan Keamanan dari Belanda.

Leste yang mencari perlindungan di markas. Banyak di antara mereka adalah staf Konsultasi Rakyat UNAMET lokal, dan pasti akan dijadikan sasaran jika ditinggal.

652. Ketika Indonesia mengumumkan pada tanggal 12 September bahwa Indonesia akan menerima intervensi internasional, ada kekhawatiran bahwa TNI dan milisi akan melakukan balas dendam terhadap staf UNAMET dan orang-orang yang bersama dengan mereka di markas UNAMET sebelum pasukan mendarat di Dili.⁸¹¹ Aktivitas diplomatik yang intensif meminta izin Presiden Habibie dan Perdana Menteri Howard untuk melakukan evakuasi terhadap 1500 orang Timor yang mengungsi di markas UNAMET, dan pada tanggal 14 September mereka dievakuasi ke Darwin. Ian Martin ikut terbang bersama mereka. Markas UNAMET ditutup, dan tim kecil yang terdiri atas 12 staf UNAMET dipindah ke konsulat Australia yang dijaga untuk menunggu kedatangan Interfet, dan dikepeng oleh tentara Kostrad.

Evakuasi penduduk secara paksa

653. Di balik upaya diplomatik yang gencar dan foto-foto yang terbatas mengenai Timor-Leste yang dikirim oleh orang-orang yang masih berada di markas UNAMET, perusakan dan pemindahan paksa yang telah mulai pada hari-hari setelah pengumuman hasil Konsultasi Rakyat semakin meningkat. Meskipun pada umumnya lebih buruk dan dengan waktu lebih lama di wilayah bagian barat di mana TNI-milisi lebih kuat, kekerasan terjadi di seluruh wilayah.⁸¹²

654. Sebelum Konsultasi Rakyat, TNI dan polisi telah merencanakan evakuasi massal penduduk. Mereka mempunyai rencana darurat rinci untuk menyelamatkan penduduk dari perang sipil yang diperkirakan Indonesia akan terjadi setelah Konsultasi Rakyat. Ini merupakan bagian dari kebijakan yang direncanakan sebelumnya, seperti disebutkan di atas.⁸¹³ Ada perbedaan pendapat mengenai apakah ini merupakan evakuasi untuk melindungi orang Timor-Leste, atau pemindahan paksa di bawah intimidasi dan kekerasan. Sementara sebagian orang benar-benar ingin meninggalkan wilayah tersebut, kondisi kekerasan diciptakan oleh TNI dan milisi, pelaku yang sama yang melakukan evakuasi. Setelah Konsultasi Rakyat, 250.000 orang, atau lebih dari seperempat penduduk, dipindahkan dari Timor-Leste, paling banyak ke Timor Barat (lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan kelaparan). Baik militer maupun polisi keduanya terlibat dalam upaya pemindahan ini, dan polisi serta Kodim digunakan sebagai tempat transit untuk evakuasi.⁸¹⁴ Karena takut terhadap milisi yang menyerang, banyak orang mencari perlindungan kepada militer atau polisi dan setelah itu mereka dibawa ke Timor Barat. Saksi mata mengatakan bahwa orang-orang diusir dari rumah mereka oleh TNI dan milisi, kemudian rumah mereka dirusak.⁸¹⁵ Pengusiran paksa terus terjadi hingga kedatangan Interfet pada tanggal 20 September.⁸¹⁶ Banyak orang Timor-Leste terbang dengan pesawat menuju Jawa beberapa hari setelah Konsultasi Rakyat, karena takut pecahnya kekerasan.

655. Sekitar 400.000 orang diperkirakan melarikan diri untuk menghindari kekerasan di kota dan desa menuju bukit di pedalaman Timor-Leste yang keadannya relatif aman (lihat Bab 7.3.: Pemindahan Paksa dan Kelaparan). Karena mereka tidak mempercayai Militer atau Polisi Indonesia, banyak yang lari mencari perlindungan di markas Falintil di gunung-gunung. Puluhan ribu orang meninggalkan kota-kota besar. Sekitar 10.000 meninggalkan Ermera, dan antara 30.000 dan 40.000 orang meninggalkan Dili menuju wilayah di sekitar kompleks Gereja di kaki bukit sekitar Dare. Di dare orang-orang yang memiliki telepon seluler mengadakan kontak ke seluruh dunia dan menjelaskan langsung apa yang mereka lihat dari atas bukit dengan mata kepala mereka mengenai perusakan kota Dili. Makanan, air dan obat-obatan tidak mencukupi, dan ketakutan akan adanya serangan TNI dan milisi tinggi.

Interfet datang: TNI ditarik

656. Pada tanggal 19 September, Komandan Interfet dari Australia Mayor Jenderal Peter Cosgrove, wakilnya dari Thailand, dan Kepala dari kontingen negara lain terbang dari Darwin

menuju Dili, yang ditemani oleh kepala UNAMET, Ian Martin. Pada tanggal 20 September, tentara Interfet tiba di Timor-Leste.^{*}

657. Militer Indonesia dalam proses penarikan. Pada tanggal 20-21 September, Battalion 745 ditarik dari Lautém ke Dili, dan diketahui membunuh hingga 17 orang saat mengundurkan diri (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa). Selain pembunuhan oleh TNI pada periode pasca Konsultasi Rakyat, kelompok-kelompok milisi tertentu masih terus aktif. Pada tanggal 23 September milisi membunuh 12 orang di Ainaro. Pada tanggal 25 September, lima hari setelah Interfet tiba di Timor-Leste, milisi Tim Alfa, yang telah lama menjalin hubungan dengan Kopassus, melakukan menghadang dan mengeksekusi, dengan menggunakan pedang, anggota iring-iringan kemanusiaan yang dipimpin oleh Biarawati Katolik di tikungan di dekat sungai Sika di kabupaten Lautém. Sembilan orang, termasuk lima orang Biarawati, seorang wartawan Indonesia, dan dua orang lainnya terbunuh.⁸¹⁷

658. Sadar akan kemarahan TNI atas intervensinya, serta adanya potensi bahaya dari kelompok milisi, Interfet menempatkan pasukan dengan hati-hati. Interfet butuh waktu satu bulan untuk mencapai daerah terisolasi seperti Oecusse. Setelah keamanan dapat dipulihkan orang-orang yang tadinya bersembunyi di gunung-gunung atau mencari perlindungan pada Falintil kembali ke puing-puing kota dan desa mereka. Banyak di antara orang-orang yang kembali dari gunung dan tempat lainnya karena mengungsi berada dalam keadaan lapar dan sakit, dan umumnya dalam kondisi sangat jelek. Pada tanggal 30 Oktober militer Indonesia yang terakhir telah ditarik.⁸¹⁸ Komandan Falintil – Xanana Gusmão hadir di lapangan terbang Dili untuk menyaksikan pemberangkatan tentara terakhir yang ditarik.

659. Pengalaman 250.000 pengungsi di Timor Barat benar-benar berbeda dengan para pengungsi yang masih berada di wilayah Timor-Leste. Sebagian besar dari mereka tinggal di kamp sepanjang perbatasan dan di dekat Kupang. Komisi mendengarkan kesaksian langsung dari koalisi LSM Indonesia dari Timor Barat, yang bekerja dengan pengungsi Timor-Leste.⁸¹⁹ Koalisi menceritakan tentang kamp-kamp yang dikontrol oleh TNI dan kelompok milisi, di mana orang-orang sipil hidup di bawah ketakutan dan intimidasi. Perempuan dewasa dan anak-anak perempuan khususnya tidak berdaya dan rentan. Kesaksian pada Komisi dari perempuan yang menjadi korban menceritakan tentang perbudakan seksual oleh para anggota milisi.

660. Fasilitas di Timor Barat tidak layak dan tidak dapat menampung jumlah pengungsi yang besar tersebut. Saat tiba, banyak pengungsi menandatangani formulir yang menyatakan keinginan mereka untuk menjadi WNI dan bersedia dimukimkan di wilayah manapun di Indonesia. Beberapa orang kemudian mengatakan bahwa mereka menandatangani karena dipaksa.⁸²⁰ Kelompok milisi berkuasa di kamp pengungsi, dan terus mencari tokoh-tokoh CNRT. Mau Hodo, yang telah mencoba berdialog dengan KPS setelah Konsultasi Rakyat, hilang di Atambua.⁸²¹ Lama setelah referendum, milisi terus melakukan pelecehan dan mengintimidasi pengungsi, dan menyebarkan informasi bohong mengenai situasi di Timor-Leste. Mereka juga turut campur dengan orang-orang Timor yang ingin kembali.⁸²²

Pembentukan UNTAET: Resolusi Dewan Keamanan 1272, 25 Oktober 1999

661. Sejumlah kecil staf UNAMET kembali ke Timor-Leste bersama Interfet. Petugas penghubung militer merupakan orang-orang yang pertama kembali, kemudian disusul oleh polisi dan petugas urusan sipil. Perhatian utama mereka adalah keamanan dan stabilitas, dan menangani krisis kemanusiaan yang dianggap mendesak. Dengan penempatan pasukan Interfet dan pengamanan wilayah Timor-Leste, intervensi kemanusiaan internasional dalam jumlah besar

^{*} Dengan kekuatan penuh, Interfet terdiri dari kurang lebih 11.000 pasukan dari dua puluh negara yang berbeda. Australia bertindak sebagai pemimpin pasukan, dan memiliki 5.000 pasukan. Diperlukan waktu beberapa lama untuk mencapai kekuatan maksimum, dan pada awalnya, jumlah pasukan TNI masih melebihi jumlah pasukan Interfet [Dunn, *East Timor*, hal. 361].

mulai berdatangan. Konferensi donor diadakan pada bulan November di Tokyo di mana janji sebesar \$ 522 juta diterima.⁸²³ Badan-badan PBB, IMF dan Bank Dunia, serta LSM internasional melakukan mobilisasi bantuan keadaan darurat. CNRT menyiapkan jaringannya untuk membantu operasi ini. LSM Timor aktif dalam bantuan kemanusiaan dan koordinasi, meskipun mereka menghadapi tantangan besar mengurus lembaga mereka sendiri sementara operasi internasional yang besar berlangsung. Gereja Katolik memainkan peranan penting dalam melakukan koordinasi di banyak tempat.

662. Indonesia tetap berkeras bahwa secara de jure ia mengontrol Timor-Leste sampai MPR membuat keputusan resmi mengenai hasil Konsultasi Rakyat. Namun demikian, Indonesia setuju bahwa PBB dapat memegang kekuasaan secara de facto.⁸²⁴ Pada tanggal 19 Oktober MPR mencabut Undang-Undang tahun 1976 tentang penggabungan Timor-Leste sebagai sebuah provinsi (Timor-Leste), dan pada tanggal 25 Oktober Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1272 (1999) yang membentuk Pemerintahan Transisi PBB untuk Timor-Leste (UNTAET), yang menjadikan PBB sebagai pemegang otoritas pemerintahan resmi untuk Timor-Leste.

Pulang ke Rumah

663. Bagi orang Timor yang berada di Timor Barat, di daerah lain di Indonesia, di Portugal, Australia dan belahan dunia yang lain, orang-orang yang terusir baru-baru ini, mereka yang dibebaskan dari berbagai penjara Indonesia, dan mereka yang lama berada dalam pengasingan, pertanyaannya ialah kapan dan bagaimana mereka dapat kembali ke Timor-Leste. Uskup Belo adalah tokoh yang pertama yang kembali pada tanggal 5 Oktober setelah sebulan berada di luar wilayah Timor-Leste. Xanana Gusmão kembali di tengah-tengah sambutan yang meriah pada tanggal 22 Oktober. Setelah 24 tahun berada di luar negeri José Ramos-Horta tiba dengan Pemerintahan Transisi PBB yang baru diangkat dan Utusan Khusus Sekjen PBB, Sérgio Vieira de Mello, pada tanggal 1 Desember. Pengungsi Timor-Leste mulai kembali dari Timor Barat pada bulan-bulan akhir tahun 1999, dibantu oleh UNHCR, IOM dan LSM internasional. Yang lain, sebagian berada di pengasingan sejak 1975, kembali dan menemukan kampung halaman mereka menjadi abu.

664. Hak untuk menentukan nasib sendiri akhirnya dihormati dan ditegakkan oleh masyarakat internasional, namun hanya setelah orang-orang Timor-Leste menunjukkan keberanian besar untuk menghadapi intimidasi dan kekerasan masal dan setelah mereka memberikan suara mereka. Tugas membangun negara didasarkan atas penghormatan hak asasi manusia, penegakan hukum serta prinsip demokrasi, termasuk pengadilan bagi kejahatan masa lalu terhadap kemanusiaan, adalah pekerjaan dan harapan generasi saat ini dan masa mendatang.

¹ Dr Asvi Warman Adam, dalam sebuah makalah berjudul "Sejarah Timor-Timur dalam Sejarah Indonesia" disampaikan dalam Audensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.

² Luís Filipe F. R. Thomaz, *De Ceuta A Timor*, DIFEL, Lisbon, 1994, h. 598.

³ James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Media, Edisi ke tiga 2003, Australia, h.17

⁴ René Pélissier (ed), *Timor en Guerre, La Crocodile et Les Portugais (1847-1913)*.

-
- ⁵ Dr Soebandrio, yang kemudian menjabat Menteri Luar Negeri, pada Komite Pertama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1957, kutipan dalam Dunn hal. 85-6
- ⁶ Geoffrey Robinson, "People's war: militias in East Timor and Indonesia", dalam *South East Asia Research* 9, 3, hal. 271-318.
- ⁷ Hélio Felgas, *Timor Português*, Agência Geral do Ultramar, 1956, hal. 227, seperti dikutip dalam Abílio Araújo, *Timor-Leste: Os Loricos Vontaram a Cantar*, Lisboa, 1977, hal. 75.
- ⁸ Lihat Geoffrey C. Gunn, *Timor Loro Sae: 500 Years*, Livros do Oriente, Macau, 1999, hal. 95-103.
- ⁹ Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, h.17
- ¹⁰ Rene Pelessier (eds), *Timor en Guerre, La Crocodile et Les Portugais (1847-1913)*
- ¹¹ Peter Hastings, "The Timor Problem", *Australian Outlook*, Vol. 29, No. 1.
- ¹² David Scott "judul?", pidato yang disampaikan pada audiensi nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15-16 Maret 2004.
- ¹³ Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, pp. 19-22.
- ¹⁴ Lihat Tomás Gonçalves "kesaksian", Pidato yang disampaikan pada audiensi nasional CAVR tentang para Pelaku Sejarah dan Mario Carrascalão sebagai Pelaku Sejarah.
- ¹⁵ Gunn, *Timor Loro Sa'e* hal. 235-236.
- ¹⁶ Rowena Lennox, *Fighting Spirit of East Timor: The life of Martinho da Costa Lopes*, Pluto Press, 2000, hal. 62.
- ¹⁷ Xanana Gusmão, *Timor-Leste: Un Povo Uma Pátria*, Edições Colibri, 1994, hal. 3.
- ¹⁸ Arnold Kohen, *From the Place of the Dead: Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, Lion Books, 1999, hal. 88.
- ¹⁹ Lennox, *Fighting Spirit*, hal. 63.
- ²⁰ Gusmão, *Um Povo Uma Pátria*, hal. 3.
- ²¹ Lihat Bill Nicol, *Timor: The Stillborn Nation*, Visa Books, Melbourne and Connecticut, 1978, hal. 21
- ²² João César das Neves, *The Portuguese Economy: A Picture in Figures XIX and XX Centuries*, Universidade Católica Editora, 1994, hal. 79-84.
- ²³ ACFOA (Australian Council for Overseas Aid), *Report On Visit to East Timor*, Oktober 1975, hal. 7.
- ²⁴ Dokumen resmi Sidang Umum, Sesi ke-30, Suplemen No. 23 (A/10023/Rv.1), bab VIII, lampiran, bagian B, paragraf 56.
- ²⁵ Thomaz, hal. 686-687; Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor: Fretilin 1974-1978*, *The Origins, Ideologies and strategies of a nationalist movement*, Otford Press, 2002, hal. 39.
- ²⁶ João Mariano de Sousa Saldanha, *Ekonomi Politik Pembangunan Timor-Leste*, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 57; lihat juga: Lembar Kerja tentang Timor dipersiapkan oleh Dekretariat PBB untuk Komite Khusus tentang Dekolonisasi, 20 November 1975, dalam Heike Krieger (ed.), *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge University Press, 1997, Timor: Pequena Monografia, Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1965, hal. 18-26.
- ²⁷ *Timor: pequena monografia*, Agência-Geral do Ultramar, 1965, hal. 47-48.
- ²⁸ Resolusi Sidang Umum PBB 1807 (XVII), 1962, para. 4 (c). Lihat Heike Krieger (ed.), *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge University Press, 1997, hal. 31.
- ²⁹ Bill Nicol, *Timor: The Stillborn Nation*, Visa Books, Melbourne and Connecticut, 1978, hal.21
- ³⁰ Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor (Relatório CAEPDT), Presidência do Conselho de Ministros, Lisbon, 1981, hal. 25.

-
- ³¹ Norrie MacQueen, *The Decolonization of Portuguese Africa* : Metropolitan Revolution and The Dissolution of Empire, Longman, London, 1997 hal. 79.
- ³² Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor (Relatório CAEPDT), Presidência do Conselho de Ministros, Lisbon, 1981, hal. 26, hal. 26.
- ³³ Dekrit No. 7/1974. Lihat Heike Krieger (ed.), *East Timor and the International Community: Basic Dokumens*, Cambridge University Press, 1997, hal. 34.
- ³⁴ Lihat Lemos Pires, 2003, testimoni video kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003
- ³⁵ Mário Carrascalão, Xanana Gusmão, Francisco Xavier do Amaral, Domingos de Oliveira, João Carrascalao semua menjelaskan masalah ini dalam kesaksian masing-masing pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal pada tahun 1974-76, Dili, 15-18 Desember 2003.
- ³⁶ Kreiger, hal. 25-29.
- ³⁷ Ibid, hal. 30-31.
- ³⁸ Mário Lemos Pires, *Descolonização de Timor*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 46-47.
- ³⁹ *Relatório* CAEPDT, hal. 44.
- ⁴⁰ Domingos Oliveira, mantan Sekretaris Jenderal partai politik UDT berbicara sebagai Pelaku Sejarah pada audiensi publik nasional CAVR tentang Konflik Internal pada tahun 1974-76, Dili, 18 Desember 2003
- ⁴¹ Lihat Mario Lemos Pires, *Relatório do Governo de Timor* , hal. 28-30. Lihat juga kesaksian dari Mário Carrascalão dan Domingos de Oliveira tentang UDT, dan Mári Alkatiri, José Ramos-Horta dan Francisco Xavier do Amaral tentang ASDT dan Fretilin pada audiensi publik nasional CAVR tentang Konflik Internal pada tahun 1974-76, 15-18 Desember 2003
- ⁴² Domingos de Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003.
- ⁴³ Mário Lemos Pires, *Descolonização de Timor*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 191-121.
- ⁴⁴ Lihat Pires, *Relatório*, hal. 23; lihat juga Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism* , The University of Queensland Press, 1978, hal. 67.
- ⁴⁵ Lihat wawancara dengan Paulo Freitas da Silva, Presiden Trabalista, kantor CAVR, 9 Juli 2003; lihat juga Pires, *Relatório*, hal. 20.
- ⁴⁶ James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville, 2003, hal. 62.
- ⁴⁷ Lihat Dr José Ramos-Horta, Yusuf Wanandi dan James Dunn, kesaksian lisan kepada CAVR, Audiensi Publik mengenai Konflik Internal 1974-76, pada 18 Desember 2003. Testimoni Yusuf Wanandi disampaikan sebagai sebuah paper dan dibacakan secara publik kepada Komisioner Nasional Pdt. Agostinho Vasconcelos
- ⁴⁸ Lihat Gary Gray, kesaksian kepada CAVR, Audiensi Publik Nasional mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁴⁹ Lihat Dr José Ramos-Horta, kesaksian kepada CAVR, Audiensi Publik mengenai Konflik Internal 1974-76, 17 Desember 2003.
- ⁵⁰ Francese Vendrell, kesaksian kepada CAVR, Audiensi Publik mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁵¹ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, London, hal.155; Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, Allen & Unwin, NSW, 1994, hal.20
- ⁵² Lihat James Dunn, kesaksian lisan kepada CAVR, Audiensi Publik mengenai Konflik Internal 1974-76, 17 Desember 2003; Lihat also Xanana Gusmão, kesaksian lisan kepada CAVR, Audiensi Publik mengenai Konflik Internal 1974-76, 15 Desember 2003.

-
- ⁵³ J.R. Walsh dan G.J. Munster, *Documents on Australian Defence and Foreign Policy 1968-1975*, Hong Kong, 1980, h. 192-193.
- ⁵⁴ Rekaman Resmi Majelis Umum, dikutip di *Decolonisation*, UN Department of Political Affairs, No.7, Agustus 1976, hal.41
- ⁵⁵ Faximile dari surat tersebut ada di Arsip CAVR.
- ⁵⁶ Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT], Wendy Way (ed.), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, University of Melbourne Press, 2000, h.18.
- ⁵⁷ See UN document A/AC 108/L. 13.3, tertanggal 3 Desember 1962, dikutip dalam John Taylor, *East Timor: The Price of Freedom*, hal. 21. Lihat juga Ken Conboy, *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*, Equinox Publishing, Singapore, 2004, hal. 39.
- ⁵⁸ Lihat Mári Alkatiri, kesaksian kepada CAVR, Audiensi Publik mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ⁵⁹ Wawancara dengan Aloysius Sugianto, mantan perwira Opsus, Jakarta, 24 Juli 2003.
- ⁶⁰ Pernyataan Duta Besar Sani kepada Majelis Umum, 13 Desember 1975, dicetak ulang dalam Drs Machmuddin Noor, *Lahirnya Propinsi Timor-Leste*, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, 1977, h. 271.
- ⁶¹ James Dunn, *East Timor: A Rough Passage*, hal. 90. Lihat juga kesaksian James Dunn ke CAVR pada Audiensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ⁶² Soekanto dkk., *Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor-Leste*, Yayasan Parikesit, November 1977, h. 97.
- ⁶³ Lihat dokumen 7 di DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of East Timor*, h. 56.
- ⁶⁴ Lihat dokumen 26 di DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of East Timor*, h. 97.
- ⁶⁵ Bilveer Singh, *Timor-Leste, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan*, Institute for Policy Studies, 1998, h. 52.
- ⁶⁶ Wawancara dengan Jusuf Wanandi, CSIS, Jakarta, 24 Juli 2003.
- ⁶⁷ See Mario Carrascalao, Kesaksian ke CAVR pada Audiensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ⁶⁸ José Ramos-Horta, *Timor-Leste: Amanhã em Dili*, Publicações Dom Quixote, 1994, pp. 58-59. Or *Funu: The unfinished saga of East Timor*, The Red Sea Press, 1987, h. 6-7.
- ⁶⁹ Ramos-Horta, op. cit., h. 75-76. Dia juga mengatakan bagaimana dia diklaim “memprovokasi” para pemuda di Bidau untuk melemparkan batu kepada prajurit Portugis. Klaim yang jelas-jelas salah.
- ⁷⁰ Domingos Oliveira, Kesaksian Lisan ke CAVR pada Audiensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ⁷¹ Domingos Oliveira, Kesaksian ke CAVR pada Audiensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ⁷² Fransisco Xavier Do Amaral, Kesaksian kepada CAVR, Audiensi Publik mengenai Konflik Internal, 15-18 Desember 2003
- ⁷³ Lemos Pires, Kesaksian Video ke CAVR pada Audiensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ⁷⁴ Mário Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003.

-
- ⁷⁵ Lihat João Carrascalão, Mári Alkatiri, Francisco Xavier Amaral dan Domingos de Oliveira, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 16 Desember 2003.
- ⁷⁶ José Ramos-Horta, *Timor-Leste-Amanhá em Díli*, Publicações Dom Quixote, 1994, h. 96-97.
- ⁷⁷ Lihat Domingos Oliveira, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁷⁸ Xanana Gusmão, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁷⁹ Wawancara CAVR dengan Tomás Gonçalves, Dili, 23 Oktober 2003.
- ⁸⁰ Lihat Rogério Lobato, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁸¹ Lihat Rogerio Lobato, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁸² Pires, *Decolonização*, h. 112-113.
- ⁸³ Lihat Rogerio Lobato, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁸⁴ Lihat Mari Alkatiri, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003; Lihat juga wawancara dengan Marito Reis.
- ⁸⁵ Lihat Mário Carrascalão dan Domingos Oliveira, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁸⁶ Lihat Mari Alkatiri, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁸⁷ Lihat Mari Alkatiri, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁸⁸ Manuel Carrascalão, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15 Desember 2003.
- ⁸⁹ Lihat Domingos Oliveira, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁹⁰ Fretilin, *Manual e Programa Políticos*, h. 9
- ⁹¹ Lihat Mari Alkatiri, Testimoni ke CAVR, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁹² Lihat Mario Carrascalão, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁹³ Lihat Mario Carrascalão, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁹⁴ Lihat José Ramos-Horta, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁹⁵ João Carrascalão, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁹⁶ José Ramos-Horta, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁹⁷ Mario Carrascalão, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.

-
- ⁹⁸ Mario Carrascalão, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁹⁹ Mario Carrascalão, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁰⁰ João Carrascalão, dan Mári Alkatiri, Kesaksian Lisan ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁰¹ Mari Alkatiri, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁰² Lihat José Ramos-Horta, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁰³ Lihat Tomás Gonçalves, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁰⁴ Lihat, misalnya, Manuel Duarte, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003; lihat juga Alexander da Costa dan António Amado, Kesaksian ke CAVR Audensi Publik Nasional mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003; Lihat juga Domingos Maria Alves, Kesaksian ke CAVR, Audensi Publik Nasional Mengenai Penahanan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ¹⁰⁵ Isabel dos Santos Neves, Kesaksian ke CAVR, Audensi Publik Mengenai Anak-Anak dan Konflik , 29-30 Maret 2004.
- ¹⁰⁶ Xanana Gusmão, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁰⁷ Mário Lemos Pires, *Decolonização de Timor*, Publicações Dom Quixote, 1994, h. 58.
- ¹⁰⁸ Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Process de Descolonização de Timor II, [Analisa dan Penjelasan mengenai prosess Dekolonisasi di Timor II]
- ¹⁰⁹ Lemos Pires, Kesaksian video ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 16 Desember 2003.
- ¹¹⁰ Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Process de Descolonização de Timor II, h. 38.
- ¹¹¹ A. Barbedo de Magalhães, *Descolonização do Ensino em Timor: Um Projecto a Intervenção Indonésia Matou á Nascimento*, Porto, Februari 1997.
- ¹¹² Lihat Rogério Lobato, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹¹³ Lihat Lemos Pires, Kesaksian Video ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 17 Desember 2003.
- ¹¹⁴ Lihat Mario Carrascalão, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹¹⁵ Lihat Domingos Oliveira, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹¹⁶ Lihat Mario Carrascalao and Mari Alkatiri, Kesaksian lisan ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹¹⁷ Domingos Oliveira, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹¹⁸ Lemos Pires, Kesaksian Video ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.

-
- ¹¹⁹ Lihat, "Setelah Townsville," *Tempo*, 5 Mei 1975, Conboy, *Kopassus*, h. 208; Lihat juga Ramos-Horta, *Funu*, h. 66.
- ¹²⁰ Ramos-Horta, *Funu*, h. 64.
- ¹²¹ Mario Carrascalão, Kesaksian Lisan ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹²² Lihat Domingos Oliveira, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹²³ Lihat kesaksian dari Xanana Gusmão dan Mario Carrascalão ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹²⁴ Domingos de Oliveira, mantan Sekretaris Jenderal UDT, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹²⁵ "Indonesia Plans Armed Takeover in Timor," *Melbourne Age*, 22 Februari 1975, dikutip dalam Taylor, *East Timor*, h 40 dan catatan kaki 44; lihat juga Conboy, *Kopassus*, h 238.
- ¹²⁶ Jiwa Atmaja, *TNI Kembali ke Jatidiri: Profesionalisme Kodam IX/Udayana*, h 74.
- ¹²⁷ Conboy, *Intel*, h 90.
- ¹²⁸ Wawancara CAVR dengan Tomás Gonçalves, pelantikan anggota Apodeti, Dili, 23 Oktober 2003.
- ¹²⁹ Tomás Gonçalves, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹³⁰ Tomás Gonçalves, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹³¹ Conboy, *Kopassus*, h 207.
- ¹³² Soekanto (ed.), *Integrasi*, Yayasan Parikesit, 1976, h. 116-134.
- ¹³³ Pires, *Decolonização*, h. 49.
- ¹³⁴ Relatorio II, h.54.
- ¹³⁵ Relatorio II h.44-46.
- ¹³⁶ Major-General Mário Lemos Pires, Kesaksian Video ke CAVR pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹³⁷ Lihat Dokumen 123 di DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976*, h 247.
- ¹³⁸ Lihat Dokumen 26, Record of Meeting between Whitlam and Soeharto, in DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor*, Department of Foreign Affairs and Trade[DFAT]/University of Melbourne Press 1974-76, h. 96.
- ¹³⁹ Lihat Dokumen 26, Record of Meeting between Whitlam and Soeharto, in DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, Department of Foreign Affairs and Trade[DFAT]/University of Melbourne Press h. 97.
- ¹⁴⁰ Lihat Dokumen 123, *Record of Conversation between Whitlam and Soeharto, Townsville, 4 April 1975*, in Wendy Way, *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, Department of Foreign Affairs and Trade[DFAT]/University of Melbourne Press, 2000, h. 245
- ¹⁴¹ Lihat Dokumen 123, *Record of Conversation between Whitlam and Soeharto, Townsville, 4 April 1975*, in Wendy Way, *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, Department of Foreign Affairs and Trade[DFAT]/University of Melbourne Press, 2000, h. 245
- ¹⁴² Lihat Dokumen 14, DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, h. 119.

-
- ¹⁴³ Lihat Dokumen 37, Document 37, Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76, h.111.
- ¹⁴⁴ Lihat Document 127, Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76, h.253.
- ¹⁴⁵ Richard Woolcott, *The Hot Seat, Reflection on Diplomacy from Stalin's Death to the Bali Bombings*, Harpers Collins Publishers, Sydney, 2003, h.306.
- ¹⁴⁶ Pires, *Decolonização*, Publicações Dom Quixote, 1994, h. 167-168.
- ¹⁴⁷ Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Kesaksian ke CAVR, Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁴⁸ Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Kesaksian ke CAVR, Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁴⁹ Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Perdana Menteri RDTL, di kantor Perdana Menteri, Juni 2004. Lihat juga kesaksian oleh Mari Alkatiri pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁵⁰ Mário Carrascalão, Kesaksian pada Audensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik *Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁵¹ National Security Archive collection, Memorandum of Conversation between Presidents Ford and Suharto, 5 July 1975, Camp David.
- ¹⁵² Woolcott, *The Hot Seat*, h.148.
- ¹⁵³ Lihat Domingos de Oliveira dan João Carrascalão, kesaksian lisan pada CAVR *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 18 Desember 2003.
- ¹⁵⁴ Lihat Mayor-Jenderal Mário Lemos Pires, kesaksian dalam video pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 16 Desember 2003.
- ¹⁵⁵ Lihat Tomás Gonçalves, kesaksian lisan pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 18 Desember 2003.
- ¹⁵⁶ Wawancara CAVR dengan João Carrascalão, Dili, 30 Juli 2004.
- ¹⁵⁷ Wendy Way (ed), *Documents on Australian Foreign Policy: Australia and the Incorporation of Portuguese Timor*, 1974-76, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Dokumen 169, hal.313,
- ¹⁵⁸ João Carrascalão, kesaksian pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁵⁹ Lihat Mário Carrascalão dan Domingos de Oliveira, kesaksian pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003 secara berurutan.
- ¹⁶⁰ Submisi Domingos Oliveira pada CAVR, hal.26
- ¹⁶¹ Lihat Pires, *Decolonização*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 181-231
- ¹⁶² Pires, *Decolonização*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 204.
- ¹⁶³ Lihat Rogério Lobato, kesaksian pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 17 Desember 2003.
- ¹⁶⁴ Lihat Mário Carrascalão dan Domingos de Oliveira, Historical Actors, kesaksian pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15 dan 18 Desember 2003 secara berurutan.
- ¹⁶⁵ Lihat Mayor-Jenderal Mário Lemos Pires, kesaksian dalam video pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 16 Desember 2003.
- ¹⁶⁶ Lihat *Relatório da CAEPDT*, Presidencia do Conselho de Ministros, Lisbon, 1981, hal. 186-191; lihat juga Lemos Pires, *Decolonização*, hal. 228.

-
- ¹⁶⁷ Lemos Pires, *Decolonização*, hal. 213.
- ¹⁶⁸ Lemos Pires, *Decolonização*, hal. 225.
- ¹⁶⁹ Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, The University of Queensland Press, 1978, hal. 121-122; lihat juga Pires, *Decolonização*, hal. 205
- ¹⁷⁰ *Relatório do Governo de Timor*, hal. 118.
- ¹⁷¹ Wawancara CAVR dengan Rogério Lobato, Kementerian Dalam Negeri, 26 Agustus 2003.
- ¹⁷² Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, anggota komite regional ASDT, kantor CAVR, 21 Juni 2004.
- ¹⁷³ Wawancara CAVR dengan Rogério Lobato, Kementerian Dalam Negeri, 26 Agustus 2003.
- ¹⁷⁴ Mario Carrascalão, kesaksian pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15 Desember 2003; Mayor-Jenderal Mário Lemos Pires, kesaksian dalam video pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15 Desember 2003; dan Profil Komunitas, Suco Asucaí Lorosae, Nain Feto.
- ¹⁷⁵ Mario Carrascalão, kesaksian lisan pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 18 Desember 2003.
- ¹⁷⁶ Francisco Xavier do Amaral, kesaksian lisan pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 18 Desember 2003.
- ¹⁷⁷ Dunn, *East Timor*, 2003, hal. 176
- ¹⁷⁸ Wawancara CAVR dengan Elidio Maria de Jesus, 24 Juni 2003; lihat juga pernyataan HRVD # 03426-01 dan 03427-01.
- ¹⁷⁹ Lihat Adelino Soares, kesaksian pada CAVR, *Audiensi Publik tentang Pemenjaraan Politis*, 17-18 Desember 2003; lihat juga Manuel Duarte, kesaksian lisan pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003; lihat juga wawancara dengan Florentino de Jesus Martins, Ermera, [interview tanpa tanggal].
- ¹⁸⁰ Xanana Gusmao, kesaksian lisan pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁸¹ Rogério Lobato, kesaksian lisan pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁸² Lihat João Carrascalão dan Mári Alkatiri, kesaksian lisan pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal Bersenjata 1974-76*, 15-18 Desember 2003
- ¹⁸³ Tentang keterlibatan tokoh-tokoh senior dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Fretilin, lihat wawancara CAVR dengan Humberto Martins da Cruz, Dili, dan wawancara CAVR dengan Francisco Gonçalves; tentang pelanggaran-pelanggaran UDT, lihat wawancara CAVR dengan João Carrascalão, Dili, 30 Juli 2004.
- ¹⁸⁴ Lihat Mário Carrascalão dan Rogério Lobato, kesaksian lisan pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15 dan 17 Desember 2003 secara berurutan.
- ¹⁸⁵ Lihat Mário Carrascalão, kesaksian oral pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15 Desember 2003.
- ¹⁸⁶ Lihat Tomás Gonçalves, kesaksian oral pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 18 Desember 2003; lihat juga wawancara dengan Aloysius Sugyianto, Jakarta, 23 Juli 2003.
- ¹⁸⁷ Lihat Tomás Gonçalves, kesaksian oral pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 18 Desember 2003, João Carrascalão, *ibid*; dan Bapa Francisco Fernandes dan Bapa

Apolinario Guterres, Pernyataan Dikirim ke Komite Empat Sidang Umum PBB atas nama Comissão dos Refugiados de Timor Oriental, 26 Oktober 1979.

¹⁸⁸ Pires, *Decolonização*, hal. 247-248.

¹⁸⁹ Jolliffe, *East Timor*, hal. 139; lihat juga Dunn, *East Timor*, 2003 hal. 179.

¹⁹⁰ *Relatório da CAEPDT*, hal. 230.

¹⁹¹ Lihat Relatorio da CAEPDT I, hal.308-311; Relatorio da CAEPDT, hal.231; Dunn, op.cit, hal. 184; dan Jolliffe, op.cit.,hal.184.

¹⁹² Lihat Akihisa Matsuno, "The Balibo Declaration: Between Text and Fact," dalam Pedro Pinto Leite [editor], *The East Timor Problem and the Role of Europe*, International Platform of Jurists for East Timor, 1996.

¹⁹³ Heike Krieger [editor], *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, hal. 70-71.

¹⁹⁴ Mario Carrascalão, kesaksian pada CAVR, *Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76*, 15 Desember 2003; lihat juga Jolliffe, hal. 150.

¹⁹⁵ Conboy, *Kopassus*, hal. 211 dan 233; lihat juga Julius Pour, *Benny Moerdani: Portrait of a Soldier Statesman*, Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, Jakarta, 1993, hal. 390.

¹⁹⁶ Conboy, *Kopassus*, hal. 218-221; lihat juga: wawancara dengan Rui Lopes, Camenassa, Covalima, 31 Oktober, 2003.

¹⁹⁷ Conboy, *Kopassus*, hal. 212.

¹⁹⁸ Wawancara CAVR dengan Rui Lopes, mantan pemimpin Partisan, Camenassa, Covalima, 31 Oktober 2003.

¹⁹⁹ "International Committee of the Red Cross, East Timor Relief Operation," *Report to the ICRC Geneva, 16 September 1976*, hal. 1.

²⁰⁰ Jolliffe, *East Timor*, hal. 146.

²⁰¹ Jolliffe, *East Timor*, hal. 164; lihat juga Helen Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, Yayasan HAK & Sahe Institute for Liberation, Dili 2000, hal. 195.

²⁰² Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.

²⁰³ Jolliffe, *East Timor*, h 155; Hill, *Gerakan Pembebasan*, 2000, h 197; Dunn, *East Timor*, 1983, h 271.

²⁰⁴ Komite Sentral Fretilin, siaran pers, 13 September 1975, ditandatangani oleh Francisco Xavier do Amaral. [arsip CAVR].

²⁰⁵ *Relatório da CAEPDT*, h 230.

²⁰⁶ Pernyataan Komite Sentral Fretilin, 16 September 1975, dokumen ditulis tapi tidak ditandatangani oleh Francisco Xavier do Amaral. [Arsip CAVR].

²⁰⁷ Dunn, *Timor: A People Betrayed*, hal. 229.

²⁰⁸ Jolliffe, *East Timor*, h 180.

²⁰⁹ Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.

²¹⁰ Lihat contohnya HRVD Pernyataan 02226; 09081; 08432.

²¹¹ Lihat contohnya João Baptista, 19/08/2003, Aíleu, Pernyataan 05806-01, CAVR basis data PRK; dan João Soares, 15/05/2003, Ainaro, Pernyataan 04969-01, CAVR basis data PRK.

²¹² Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

-
- ²¹³ HRVD Pernyataan 01688.
- ²¹⁴ Lihat Mári Alkatiri, kesaksian pada audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, sebagai Sekretaris Jenderal Fretilin, 18 Desember 2003.
- ²¹⁵ *Report on Visit to Portuguese Timor by Senator Gietzelt dan K.L. Fry*, h 4 [Arsip CAVR]; dan Dunn, *East Timor*, 1983, h 211. Lihat juga Dunn, *East Timor: Rough Passage to Independence*, hal. 220.
- ²¹⁶ Lihat Mári Alkatiri, kesaksian pada audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974-76, sebagai Sekretaris-Jenderal Fretilin, 18 Desember 2003.
- ²¹⁷ Lihat Senator Gietzelt dan Mr KL Fry, *Report on visit to Portuguese Timor*, September 1975; lihat juga James Dunn, *People Betrayed*, hal. 187; lihat juga wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004.
- ²¹⁸ Monis da Maia, kesaksian pada audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-8 Desember 2003.
- ²¹⁹ Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, kantor Perdana Menteri, Dili, 25 Juni 2004.
- ²²⁰ Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Manlewana-Dili, 5 Desember 2004.
- ²²¹ Wawancara CAVR dengan João da Costa, Letefoho-Same, 24 Juni 2003.
- ²²² José Ramos-Horta, *Timor-Leste Besok di Dili*, hal. 107-113.
- ²²³ Wawancara CAVR dengan João da Costa, Letefoho-Same, 24 Juni 2003.
- ²²⁴ *Report on Visit to Portuguese East Timor by Senator Gietzelt dan K.L. Fry*, h 4.
- ²²⁵ Rogério Lobato, kesaksian pada audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
- ²²⁶ Mári Alkatiri, kesaksian pada audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 16 Desember 2003.
- ²²⁷ Wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004.
- ²²⁸ HRVD Pernyataan 03361-01.
- ²²⁹ Xanana Gusmão, kesaksian audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15 Desember 2003; Lihat juga Rogério Lobato, kesaksian pada audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15 Desember 2003.
- ²³⁰ Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
- ²³¹ Lihat Dunn, p 211; Lihat juga *Report on Visit to Portuguese East Timor by Senator Goetzelt dan K.L. Fry*, h 3, [Arsip CAVR].
- ²³² *Report on Visit to Portuguese East Timor by Senator Gietzelt dan K.L. Fry*, h 8.
- ²³³ Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor*, Otford Press, Sydney, 2001, h 154.
- ²³⁴ Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
- ²³⁵ Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2001, h 155.
- ²³⁶ Hill, *Gerakan Pembebasan*, 2000, h 185.
- ²³⁷ “*ICRC Relief Programme in Eastern Timor*”, 24 November 1975, h 2; Lihat juga Geoffrey Gunn, *Timor Loro Sae: 500 Years*, Livros do Oriente, 2000, bab 13 “*Colonial Capitalism dan Underdevelopment in Post-war Timor.*”
- ²³⁸ Lihat John G. Taylor, *Perang Tersembunyi: Sejarah Timor-Leste yang Dilupakan*, Fortilos, Jakarta, 1998, h. 1-28. [Alih bahasa dari John G. Taylor, *Indonesia’s Forgotten War: The Hidden History of East Timor*, Zed Books, London, 1991.]

-
- ²³⁹ Andre Pasquier kepada ICRC Geneva, *Concerning the Situation in East Timor, Report on the activities of the delegation from 1-15 September*, Darwin, 16 September 1975.
- ²⁴⁰ Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Lecidere, 28 Agustus 2003.
- ²⁴¹ Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, 5 Desember 2003; Lihat juga wawancara dengan Rafael Nascimento, Aileu, Juni 2003.
- ²⁴² Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, 5 Desember 2003; Lihat juga wawancara dengan Rafael Nascimento, Aileu, Juni 2003.
- ²⁴³ *Report on Visit to Portuguese East Timor*, Senator Gietzelt dan K.L. Fry, h 6.
- ²⁴⁴ ACFOA, “*Report on a Visit to East Timor for the ACFOA Timor Task Force*,” h 8.
- ²⁴⁵ Hill, *Gerakan Pembebasan*, 2000, h 192.
- ²⁴⁶ Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, anggota komite regional ASDT, kantor CAVR di Dili, 21 Juni 2004.
- ²⁴⁷ *Report on Visit to East Timor for the ACFOA Timor Task Force*, h 7 dan h 4.
- ²⁴⁸ Shirley Shackleton, “Planting a Tree in Balibo” , dalam Peter Carey, Ed, *East Timor at the Crossroads*, Cassell, New York, 1995, h. 116.
- ²⁴⁹ Jolliffe, *East Timor*, h 201.
- ²⁵⁰ Adelino Gomes (Portuguese journalist), rekaman film ada pada Arsip CAVR.
- ²⁵¹ Transkripsi wawancara dengan João Vieja Carrascalão, 13 Maret 1996, h 131, “Report on the Deaths of the Australian Based Journalists in East Timor in 1975”, Juni 1996.
- ²⁵² Van Atta dan Toohey, “The Timor Papers, part II” *The National Times*, h 16.
- ²⁵³ Wawancara CAVR dengan Albino do Carmo, Suai, 31 Oktober 2003.
- ²⁵⁴ Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor* , h 21; Conboy , *Kopassus* , hal. 231-232; *Korps Marinir TNI AL, 1970-2000*, Jakarta, Dinas Penerangan Korps Marinir, 2000, hal. 188-189.
- ²⁵⁵ Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, former leader of Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
- ²⁵⁶ Jolliffe, *East Timor*, p 201; lihat juga Mári Alkatiri, kesaksian yang disampaikan pada audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ²⁵⁷ Francisco Xavier do Amaral, “ *Comrades! Independence or death! We will win,*” terjemahan Bahasa Inggris dari pidato yang disampaikan dalam pelantikan menteri kabinet RDTL, Dili, 29 November 1975, h 8 [Copy available at CAVR].
- ²⁵⁸ Jolliffe, AAP’s Delivery, 11 Oktober 1975, dikutip dari Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2001, h 157.
- ²⁵⁹ Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional*, h 197.
- ²⁶⁰ Jolliffe, *East Timor*, h. 215-16.
- ²⁶¹ Dunn, *East Timor*, 2003, h 232.
- ²⁶² Wawancara CAVR dengan Adriano João, bekas Falintil selama 1975, Kantor CAVR, September 2004.
- ²⁶³ Jolliffe, *East Timor* , h 217; Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Kantor Perdana Menteri, Dili, 25 Juni 2004.
- ²⁶⁴ Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Kantor Perdana Menteri, Dili, 25 Juni 2004; lihat juga Jolliffe, *East Timor*, h 217; lihat juga José Ramos Horta, *Funu: Perjuangan Timor Lorosae Belum Selesai*, Solidarior, Jakarta, 1998, h. 145-146 [terjemahan dari Jose Ramos Horta, *Funu: Unfinished Saga of East Timor*, The Red Sea Press, Trenton NJ, 1987].

-
- ²⁶⁵ Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Kantor Perdana Menteri, Dili, 25 Juni 2004; lihat juga Jolliffe, *East Timor*, h 216; lihat juga Ramos Horta, *Funu*, h 146.
- ²⁶⁶ Hill, *Gerakan Pembebasan*, 2000, h 201.
- ²⁶⁷ Wawancara CAVR dengan Manuel Gaspar da Silva, mantan anggota milisi Fretilin, Uatolari, 19 September 2003.
- ²⁶⁸ Hill, *Gerakan Pembebasan*, 2000, h 200.
- ²⁶⁹ Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
- ²⁷⁰ Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Kantor Perdana Menteri, Dili, 25 Juni 2004.
- ²⁷¹ Jolliffe, *East Timor*, h. 217.
- ²⁷² Jolliffe, *East Timor*, h 217; Ramos Horta, *Funu*, h. 146.
- ²⁷³ Francisco Xavier do Amaral, “ *Comrades! Independence or death! We will win,*” terjemahan Bahasa Inggris dari pidato yang diberikan ketika pelantikan anggota menteri kabinet RDTL, Dili, 29 November 1975, h 8 [Arsipnya ada di CAVR].
- ²⁷⁴ Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Kantor Perdana Menteri, Dili, 25 Juni 2004; lihat juga Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Anggota Majelis Daerah ASDT, Kantor CAVR, 21 Juni 2004; lihat juga Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, bekas pemimpin Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
- ²⁷⁵ Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, bekas pemimpin Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
- ²⁷⁶ Soekanto (ed.), *Integrasi*, h 283-284.
- ²⁷⁷ Lihat Akihisa Matsuno, “The Balibo Declaration: Between Text and Fact,” dalam Pedro Pinto Leite [editor], *The East Timor Problem and the Role of Europe*, International Platform of Jurists for East Timor, 1996.
- ²⁷⁸ Mario and João Carrascalão and Domingos de Oliveira; Clementino Amaral; and Paul Freitas kesaksian ke CAVR pada audiensi publik nasional mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga José Martins dari KOTA dalam suatu wawancara dengan Aboeprijadi Santoso yang dipublikasikan dalam *Jejak-jejak Darah: Tragedi & Pengkhianatan di Timor-Leste*, Amsterdam dan Yogyakarta: Stichting Inham & Pijar, 1996, h. 85-86.
- ²⁷⁹ Mario Carrascalao, audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ²⁸⁰ *East Timor and the International Community: Basic Documents* , Cambridge, Cambridge University Press, 1997, h. 39-40.
- ²⁸¹ United Nations Department of Political Affairs, *Trusteeship and Decolonisation, No. 7* , Agustus 1976, h 44.
- ²⁸² Wawancara CAVR dengan Jusuf Wanandi, bekas peneliti CSIS, Kantor CSIS di Jakarta, 24 Juli 2003.
- ²⁸³ Soekanto, *Integrasi*, h 276.
- ²⁸⁴ Soekanto, *Integrasi*, h. 289-291.
- ²⁸⁵ “Malik Warns,” *The Canberra Times*, 3 Desember 1975, dikutip dalam Jolliffe, *East Timor*, h. 225-226.
- ²⁸⁶ Lihat, misalnya, Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese East Timor, Document 206, h 468-470.
- ²⁸⁷ Lihat Dunn, *East Timor*, 2003, p 152, 155, 157; lihat juga telegram American Embassy Surabaya to American Embassy Jakarta, 20 Februari 1975; memorandum 6362-x to Henry Kissinger from National

Security Council, 30 Desember 1974; US Department of State Telegram, American Embassy Jakarta to Secretary of State Washington, 21 Agustus 1975.

²⁸⁸ *Decolonization*, p 30; lihat juga Jolliffe, *East Timor*, h 217.

²⁸⁹ Dunn, *East Timor*, 1983, h 276.

²⁹⁰ Dunn, *East Timor*, 1983, h 236.

²⁹¹ Telegram from American Embassy Jakarta to Secretary State Washington, *Ford-Suharto meeting*, 6 Desember 1975.

²⁹² Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, bekas pemimpin Fretilin, Dili, 18 Juni 2004; diulangi kembali dalam Mari Alkatiri dan Francisco Xavier do Amaral, Kesaksian ke CAVR pada Audensi Publik Nasional mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

²⁹³ Jolliffe, *East Timor*, h 226.

²⁹⁴ Jolliffe, *East Timor*, h 227.

²⁹⁵ David Scott, Testimoni ke CAVR pada Audensi Publik Nasional mengenai Penentuan Nasib sendiri dan Masyarakat Internasional, Maret 2003.

²⁹⁶ Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Kantor Perdana Menteri, Dili, 25 Juni 2004.

²⁹⁷ Jolliffe, *East Timor*, h 232.

²⁹⁸ Dr Kenneth Chan, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib sendiri dan Komunitas Internasional, di Dili, 15-17 Maret 2004.

²⁹⁹ Telegram dari Francisco Xavier do Amaral kepada Presiden AS Ford, Dili, 5 Desember 1975.

³⁰⁰ Telegram dari Kedutaan Besar Amerika Jakarta kepada Sekretaris Negara Washington, 'Pertemuan Ford-Suharto', 6 Desember 1975.

³⁰¹ Drs Machmuddin Noor, Drs Slamet Moeljono, Ir Sujamto, Drs H. Soemarno, *Lahirnya Propinsi Timor-Leste*, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 83.

³⁰² Machmuddin, *Lahirnya*, hal. 82.

³⁰³ Dunn, *East Timor*, 2003, hal. 251.

³⁰⁴ Telegram dari Mari Alkatiri kepada Presiden UNSC, diserahkan kepada UNSC 8 Oktober, dikutip dalam telegram, US Mission United Nations New York to Secretary of State Washington, *Cables to Security Council about Portuguese Timor from Fretilin*, 11 Oktober 1975.

³⁰⁵ Dunn, *East Timor*, hal. 196.

³⁰⁶ Lihat Van Atta and Toohey, p. 15; juga lihat Ken Conboy, *Kopassus*, Equinox Publishing, Jakarta, 2003, hal. 231.

³⁰⁷ Hendro Subroto, *Eyewitness to the Integration of East Timor*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 147.

³⁰⁸ Dr Asvi Warman Adam, kesaksian pada CAVR Audiensi Publik Nasional mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15 - 17 Maret 2004.

³⁰⁹ Lihat Subroto, *Eyewitness*, hal. 137-138 dan *Korps Marinir*, hal. 190.

³¹⁰ Subroto, *Eyewitness*, hal. 142.

³¹¹ *Korps Marinir* hal. 190; Juga lihat Subroto, *Eyewitness*, hal. 137.

³¹² Subroto, *Eyewitness*, hal. 137, 150; lihat juga M. Saleh Kamah, *Seroja*, hal. 106; juga lihat *Korps Marinir*, hal. 191.

-
- ³¹³ Pour, *Murdani*, hal. 398; juga lihat James Dunn, *Timor: A People Betrayed*, ABC Books, Sydney, 1996, hal. 282.
- ³¹⁴ Subroto, *Eyewitness*, hal. 154.
- ³¹⁵ Conboy, *Kopassus*, hal. 243.
- ³¹⁶ John G. Taylor, *East Timor: Indonesia's Forgotten War*, Zed Books, London, 1991, hal. 70.
- ³¹⁷ Subroto, *Eyewitness*, hal. 170.
- ³¹⁸ Subroto, *Eyewitness*, hal. 174.
- ³¹⁹ Wawancara CAVR dengan Carlos Maria Soares, Dili, 27 Desember, 2003.
- ³²⁰ George Aditjondro, *In the Shadow of Mt Ramelau*, : The Impact of the Occupation of East Timor. Leiden, Netherlands, 1994, hal. 87.
- ³²¹ Pour, *Murdani*, hal. 325.
- ³²² Memorandum Dewan Keamanan Nasional untuk Brent Scowcroft, dari Clinton E Granger, *Indonesian Use of MAP Equipment in East Timor*, 12 Desember 1975.
- ³²³ José Ramos-Horta, 'Timor-Leste Amanha Em Dili', dari *De regresso de Jacarta, a cupula da UDT...*, hal. 113.
- ³²⁴ *Pernyataan Pemerintah Tentang Timor Portugis*, Antara, 9 Desember 1975 [(Indonesian) Government statement on Portuguese Timor].
- ³²⁵ *Pernyataan Pemerintah Indonesia Tentang Timor Portugis*, Antara, 15 Desember, 1975.
- ³²⁶ Lihat, sebagai contoh, M. S. Kamah, *Catatan dari Dili, [Notes from Dili]* Antara, 19 Desember 1975.
- ³²⁷ Dr Asvi Warman Adam, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
- ³²⁸ Wawancara CAVR dengan Francisco Calsonha, 13 Agustus, 2004, Dili; Wawancara CAVR dengan Lay Kuo Nhen, 23 Februari 2004, Dili. Lihat juga Bab Pembunuhan Di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa.
- ³²⁹ Wawancara CAVR dengan Alexandrino do Rego, mantan pekerja rumah sakit, Dili, 4 Februari 2004.
- ³³⁰ Wawancara CAVR dengan Frederico dos Santos Almeida, Dili, 29 Agustus 2003.
- ³³¹ Wawancara CAVR dengan Kuon Nhen (Konneng) Lay, nom de guerre Mali Sera, Dili, 23 Februari 2004.
- ³³² Subroto, *Eyewitness*, hal. 182.
- ³³³ Felismina dos Santos Conceição, Kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR *Nasional mengenai Pembantaian*, Dili, November 2003.
- ³³⁴ Lihat Wawancara CAVR dengan Francisco Soriano, Dili, 3-4 Juli 2004; juga lihat pernyataan HRVD 25666; juga lihat Wawancara CAVR dengan Francisco da Cunha, Dili, 3 Februari 2004.
- ³³⁵ Pernyataan HRVD 9471-02; juga lihat Wawancara CAVR dengan Domingos Freitas, Dili, 29 Juni 2004.
- ³³⁶ Lihat sebagai contoh kesaksian Xanana Gusmão dan Francisco Xavier Amaral sebagai tokoh sejarah pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ³³⁷ Kesaksian Xanana Gusmão di Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Internal Konflik 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ³³⁸ Tomas Goncalves, tokoh sejarah, dan Clementino Amaral, Perwakilan Partai KOTA, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
- ³³⁹ Telegram, US Mission United Nations New York to Secretary of State Washington, *Portuguese Timor: Further Messages to United Nations from Fretilin*, 18 Desember 1975.

-
- ³⁴⁰ Pour, *Murdani*, hal. 398-399.
- ³⁴¹ David Scott, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
- ³⁴² Telegram, US Mission UN New York to Secretary State Washington, *Portuguese Timor—Letter to President of UNSC from Fretilin*, 4 Februari 1976; juga lihat Telegram, US Department of State circular, *Timor*, 29 Januari 1976; juga lihat David Scott, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
- ³⁴³ Telegram, US Mission UN New York to Secretary of State Washington, *Text of letter to President of UNSC from Fretilin*, 4 Februari 1976.
- ³⁴⁴ Lihat Francisc Vendrell, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15 - 17 Maret 2003.
- ³⁴⁵ Drs Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya Propinsi Timor-Leste*, Badan Penerbit Almanak Republic Indonesia, 1977, hal. 26.
- ³⁴⁶ Noor, *Lahirnya*, hal. 29.
- ³⁴⁷ Noor, *Lahirnya*, hal. 52.
- ³⁴⁸ Telegram dari Pemerintahan Sementara Timor-Leste (PGET) kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, dikutip dalam telegram dari US Mission UN NY to Secretary of State Washington, 23 Desember 1975; juga lihat Noor, *Lahirnya*, hal. 56.
- ³⁴⁹ Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
- ³⁵⁰ Noor, *Lahirnya*, hal. 59.
- ³⁵¹ Lihat David Scott, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional. 15-17 Maret 2003; juga lihat Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal 15, 23; Dunn 2004, hal 244.
- ³⁵² Lihat Conboy, *Kopassus*, hal. 256.
- ³⁵³ Antonio Serpa, Monis da Maia, UDT, kesaksian pada *Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76*, 15 - 18 Desember 2003.
- ³⁵⁴ Wawancara CAVR dengan Humberto Martins da Cruz, mantan kepala penjara Aileu, Dili tidak bertanggal.
- ³⁵⁵ Wawancara CAVR dengan Humberto Martins da Cruz, mantan kepala penjara Aileu, Dili tidak bertanggal.
- ³⁵⁶ Wawancara CAVR dengan Humberto Martins da Cruz, mantan kepala penjara Aileu, tidak bertanggal; juga lihat Alexander da Costa Araújo, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
- ³⁵⁷ Francisco Xavier do Amaral, Mantan Presiden Fretilin, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ³⁵⁸ Wawancara CAVR dengan Tomas Gonçalves, mantan Partisan dan pemimpin Apodeti, Farol, Dili, 23 Oktober 2003.
- ³⁵⁹ Wawancara CAVR dengan Joao da Costa, mantan tahanan UDT, Same, 24 Juni 2003.
- ³⁶⁰ Monis da Maia, kesaksian di Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ³⁶¹ Angelo Araujo Fernandes, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
- ³⁶² *25 Tahun Kodam XIV Hasanudin, 1957-1982* (tidak ada informasi bibliografi).

-
- ³⁶³ *50 Tahun Emas Pengabdian TNI Angkatan Udara*, Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Jakarta, (tidak bertanggal), hal. 134.
- ³⁶⁴ Data dalam paragraf ini adalah dari *35 Tahun Darma Bakti Kostrad* (tidak tersedia informasi bibliografi), hal. 82.
- ³⁶⁵ Lihat, sebagai contoh, Manuel Carceres da Costa (mengenai kota Lacleo di distrik Manatuto) dan Fransisco Soares Pinto (mengenai kota Iliomar di distrik Lautem), kesaksian di CAVR audiensi publik nasional mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ³⁶⁶ Laporan yang diterbitkan dalam *The Canberra Times*, 27 November 1979, dikutip dalam Dunn, *East Timor*, 2003, hal. 259.
- ³⁶⁷ Lihat, sebagai contoh, Julio Alfaro dan Maria Jose Franco Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ³⁶⁸ Lihat kesaksian Mari Alkatiri sebagai Tokoh Sejarah pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003, dan kesaksian Marito Reis pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ³⁶⁹ Lihat Xanana Gusmão, *To Resist Is To Win*, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 41-43.
- ³⁷⁰ Lihat Gusmão, *To Resist Is To Win*, hal. 42.
- ³⁷¹ Father Leoneto do Rego, excerpts from an interview given in 1980, disampaikan dalam Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ³⁷² Manuel Carceres da Costa, kesaksian di Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ³⁷³ Lihat Pernyataan HRVD 5028, 3160, 0160, 2056.
- ³⁷⁴ Clementino Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ³⁷⁵ Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
- ³⁷⁶ Noor, *Lahirnya*, hal. 18.
- ³⁷⁷ Lihat Mario Carrascalao, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15 – 18 Desember 2003.
- ³⁷⁸ *Tempo*, 36 Juni 1976, dikutip dalam Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, hal. 97.
- ³⁷⁹ Laporan Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Timor-Leste, No. Pem.1/8/26, 26 Juni 1976, termuat dalam Noor, *Lahirnya*, hal. 111.
- ³⁸⁰ Kesaksian US Rear Admiral Gene R. La Roque, *US Congressional Hearing s*, 10 Juni 1980; juga lihat Budiardjo, hal. 27; John Taylor, *East Timor: The Price of Freedom*, Zed Books, London and New York, 1999, hal. 84.
- ³⁸¹ Wawancara CAVR dengan Albino do Carmo, Mantan komandan Falintil Suai, Suai, 31 Oktober 2003.
- ³⁸² Wawancara CAVR dengan Jose Pereira, Lolotoe, Bobonaro, 29 Oktober 2003.
- ³⁸³ Telegram, Kedutaan Besar Amerika Jakarta kepada Sekretaris Negara Washington, *GOI request for help in Timor*, 29 April 1976.
- ³⁸⁴ Wawancara dengan Taur Matan Ruak, Kamandan Falintil, Bagian II, Dili, 14 Juni 2004.
- ³⁸⁵ Dunn, *A People Betrayed*, p. 280; Conboy, *Kopassus*, hal 274.
- ³⁸⁶ Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004; lihat bab mengenai Gerakan Kemerdekaan.

-
- ³⁸⁷ Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ³⁸⁸ Departemen Pertahanan-Kelompok, “Petunjuk Pelaksanaan Nomor JUKLAK/06/V/1976 tentang Kegiatan Dibidang Operasi Tempur Tahun 1976/1977” [Department of Defence and Security, *Manual Instruction No. JUKLAK/06/V/1976 reg. Activities in Field of Combat Operation year 1976/77*].
- ³⁸⁹ Dinas Penerangan Korps Marinir, *Korps Marinir TNI AL 1970-2000*, [Bureau of Information of Marines Corps, *Marines Corps of Indonesian Armed Forces 1970-2000*], Jakarta, 2000, hal. 233.
- ³⁹⁰ Indonesian Withdrawal Way to Peace,” *East Timor News*, 2 Juni, 1977, hal. 1.
- ³⁹¹ “Fretilin Ready for Offensive,” *East Timor News*, 16 Juni, 1977, hal. 1.
- ³⁹² *East Timor News*, 19 Mei, 1977, hal. 4.
- ³⁹³ Telegram, Sekretaris Negara Washington kepada Kedutaan Besar Amerika Jakarta, *Report of Wolff Sub Committee on visit to Indonesia*, 28 Juni 1977.
- ³⁹⁴ Memorandum, Mike Armacost to Zbigniew Brzezinski, *Initiatives to Deepen Relations with Indonesia*, 14 Juni 1977.
- ³⁹⁵ Lihat Sekretaris Negara Washington kepada semua Pos Diplomatik Asia Timur dan Pasifik, *Laporan Status Mingguan—Thailand, Indonesia, Malaysia, Burma dan Singapore*, 23 Maret 78; juga lihat telegram, Kedutaan Besar AS Jakarta kepada Sekretaris Negara Washington, *Preparation of Congressional Presentation Document (CPD) FOY 1979 Security Assistance Program*, 16 Desember 1977; juga lihat telegram, Kedutaan Besar Amerika Jakarta kepada Sekretaris Negara Washington, *A4 sales to Indonesia*, 12 Mei 78.
- ³⁹⁶ Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 78.
- ³⁹⁷ Budiardjo and Liem, *The War in East Timor*, hal. 30.
- ³⁹⁸ Communique, Douglas J Bennet Jr, Assistant Secretary for Congress Relations to the Hon. Frank Church, Chairman, Committee on Foreign Relations, US senate, 6 April 1979.
- ³⁹⁹ Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 95.
- ⁴⁰⁰ Lihat Chamberlain, “*The Struggle in Iliomar: Resistance in Rural East Timor*,” Point Lonsdale, Australia 2003, hal. 11.
- ⁴⁰¹ Lihat wawancara dengan CAVR Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Jose da Conceicao, Kupang, 24 Agustus 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Sera Malik, SoE-West Timor, 28 Agustus 2004.
- ⁴⁰² Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal t 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ⁴⁰³ Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 July 2004; lihat juga Gusmão, *To Resist*, hal. 130-131.
- ⁴⁰⁴ Budiardjo and Liem, *War Against East Timor*, hal. 61.
- ⁴⁰⁵ Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003. *Nossa Vitoria e Apenas Questao de Tempo, Comunicado Comite Permanente do C.C. da FRETILIN de 14/9/77*, aquando da traicao de Xavier do Amaral, Lisbon, 1977, hal. 7-27.
- ⁴⁰⁶ *Nossa Vitoria e Apenas Questao de Tempo, Comunicado Comite Permanente do C.C. da FRETILIN de 14/9/77*, aquando da traicao de Xavier do Amaral, Lisbon, 1977, hal. 7-27.
- ⁴⁰⁷ Lihat Domingos Maria Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003, dan Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

-
- ⁴⁰⁸ Wawancara CAVR dengan dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004; juga lihat Gusmão, *To Resist*, hal. 47.
- ⁴⁰⁹ 20 Sept 77, Kedutaan Amerika Lisbon pada Sekretaris Negara Washington, Kupnya Fretilin mungkin menunda debat UNGA Timor-Leste.
- ⁴¹⁰ Domingos Maria Alves, Kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
- ⁴¹¹ António Amado J.R. Guterres Kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
- ⁴¹² Carmel Budiardjo and Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, 1984, hal. 27.
- ⁴¹³ “‘Victory is ours!’ Offensive Defeated,” *East Timor News*, 8 September 1977, hal. 1, mengutip Radio Maubere broadcasts, *Melbourne Age*, 31 Agustus 1977, dan *The Australian*, 5 Agustus, 1977.
- ⁴¹⁴ “Foreign Affairs gag on Timor build-up,” *Australian*, 1 September 1977; juga lihat James Dunn, *Timor: A People Betrayed*, The Jacaranda Press, Queensland, 1983, hal. 312.
- ⁴¹⁵ Lihat “Border Zone Offensive Meets Big Defeat,” *East Timor News*, 20 Oktober, 1977, hal. 1.
- ⁴¹⁶ Wawancara CAVR dengan Carlos Tilman, Suai, 31 Oktober 2003.
- ⁴¹⁷ *Korps Marinir TNI AL 1970-2000*, Dinas Penerangan Korps Marinir, Jakarta, 2000, h. 236-237.
- ⁴¹⁸ Manuel Carceres da Costa, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR National mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴¹⁹ Kesaksian Manuel Carceres da Costa pada Audensia Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴²⁰ “Suharto Gambles on Wet Season Offensive,” *East Timor News*, 15 Desember 1977, hal. 1.
- ⁴²¹ Ibid.
- ⁴²² Wawancara CAVR dengan Duarte Gaspar Corte Real, Ainaro, 22 Oktober 2003; Wawancara CAVR.
- ⁴²³ Wawancara CAVR dengan Francisco Barros, Ainaro, 22 Oktober 2003.
- ⁴²⁴ Maria José da Costa, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴²⁵ Budiardjo and Liem, *War Against East Timor*, h. 30.
- ⁴²⁶ Budiardjo and Liem, *War Against East Timor*, h. 30.
- ⁴²⁷ CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, 7 Juli 2004.
- ⁴²⁹ CAVR, Dokumen penelitian tentang ABRI/TNI. Arsip CAVR. Lihat juga Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia mengenai pola-pola statistis dari pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan sekitar periode ini.
- ⁴³⁰ Douglas Kammen, wawancara dengan mantan perwira Kostrad yang bertugas di Timor-Leste pada tahun 1977-1978, nama dirahasiakan, Indonesia, [tidak ter tanggal].
- ⁴³¹ Lihat, sebagai contoh, Wawancara CAVR dengan Abilio Quintão Pinto, Iliomar, 7 Oktober 2003; juga lihat Wawancara CAVR dengan Teotonio [tidak ada nama belakang], Ossu, 2 Oktober 2003.
- ⁴³² Pernyataan HRVD 3889.
- ⁴³³ Wawancara CAVR dengan Tomas Soares da Silva, Uatulari, 4 Oktober 2003.
- ⁴³⁴ Xanana Gusmão, *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, ed. Sarah Niner, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 56.

-
- ⁴³⁵ Dunn, *A People Betrayed*, hal. 280; Conboy, *Kopassus*, hal. 274.
- ⁴³⁶ Lihat kesaksian Pat Walsh dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴³⁷ Lihat Abilio dos Santos Belo, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR *mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan*, 28-29 Juli 2003.
- ⁴³⁸ Dinas Penerangan Korps Marinir, *Korps Marinir TNI AL 1970-2000*, Jakarta, 2000, hal. 276-279.
- ⁴³⁹ Lihat Edmundo da Cruz, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁴⁰ Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 96.
- ⁴⁴¹ Wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, Komandan Falintil, Bagian II, 14 Juni 2004.
- ⁴⁴² Gusmão, Niner (ed), *To Resist is to Win*, h. 59.
- ⁴⁴³ Association of Ex-Political Prisoners (Assepol), submisi ke Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ⁴⁴⁴ Lihat Lennox, *Fighting Spirit of East Timor* hal 133 dan 155-157; Lihat juga Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 84.
- ⁴⁴⁵ Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁴⁶ Lihat Petunjuk Teknis No. Juknis/05/1/1982 Sisetem keamanan kota dan wilayah pemukiman, dikutip dari Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, h. 183; Juga lihat bab tentang Pemindahan dan Kelaparan hal 88.
- ⁴⁴⁷ USAID, *East Timor-Indonesia, Displaced Persons* , Situation Report No 1, 9 Oktober 1979, dikutip dalam Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal 88. juga lihat CRS Final report, hal. 3.
- ⁴⁴⁸ Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, h. 89, 90.
- ⁴⁴⁹ Juknis/04-B/IV/1982 Tentang Cara Mengamankan Masyarakat dari Pengaruh Propaganda GPK; [Instruction Manual No: JUKNIS/04-B/IV/1982, Subject: How to Protect the Community from the Influence of GPK Propaganda], dikutip dalam Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, 216-17.
- ⁴⁵⁰ Lihat sebagai contoh Fransisco Soares Pinto dari Iliomar sub-district di Lautem, Manuel Carceres da Costa dalam hubungannya dengan kamp di Metinaro, dan Abilio dos Santos Belo dalam kaitannya dengan kamp di Ainaro dan situasi di Desa Mauxiga, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli, 2003.
- ⁴⁵¹ Lihat Gusmão, Niner (Ed), *To Resist is to Win*, p. 59; Lihat juga Pernyataan HRVD # 9188-02, 0187-01, 7800-02, 8088-05.
- ⁴⁵² Pernyataan HRVD 8274-04.
- ⁴⁵³ Bekas pegawai CRS Gilman dos Santos, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁵⁴ Pat Walsh, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁵⁵ Pat Walsh, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁵⁶ Gilman dos Santos, kesaksian pada audiensi publik CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan , 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁵⁷ Pat Walsh, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.

-
- ⁴⁵⁸ Gilman dos Santos, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁵⁹ *Catholic Relief Services-USCC East Timor Emergency Program* , Laporan Akhir, Juni 1979-Desember 1980, hal. 11 & 19.
- ⁴⁶⁰ Pat Walsh, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁶¹ Gilman dos Santos, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁶² Lihat, misalnya, Joana Pereira dari Sub distrik Quelicai, Baucau, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁶³ Bernado Villanova, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ⁴⁶⁴ Rosalina da Costa of Manufahi, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁶⁵ Abilio dos Santos Belo, kesaksian kepada Audensi Publik Nasional CAVR on Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁶⁶ Kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ⁴⁶⁷ Maria de Ceu Lopes Federer, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ⁴⁶⁸ Reuters dan AP reports, 4 Maret 1982, dikutip dalam, *Timor Information Service* , No. 35, Maret/April 1982, hal 6.
- ⁴⁶⁹ Lihat, misalnya, Abilio dos Santos Belo dan Marito Reis, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁴⁷⁰ Department of Information [Republic of Indonesia], *East Timor After Integration*, 1983, hal 88.
- ⁴⁷¹ Maria de Ceu Lopes Federer, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ⁴⁷² Maria de Ceu Lopes Federer, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ⁴⁷³ “Berita Buana”, 14 Juli 1982, dalam *Pengungkapan Kebenaran Timor-Leste* ; juga lihat kesaksian Mario Carrascalão pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, 28-29 April 2003.
- ⁴⁷⁴ Taylor, *Indonesia’s Forgotten War*, hal. 195.
- ⁴⁷⁵ *Timor-Leste Dalam Angka*, Biro Pusat Statistik Provinsi Timor-Leste, 1981.
- ⁴⁷⁶ Costa Alves dan Moreira Reis, wawancara dengan pastor Katholik asal Portugal, Fr Leoneto do Rego, diterbitkan di majalah *Funu* di Portugal pada bulan Juli 1980.
- ⁴⁷⁷ Costa Alves dan Moreira Reis, wawancara dengan Father Leoneto do Rego, 1980, diterbitkan dalam *Funu* magazine, Portugal, Juli 1980.
- ⁴⁷⁸ Lihat masukan Assepol pada Audensi Publik Nasional CAVR *tentang Pemenjaraan Politis* , 17-18 Februari 2003.
- ⁴⁷⁹ Lihat, misalnya, Julio Alfaro, Maria da Silva dan Maria Jose Franco Pereira, kesaksian-kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR *tentang Pemenjaraan Politis*, 17-18 Februari 2003.
- ⁴⁸⁰ Telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, *Reports of Fretilin attacks in East Timor capital*, 18 Juni 1980.
- ⁴⁸¹ Wawancara CAVR dengan Bernardino Vila Nova, Atauro 7 Maret 2002.

-
- ⁴⁸² Telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, [disensor] *Impressions after Juni 10 attack in East Timor*, 25 Juni 1980.
- ⁴⁸³ Lihat, misalnya, Bernadino Villanova, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR *tentang Pemenjaraan Politis*, 17-18 Februari 2003.
- ⁴⁸⁴ Pernyataan-pernyataan HRVD 2399 dan 0663; wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 20 Juni 2003, wawancara dengan Francisco Soares, 5 Agustus 2003.
- ⁴⁸⁵ Lihat *Angkatan Bersenjata*, 26 Februari, 1982; Juga lihat Conboy, *Kopassus*, hal. 297.
- ⁴⁸⁶ Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resor Militer 164/Wira Dharma, Instruksi - Operasi No: INSOP/03/II/1982 [Regional Military Command XVI/Udayana, Sub-regional Command 164/Wira Dharma, Instruction for Operation No. INSOP/03/II/1982].
- ⁴⁸⁷ Lihat Xanana Gusmão, surat tertanggal 10 Mei 1983, hal. 3.
- ⁴⁸⁸ Lihat “Petunjuk Teknis [sic] Nomor Juknis/05/I/1982, *Sistem Keamanan Kota dan Daerah Pemukiman*, hal. 3, yang menyebutkan “Perintah Operasi Korem 164/WD: 08/Kikis-D.” Dicitak ulang dalam Budiardjo dan Liem, *War In East Timor*, hal. 183.
- ⁴⁸⁹ Manual instruksi No. JUKNIS/06/IV/1982, *Babinsa/TPD Activity in Developing and Phasing out Trained People’s Resistance Forces*, dicetak ulang dalam Budiardjo dan Liem, hal. 238.
- ⁴⁹⁰ “Instruksi – Operasi No: INSOP/03/II/1982,” hal. 8.
- ⁴⁹¹ Lihat *Korps Marinir TNI AL, 1970-2000*, Dinas Penerangan Korps Marinir, Jakarta, 2000, hal. 274.
- ⁴⁹² Wawancara CAVR dengan Anselmo Fernandes Xavier, Lospalos, 10 Oktober 2003.
- ⁴⁹³ Informação sobre a situação socio-humana nas zonas de Ossu, Viqueque, Uato-Lari e Uato-Carabau Abril 1982, hal. 4, tertanggal 5 Mei 1982, Dili.
- ⁴⁹⁴ “Timor: Kisah tentang Penyiksaan”, *Melbourne Age*, 14 Mei 1982, disebutkan dalam Taylor, hal. 111; juga lihat Lennox, *Fighting Spirit*, hal. 172; juga lihat telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, *Briefing on the Military Situation in East Timor*, 17 Nopember 1981.
- ⁴⁹⁵ “Apakah Ada Cukup Makanan yang Bisa Dimakan di Timor-Leste?” *Asian Wall Street Journal*, 21 Juni 1982.
- ⁴⁹⁶ Xanana Gusmão, *Pesan untuk pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-37*, dalam Sarah Niner (Ed), *To Resist*, hal. 81.
- ⁴⁹⁷ Telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, *Briefing on the Military Situation in East Timor*, 17 Nopember 1981.
- ⁴⁹⁸ Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 174, Taylor, *Indonesia’s Forgotten War*, hal. 101.
- ⁴⁹⁹ Wawancara CAVR dengan Albino da Costa, Dili, Juni 2003.
- ⁵⁰⁰ Pernyataan HRVD 2092.
- ⁵⁰¹ Wawancara CAVR dengan Albino da Costa, Dili, Juni 2003.
- ⁵⁰² Wawancara CAVR dengan Antonio dos Santos, Mehara, Tutuala, Lautem, 10 Oktober, 2003.
- ⁵⁰³ Wawancara CAVR dengan João Fuas de Carvalho, Tutuala, 10 Oktober, 2003.
- ⁵⁰⁴ Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 175.
- ⁵⁰⁵ Alfredo Alves, kesaksian pada CAVR, *Audiensi Publik tentang Anak-anak dan Konflik*, 28-29 Maret 2003.
- ⁵⁰⁶ Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 174.
- ⁵⁰⁷ Taylor, *Indonesia’s Forgotten War*, hal. 117.

-
- ⁵⁰⁸ Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 180. juga lihat Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 152.
- ⁵⁰⁹ Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 181.
- ⁵¹⁰ Timor Information Service, No 38, Sept/Okt 1982, hal. 7: *Kunjungan Dewan Gereja Dunia, 3-6 Juni 1982*.
- ⁵¹¹ Telegram, 17 Nopember 1981, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, *Briefing on the Military Situation in East Timor*.
- ⁵¹² Lihat sebagai contoh kesaksian dari ahli Ceu Federer Lopes pada Audensi Public Nasional CAVR tentang Tahanan Politik 17 – 18 Februari 2003.
- ⁵¹³ Lihat Joana Pereira dari Quelicai, Manuel Carceres da Costa dari Lacro dan Edmundo da Cruz dari Lautem, kesaksian lisan pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang *Pemindahan Paksa dan Kelaparan*, 28-29 Juli 2003.
- ⁵¹⁴ Catholic Relief Services-USCC, Program Darurat Timor-Timur, Laporan Akhir, Juni 1979-Desember 1980, hal. 3.
- ⁵¹⁵ Wawancara CAVR dengan José Alexandre Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
- ⁵¹⁶ Gusmão, *To Resist is To Win!*, hal. 58.
- ⁵¹⁷ Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, 10 Agustus 2004.
- ⁵¹⁸ Gusmão, *To Resist is To Win!*, hal 61.
- ⁵¹⁹ Gusmão, *To Resist is To Win!*, hal. 63.
- ⁵²⁰ Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, 10 Agustus 2004; juga lihat Paulino Gama, 'Kenangan Seorang Komandan Fretilin pada Peter Carey (Ed), *East Timor at the Crossroads*, Cassell, New York, 1995, hal. 101.
- ⁵²¹ Lihat Gusmão, *To Resist is to Win!*, hal. 64; juga lihat wawancara dengan Lere Anan Timor, Archive of the *Tuba Rai Metin* Oral History Project [radio], Taibessi, Maret 2002 [CD no.18].
- ⁵²² Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
- ⁵²³ Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
- ⁵²⁴ Francisco Guterres, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang *Konflik Politik 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁵²⁵ Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
- ⁵²⁶ Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
- ⁵²⁷ Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, hal. 18.
- ⁵²⁸ Gusmão, *To Resist is to Win*, hal. 68.
- ⁵²⁹ Wawancara CAVR dengan Justo Talenta, ketika itu merupakan sekretaris informasi Brigada Vermelha, 3 Nopember 2003; juga lihat kesaksian Francisco (Lu Olo), kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang *Konflik Politik Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁵³⁰ Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama (L-7), Baucau, 9 April 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Justo Talenta, Nopember 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Juni 2004; juga lihat; juga lihat wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lu Olo), 26 Maret 2003; juga lihat wawancara CAVR dengan Lere Anan Timor, Arsip dari Proyek Sejarah Lisan *Tuba Rai Metin* [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD no. 18].
- ⁵³¹ "Rajustamento Estrutural da Resistência de Paz" [CAVR, terjemahan bahasa Tetum, tidak ada keterangan penerbitan]; juga lihat wawancara dengan Lere Anan Timor, Arsip dari Proyek Sejarah Lisan *Tuba Rai Metin* [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD. No.18]; juga lihat Agio Pereira, *Dewan Nasional*

Perlawanan Maubere (CNRM), Ikhtisar tentang Sejarah Perjuangan Timor-Leste, kertas kerja, dipersentasikan pada konferensi di Sydney, 1994, tanpa tanggal.

⁵³² Liha wawancara CAVR dengan Cornelio Gama, Baucau, 9 April 2003; juga lihat wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lo Olo), Dili, 26 Maret 2003.

⁵³³ Pesan kepada Bangsa oleh Yang Terhormat Presiden Republik... Kay Rala Xanana Gusmão, pada Peringatan Hari Jadi FALINTIL di Uaimori, 20 Agustus 2003, di <http://www.etan.org/et2003/august/17-23/20fal.htm>.

⁵³⁴ Wawancara CAVR dengan Julio Maria de Jesus, mantan Falintil, Lospalos, 29 Mei 2003; juga lihat Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, hal. 70.

⁵³⁵ Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, hal. 170.

⁵³⁶ Juknis/04-B/IV/1982 Tentang Cara Mengamankan Masyarakat dari Pengaruh Propaganda GPK; terjemahan disebutkan dalam Budiardjo dan Liem, Manual Instruksi No: JUKNIS/04-B/IV/1982, *Subject: How to Protect the Community from the Influence of GPK Propagandam, The War Against East Timor*, hal. 216-17.

⁵³⁷ Pernyataan-pernyataan HRVD 7816-01, 3315-01, 7250-01; juga lihat Aditjondro, *In the Shadow of Mt Ramelau*, hal. 83; juga lihat kesaksian Olga da Silva Amaral pada Audensi Publik Nasional CAVR *tentang Perempuan dan Konflik*, 28-29 April, 2003.

⁵³⁸ Lihat wawancara-wawancara CAVR dengan Horacio La Hakiduk, 2 Juni 2003; dengan Albino da Costa, Juni 2003; serta juga lihat dengan António Aitahan Matak, 28 April 2004.

⁵³⁹ Lihat Juknis Tentang Cara Babinsa/TPD dalam membongkar Jaringan Pendukung GPK, Korem 164, Seksi Intel, [tanggal kabur, di antara setumpuk dokumen yang diperoleh Falintil pada tahun 1982; arsip CAVR].

⁵⁴⁰ Lihat Rowena Lennox, *Fighting Spirit of East Timor: The Life of Martinho da Costa Lopes*, Zed Books, London and New York, 2000, hal. 189-191.

⁵⁴¹ Lihat kesaksian Domingos de Oliveira pada *Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76*, 18 Desember 2003.

⁵⁴² Agio Pereira, “*Dewan Nasional Perlawanan Maubere (CNRM), Ikhtisar tentang Sejarah Perjuangan Timor-Leste*,” kertas kerja, *ibid.*

⁵⁴³ “Fretilin Menjelaskan Mengapa Menolak Negosiasi,” *East Timor News*, No. 36, 29 Juni 1978; juga lihat Francisco Guterres (Lu Olo), kesaksian lisan pada Audensi Publik Nasional CAVR *tentang Konflik Internal 1974-76*, 18 Desember 2003.

⁵⁴⁴ Lihat wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lu Olo), 26 Maret 2004; wawancara dengan Cornelio Gama, 9 April 2003; wawancara dengan Lere Anan Timor, Arsip dari Proyek Sejarah Lisan *Tuba Rai Metin* [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD no. 18].

⁵⁴⁵ Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama, Baucau, 9 April 2003; juga lihat wawancara dengan Taur Matan Ruak, 14 Juni 2004; juga lihat wawancara dengan Francisco Guterres (Lu Olo), 26 Maret 2003; juga lihat wawancara dengan Lere Anan Timor, *Tuba Rai Metin* [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CAVR].

⁵⁴⁶ Patrick A. Smythe, *The Heaviest Blow—The Catholic Church and the East Timor Issue*, LIT, Germany, 2004, hal. 45.

⁵⁴⁷ Lihat Dr Jose Ramos-Horta, pidato penutupan dalam acara CAVR, *Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan*, 28-29 Juli 2003.

⁵⁴⁸ Kohen, *The Place of the Dead*, hal. 150.

⁵⁴⁹ Dunn, *East Timor*, h. 40.

⁵⁵⁰ Kantor Statistik Timor-Leste, *Timor-Leste Dalam Angka 1981*, [Statistic Office of East Timor, *East Timor in Figure*] Dili, 1981, hal. 71.

-
- ⁵⁵¹ Pusat Dokumentasi Internasional (International Documentation Centre-IDOC), Roma, Pendahuluan, hal.1-2, *Pro Mundo Vita Dossier 'East Timor'*, 1984, Brussels, hal.36-7, disebutkan dalam Smythe, *The Heaviest Blow*, hal. 39.
- ⁵⁵² Lihat Ken Conboy, *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces*, Equinox Publishing, Jakarta dan Singapura, 2002, hal. 298; juga lihat "Catatan Pertemuan dengan Gubernur Timor-Timur pada tanggal 28 Juli 1983, di Kantor Pemerintahan, Dili," dalam *Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia*, yang dipimpin oleh Yang Mulia W. L. Morrison, Perdana Menteri, Juli-Agustus 1983," hal. 152.
- ⁵⁵³ Peter A. Rohi, "Hanya Dengan 1 Pistol di Pinggang Kotak Suara Dikawal Ke Los Palos [sic]," *Sinar Harapan newspaper*, 1 Juni 1982.
- ⁵⁵⁴ Wawancara CAVR dengan Tomas Soares da Silva, 4 Oktober 2003.
- ⁵⁵⁵ A. Goldstone, wawancara dengan Jacobs, Lisbon, 4 Agustus 1982 [arsip CAVR].
- ⁵⁵⁶ Telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington, *East Timor Governor address to Jakarta political officers luncheon*, 29 April 1983.
- ⁵⁵⁷ Pesan Xanana kepada pertemuan Majelis Umum PBB ke-37, 14 Oktober 1982, dicetak ulang dalam Gusmão, Niner (Ed), *To Resist is to win*, Otobiografi Xanana Gusmão, Aurora books, Victoria, 2000, hal. 82.
- ⁵⁵⁸ Lihat Abilio dos Santos Belo, kesaksian pada *Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan*, 28-29 Juli 2003.
- ⁵⁵⁹ Lihat Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 146-7.
- ⁵⁶⁰ Wawancara CAVR dengan João Fuas de Carvalho, mantan pegawai Fretilin, Lautem, 10 Oktober 2003.
- ⁵⁶¹ Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, 2003, catatan kaki hal. 22.
- ⁵⁶² Lihat Chamberlain; juga lihat wawancara CAVR dengan João Fuas de Carvalho, Tutuala, Lautem, 10 Oktober 2003; juga lihat Wawancara CAVR dengan Aleixo Ximenes, Dili, 2 Februari 2003.
- ⁵⁶³ Wawancara CAVR dengan Aleixo Ximenes, seorang mantan anggota UDT, Venilale, 2 Februari 2004.
- ⁵⁶⁴ Wawancara CAVR dengan Daniel Amaral, mantan anggota Hansip Venilale, 3 Oktober 2003.
- ⁵⁶⁵ Lihat Jill Jolliffe, *Timor: Terra Sangrenta*, O Jornal, Lisboa, 1989, hal. 163-170.
- ⁵⁶⁶ Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama (L-7), 9 April 2004; juga lihat Wawancara CAVR dengan Antonio Thomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 29 Maret 1984.
- ⁵⁶⁷ Telegram, *Negotiations to End Insurgency in East Timor*, 11 Juni 1983, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington.
- ⁵⁶⁸ *Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia*, yang dipimpin oleh Yang Mulia W. L. Morrison, Perdana Menteri, Juli-Agustus 1983.
- ⁵⁶⁹ Wawancara CAVR dengan Constantino dos Santos, mantan anggota Falintil Macadique, 26 Juni 2003; Juga lihat Francisco (Lu Olo) Guterres, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR *tentang Konflik Internal 1974-76*, 18 Desember 2003.
- ⁵⁷⁰ J. Jolliffe, ed., *Timor Newsletter*, Vol. II, No. 3, Oktober 1983, hal. 6, disebutkan dalam Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in rural East Timor*, 2003, hal. 23.
- ⁵⁷¹ Lihat wawancara CAVR dengan Francisco (Lu Olo) Guterres, Dili, 26 Maret 2004; dengan Albino da Costa, Juni 2003; dengan Taur Matan Ruak, part II, Dili, 14 Juni 2004
- ⁵⁷² Lihat Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 131-5.
- ⁵⁷³ Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 215.
- ⁵⁷⁴ Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 185.

-
- ⁵⁷⁵ Patrick A. Smythe, *'The Heaviest Blow' – The Catholic Church and the East Timor Issue*, [penyebutan secara lengkap], hal. 38.
- ⁵⁷⁶ Ben Anderson, Arief Djati dan Douglas Kammen, "Wawancara dengan Mário Carrascalão," *Indonesia* 76, Oktober 2003, hal. 7-8.
- ⁵⁷⁷ Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal. 139 dan 47.
- ⁵⁷⁸ Telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington, *Current developments in East Timor [kabur] on renewed fighting, access by foreigners, etc*, 23 September 1983.
- ⁵⁷⁹ Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington, *Briefing on the military situation in East Timor*, 17 Nopember 1981.
- ⁵⁸⁰ Lihat Conboy, *Kopassus*, hal. 310.
- ⁵⁸¹ Ben Anderson, Arief Djati dan Douglas Kammen, "Wawancara dengan Mário Carrascalão," *Indonesia* 76 (Oktober 2003), hal. 8.
- ⁵⁸² Telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington, *Negotiations to End Insurgency in East Timor*, 11 Juni 1983.
- ⁵⁸³ Lihat "Terjemahan Surat dari Fretilin" oleh K. Reppter (Canberra), dalam *Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia*, dipimpin oleh Yang Mulia W. L. Morrison, Perdana Menteri, Juli-Agustus 1983, hal. 169-170.
- ⁵⁸⁴ Lihat pernyataan-pernyataan HRVD 6957-01; 5330-01; 2369-02; 6205-01; 39977-01; 5344-02.
- ⁵⁸⁵ 1983 Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Indonesia, hal. 109.
- ⁵⁸⁶ Francisco (Lu Olo) Guterres, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- ⁵⁸⁷ Wawancara CAVR dengan José Gomes, kepala suku Bibileo-Lalerek Mutin, Viqueque, 13 Desember 2003.
- ⁵⁸⁸ Telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington, *Views on East Timor Developments*, 9 September 1983; juga lihat wawancara dengan José Gomes, Village chief Bibileo-Lalerek Mutin, Viqueque, 13 Desember 2003; juga lihat Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 142.
- ⁵⁸⁹ Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington, *Current developments in East Timor [kabur] on renewed fighting, access by foreigners, etc*, 23 September 1983.
- ⁵⁹⁰ Timor Information Service, *Gough Whitlam Fails to Convince*, Maret/April 1982, hal. 10.
- ⁵⁹¹ "Uskup Timor Menuduh Militer Membantai 84 Penduduk Desa", Peter Millership, Reuters, Dili, 1 Maret 1984, disebutkan dalam Taylor, *East Timor*, hal. 147.
- ⁵⁹² CAVR, Wawancara dengan José Gomes, Kepala Desa Bibileo-Lalerek Mutin [wawancara tidak bertanggal].
- ⁵⁹³ Juga lihat Olinda Pinto Martins, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR *tentang Pembantaian*, Nopember 2003.
- ⁵⁹⁴ Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington, *Current developments in East Timor [kabur] on renewed fighting, access by foreigners, etc*, 23 September 1983.
- ⁵⁹⁵ Moerdani, artikel di *Sinar Harapan Newspaper*, 17 Agustus 1983, disebutkan dalam Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 143.
- ⁵⁹⁶ Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 139.

-
- ⁵⁹⁷ Telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington, [Kabur] *Views on East Timor Developments*, 9 September 1983.
- ⁵⁹⁸ ACFOA, *East Timor Report No. 5*, Nopember 1983.
- ⁵⁹⁹ “Surat kepada Belo dari Konferensi Uskup-uskup Indonesia, 1983”, dicetak ulang dalam *Just Reading No 2., The Church And East Timor*, Komisi Katolik untuk Keadilan, Pembangunan dan Perdamaian 1993, hal. 18; juga lihat Taylor, *Indonesia’s Forgotten War*, hal. 154.
- ⁶⁰⁰ Lihat Xanana Gusmão, Sarah Niner (Ed.), *To Resist is to Win ! The Autobiography of Xanana Gusmão* , hal. 85-126.
- ⁶⁰¹ Lihat Gusmão, *To Resist is to Win*, hal.129-136.
- ⁶⁰² Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa (“Aitahan Matak”), Dili, 18 Desember 2003; Lihat Wawancara dengan Avelino Coelho, 17 Juli 2004; Juga lihat Pinto & Jardine, *East Timor’s Unfinished Struggle*, Boston: South End Press, 1997, hal. 122.
- ⁶⁰³ Pinto dan Jardine, *East Timor’s Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, South End Press, hal. 123.
- ⁶⁰⁴ Lihat Abel Guterres, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁰⁵ Suster Monica Nakamura, kesaksian lisan pada Audensi Publik Nasional CAVR *mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional*, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁰⁶ Lihat António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak) dan Mariano Soares, kesaksian lisan pada Audensi Publik Nasional CAVR *mengenai Pemenjaraan Politik*, 17-18 Februari 2003.
- ⁶⁰⁷ Lihat Marito Nicolau dos Reis, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR *mengenai Pemenjaraan Politik*, 17-18 Februari 2003.
- ⁶⁰⁸ Ade Sitompul, kesaksian lisan pada Audensi Publik Nasional CAVR *mengenai Pemenjaraan Politik* , 17-18 Februari 2003.
- ⁶⁰⁹ Wawancara CAVR dengan Aleixo da Silva Gama (“Cobra”), Dili, [wawancara tanpa tanggal]; Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa (“Aitahan Matak”), Dili, 18 Desember 2003; Wawancara CAVR dengan José Manuel Fernandes, Dili, 31 Oktober 2002; Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, Dili, 17 Juli 2004.
- ⁶¹⁰ Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, Dili, 17 Juli 2004; Gregório Saldanha, Dili, [wawancara tanpa tanggal]; serta Wawancara CAVR dengan Octavio da Conceição, Dili, 3 November 2002.
- ⁶¹¹ Wawancara CAVR dengan João Câmara, Dili, 5 Juni 2004.
- ⁶¹² Wawancara CAVR dengan João Câmara, Dili, 5 Juni 2004.
- ⁶¹³ Lihat Arnold S. Kohen, *From the Place of the Dead: Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, hal 161.
- ⁶¹⁴ Kohen, *From the Place of the Dead*, hal.151-152.
- ⁶¹⁵ Kohen, *From the Place of the Dead*, hal.166; Juga lihat Mário Carrascalão, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR *on Women and the Conflict*, 28-29 April 2003.
- ⁶¹⁶ *From the Place of the Dead*, hal. 167.
- ⁶¹⁷ Kohen, *From the Place of the Dead*, hal. 169.
- ⁶¹⁸ Kohen, *From the Place of the Dead*, hal.169-173.
- ⁶¹⁹ UNGA Resolution no. 37/30, 1982.
- ⁶²⁰ Francesc Vendrell, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR *mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional* 15-17 Maret, 2004.

-
- ⁶²¹ Ian Martin, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 17 Maret 2004.
- ⁶²² Francesc Vendrell, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional 15-17 Maret, 2004.
- ⁶²³ Kohen, *From the Place of the Dead*, hal. 177.
- ⁶²⁴ Kohen, *From the Place of the Dead*, hal.178.
- ⁶²⁵ Lihat Gregorio Saldhana, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ⁶²⁶ Constâncio Pinto, “Gerakan Pelajar dan Gerakan Perjuangan Kemerdekaan Timor-Leste: Sebuah Wawancara,” pada Richard Tanter, Mark Selden & Stephen R Shalom (Eds), *Bitter Flowers, Sweet Flowers, East Timor, Indonesia and The World Community*, London, Rowman & Littlefield Publishers Inc., hal. 34.
- ⁶²⁷ Lihat, sebagai contoh, Wawancara CAVR dengan Jose Manual, Dili, 31 Oktober 2002; Wawancara CAVR dengan Fernanda Soares, Kaikoli, Dili, 21 Januari 2003.
- ⁶²⁸ Wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 6 Mei 2004; Juga lihat Wawancara CAVR dengan Octavio da Conceição, Dili, 3 November 2002.
- ⁶²⁹ Wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 6 Mei 2004.
- ⁶³⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 62 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Leste [Decree of President of Republic of Indonesia No. 62/1988 reg. the Organization of Administration and Development in the Province of East Timor] diterbitkan dalam *Himpunan Peraturan Negara* (Collected State Regulation) Triwulan IV, 1988, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal 1103-05.
- ⁶³¹ *East Timor: Keeping the Flame of Freedom Alive*, ACFOA Development Dossier No 29, Februari 1991.
- ⁶³² Lihat Rosa Yeni Damayanti dan Nugroho Katjasungkana, kesaksian lisan pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶³³ “Pesan kepada Pemuda Katolik di Timor-Leste dan Pelajar dan Mahasiswa di Jakarta”, 20 Mei 1986, dicetak ulang dalam Gusmão, *To Resist is to Win!* hal. 109-110.
- ⁶³⁴ Kesaksian Francesc Vendrell pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Self-Determination and the International Community, 15-17 Maret 2004.
- ⁶³⁵ Pidato Penutupan José Ramos-Horta pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
- ⁶³⁶ Constâncio Pinto and Matthew Jardine, *East Timor’s Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, South End Press, foreword.
- ⁶³⁷ Kesaksian Simplicio Celestino de Deus pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian 19-21 November 2003.
- ⁶³⁸ Kesaksian Max Stahl pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian 19-21 November 2003.
- ⁶³⁹ Kesaksian Simplicio Celestino de Deus pada Audencia Publik CAVR Nasional mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
- ⁶⁴⁰ Lihat Kohen, *From the Place of the Dead*, hal 197-200.
- ⁶⁴¹ Kesaksian Max Stahl pada Audencia Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian 19-21 November 2003.
- ⁶⁴² Kesaksian Alexandrino da Costa pada Audencia Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 2004.

-
- ⁶⁴³ Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho Silva, Dili, 17 Juli 2004; wawancara CAVR dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004; juga lihat Pinto & Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, hal. 196-197.
- ⁶⁴⁴ Lihat kesaksian Gregorio Saldanha pada Audensi Publik Nasional CAVR, mengenai Penahanan Politik 17-18 Februari 2003.
- ⁶⁴⁵ Kesaksian Luhut Pangaribuan dan Ibu Ade Sitompul pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Tahanan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ⁶⁴⁶ *East Timor After Santa Cruz: Indonesia and the international order*, disusun oleh Peace is Possible in East Timor, Ed. Peace is Possible in East Timor, Lisbon, January 1993.
- ⁶⁴⁷ Tony Parkinson, 'Hawk Blasts Jakarta Over Sick Remarks', *The Australian*, November 22, 1991; juga lihat kesaksian Pinto dihadapan The Subcommittee On International Operations And Human Rights Of The Committee On International Relations House Of Representatives, One Hundred Fifth Congress, Sesi kedua; Mei 7, 1998.
- ⁶⁴⁸ Pernyataan HRVD 02049.
- ⁶⁴⁹ Pemasukan Assepol pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penahanan Politik, 17-18 Februari 2003.
- ⁶⁵⁰ Pidato Xanana Gusmão pada Peresmian Kantor Pusat CAVR di bekas Penjara Balide, 17 Februari 2003.
- ⁶⁵¹ Lihat Geoffrey Robinson, *East Timor 1999*, hal. 85.
- ⁶⁵² AFP, *East Timor/Church*, Jakarta, 12 Juli 1994.
- ⁶⁵³ Amnesty International, *East Timor—Continuing Human Rights Violations*, 2 Februari 1995.
- ⁶⁵⁴ Kesaksian Alexandrino da Costa pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak-anak dan, 29-30 Maret 2004. Juga lihat artikel oleh Kieran Dwyer pada *Matebian News* April 1995, dipublikasikan oleh East Timor Relief Association (ETRA).
- ⁶⁵⁵ Kesaksian Ade Sitompul pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penahanan Politik, 17-18 Februari 2003; Masukan Assepol pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penahanan Politik 17-18 Februari 2003.
- ⁶⁵⁶ Nugroho Katjasungkana, Kesaksian Lisan pada CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁵⁷ Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Fernando de Araújo (Lasama), Dili, 5 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, Dili, 17 Juli 2004.
- ⁶⁵⁸ Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Oscar da Silva, Dili, 23 Mei 2004.
- ⁶⁵⁹ Wawancara CAVR dengan Fernando de Araújo ("Lasama"), Dili, 5 Mei 2004.
- ⁶⁶⁰ Lihat kesaksian Yeni Rosa Damayanti pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁶¹ Lihat kesaksian Yeni Rosa Damayanti dan Nugroho Kacabungkana pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁶² Wawancara CAVR dengan Mariano Sabino Lopes, Dili, (wawancara tidak bertanggal).
- ⁶⁶³ Lihat wawancara dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 21 Februari 2005; juga lihat wawancara dengan Avelino Coelho, 17 Juli 2004.
- ⁶⁶⁴ Wawancara CAVR dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 21 Februari 2005.
- ⁶⁶⁵ Kompas, Jakarta 18 November 1995.
- ⁶⁶⁶ Wawancara dengan Naldo Rei, Dili 11 November 2003.

-
- ⁶⁶⁷ Wawancara CAVR dengan Mariano Sabino Lopes, Dili, 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Naldo Rei, Dili 11 November 2003.
- ⁶⁶⁸ Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonesca, Mantan Renetil, Dili, 23 Mei 2004.
- ⁶⁶⁹ Wawancara CAVR dengan Mariano Sabino Lopes, Dili, [tidak tertanggal].
- ⁶⁷⁰ Dunn, East Timor, 2003, hal. 338-9.
- ⁶⁷¹ Kesaksian Francesc Vendrell pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁷² Kesaksian Suzannah Linton pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁷³ Kesaksian Suzannah Linton pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁷⁴ Pidato Hadiyah Nobel Perdamaian, 10 Desember 1996, tersedia pada <http://nobelprize.org/peace/laureates/1996/presentation-speech.html>.
- ⁶⁷⁵ Pidato Penerimaan Hadiyah Nobel Perdamaian Uskup Carlos Belo, 10 Desember 1996.
- ⁶⁷⁶ Kesaksian Francesc Vendrell pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁷⁷ Kesaksian Francesc Vendrell pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁷⁸ Kesaksian Francesc Vendrell pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁶⁷⁹ Jim Schiller, *The 1997 Indonesian Elections: Festival of democracy or costly fiction?*, Occasional Paper 22, Center for Asia Pacific Initiatives, University of Victoria, Mei 1999.
- ⁶⁸⁰ “Pernyataan dari Komisi Hak Asasi Manusia mengenai kekacauan disekitar Jakarta, “ Komnas HAM, Juni 2, 1998.
- ⁶⁸¹ Don Greenless & Robert Garran, *Deliverance: The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom*, Allen & Unwin, Australia, 2002, hal. 28-29.
- ⁶⁸² Dan Nicholson, “The Lorikeet Warriors: East Timor New Generation National Resistance 1989-1999”, BA Thesis, University of Melbourne, October 2001, hal 38.
- ⁶⁸³ Wawancara CAVR dengan Basilio Dias Araújo, Kupang, 26 Juli 2004.
- ⁶⁸⁴ John Martinkus, A *Dirty Little War, An Eyewitness of East Timor's Descent into Hell 1997-2000*, Random House, Australia, 2001, hal. 54.
- ⁶⁸⁵ Komando Daerah Militer IX Udayana, Komando Resor Militer 164, ‘*Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan*’, Juli 1998 [Regional Military Command IX Udayana, Sub-regional Military Command 164, ‘*Recapitulation of Capacity of Organic Personnel and its task*’]; lihat juga Komando Daerah Militer IX Udayana, Komando Resor Militer 164, ‘Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan Posisi, Nopember 1997’ [Regional Military Command IX Udayana, Sub-regional Military Command 164, ‘*Recapitulation of Capacity of Organic Personnel and its task position*’].
- ⁶⁸⁶ Komando Daerah Militer IX Udayana, Komando Resor Militer 164, ‘Kekuatan Personil Tim Tim Penugasan’, Juli 1998.
- ⁶⁸⁷ Laporan dari Komisi Penyelidikan Indonesia pada berbagai kejahatan berat HAM yang dilanggar di Timor-Leste pada tahun 1999 (Report of the Indonesian commission of inquiry into atrocities committed in East Timor in 1999 (KPP HAM)), 31 Januari 2000, para. 68.
- ⁶⁸⁸ Lihat kesaksian dari saksi pada Audensi Publik Nasional CAVR *Rona Ami Nia Lian* (Dengarkan Kesaksian Kami) 11-12 November 2002.

-
- ⁶⁸⁹ Martinkus, *A Dirty Little War*, h. 98.
- ⁶⁹⁰ Martinkus, *A Dirty Little War*, h. 106.
- ⁶⁹¹ Martinkus, *A Dirty Little War*, h 105; juga lihat KPP HAM, *Report*, para 68.
- ⁶⁹² Lihat diskusi pada Geoffrey Robinson, "People's War: Militia in East Timor and Indonesia", *South East Asia Research*, 9, November 2001, h 296.
- ⁶⁹³ Lihat KPP HAM, *Report on East Timor*, para. 39; juga lihat Geoffrey Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights*, Juli, 2003, h 90-93.
- ⁶⁹⁴ Lihat Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of its Documents", *Indonesia* 72, Cornell South East Asia Program, October 2001, h 31.
- ⁶⁹⁵ KPP HAM, *Report on East Timor*, para 40 dan 49.
- ⁶⁹⁶ Robinson, *People's War*, h 276.
- ⁶⁹⁷ Laporan KPP HAM, para 44; juga lihat Moore, *Indonesian Military's Last Years*, hal 30.
- ⁶⁹⁸ Laporan KPP HAM para 48; juga lihat Robinson, *East Timor*, hal 106.
- ⁶⁹⁹ Louise Williams, "Separatists fear bloodshed as military arms integrationists", *Sydney Morning Herald*, 28/01/99; "Interview: Orders to Kill", *Expresso*, Lisbon, September 17 1999.
- ⁷⁰⁰ KPP HAM, *Report on East Timor*, para 47.
- ⁷⁰¹ Danrem 164/WD ke Dandim 1627-1639. Telegram Rahasia No TR/41/1999, Jan 28, (Yayasan Hak Document #7) dikutip dalam Robinson, *East Timor*, h. 110; juga lihat KPP HAM, *Report*, para 50.
- ⁷⁰² Robinson, *East Timor*, hal. 98. Laporan KPP HAM mengenai *East Timor*, para 40.
- ⁷⁰³ Laporan KPP HAM mengenai *East Timor*, para 54.
- ⁷⁰⁴ Laporan KPP HAM mengenai East Timor para 50.
- ⁷⁰⁵ Dikutip dalam Xanana Gusmão, Sarah Niner (Ed), *To Resist is to Win—The Autobiography of Xanana Gusmão*, David Lovell Publishing, Melbourne 2000, h. 233/4.
- ⁷⁰⁶ Dikutip dalam Ian Martin, *Self-determination in East Timor: The United Nations, The Ballot, and International Intervention*, Boulder, Lynne Rienner, 2001, h 21.
- ⁷⁰⁷ Alexander Downer, Konferensi Pers, Adelaide, 12 Januari 1999.
- ⁷⁰⁸ Susan Sim, *The Straits Times*, 2 Februari 1999, Dikutip dalam Greenlees dan Garran, *Deliverance-The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom*, Allen and Unwin, Sydney, 2002, hal. 93.
- ⁷⁰⁹ Moore, *Indonesian Military's Last Years*, hal 33.
- ⁷¹⁰ Pemberitahuan ke Pers tentang Timor-Leste, United Nations, New York, 9 Februari, 1999, dikutip dalam Martin, hal 24.
- ⁷¹¹ Lihat Lansell Taudevin, *East Timor: To Little Too Late*, Duffy & Snellgrove, Sydney, 2000, hal. 223.
- ⁷¹² Martinkus, *A Dirty Little War*, hal 119.
- ⁷¹³ Pesan CNRT kepada Sekretaris Umum PBB dan Duta Besar Australia pada Indonesia, 26 Januari ditandatangani oleh Leandro Isaac, dikutip dalam Taudevin, *East Timor*, h. 222.
- ⁷¹⁴ Falintil press release, 5 April 1999, secara sebagian dikutip dalam Martin, hal 30.
- ⁷¹⁵ Robinson, *East Timor*, h 193; juga lihat KPP HAM, *Report on East Timor*, hal 104-114.
- ⁷¹⁶ McDonald, Ball (ed), *Masters of Terror: Indonesia's Military and Violence in East Timor in 1999*, Australian National University, Canberra, 2002, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/cons92z%20-%20Eurico%20Guterres.htm>, pada Januari 2005.

-
- ⁷¹⁷ KPP HAM, *Report on East Timor*, para 119-121.
- ⁷¹⁸ Lihat KPP HAM, *Report on East Timor*, 186-191; juga lihat Robinson, *East Timor*, Bab 10.
- ⁷¹⁹ Tono Suratman, *Untuk Negaraku*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 112, dan hal. 118.
- ⁷²⁰ Lihat sebagai contoh Laporan KPP HAM para 108 dan 119-121.
- ⁷²¹ Martin, *Self Determination*, hal 70.
- ⁷²² Martin, *Self Determination*, hal 31.
- ⁷²³ Martin, *Self Determination*, hal 33.
- ⁷²⁴ Artikel 2 dari Anex 3 pada Persetujuan 5 Mei, dikutip dalam Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), *East Timor in Transition 1998-2000—An Australian Policy Challenge*, Canberra, 2001.
- ⁷²⁵ Surat José Ramos-Horta ke Kofi Annan, dikutip dalam Greenlees and Garran, hal. 147.
- ⁷²⁶ Martin, *Self Determination*, hal 33; juga lihat Francesc Vendrell and Ian Martin, Kesaksian Audensi Publik CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁷²⁷ Moore, *Indonesian Military's Last Years*, hal 41.
- ⁷²⁸ Martin, *Menentukan Nasib Sendiri*, hal. 60.
- ⁷²⁹ Anex II: Persetujuan Mengenai Modalitas untuk Konsultasi Rakyat dari orang Timor-Leste melalui Pemungutan secara lansung (Agreement Regarding the Modalities for the Popular Consultation of the East Timorese through a direct Ballot), Persetujuan 5 Mei (5 May Agreements) dicetak ulang dalam Martin, *Self Determination*, hal. 144.
- ⁷³⁰ Martin, *Self Determination*, hal. 46.
- ⁷³¹ Martin, *Self Determination*, hal.93.
- ⁷³² Martin, *Self Determination*, hal 42.
- ⁷³³ Martin, *Self Determination*, hal. 88.
- ⁷³⁴ Lihat Yeni Rosa Damayanti, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁷³⁵ Martin, *Self Determination*, hal 71.
- ⁷³⁶ Geoffrey Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights*, July, 2003, h. 216.
- ⁷³⁷ Laporan Komisi Indonesia atas penyelidikan kekerasan yang dilakukan di Timor-Leste tahun 1999 (KPP HAM), 31 Januari 2000, para 124; juga lihat Robinson, *East Timor*, hal. 63.
- ⁷³⁸ Martin, *Self Determination*, hal 71.
- ⁷³⁹ Martin, *Self Determination*, hal 71.
- ⁷⁴⁰ Martin, *Self Determination*, hal 70.
- ⁷⁴¹ Lihat Robinson, *East Timor*, secara umum; juga lihat Laporan Komisi Indonesia atas penyelidikan kekerasan yang dilakukan di Timor-Leste tahun 1999 (KPP HAM), 31/01/2000; Lihat Julieta Jesuirina dos Santos, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Anak-anak dan Konflik, 28-29 Maret 2004; juga lihat bab mengenai Proses Rekonsiliasi Masyarakat, bagian mengenai latar belakang mandat CRP.
- ⁷⁴² Surat Bupati Kepala Daerah Tk II Dili, Nomor 33 tahun 1999 tentang Pengamanan Swakarsa dan Ketertiban Kota Dili [Letter of Dili District Administrator, No.33 Year 1999, reg. Self-Initiate Security and Order in city of Dili].
- ⁷⁴³ Laporan KPP HAM para 89; Moore, *Indonesian Military's Last Years*, hal. 39.

-
- ⁷⁴⁴ Ross Coulthart, 'Timor on the brink', *Sunday Program*, Channel 9, Sydney, Australia. Disiarkan dalam bulan Juni 1999.
- ⁷⁴⁵ Ian Martin, kesaksian dalam dengar pendapat umum nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2003.
- ⁷⁴⁶ Robinson, *East Timor 1999*, hal. 210-213.
- ⁷⁴⁷ Kesaksian Ian Martin, pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2003.
- ⁷⁴⁸ Martin, *Self Determination*, hal. 48.
- ⁷⁴⁹ Laporan Sekretaris Jenderal, S/1999/803, 20 Juli 1999.
- ⁷⁵⁰ Laporan Sekretaris Jenderal, S/1999/803, 20 Juli 1999.
- ⁷⁵¹ Martin, *Self Determination*, hal. 45.
- ⁷⁵² Komisi Pemilihan (Electoral Commission), *East Timor Popular Consultation. Determination: Registration of Voters*, 25 August 1999, dikutip oleh Martin, *Self Determination*, hal. 61.
- ⁷⁵³ KPP HAM, *Laporan*, para 161.
- ⁷⁵⁴ Lihat Geoffrey Robinson, "People's War: Militia in East Timor and Indonesia", *South East Asia Research*, 9, November 2001, hal 206.
- ⁷⁵⁵ Fernando de Araujo, "The CNRT Campaign for Independence" in James J. Fox and Dionisio Babo Soares (Eds), *East Timor: Out of the Ashes*, Crawford House Publishing, Adelaide, 2000, hal. 111.
- ⁷⁵⁶ Wawancara CAVR dengan Agio Pereira, mantan Kepala CPCC *National Department of Information* ., Arsip CAVR Maret 2005.
- ⁷⁵⁷ Martin, *Self Determination*, hal 43.
- ⁷⁵⁸ Martin, *Self Determination*, hal. 47.
- ⁷⁵⁹ Wawancara CAVR dengan Basilio Dias Araujo, juru bicara FPDK, Hotel Astiti, Kupang, 26 Juli 2004.
- ⁷⁶⁰ Surat Gubernur No 200/827/SOSPOL/V/1999, tentang Tindakan terhadap PNS yang terlibat organisasi/kegiatan yang menentang Pemerintah RI, Dili 28 Mei 1999 [Letter of Governor (of East Timor) No. 200/827/SOSPOL/V/1999, reg. Action to Civil Servant involved in organization/activities against the Government of Republic of Indonesia.
- ⁷⁶¹ Robinson, *East Timor*, hal 35.
- ⁷⁶² Surat Gubernur pada Bupati Liquiça tertanggal 21 Mei 1999, koleksi Yayasan HAK, dikutip dalam Robinson, *East Timor*, hal 115.
- ⁷⁶³ Surat Gubernur 461/e.09/BIDRAM II/99 pada Bupati Lautém, Los Palos, Pengesahan Proposal
- ⁷⁶⁴ Martin, *Self Determination*, hal 75.
- ⁷⁶⁵ Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, *Rencana Operasi Wira Dharma-99* , [*Operation Plan of Wira Dharma-99*] Dili, Juli 1999. (Yayasan Hak document 34).
- ⁷⁶⁶ Tono Suratman, *Untuk Negaraku*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal 51.
- ⁷⁶⁷ Martin, *Self Determination*, hal. 71.
- ⁷⁶⁸ Martin, *Self Determination*, hal. 73.
- ⁷⁶⁹ *Clash Mars East Timor Registration* , The Jakarta Post, 17 Juli 1999; 'Fortilos: Situasi Dili 1/9/99 - 21:00', SiaR, 31 August 1999, dikutip dalam McDonald, Ball, et al, *Masters of Terror: Indonesia's Military and Violence in East Timor in 1999*, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University (Canberra Paper #145), 2002, tersebut di: yayasanhak.minihub.org/mot/Timbul%20Silaen.htm; juga lihat KPP HAM, *Report*, para 172.

-
- ⁷⁷⁰ Laporan KPP HAM, para 48; juga lihat Robinson, *East Timor*, hal 39.
- ⁷⁷¹ Don Greenless and Robert Garran, *Deliverance-The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom*, Allen and Unwin, Sydney, 2002, hal 187.
- ⁷⁷² Martin, *Self Determination*, hal. 84.
- ⁷⁷³ Martin, *Self Determination*, hal. 90.
- ⁷⁷⁴ Martin, *Self Determination*, hal. 90.
- ⁷⁷⁵ Martin, *Self Determination*, hal. 90.
- ⁷⁷⁶ Dikutip dari Greenlees, hal. 191.
- ⁷⁷⁷ Laporan dari Komisi Pemilihan (Report of the Electoral Commission) dikutip oleh Martin, *Self Determination*, hal. 91
- ⁷⁷⁸ Martin, *Self Determination*, hal. 90.
- ⁷⁷⁹ Martin, *Self Determination*, hal. 93.
- ⁷⁸⁰ Electoral Commission Determination, Dili 4 September 1999, dan lihat see Martin, *Self Determination*, hal. 157-160.
- ⁷⁸¹ Ian Martin, *Self-determination in East Timor: The United Nations, The Ballot, and International Intervention*, Boulder (Col), Lynne Rienner, 2001, hal. 93.
- ⁷⁸² Laporan komisi Indonesia mengenai penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste pada tahun 1999 (KPP HAM), 31/01/2000, para 72.
- ⁷⁸³ KPP HAM, *Laporan*, para 161.
- ⁷⁸⁴ KPP HAM, *Laporan*, para 81.
- ⁷⁸⁵ KPP HAM, *Laporan*, para 181.
- ⁷⁸⁶ KPP HAM, *Laporan*, para 84 and 85; juga lihat Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights*, Juli, 2003, hal. 44.
- ⁷⁸⁷ Robinson, *East Timor 1999*, hal. 221.
- ⁷⁸⁸ KPP HAM, *Laporan*, 131-135; juga lihat Robinson, *East Timor*, hal. 225.
- ⁷⁸⁹ KPP HAM, *Laporan*, para. 139.
- ⁷⁹⁰ Samuel Moore, “The Indonesian Military’s Last Years in East Timor: An Analysis of its Documents”, *Indonesia* 72, Cornell South East Asia Program, Oktober 2001, hal 31.
- ⁷⁹¹ Feliciano Cardoso, kesaksian di dengar pendapat publik nasional CAVR tentang Wanita dan Konflik, 28– 29 April 2003
- ⁷⁹² Greenlees and Garran, hal. 231.
- ⁷⁹³ Lihat pernyataan HRVD 3530-04; 6160; 6229; 6762; 6173-03; 4266; 8259; 2104-02; 8255; 1061-05; 0710; juga lihat KPP HAM, *Report*, para 171.
- ⁷⁹⁴ Martin, *Self Determination*, hal 97.
- ⁷⁹⁵ Laporan komisi Indonesia mengenai penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste pada tahun 1999 (KPP HAM), 31 Januari 2000, VI.6.
- ⁷⁹⁶ Laporan komisi Indonesia mengenai penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste pada tahun 1999 (KPP HAM), 31 Januari 2000, para 50.
- ⁷⁹⁷ *Laporan* KPP HAM, para 162.

-
- ⁷⁹⁸ Submisi kepada CAVR, wawancara David Hicks, Maxine Hicks dan Phyllis Ferguson dengan Virgilio Simith, 7 Juli 2005, Arsip CAVR.
- ⁷⁹⁹ Ibid.
- ⁸⁰⁰ Lihat pembahasan bab mengenai Kekerasan Seksual dan, misalnya, kesaksian BM, pada Audensi Publik Nasional CAVR dari korban *Rona Ami Nia Lian* di CAVR (Dengar Suara Kami) 11-12 November 2002.
- ⁸⁰¹ *Laporan KPP HAM*, para 142; juga lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Maliana Indictment, Case No. 2003/18, para 128-190.
- ⁸⁰² Geoffrey Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights*, Juli, 2003, hal. 185.
- ⁸⁰³ Kesaksian Ian Martin pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁸⁰⁴ Kesaksian Abel Guterres pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁸⁰⁵ Martin, *Self Determination*, hal. 104-105.
- ⁸⁰⁶ Lihat Martin, *Self Determination*, hal. 104-105; juga lihat Ian kesaksian Martin pada Audensi Publik Nasional CAVR dan *Masyarakat Internasional*, 15-17 Maret 2004.
- ⁸⁰⁷ Kesaksian Ian Martin pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁸⁰⁸ Lihat *Laporan KPP HAM*, para 87.
- ⁸⁰⁹ Martin, *Self Determination*, hal. 111.
- ⁸¹⁰ Kesaksian Ian Martin pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ⁸¹¹ Martin, *Self-determination*, hal. 101.
- ⁸¹² *Laporan KPP HAM*, para 98.
- ⁸¹³ *Laporan KPP HAM*, para 83. Martin, *Self Determination*, P. 115.
- ⁸¹⁴ *Laporan KPP HAM*, para 164.
- ⁸¹⁵ *Human Rights Watch, Laporan mengenai Nusa Tenggara Timur (Timor Barat)*, 1999.
- ⁸¹⁶ *Human Rights Watch, Laporan mengenai Nusa Tenggara Timur (Timor Barat)*, 1999.
- ⁸¹⁷ *Laporan KPP HAM*, para 151; juga lihat Pernyataan 2285. General Prosecutor of the UNTAET, Indictment against Joni Marques, et.al., Kasus No. 2000/9, para. 33-40. Special Panel for Serious Crimes, Judgement, 11 Desember 2001. Tujuh anggota milisi termasuk Marques ditemukan bersalah oleh Special Panel for Serious Crimes.
- ⁸¹⁸ Martin, *Self Determination*, hal. 115.
- ⁸¹⁹ Truk F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan) Penyerahan disampaikan pada dengar pendapat publik CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, April 2003.
- ⁸²⁰ Human Rights Watch, *Report on West Timor*, 1999.
- ⁸²¹ Martin, *Self Determination*, hal. 97.
- ⁸²² *KPP Ham, Report on East Timor*, para 185.
- ⁸²³ Human Rights Watch, *Laporan Dunia 2001, East Timor*, pada <http://www.hrw.org/wr2k1/asia/etimor3.html>.
- ⁸²⁴ Martin, *Self Determination*, hal. 115.